



BENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN (RPJMD-P)

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023**





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; 

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-
2023.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) diubah sebagai berikut : 

Pasal 5

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (2) Misi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 (lima) misi pembangunan yaitu:
 - a. mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
 - b. membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
 - c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (3) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
Memuat aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah;
 - c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Memuat tentang kinerja keuangan 2013-2017; kerangka pendanaan; dan sumber pendanaan pembangunan lainnya;
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan pembangunan dan analisis lingkungan strategis;
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Memuat visi; misi; keselarasan visi, misi RPJMD dengan visi, misi RPJPD 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024; keselarasan misi RPJMD dengan SDGs; dan tujuan dan sasaran;
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat strategi; arah kebijakan; dan program pembangunan daerah; 

g. **BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan;

h. **BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan; dan

i. **BAB IX : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan; pedoman transisi; dan pengembangan pembiayaan pembangunan.

- (4) Isi beserta uraian RPJMD yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(1-12/2021)

Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0116 

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-9
1.4 Maksud dan Tujuan	1-10
1.5 Sistematika Penulisan	1-11
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1 Geografis dan Wilayah	II-2
2.1.1.1 Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.2 Geologi	II-3
2.1.1.3 Hidrologi	II-3
2.1.1.4 Klimatologi	II-4
2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana	II-5
2.1.1.6 Demografi Wilayah	II-7
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
2.2.1 Pertumbuhan PDRB	II-11
2.2.2 Laju Inflasi	II-14
2.2.3 PDRB Per Kapita	II-14
2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio)	II-15
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia	II-15
2.2.6 Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-16
2.2.7 Harapan Lama Sekolah	II-17
2.2.8 Jumlah Pengeluaran per Kapita	II-18
2.2.9 Umur Harapan Hidup	II-19
2.2.10 Angka Kemiskinan	II-20
2.2.11 Angka Partisipasi Kasar	II-21
2.2.12 Angka Partisipasi Murni	II-22
2.2.13 Angka Partisipasi Sekolah	II-23
2.2.14 Angka Buta Huruf	II-24
2.2.15 Jumlah Kasus Kematian Bayi, Anak Balita dan Balita	II-25
2.2.16 Jumlah Kasus Kematian Ibu	II-25



2.2.17 Presentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	II-25
2.2.18 Rasio penduduk yang berkerja	II-26
2.2.19 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	II-27
2.2.20 Keluarga Pra Sejahtera	II-28
2.2.21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	II-29
2.2.22 Daya Dukung Pangan	II-29
2.2.23 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	II-29
2.2.24 Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	II-30
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-31
2.3.1 Layanan Urusan Wajib	II-31
2.3.1.1 Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-32
2.3.1.1.1 Pendidikan	II-32
2.3.1.1.2 Kesehatan	II-42
2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-46
2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-
492.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-50
2.3.1.1.6 Sosial	II-51
2.3.1.2 Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-52
2.3.1.2.1 Tenaga Kerja	II-52
2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-58
2.3.1.2.3 Pangan	II-60
2.3.1.2.4 Pertanahan	II-60
2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup	II-61
2.3.1.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-66
2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-67
2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-67
2.3.1.2.9 Perhubungan	II-70
2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika	II-74
2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-76
2.3.1.2.12 Penanaman Modal	II-79
2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga	II-80



2.3.1.2.14 Statistik.....	II-81
2.3.1.2.15 Persandian	II-82
2.3.1.2.16 Kebudayaan	II-83
2.3.1.2.17 Perpustakaan	II-83
2.3.1.2.18 Kearsipan.	II-85
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan.....	II-86
2.3.2.1 Kelautandan Perikanan	II-86
2.3.2.2 Pariwisata	II-91
2.3.2.3 Pertanian	II-94
2.3.2.4 Kehutanan	II-96
2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya	II-97
2.3.2.6 Perdagangan	II-99
2.3.2.7 Perindustrian	II-100
2.3.2.8 Transmigrasi	II-101
2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang.....	II-102
2.3.3.1 Perencanaan	II-102
2.3.3.2 Keuangan.....	II-103
2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan.....	II-103
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-104
2.4.1 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan	II-111
2.4.2 Nilai Tukar Petani	II-113
2.4.3 Tingkat Kriminalitas	II-114
2.4.4 Rasio Ketergantungan.....	II-115
2.4.5 Akomodasi	II-116
2.4.6 Restaurant dan Rumah Makan	II-117
2.5. Evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018	II -118
2.6 Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)	II -125
2.7 Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II -132
2.7.1 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	II -132
2.7.2 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II -135
2.7.3 Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II -135
2.7.4 Indikator TPB Dengan Data Belum Tersedia Pada Setiap Pilar	II -136



2.8 Integrasi RTRW dalam RPJMD	II -163
2.8.1 Rencana Struktur Ruang	II -163
2.8.1.1 Rencana Sistem Perkotaan	II-163
2.9 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	II -166
2.9.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama	II -166
2.9.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat	II -166
2.9.1.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut	II-171
2.9.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara	II -173
2.9.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi	II -176
2.9.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	II -181
2.9.4 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	II -182
2.9.5 Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan	II -187
2.9.6 Kawasan Konservasi Perairan	II -188
 BAB III GAMBARAN KEUANGANDAERAH	 III-1
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2018-2019	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah	III-5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masalalu	III-8
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-8
3.2.2. Analisa Pembiayaan	III-12
3.3. Kerangka Pendanaan	III-14
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-14
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV- 1
4.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.2 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Non layanan Dasar	IV-6
4.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan	IV-11
4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan	IV-14
4.2 Analisis Lingkungan Strategis	IV-15
4.2.1 Lingkungan Global	IV-15



4.2.2 Lingkungan Nasional	IV-27
4.2.3 Isu Strategis Provinsi	IV-41
BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-3
5.2.1 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Dengan Visi, Misi RPJPD	V-4
5.2.2. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024	V-5
5.2.3. Keselarasan Misi RPJMD dengan SDG's	V-7
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan	VI-20
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-22
6.4 Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran	VI-85
6.5 Pendekatan Struktur Organisasi	VI-86
6.6 Pendekatan Restrukturisasi Program	VI-88
6.7 Pendekatan Penyusunan Indikator Kinerja Program	VI-90
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.3 Indikator Kinerja Kunci	VIII-4
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2 Pedoman Transisi	IX-2
9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	IX-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2019	I-3
Tabel 2.9	Kawasan Lindung di Provinsi NTT	II-9
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 (dalam Rp. Juta)	II-11
Tabel 2.11	Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-12
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)	II-13
Tabel 2.13	Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-14
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2012-2016 (juta rupiah)	II-15
Tabel 2.15	Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-15
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, 2013-2017	II-16
Tabel 2.17	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ...	II-16
Tabel 2.18	Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-17
Tabel 2.19	Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-18
Tabel 2.20	Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-19
Tabel 2.21	Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-21
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-22
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Murni di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-22
Tabel 2.24	Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang untuk jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di NTT Tahun 2017 dan 2018 ..	II-23
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.26	Angka Buta Huruf di Provinsi NTT Tahun 2015-2017	II-24
Tabel 2.27	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.28	Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.29	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.30	Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2015-2017	II-26
Tabel 2.31	Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2017 .	II-26
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Gender NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017	II-28
Tabel 2.33	Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi NTT Tahun 2013-2014	II-28
Tabel 2.34	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT	



Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.35 Daya Dukung Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 ..	II-29
Tabel 2.36 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2012-2016	II-30
Tabel 2.37 Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT	
Tahun 2014-2017	II-31
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.39 Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017	II-33
Tabel 2.40 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah	
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.41 Angka Putus Sekolah Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.42 Angka Melanjutkan Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.43 Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur	
Provinsi NTT Tahun 2017/2018	II-40
Tabel 2.44 Gambaran Pendidikan Luar Biasa Provinsi NTT Tahun 2015/2016	
sampai dengan 2017/2018	II-40
Tabel 2.45 Persentase Guru Pendidikan Khusus sesuai Kualifikasi Pendidikan	
Provinsi NTT Tahun 2017 – 2019.....	II-41
Tabel 2.46 Persentasi Guru SLB Tersertifikasi	
Provinsi NTT Tahun 2017 – 2019.....	II-41
Tabel 2.47 Jumlah Guru Jenjang SMA/SMK/SLB	
Provinsi NTT Tahun 2017 – 2019	II-41
Tabel 2.48 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi NTT, 2013-2017	II-42
Tabel 2.49 Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan	
Per Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-43
Tabel 2.50 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk	
Tahun 2013-2017.....	II-43
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan	
Tabel 2,51 Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	
Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
Tabel 2.52 Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-45
Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Tabel 2.53 Tahun 2013-2017	II-45
Usia Harapan Hidup di Provinsi NTT	
Tabel 2.54 Tahun 2015 – 2019.....	II-46
Tabel 2.55 Total Panjang Jalan Provinsi NTT tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.56 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	
Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.57 Kondisi Jalan Provinsi NTT Tahun 2017	II-47
Tabel 2.58 Kondisi Baik Jaringan Irigasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama	
Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.60 Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan	
Sumber Air Minum Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.61 Persentase Rumah Layak Huni Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-50



Tabel 2.62	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-51
Tabel 2.63	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.64	Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.65	Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.67	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT dan Nasional 2013-2017	II-55
Tabel 2.68	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2015-2017	II-56
Tabel 2.69	Sebaran PMI Asal NTT Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.70	Jumlah Tenaga Kerja per Sektor yang menjadi Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.....	II-57
Tabel 2.71	Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2017	II-59
Tabel 2.72	Jumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan PNS Provinsi NTT Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.73	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi NTT Tahun 2013-2016	II-60
Tabel 2.74	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1960–2018	II-61
Tabel 2.75	Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan Provinsi NTT Tahun 2017	II-62
Tabel 2.76	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.77	Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-66
Tabel 2.78	Persentase PKK Aktif di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.79	Persentase Posyandu Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.80	Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.81	Cakupan Peserta KB Baru Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.82	Jumlah Kampung KB yang Sudah Dibentuk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2018	II-69
Tabel 2.83	Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Provinsi NTT Tahun 2013 -2017	II-72
Tabel 2.84	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.85	Arus Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-73



Tabel 2.86	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-73
Tabel 2.87	Status Website Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.88	Penyebaran Informasi Publik Milik Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2013-2018	II-75
Tabel 2.89	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-76
Tabel 2.90	Persentase Koperasi Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.91	Jumlah Koperasi Unit Desa Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.92	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016	II-78
Tabel 2.93	Penyaluran KUR di Provinsi NTT Tahun 2013-2018	II-78
Tabel 2.94	Data Sebaran Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah Di NTT Tahun 2013- 2017 (Per Desember Setiap Tahun).....	II-78
Tabel 2.95	Realisasi Investasi Provinsi NTT Periode Tahun 2013 – 2017 (Dalam Juta Rupiah)	II-79
Tabel 2.96	Data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-80
Tabel 2.97	Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017	II-81
Tabel 2.98	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..	II-82
Tabel 2.99	Data Alat Dan Kondisi Alat Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017	II-82
Tabel 2.100	Jenis Sarana Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2017	II-83
Tabel 2.101	Persentase Obyek Budaya Provinsi NTT yang Tertangani Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.102	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2012-2017	II-84
Tabel 2.103	Jumlah Koleksi Perpustakaan, Data Tenaga Pustakawan, Data Tenaga Teknis Fungsional Umum Dan Data Tenaga Penilai Angka Kredit Memiliki Sertifikat Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018.....	II-84
Tabel 2.104	Keadaan Perpustakaan Di Nusa Tenggara Timur s/d 2018	II-84
Tabel 2.105	Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018	II-85
Tabel 2.106	Data Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2014-2018	II-86
Tabel 2.107	Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Laut dan Kontribusi terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan- Miliar/ Persen) Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.108	Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2013-2016	II-88



Tabel 2.109	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha Provinsi NTT Tahun 2013-2016	II-89
Tabel 2.110	Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.111	Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.112	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.113	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB) Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.114	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017	II-95
Tabel 2.115	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.116	Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Provinsi NTT Tahun 2013-2018	II-97
Tabel 2.117	Kapasitas Listrik di Provinsi NTT Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.118	Jumlah Usaha Pertambangan per Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.119	Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017 (Juta US \$ / Miliar Rupiah)	II-99
Tabel 2.120	Besaran Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.121	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II -104
Tabel 2.122	Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 – 2017	II-112
Tabel 2.123	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-113
Tabel 2.124	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2016	II-114
Tabel 2.125	Rasio Ketergantungan NTT dan Indonesia	II-115
Tabel 2.126	Rasio Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-116
Tabel 2.127	Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kabupaten/Kota (unit) Provinsi NTT Tahun 2015-2017	II-116
Tabel 2.128	Jumlah Restaurant dan Rumah Makan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-117



Tabel 2.129	Evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018	II-119
Tabel 2.130	Evaluasi Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi NTT	II-126
Tabel 2.131	Tujuan, Sasaran dan Pencapaian Indikator MDGs Provinsi NTT	II-127
Tabel 2.132	Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan TPB Provinsi NTT	II-133
Tabel 2.133	Capaian Indikator TPB Provinsi NTT Terhadap Target Nasional.....	II-137
Tabel 2.134	Capaian Indikator SDGs Provinsi NTT Tahun 2017	II-137
Tabel 2.135	Kecamatan Strategis di Provinsi NTT	II-165
Tabel 2.136	Kebutuhan Air Provinsi NTT Tahun 2017	II-182
Tabel 2.137	Daya Dukung Air Provinsi NTT Tahun 2017	II-182
Tabel 2.138	Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT Tahun 2017	II-188
Tabel 2.139	Target Pencapaian SPM Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	II-191
Tabel 2.140	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	II-191
Tabel 2.141	Perlengkapan Dasar Peserta Didik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	II-192
Tabel 2.142	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	II-192
Tabel 2.143	Target Pencapaian SPM Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-194
Tabel 2.144	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-194
Tabel 2.145	Target Pencapaian SPM Kesehatan (RSUD Prof.Dr.W.Z.Yohanes Kupang) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-195
Tabel 2.146	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan (RSUD Prof.Dr.W.Z.Yohanes Kupang) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-199
Tabel 2.147	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-206
Tabel 2.148	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-207
Tabel 2.149	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-208
Tabel 2.150	Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-200
Tabel 2.151	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial (Dinas Sosial) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-212
Tabel 2.152	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial (Dinas Sosial) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.....	II-213
Tabel 2.153	Pertumbuhan PDRB NTT Berdasarkan Lapangan Usaha	II-214
Tabel 2.154	Pertumbuhan PDRB NTT Berdasarkan Pengeluaran	II-215



	Kinerja Pendapatan Daerah 2017-2019	
Tabel 3.1		III-2
	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2017-2019	
Tabel 3.2		III-3
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2019	III-4
Tabel 3.4	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2019	III-4
Tabel 3.5	Neraca provinsi NTT tahun 2018-2019	III-5
Tabel 3.6	Rata – rata pertumbuhan neraca daerah provinsi NTT tahun 2018-2019	III-6
Tabel 3.7	Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2019	III-10
Tabel 3.8	Rata-Rata Proporsi Belanja daerah Tahun 2017-2019	III-11
Tabel 3.9	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2017-2019	III-11
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-11
Tabel 3.11	Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019	III-12
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019	III-13
		III-16
Tabel 3.13	Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD	III-16
Tabel 3.14	Proyeksi Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi NTT Tahun 2019-2023	III-18
Tabel 3.15	Proyeksi Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTT Tahun 2019-2023	III-19
Tabel 3.16	Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023	III-19
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023	III-20
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja Daerah 2021-2023	III-23
Tabel 3.19	Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-25
Tabel 3.20	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 2021-2023.....	III-26
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024	IV-28
Tabel 4.2	Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	IV-29
Tabel 4.3	Target dan realisasi indikator kinerja pembangunan RPJPD provinsi NTT tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2017	IV-40
Tabel 5.1	Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Dengan VISI MISI RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025	V-5
Tabel 5.2	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas Nasional Tahun 2020-2024.....	V-6
Tabel 5.3	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT dengan SDGs	V-7



Tabel 5.4	Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019-2023	V-10
Tabel 5.5	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	V-11
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-21
Tabel 6.3	Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	VI-23
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-28
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	VII-1
Tabel 7.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	VII-4
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023	VIII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya.....	I-9
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen RTRWP, KLHS dan RZWP3K....	I-10
Gambar 2.1	Peta Provinsi.....	II-1
Gambar 2.2	Peta Morfologi NTT.....	II-2
Gambar 2.3	Peta Formasi Geologi NTT.....	II-3
Gambar 2.4	Peta Hidrologi NTT.....	II-4
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan NTT.....	II-5
Gambar 2.6	Daftar Kejadian Bencana dan Korban Jiwa di NTT 1950-2017.....	II-6
Gambar 2.7	Peta Kepadatan Penduduk NTT.....	II-7
Gambar 2.8	Piramida Penduduk NTT Tahun 2017)	II-8
Gambar 2.9	APK dan APM Tingkat SMP dan SMA Provinsi NTT Tahun 2018/2019.	II-33
Gambar 2.10	Persentase Guru yang memiliki Ijazah D4/S1 Provinsi NTT Tahun 2016..	II-36
Gambar 2.11	Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Provinsi NTT Tahun 2016.....	II-37
Gambar 2.12	Hasil Akreditasi Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi NTT Tahun 2019.....	II-38
Gambar 2.13	Rata-Rata Hasil Ujian Nasional dan Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017.....	II-38
Gambar 2.14	Kasus Kematian Ibu (AKI) dan Kasus Kematian Bayi (AKB) Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017.....	II-46
Gambar 2.15	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-49
Gambar 2.16	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-58
Gambar 2.17	Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2017.....	II-63
Gambar 2.18	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-68
Gambar 2.19	Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata sesuai Wilayah di NTT.....	II-92
Gambar 2.20	Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017.....	II-103
Gambar 2.21	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan di NTT tahun 2013-2017.....	II-114
Gambar 2.22	Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target.....	II-134
Gambar 2.23	Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar.....	II-134
Gambar 2.24	Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar.....	II-135
Gambar 2.25	Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar.....	II-136
Gambar 2.26	Jumlah Indikator TPB dengan Data Belum Tersedia pada Setiap Pilar....	II-136
Gambar 2.27	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi NTT.....	II-166
Gambar 2.28	Peta Rencana Jaringan Transportasi Darat Provinsi NTT.....	II-171
Gambar 2.29	Peta Rencana Jaringan Transportasi Laut Provinsi NTT.....	II-173



Gambar 2.30	Peta Rencana Jaringan Listrik Provinsi NTT.....	II-180
Gambar 2.31	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Provinsi NTT.....	II-181
Gambar 2.32	Peta Rencana Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi NTT.....	II-186
Gambar 2.33	Peta Kawasan Konservasi Provinsi NTT	II-190



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur **Viktor Bungtilu Laiskodat** dan **Josef Adreanus Nae Soi** yang dilantik tanggal 05 September 2018 lalu adalah rencana pembangunan lima tahunan periode keempat atau periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT 2005-2025. Karena itu, RPJMD NTT 2018-2023 harus diarahkan untuk memastikan sampai sejauhmana tujuan dan sasaran RPJPD NTT 2005-2025 telah tercapai.

Tujuan akhir pembangunan NTT sebagaimana tercantum dalam RPJPD NTT 2005-2025 adalah mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, masih menempatkan NTT dibawah rata-rata capaian secara nasional. Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir RPJPD NTT 2005-2025, harus diupayakan akselerasi atau lompatan besar (*great leap*), agar terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan. Inilah sebabnya dalam perubahan RPJMD NTT 2018-2023, beberapa target makro pembangunan NTT tetap dipertahankan dan beberapa indikator makro pembangunan yang lain mengalami koreksian dan disesuaikan dengan target-target makro pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Mempertahankan target makro pembangunan yang telah ada dan mengoreksi target makro pembangunan lainnya sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024, berimplikasi pada pengarahannya sumberdaya yang lebih besar, terfokus dan terukur untuk menciptakan lompatan besar. Demikian pula model implementasi program dan kegiatan pembangunan harus menjamin efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan efektivitas pencapaian hasil. Kuncinya terletak pada birokrasi sebagai sarana dan aparat sebagai pelaksana, harus berfungsi optimal dalam seluruh proses pembangunan. Dalam perspektif demikian, perencanaan pembangunan yang bertumpu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, hendaknya tidak menjadikan perencanaan pembangunan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam orientasi perencanaan dewasa ini, bahwa perencanaan pembangunan hakekatnya adalah merencanakan hasil terbaik yang akan dicapai dari sumberdaya yang dimiliki.



Wawasan perencanaan seperti ini menghendaki perencana memahami secara mendalam sumberdaya yang dimiliki, arah dan tujuan pembangunan yang dikehendaki pemimpin, agar dapat menetapkan proses secara tepat. Karena itu Pembangunan NTT harus berpijak pada realitas potensi yang dimiliki. Sebagai wilayah kepulauan dengan luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang, serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya, pembangunan ekonomi NTT harus berorientasi pada pengembangan *ekonomi biru* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi pertanian, peternakan, kehutanan dan rumput laut yang dimiliki, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada pengembangan *ekonomi hijau*, dan dengan potensi kepariwisataan yang besar, unik dan eksotis, kepariwisataan NTT dapat menjadi *ring of beauty* untuk menggerakkan perekonomian NTT sehingga terjadi loncatan besar untuk mewujudkan NTT Bangkit menuju masyarakat NTT sejahtera. Selain itu, posisi geostrategis NTT yang menguntungkan, berhadapan dengan negara Timor Leste, Australia, New Zealand dan negara pasifik lainnya, membuka peluang pengembangan kerjasama Selatan-Selatan yang berguna bagi akselerasi pembangunan NTT.

Perubahan RPJMD yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

- 1) hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena tahun 2020 belum berakhir. Pencapaian kinerja daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik.
 - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebesar 5,20 persen, meningkat dari tahun 2018 sebesar 5,13 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,02 persen pada tahun 2019. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah target RKPD NTT Tahun 2019 yang sebesar 5,87 persen.
 - Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,131 juta jiwa menjadi 1,129 juta jiwa. Capaian ini melampaui target RKPD 2019, dimana angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 21 persen.
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, melampaui target RKPD 2019 yang memproyeksikan IPM sebesar 64 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 63,38 tahun pada 2018 menjadi 63,85 pada tahun 2019. Rata-rata lama sekolah meningkat



- dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 13,10 tahun pada 2018 menjadi 13,15 tahun pada 2019, dan rata pengeluaran per kapita per tahun meningkat dari 7,35 juta per kapita per tahun meningkat menjadi 7,56 juta per kapita per tahun.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019.
 - Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan.

Rincian Data Pencapaian Kinerja Daerah di Provinsi NTT Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1
Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA PEMBANGUNAN					KET
			CAPAIAN 2018		2019			
			INDONESIA	NTT	INDONESIA	NTT		
					CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.17	5.13	5.02	5,87	5.2	
2	Angka kemiskinan	%	9.66	21.03	9.22	20 - 21	20.62	
3	Inflasi	%	3.13	3.07	2.72	3	0.67	
4	IPM	poin	71.39	64.39	71.98	64	65.23	
5	Usia Harapan Hidup	tahun	71.20	66.38	71.34	66,37	66.85	
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.17	7.30	8.34	7,35	7.55	
7	TPT		5.34	3.01	5.28	3,22	3.35	
8	Indeks Gini	poin	0.389	0.351	0.382	0,35	0.356	

Sumber: Review RPJMD 2018-2023

- 2) Akibatnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 3) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain: a. Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, b. Sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi



minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding Triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin berkurang. Kesimpulan sementara upaya-upaya pemulihan ekonomi sudah tepat namun masih butuh waktu untuk mengoptimalkan dampak penanganan Covid 19 dan c. Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Perubahan RPJMD NTT 2018-2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT.

Format teknis RPJMD NTT 2018-2023 tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan, dan substansi yang direncanakan diarahkan untuk mendekati tujuan RPJPD NTT 2005-2025. Frasa mendekati yang digunakan adalah suatu bentuk penyesuaian pencapaian hasil yang disebabkan terjadinya berbagai pembatasan akibat mewabahnya Covid 19. Pembatasan tersebut telah menyebabkan target-target pembangunan pada RPJMD NTT 2018-2023 yang ditetapkan pada awalnya tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, melalui perubahan RPJMD NTT 2018-2023 ini, Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT memiliki acuan yang sama, dan dalam semangat kemitraan, masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mendorong akselerasi pembangunan NTT menuju terwujudnya NTT Bangkit menuju masyarakat NTT sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memanfaatkan pendekatan perencanaan pembangunan, yaitu: Pendekatan teknokratis yang mengutamakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pendekatan politis yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan proses politik, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan proses dan metoda perencanaan yang dilaksanakan melalui musyawarah pembangunan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional, maka pembangunan ekonomi dalam 3 tahun tersisa pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 diperuntukkan bagi peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa akhir bernilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat domestik NTT dan perdagangan antar pulau luar NTT serta memanfaatkan peluang ekspor.

Sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya ekonomi; dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.



Dalam dinamika lingkungan strategis tersebut, dengan memanfaatkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan akibat Pandemi Covid-19, dokumen Perubahan RPJMD NTT 2018- 2023 didesain dengan pola pikir yang optimis dengan akselerasi yang tinggi untuk menjangkau NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat sebagaimana tercantum dalam tujuan akhir RPJPD NTT 2005-2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai landasan penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117).

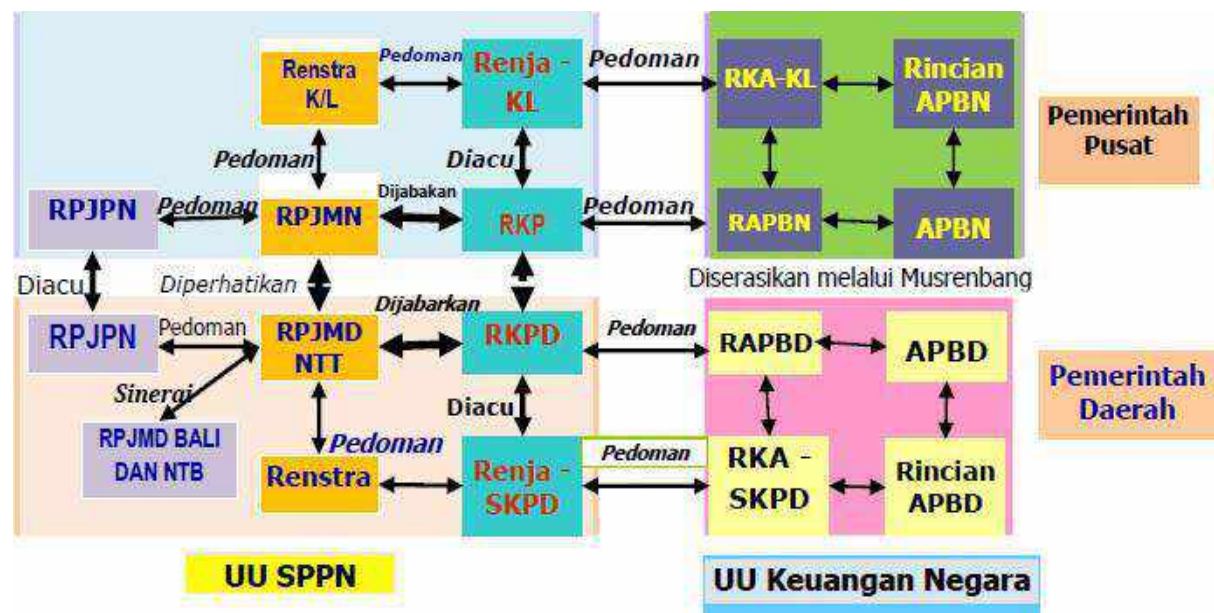


1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

- 1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
- 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

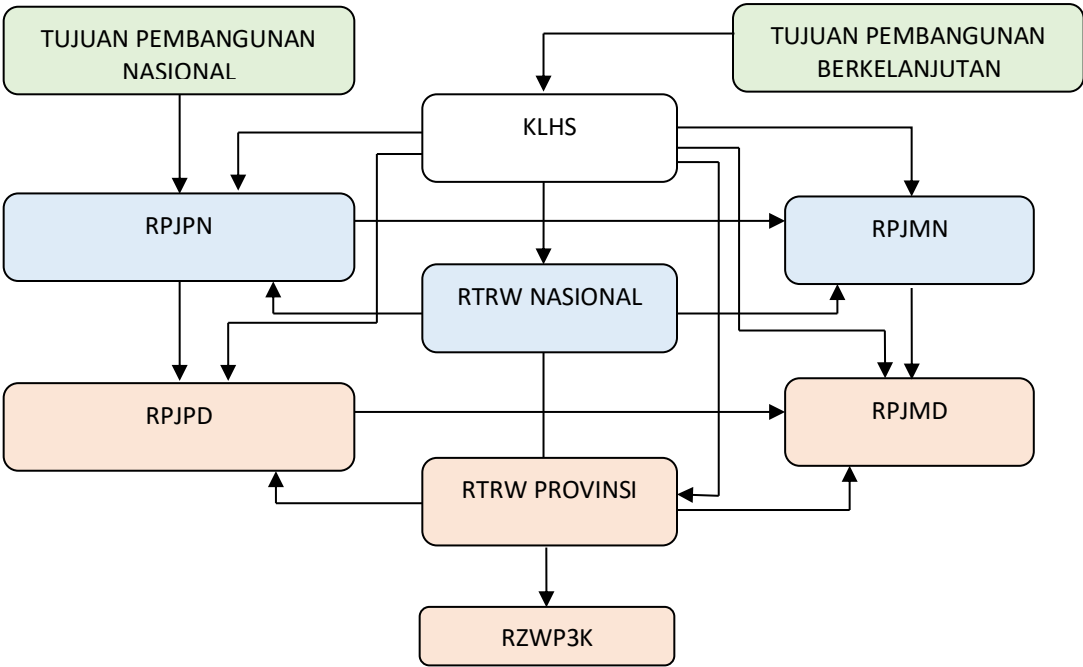
Alur hubungan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya disampaikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya

Keterkaitan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana Gambar 1.2.





Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen RTRWP, KLHS dan RZWP3K

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 adalah:

- 1. Memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
- 2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
- 3. Sebagai Pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2021-2023;
- 4. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah;
- 2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan Kepala Daerah;
- 3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I. Pendahuluan**, berisi gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. **BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. **BAB III. Gambaran Keuangan Daerah**, menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. **BAB IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**, memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.
5. **BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**, menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
6. **BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
7. **BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.
8. **BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, menjelaskan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
9. **BAB IX. Penutup**.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 Km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8⁰ -12⁰ Lintang Selatan dan 118⁰ – 125⁰ Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan satu Kota dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

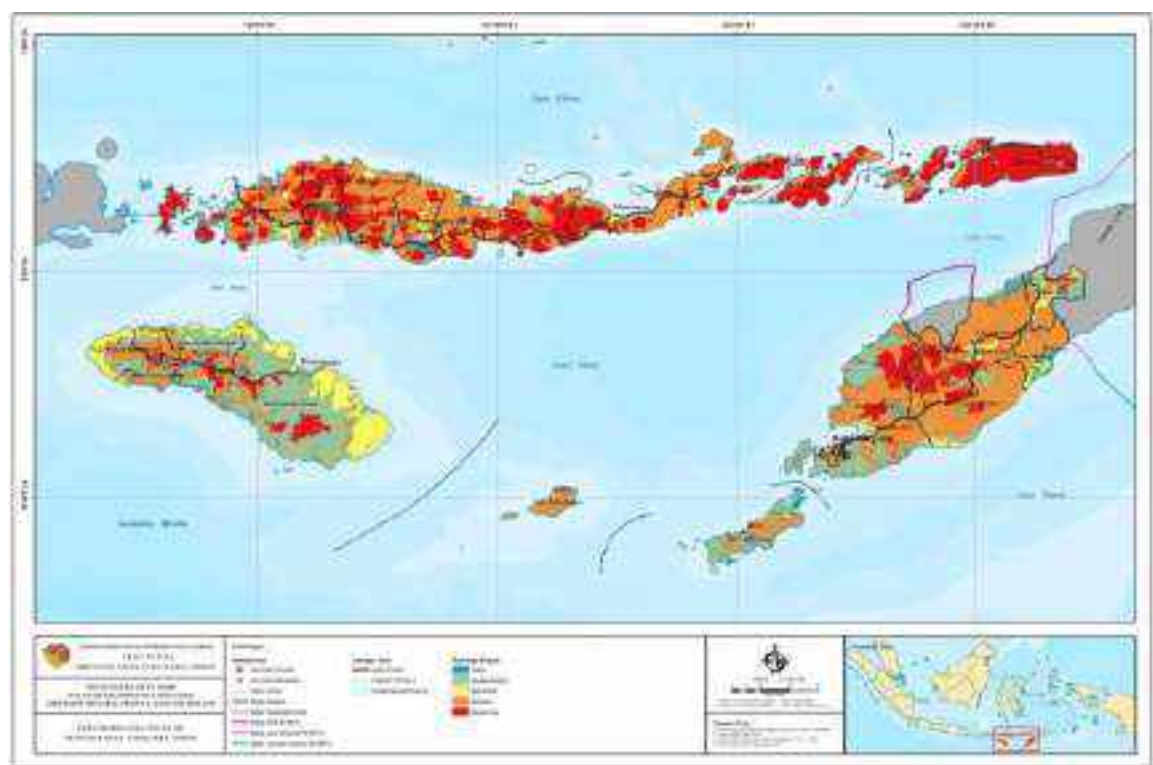
Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT



Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1. Kondisi Topografi

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi seperti pada gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.2.
Peta Morfologi NTT

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.



2.1.1.2. Geologi

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan *Circum-Pacific* sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil. Sebaran wilayah dan potensi geologis disampaikan pada gambar 2.3. berikut.



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.3
Peta Formasi Geologi NTT

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

2.1.1.3. Hidrologi

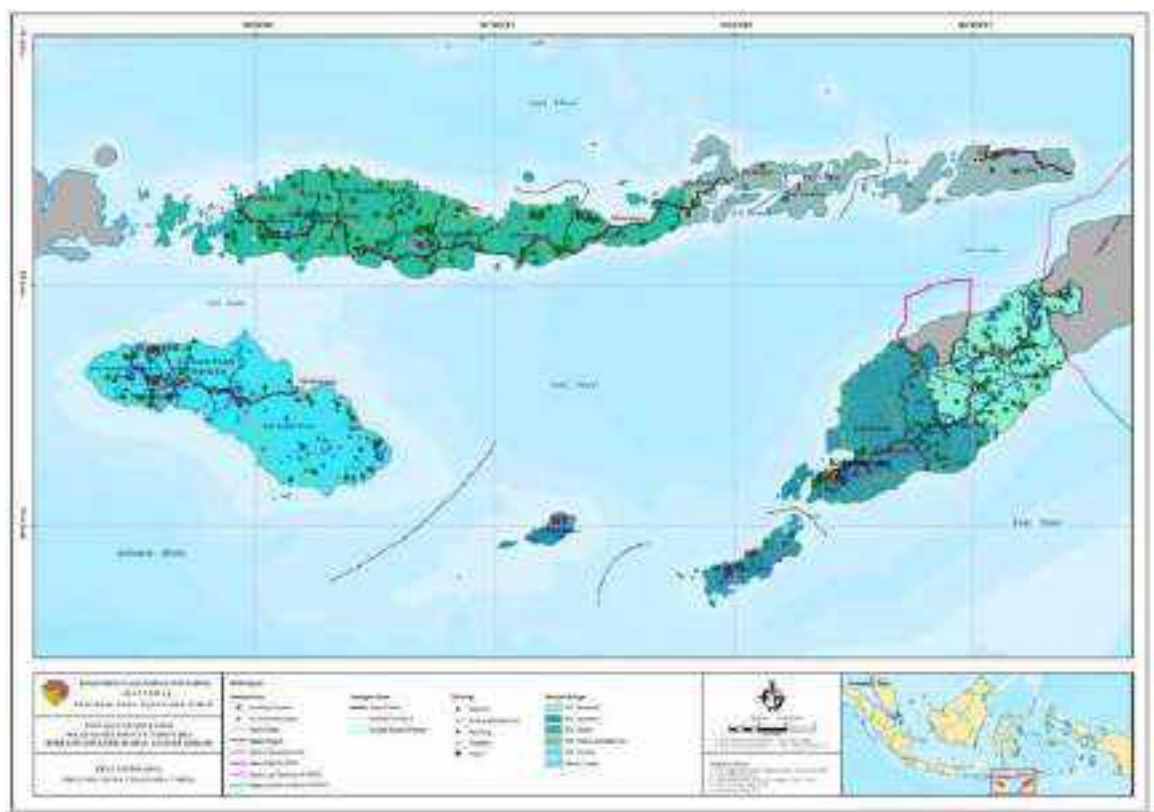
Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan



Belu. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 329.841 ha.

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti pada gambar berikut:



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.4
Peta Hidrologi NTT

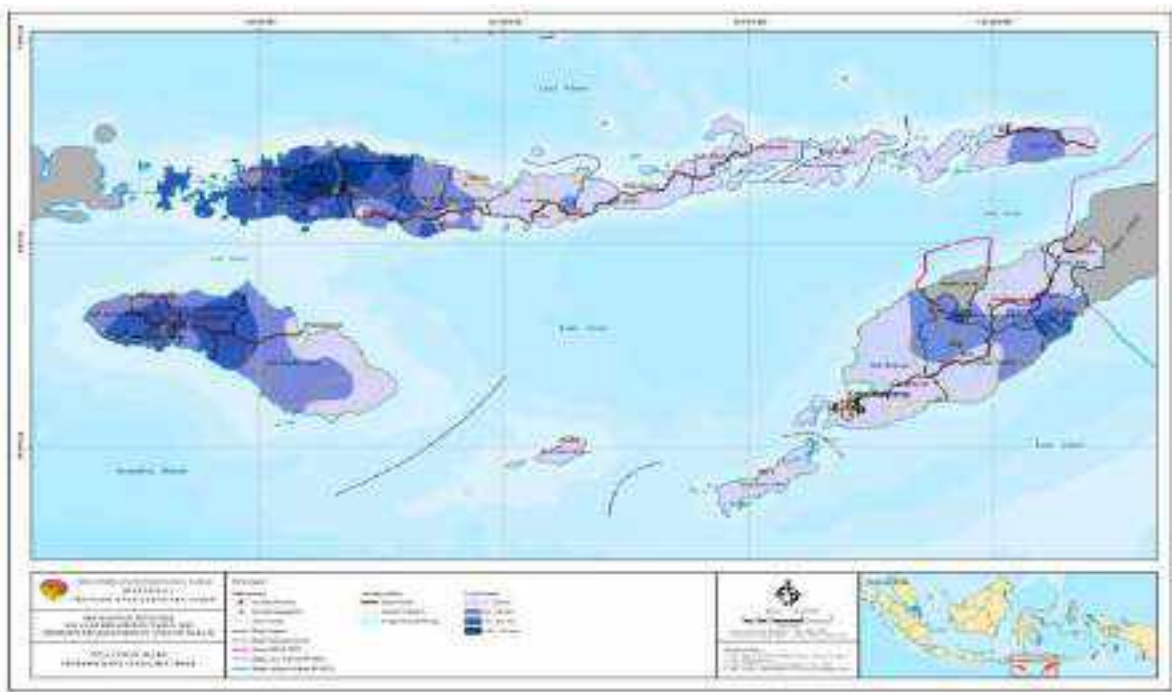
Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm per tahun, dengan *baseflow* andalan dari 194 sungai sebesar 122,50 m³/detik setara dengan 3,863 milyar m³/tahun. Dengan demikian bila jumlah penduduk NTT adalah 5.287.302 jiwa pada tahun 2017 maka kebutuhan air adalah 6.344.762.400 liter atau 6,345 milyar m³/tahun (dengan standar 1.200 liter per kapita) atau 201,19 m³/detik. Artinya NTT mengalami defisit air sebesar 78,69 m³/detik atau 2,461 milyar m³/tahun.

2.1.1.4. Klimatologi

NTT termasuk dalam wilayah iklim tropis yang termasuk ke dalam kategori iklim semi-ringkai dengan karakteristik musim penghujan rata-rata tiga-sampai empat bulan dan musim kemarau delapan hingga sembilan bulan. Peta sebaran intensitas dan hari hujan variatif antar wilayah



disampaikan dalam gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan NTT

Pemantauan iklim dalam periode 2014-2017 menunjukkan puncak musim penghujan terjadi pada bulan Desember hingga Februari dengan curah hujan tertinggi dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada bulan Januari. Wilayah dengan intensitas hujan rendah, rata-rata 850 mm/tahun, adalah Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara intensitas lebih dari 2.500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus dan Lelogama.

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

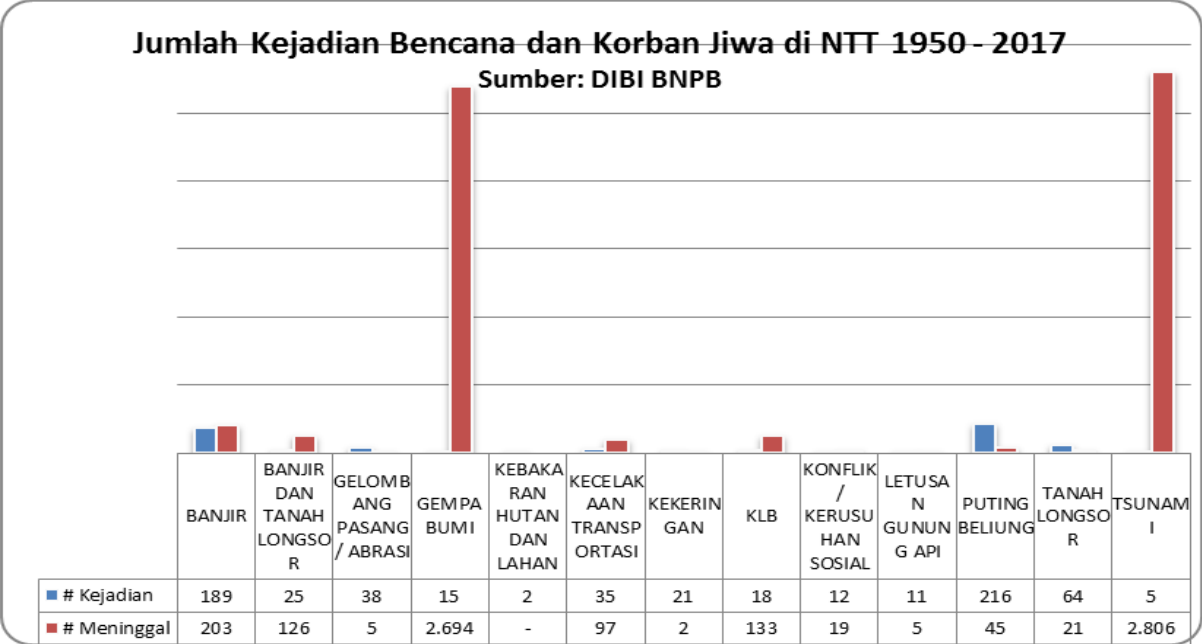
NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Di pulau Flores dan Lembata saja, terdapat 13 gunung berapi aktif, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana *hidrometereologis* secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di



Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya.

Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana *hidrometereologis*, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia.



Sumber : DPBD Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.6
Daftar Kejadian Bencana dan Korban Jiwa di NTT 1950-2017

Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer karena terhalang oleh Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan GRK disebabkan oleh kegiatan manusia (*antropogenic*) yang melepaskan GRK terlalu banyak seperti CO², N₂O dan CH⁴. Gas karbon dioksida yang paling banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil pada skala industri,



pembakaran dalam mesin kendaraan dan akibat penebangan pohon.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu mewaspadai dampak perubahan iklim, terutama karena sektor pertanian, termasuk perikanan, merupakan sektor yang rentan terkena dampak perubahan iklim. Apalagi petani NTT mayoritas adalah petani lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Dengan karakteristik iklim, topografi dan tanah NTT, maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim.

2.1.1.6. Demografi Wilayah

Peningkatan jumlah penduduk dipengaruhi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 5.120.061 jiwa meningkat menjadi 5.203.514 jiwa tahun 2016 atau meningkat 83.453 jiwa. Tahun 2017 jumlah penduduk 5.287.302 jiwa dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/km² tersebar seperti pada gambar berikut.

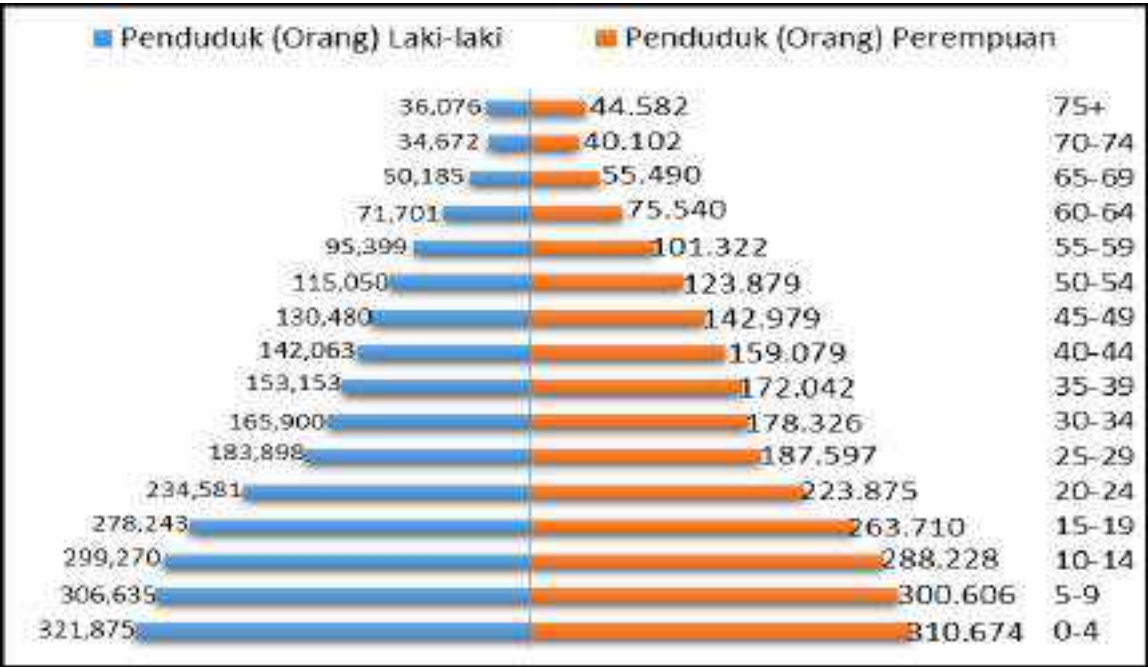


Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.7
Peta Kepadatan Penduduk NTT



Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Kupang sebesar 2.289 jiwa/km², dan terendah Kabupaten Sumba Timur 36 jiwa/km². Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.619.181 jiwa atau sebesar 49,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.668.121 jiwa atau 50,46 persen dengan *sex ratio* sebesar 98 persen yang berarti di setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan *sex ratio* sebesar 100 penduduk perempuan dan hanya terdapat *sex ratio* sebesar 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan perkembangan penduduk, maka struktur penduduk tahun 2017 seperti piramida pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.8
Piramida Penduduk NTT Tahun 2017

Sesuai Gambar 2.8, usia penduduk produktif (16-64 tahun) sebanyak 3.198.817 jiwa atau 60,50 persen, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) 1.827.378 jiwa atau 34,56 persen, dan penduduk tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun 261.107 jiwa. Angka ketergantungan (*dependency ratio province*) tahun 2017 sebesar 65,29 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung ekonomi sebesar 65,29 persen penduduk usia tidak produktif.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana



distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9
Kawasan Lindung di Provinsi NTT

No	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
1	Hutan lindung	652.915,78
2	Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	56.274 Ha
	b. Sempadan sungai	181.837 Ha
	c. Kawasan sekitar danau/waduk	28.944 Ha
3	Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan Bakau	276.666,85 Ha
4	Kawasan lindung lainnya	695.844,47

Sumber : RTRW Provinsi NTT Tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 (dua puluh) jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 (dua puluh) Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan (*provisioning*): pangan, air bersih, serat (*fiber*), bahan bakar (*fuel*); (b) 8 Fungsi pengaturan (*regulating*): pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan



penyakit; (c) 6 Fungsi budaya (*cultural*): spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of space*), rekreasi dan *ecotourism*, ikatan budaya- adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (*supporting*): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara (*nutrient*), produksi primer.

Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).

A. Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman.

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty* :

- a. Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
- b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
- c. Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan *Homo Florencis Liangboah*, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. 2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2017 nilai PDRB NTT mencapai Rp.60,79 Triliun dibanding tahun 2016 sebesar 59,71 Triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91%.



Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,92% (yoy). Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 91,16 Triliun meningkat dibanding tahun 2016 sebesar Rp 83,95 Triliun.

Tabel 2.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017
(dalam Rp. Juta)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.069.630,22	15.613.952,47	16.123.170,40	16.505.925,10	17.311.084,10
Pertambangan dan Penggalian	740.639,07	794.588,35	832.954,50	880.108,60	898.284,50
Industri Pengolahan	652.631,66	674.620,78	709.889,60	745.232,40	800.106,20
Pengadaan Listrik dan Gas	29.844,29	35.779,11	40.919,60	46.896,50	47.223,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37.354,34	39.153,92	39.965,50	40.116,20	40.691,70
Konstruksi	5.450.012,45	5.733.391,46	5.985.126,10	6.470.774,10	6.866.817,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.825.755,76	6.121.599,25	6.493.339,80	6.933.163,70	7.241.395,50
Transportasi dan Pergudangan	2.536.165,63	2.702.256,68	2.852.860,40	3.036.416,40	3.269.004,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299.560,30	318.293,62	337.927,50	386.795,80	439.343,80
Informasi dan Komunikasi	4.268.913,34	4.595.314,31	4.923.562,10	5.256.293,20	5.524.285,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.933.750,03	2.058.287,35	2.176.828,10	2.361.144,20	2.498.243,20
Real Estate	1.383.084,22	1.402.817,86	1.456.810,50	1.506.471,80	1.581.248,00
Jasa Perusahaan	150.346,00	157.716,09	164.983,10	169.655,90	172.085,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.405.819,96	6.785.670,31	7.248.102,40	7.656.376,20	7.883.246,50
Jasa Pendidikan	4.490.436,29	4.753.474,86	4.956.238,50	5.163.639,20	5.486.016,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.108.218,23	1.148.837,35	1.212.281,40	1.287.361,00	1.382.046,50
Jasa lainnya	1.123.026,84	1.172.220,46	1.215.833,80	1.258.942,00	1.346.954,60
PDRB NTT	51.505.188,64	54.107.974,23	56.770.793,30	59.705.312,20	62.788.077,10

Sumber : BPS NTT, 2018



Tabel 2.11
Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,26	28,85	28,28	27,65	27,57
Pertambangan dan Penggalian	1,44	1,44	1,46	1,47	1,43
Industri Pengolahan	1,27	1,25	1,25	1,25	1,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Konstruksi	10,58	10,6	10,62	10,84	10,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,31	11,31	11,43	11,61	11,53
Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,99	5,02	5,09	5,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,59	0,59	0,65	0,7
Informasi dan Komunikasi	8,29	8,49	8,67	8,8	8,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,75	3,8	3,83	3,95	3,98
Real Estate	2,69	2,59	2,56	2,52	2,52
Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,44	12,54	12,79	12,82	12,56
Jasa Pendidikan	8,72	8,82	8,8	8,65	8,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,12	2,13	2,16	2,2
Jasa lainnya	2,18	2,17	2,14	2,11	2,15
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS NTT, 2018

Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 27,57%, disusul administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,56%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu 0,06% disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,7%.



Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.272.822,42	20.456.313,59	22.752.446,40	24.316.945,80	26.183.603,40
Pertambangan dan Penggalian	894.151,94	986.038,08	1.073.475,10	1.166.764,10	1.186.098,60
Industri Pengolahan	758.818,34	843.707,71	940.861,50	1.034.288,80	1.147.211,20
Pengadaan Listrik dan Gas	23.569,51	33.612,24	43.569,10	59.408,50	66.389,00
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	41.817,68	45.528,98	47.150,40	48.990,40	50.483,50
Konstruksi	6.344.807,89	7.095.979,05	7.845.053,50	8.994.923,70	9.787.048,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.569.891,71	7.296.702,97	8.272.330,60	9.321.848,10	10.071.551,00
Transportasi dan Pergudangan	3.195.324,77	3.566.949,63	3.996.753,30	4.528.290,00	4.942.877,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367.820,13	422.442,80	487.091,20	586.078,90	675.948,70
Informasi dan komunikasi	4.660.243,40	5.134.426,10	5.477.448,60	5.878.512,60	6.194.544,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.389.329,02	2.698.906,29	2.991.514,50	3.357.415,10	3.726.411,80
Real Estate	1.705.495,17	1.860.877,72	2.054.341,00	2.209.475,80	2.347.678,80
Jasa Perusahaan	188.486,73	210.878,82	235.528,00	257.185,00	279.075,00
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.592.137,26	8.392.731,64	9.374.990,70	10.664.988,80	11.697.015,50
Jasa Pendidikan	5.679.554,08	6.543.780,80	7.303.246,20	7.983.265,00	8.917.404,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.279.704,26	1.414.584,00	1.585.475,40	1.767.997,10	1.941.036,80
Jasa lainnya	1.361.280,87	1.496.973,45	1.639.515,40	1.771.424,80	1.945.361,30
PDRB NTT	61.325.255,19	68.500.433,86	76.120.790,90	83.947.802,60	91.159.740,00

Sumber : BPS NTT, 2018

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 91,15 Triliun atau mengalami peningkatan secara nominal sebesar Rp 7,8 Triliun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 26,18 Triliun, disusul administasi pemerintahan, pertanian



dan jaminan sosial wajib sebesar Rp 11,69 Triliun. Sedangkan pertumbuhan terendah berasal dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp 50,48 Milyar, disusul pengadaan listrik dan gas sebesar Rp 66,39 Milyar. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar, inflasi ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut. Inflasi di NTT diukur pada dua kota yaitu Kota Maumere dan Kota Kupang. Perkembangan inflasi di NTT relatif lebih rendah dibanding inflasi pada tingkat nasional. Pada tahun 2012 laju inflasi di NTT sebesar 5,33% lebih tinggi dibanding inflasi nasional 4,3%. Namun pada tahun 2016 inflasi NTT turun menjadi 2,48% lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,02% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 2% atau lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,61%. Penurunan inflasi yang rendah di NTT tidak lepas dari intervensi program pengendalian harga produk inflasi yang direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah NTT (TPID-NTT).

Tabel 2.13
Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	8,41	7,76	4,92	2,48	2,00
Inflasi Nasional	8,36	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. Nilai PDRB per kapita penduduk NTT tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 17,24 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp 16,13 juta. Jika dibanding dengan PDB per kapita nasional, maka PDRB NTT hanya 1/3 bagian. Pada tahun 2012 PDRB per kapita NTT ADHK tercatat Rp 10,03 juta, sedangkan rata-rata nasional sebesar Rp 35,1 juta, dan NTT semakin jauh tertinggal pada tahun 2015 PDRB per kapita Rp 11,09 juta dibanding PDB nasional sebesar Rp 45,1 juta.



Tabel 2.14
PDRB Per Kapita di Provinsi NTT
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Per Kapita (ADHB) NTT	11,27	12,38	13,60	14,88	16,13
PDRB Per Kapita (ADHK) NTT	10,03	10,40	10,74	11,09	11,49
PDRB Per Kapita (ADHK) Nasional	35,1	38,4	41,9	45,1	

Sumber: Diolah dari Data BPS

2.2.4. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Indeks Gini NTT berada dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0.30-0.40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, meskipun PDRB per kapita rendah. Indeks Gini NTT relatif stabil pada angka 0,34-0,36 dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, indeks Gini sebesar 0.36, menurun pada tahun 2013 menjadi 0,35, naik menjadi 0.36 pada tahun 2014, menurun lagi tahun 2015 menjadi 0,34 dan pada tahun 2016 dan 2017 naik menjadi masing-masing 0,36. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya yang relatif tidak berbeda signifikan, baik pada masyarakat kota maupun masyarakat desa. Jika dibandingkan nasional senilai 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah.

Tabel 2.15
Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun (Poin)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Gini	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak. Dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili



capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

IPM NTT periode 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,86%. IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2016 sebesar 67,75 menjadi 68,28 pada tahun 2017 atau meningkat sebanyak 0,36 dalam kurun waktu tiga tahun. Berdasarkan rata-rata nasional sejak tahun 2005 hingga tahun 2012, NTT berada pada posisi 31 dari 34 Provinsi. Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal jauh. Pada tahun 2012 IPM NTT 60,81 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 67,70, terus tertinggal hingga tahun 2017 IPM NTT 63,73, IPM rata-rata nasional sudah mencapai 70,81.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT
menurut Komponen Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Usia Harapan Hidup (thn)	65,81	65,91	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (thn)	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350
IPM NTT	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73
IPM Rata-rata Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: BPS NTT, 2018

2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di NTT terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di NTT mencapai 6,93 tahun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,02 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 7,15 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di NTT hanya mencapai kelas-7.

Tabel 2.17
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	6,37	6,38	6,44	6,45	6,51
Sumba Timur	5,98	6,14	6,31	6,48	6,73
Kupang	6,71	6,84	6,88	6,93	7,1
Timor Tengah Selatan	5,94	5,98	6,26	6,27	6,39



Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Timor Tengah Utara	6,22	6,69	6,87	7,13	7,14
Belu	6,95	7,03	7,05	7,06	7,07
Alor	7,68	7,74	7,75	7,76	7,77
Lembata	7,07	7,44	7,51	7,52	7,58
Flores Timur	6,74	6,86	6,98	6,99	7,12
Sikka	6,49	6,53	6,54	6,55	6,56
Ende	7,03	7,3	7,37	7,38	7,63
Ngada	7,47	7,51	7,6	7,61	7,85
Manggarai	6,76	6,79	6,81	6,97	6,98
Rote Ndao	6,11	6,16	6,45	6,67	6,98
Manggarai Barat	6,65	6,8	6,81	6,82	7,14
Sumba Tengah	5,07	5,1	5,12	5,21	5,51
Sumba Barat Daya	5,97	6,01	6,29	6,3	6,31
Nagekeo	6,98	7,14	7,33	7,34	7,52
Manggarai Timur	6,04	6,42	6,43	6,44	6,45
Sabu Raijua	5,24	5,54	5,56	5,68	6,02
Malaka	5,64	6,07	6,08	6,31	6,32
Kota Kupang	11,35	11,41	11,43	11,44	11,45
Nusa Tenggara Timur	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.7. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah di NTT menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2016 harapan lama sekolah di NTT mencapai 12,97 tahun, meningkat pada tahun 2017 menjadi 13,07 tahun.

Tabel 2.18
Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	11,88	12,11	12,4	12,64	12,87
Sumba Timur	11,74	12,02	12,04	12,3	12,79
Kupang	13,13	13,45	13,47	13,48	13,49
Timor Tengah Selatan	12,03	12,51	12,52	12,53	12,54
Timor Tengah Utara	13,03	13,24	13,26	13,27	13,28
Belu	11,02	11,41	11,80	12,02	12,24
Alor	10,94	11,25	11,41	11,64	12,08
Lembata	11,19	11,50	11,86	12,23	12,25
Flores Timur	11,09	11,49	11,9	12,38	12,88
Sikka	11,03	11,38	11,54	11,91	12,34
Ende	13,49	13,71	13,73	13,74	13,75



Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ngada	11,92	11,99	12,32	12,66	12,67
Manggarai	10,90	11,29	11,60	11,92	12,32
Rote Ndao	11,93	12,20	12,22	12,51	12,91
Manggarai Barat	9,89	10,15	10,41	10,67	11,09
Sumba Tengah	12,12	12,59	11,65	11,93	12,31
Sumba Barat Daya	11,23	11,44	12,79	13,02	13,03
Nagekeo	11,17	11,39	11,61	11,98	12,45
Manggarai Timur	9,91	10,15	10,30	10,58	11,04
Sabu Raijua	11,67	12,18	12,71	13,00	13,11
Malaka	11,34	11,56	12,01	12,28	12,75
Kota Kupang	15,35	15,55	15,75	15,76	15,77
Nusa Tenggara Timur	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.8. Jumlah Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 6,615 Juta meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp 7,35 Juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata- rata nasional yang mencapai Rp12,44 Juta.

Tabel 2.19
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	6.672	6.714	6.776	6.914	6.997
Sumba Timur	8.744	8.808	8.883	9.004	9.093
Kupang	6.875	6.945	7.085	7.217	7.301
Timor Tengah Selatan	6.005	6.061	6.118	6.360	6.676
Timor Tengah Utara	5.626	5.679	5.799	5.930	6.164
Belu	6.967	7.025	7.083	7.199	7.251
Alor	6.223	6.284	6.346	6.468	6.553
Lembata	6.794	6.857	6.888	7.010	7.084
Flores Timur	7.048	7.099	7.150	7.237	7.442
Sikka	7.500	7.559	7.618	7.740	7.855
Ende	8.491	8.551	8.679	8.801	8.841
Ngada	8.002	8.070	8.085	8.195	8.649
Manggarai	6.706	6.790	6.875	7.008	7.056
Rote Ndao	5.800	5.873	5.946	6.110	6.320
Manggarai Barat	6.862	6.937	7.012	7.149	7.269
Sumba Tengah	5.828	5.880	5.822	5.907	5.946



Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat Daya	5.755	5.788	5.933	6.079	6.134
Nagekeo	7.830	7.868	7.906	8.054	8.119
Manggarai Timur	5.170	5.208	5.246	5.396	5.643
Sabu Raijua	4.717	4.748	4.781	4.923	5.120
Malaka	5.495	5.512	5.563	5.658	5.726
Kota Kupang	12.676	12.766	12.856	12.986	13.028
Nusa Tenggara Timur	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.9. Umur Harapan Hidup

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2015 angka harapan hidup sebesar 65,96 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 66 Tahun. Tahun 2016 angka umur harapan hidup sebesar 66,04 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 Tahun, dan pada tahun 2017 angka umur harapan hidup sebesar 66,07. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 1-5 Bulan.

Tabel 2.20
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	66,07	66,11	66,11	66,15	66,20
Sumba Timur	63,45	63,48	63,88	64,00	64,12
Kupang	62,87	62,97	63,17	63,33	63,49
Timor Tengah Selatan	65,42	65,45	65,55	65,60	65,65
Timor Tengah Utara	65,89	65,89	66,09	66,14	66,19
Belu	62,26	62,31	63,01	63,21	63,42
Alor	59,71	59,73	60,23	60,35	60,47
Lembata	65,30	65,35	65,85	66,02	66,19
Flores Timur	63,88	63,88	64,28	64,36	64,45
Sikka	65,68	65,70	66,10	66,20	66,30
Ende	64,24	64,27	64,37	64,42	64,48
Ngada	67,30	67,32	67,32	67,34	67,36
Manggarai	64,75	64,78	65,48	65,66	65,84
Rote Ndao	62,67	62,86	62,86	63,13	63,41
Manggarai Barat	65,92	65,98	65,98	66,19	66,19
Sumba Tengah	67,05	67,65	67,65	67,73	67,74
Sumba Barat Daya	67,61	67,08	67,08	67,71	67,76
Nagekeo	66,04	66,05	66,25	66,31	66,36



Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Manggarai Timur	67,26	67,27	67,27	67,39	67,40
Sabu Raijua	57,83	57,98	58,38	58,69	59,00
Malaka	64,11	64,15	64,15	64,27	64,29
Kota Kupang	68,09	68,14	68,34	68,46	68,58
Nusa Tenggara Timur	65,82	65,91	65,96	66,04	66,07

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.10. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2012 sebesar 1.000.300 Jiwa meningkat pada tahun 2013 menjadi 1.006.900 Jiwa, menurun tahun 2014 menjadi 994.680, meningkat lagi tahun 2015 menjadi 1.159.840 Jiwa, menurun tahun 2016 menjadi 1.149.920 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 1.150.790 Jiwa.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806 /kapita/bulan ditambah GK non makanan Rp.106.414/kapita/bulan. Setiap semester, garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester.

Garis kemiskinan NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 346.737 meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 322.947.



Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan NTT 4,06 meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,69 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 4,34.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,07 meningkat menjadi 1,29 di tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 1,17.

Tabel 2.21
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	1.006.900	994.680	1.159.840	1.149.920	1.150.790
2.	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	251.080	265.955	297.864	322.947	346.737
3.	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	3,04	3,34	4,06	4,69	4,34
4.	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,69	0,83	1,07	1,29	1,17
5.	Persentase Penduduk Miskin NTT	20.24	19.60	22.58	22.01	21.38
6.	Persentase Penduduk Miskin Indonesia	11.47	10.96	11.13	10.70	10.12

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.11. Angka Partisipasi Kasar

Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Dari perkembangan angka partisipasi kasar di NTT menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APK. Walau demikian, terjadi peningkatan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan dasar ke tingkat pendidikan menengah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 berturut-turut angka partisipasi kasar pendidikan SMA/SMK/MA dari 57,92 meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,83. Artinya terjadi perbaikan aksesibilitas penduduk untuk meningkatkan pendidikan.



Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan				
	2013	2014	2015	2016	2017
PAUD	N/A	N/A	56,32	57,44	58,32
SD/MI	113,44	114,68	116,46	114,12	114,05
SMP/MTs	80,25	88,66	88,96	89,56	91,35
SMA/SMK/MA	64,85	71,86	75,54	79,34	78,83

Sumber : BPS NTT, 2018

APK PAUD tertinggi 58,32 dicapai pada tahun 2017 dan terendah 56,32 di tahun 2015. APK SD/MI tertinggi 114,68 dicapai pada tahun 2014 dan terendah 113,44 di tahun 2013. APK SMP/MTs tertinggi 91,35 dicapai tahun 2017 dan terendah 80,25 pada tahun 2013. APK SMA/SMK/MA tertinggi 79,34 di tahun 2016 dan terendah 64,85 pada tahun 2013.

2.2.12. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka partisipasi murni di NTT mengalami peningkatan walau masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka partisipasi murni di NTT pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan dari 40,84% menjadi 53,32% pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs, maka terjadi angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 13,84%. APM SD/MI tertinggi 95,40 tahun 2017 dan terendah 92,13 di tahun 2012. SMP/MTs tertinggi 67,16 di tahun 2017 dan terendah 55,93 tahun 2013. SMA/SMK/MA tertinggi dicapai pada tahun 2017 pada angka 53,32 dan terendah 38,62 pada tahun 2013.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	93,60	94,56	94,95	95,24	95,40
SMP/MTs	59,24	65,86	66,32	66,56	67,16
SMA/SMK/MA	47,31	52,15	52,51	52,87	53,32
Perguruan Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	16,55

Sumber : BPS NTT, 2018

Terdapat selisih yang cukup besar pada masing-masing jenjang apabila data APK dibandingkan dengan APM sebagai contoh untuk jenjang SD/MI terdapat selisih senilai 18,65% dikarenakan pada Tahun 2017, terdapat 31.328 siswa yang mengulang untuk jenjang SD, demikian juga untuk jenjang SMP, terdapat selisih senilai 24,19%, dikarenakan pada



Tahun 2017 terdapat 720 siswa yang mengulang untuk jenjang SMP, demikian juga untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, terdapat selisih sebesar 25,51% dikarenakan terdapat 419 siswa yang mengulang untuk untuk level SMA serta 149 untuk jenjang SMK. Untuk nilai APS di Provinsi NTT, secara umum makin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah pula nilai APS. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah. Pada Tahun 2017 terdapat 1.980 siswa SD yang putus sekolah yang meningkat menjadi 2.872 siswa yang putus sekolah pada Tahun 2018. Rincian angka mengulang dan angka putus sekolah selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang
untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK
di NTT Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator	Tingkat Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
Tahun 2017					
1.	Putus Sekolah	1.980	2.501	2.256	1.485
2.	Mengulang	31.328	720	419	149
Tahun 2018					
1.	Putus Sekolah	2.872	3.127	2.410	1.609
2.	Mengulang	28.822	1.000	371	330

Sumber: Data verifikasi PDSPK November 2018, Kementerian Dikbud

2.2.13. Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 APS dengan kelompok umur 7-12 tahun 92,34 meningkat tahun 2017 menjadi 98,27. Demikian halnya dengan kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing masing meningkat dari 89,39 menjadi 94,76 dan dari 64,90 menjadi 74,65. Namun untuk kelompok umur 5-6 tahun mengalami penurunan dari 35,05 pada tahun 2013 menjadi 16,11 di tahun 2017.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur				
	2013	2014	2015	2016	2017
5-6	N/A	N/A	35,05	31,18	16,11
7- 12	92,34	97,99	98,13	98,24	98,27
13-15	89,39	94,26	94,39	94,60	94,76
16-18	64,90	73,96	74,25	74,56	74,65
19-24	22,88	26,22	26,54	26,75	27,80

Sumber : BPS NTT, 2018



2.2.14. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH NTT pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Pada tahun 2017 ABH NTT sebesar 7,25%, turun sebesar 0,15% dibanding tahun 2016 sebesar 7,40%. ABH tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 18,28%, disusul Kabupaten Sumba Tengah 15,4%, dan Kabupaten Sumba Barat 15,11%. ABH terendah di Kota Kupang 0,97%, disusul Kabupaten Ngada 1,62% dan Kabupaten Lembata 2,7%.

Tabel 2.26
Angka Buta Huruf di Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Wilayah	Persentase Buta Huruf (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Barat	15,43	13,26	13,52	17,08	13,8	16,83	16,23	13,52	15,11
Sumba Timur	4,25	6,36	7,16	8,63	9,95	9,36	6,38	8,10	8,23
Kupang	6,04	7,20	5,67	8,72	9,11	8,39	7,35	8,13	6,99
Timor Tengah Selatan	10,00	10,59	9,34	14,23	15,03	14,03	12,15	12,86	11,74
Timor Tengah Utara	8,66	7,23	5,79	10,37	8,38	9,71	9,53	7,81	7,78
Belu	9,78	9,43	7,91	11,15	12,01	12,15	10,47	10,73	10,04
Alor	3,29	1,92	2,25	5,19	5,78	5,38	4,28	3,93	3,89
Lembata	2,05	0,86	1,61	8,17	7,16	3,62	5,40	4,30	2,70
Flores Timur	4,28	2,90	2,74	9,38	7,28	7,96	6,99	5,23	5,52
Sikka	5,81	4,29	7,18	6,53	10,61	10,07	6,20	7,69	8,73
Ende	2,48	3,20	1,83	4,86	7,04	3,72	3,76	5,26	2,84
Ngada	1,63	1,39	1,64	3,10	1,61	1,60	2,39	1,50	1,62
Manggarai	3,31	3,73	2,29	6,28	6,16	6,92	4,84	4,98	4,67
Rote Ndao	6,79	8,06	8,37	7,33	7,34	8,11	7,05	7,71	8,25
Manggarai Barat	2,57	1,99	1,62	4,32	4,69	6,19	3,46	3,36	3,94
Sumba Tengah	7,14	6,26	11,76	11,9	12,67	19,34	9,43	9,35	15,4
Sumba Barat Daya	13,92	17,15	16,77	17,43	19,3	19,87	15,62	18,2	18,28
Nagekeo	3,72	4,11	4,78	5,25	5,79	3,84	4,52	4,99	4,29
Manggarai Timur	1,97	2,84	2,84	3,12	4,35	5,14	2,56	3,61	4,01
Sabu Raijua	11,39	10,21	8,01	10,82	12,46	11,07	11,11	11,3	9,50
Malaka	16,28	11,87	12,06	15,89	13,38	13,26	16,07	12,66	12,70
Kota Kupang	0,76	0,35	0,98	1,51	0,55	0,95	1,12	0,45	0,97
Nusa Tenggara Timur	6,11	6,07	5,87	8,39	8,69	8,58	7,27	7,40	7,25

Sumber : BPS NTT, 2018



2.2.15. Jumlah Kasus Kematian Bayi, Anak Balita dan Balita

Kasus kematian bayi, anak balita dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi tahun 2016 sebanyak 1.689 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi sejumlah 449 jiwa terjadi tahun 2016 dan jumlah kematian balita tertinggi sejumlah 1.174 pada tahun 2017. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di Kabupaten Kupang tahun 2015 sebanyak 198 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi terjadi tahun 2015 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jumlah kematian balita tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 sejumlah 170 jiwa.

Tabel 2.27
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian Bayi	1.286	1.280	1.300	1.088	1.044
Jumlah kasus kematian Balita	1.478	1.437	1.480	1.268	1.174

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.16. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu 176 Kasus, menurun tahun 2014 sejumlah 158 Kasus, untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi 182 Kasus menurun menjadi 163 Kasus.

Tabel 2.28
Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian Ibu				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian ibu	176	158	176	182	163

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.17. Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.



Tabel 2.29
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase gizi buruk	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87
Persentase gizi kurang	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kenaikan justru terjadi pada persentase balita dan baduta *wasting* dan *underweight*.

Tabel 2.30
Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Kelompok Umur	Indikator	NTT (Tahun)			Indonesia
		2015	2016	2017	2017
Baduta	Stunting	32,7	32,1	29,8	20,1
	Wasting	11,7	17,5	17,9	12,8
	Underweight	18,9	23,0	22,8	14,8
Balita	Stunting	41,2	38,7	40,3	29,6
	Wasting	13,6	17,4	15,8	9,5
	Underweight	25,6	28,2	28,3	17,8

Sumber : Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017

2.2.18. Rasio penduduk yang berkerja

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 96,17% dan naik Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 2.219.291 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja 63,92%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.320.061 jiwa dengan Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,60%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebanyak 88.846 jiwa atau 3,83% menurun pada tahun 2017 menjadi 78.548 jiwa atau 3,27%.

Tabel 2.31
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2017

No.	Kegiatan Utama	2015	2017
A.	Angkatan Kerja	2.307.737	2.398.609
1	Bekerja	2.219.291	2.320.061
2	Pengangguran Terbuka	88.846	78.548
B.	Bukan Angkatan Kerja	1.024.663	1.073.247
1	Sekolah	406.687	377.245
2	Mengurus Rumah Tangga	479.617	562.544
3	Lainnya	138.359	133.458



No.	Kegiatan Utama	2015	2017
	Jumlah	3.471.856	3.333.400
	Rasio penduduk yang bekerja	96,17	96,73
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,83	3,27
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,25	69,09

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.19. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Konsep Gender mengutamakan adanya kesetaraan di dalam pembagian peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap sesuai norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem budaya dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan nilai IPM yang rendah, namun memiliki gap IPG dan IPM yang paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya, dengan besaran rasio 96,66 persen. Nilai IPG tahun 2013 sebesar 65,99 dan IDG 68,28. Kecilnya gap pencapaian IPM dan IPG di NTT menunjukkan bahwa pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan di NTT tidak jauh berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan gender di NTT relatif paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya. Kecilnya gap tersebut terutama disebabkan oleh besaran sumbangan pendapatan penduduk perempuan NTT terhadap total pendapatan yang paling tinggi di antara lainnya. Sumbangan pendapatan ini di hitung dari upah buruh yang bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian.



Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Gender NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017

Indeks		2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Gender	NTT	91,74	92,76	92,91	92,72	92,44
	Indonesia	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96
Indeks Pemberdayaan Gender	NTT	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76
	Indonesia	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74

Sumber : BPS NTT, 2018

Kesetaraan gender tidak bisa dicapai tanpa dukungan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Di Provinsi NTT, sampai dengan saat ini, tidak ada kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah maupun instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk mengarusutamakan gender.

2.2.20. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung, dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi NTT Tahun 2013-2014

Indikator	2013	2014
Keluarga Pra Sejahtera	627.401	625.096
Keluarga Sejahtera I	296.833	208.491
Keluarga Sejahtera II,III, III Plus	199.165	1.448.147
Jumlah	1.123.399	2.281.734

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018



Dari Tabel 2.25, terlihat adanya peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera II, III dan III plus dari tahun 2013 ke tahun 2014. Secara persentase pada tahun 2014 Keluarga Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 36,53% dan Keluarga Sejahtera II, III dan III plus sebesar 63,47%.

2.2.21. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.34
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah
di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.22. Daya Dukung Pangan

Tabel 2.26 menjelaskan bahwa daya dukungan pangan di Provinsi NTT untuk Pangan Non Beras mengalami surplus sebesar 1.696.501 Ton sedangkan pada pangan beras mengalami defisit sebesar 15.700 Ton. Dengan demikian dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan berbasis karbohidrat perlu adanya diversifikasi pangan.

Tabel 2.35
Daya Dukung Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Ton/tahun setara beras	Surplus/ Defisit
Jumlah Penduduk	5,287,302	Orang	734,935	
Beras	719,235	Ton		-15,700
Pangan Non Beras	2,431,436	Ton		1,696,501

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.23. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.



Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.36
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Indikator	Tahun (%)			
	2013	2014	2015	2016
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.24. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB NTT mencakup urusan pilihan dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disumbang oleh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuhan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB NTT berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,99%, turun pada tahun 2015 menjadi 24,97%, turun lagi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 23,95% dan 23,57%.

Kontribusi sektor pariwisata didukung dengan lapangan usaha akomodasi, makan minum dan transportasi menunjukkan kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB NTT mencapai angka 5,83% meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,16%. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB NTT tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti sejak tahun 2014-2017.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB NTT 4,72% meningkat di tahun 2017 menjadi 5,01%. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB NTT cenderung menurun sejak tiga tahun lalu. Pada tahun 2014 sebesar 1,44% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,30%.



Berbeda dengan sektor pertambangan, di sektor perdagangan sumbangan terhadap PDRB NTT terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 10,65% meningkat tahun 2017 menjadi 11,05%. Sedangkan sektor industri dengan lapangan usaha berupa industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri galian memberikan kontribusi relatif rendah dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Tabel 2.37
Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT
Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun (Persen)			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	24,99	24,97	23,95	23,57
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	5,83	5,89	6,09	6,16
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,15	0,15	0,15	0,14
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,72	4,77	4,87	5,01
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,44	1,41	1,39	1,30
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,65	10,87	11,10	11,05
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,23	1,24	1,23	1,26

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.



2.3.1.1. Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Provinsi NTT diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan.

2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	APS NTT TAHUN					APS INDONESIA
		2013	2014	2015	2016	2017	2017
1.	7 – 12 tahun Sekolah Dasar (SD/MI)	92,34	97,99	98,13	98,24	98,27	99,14
2.	13-15 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	89,39	94,26	94,39	94,60	94,76	95,08
3.	16-18 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	64,90	73,96	74,25	74,56	74,65	71,42
4.	19-24 tahun Perguruan Tinggi	22,88	26,22	26,54	26,75	27,80	24,77

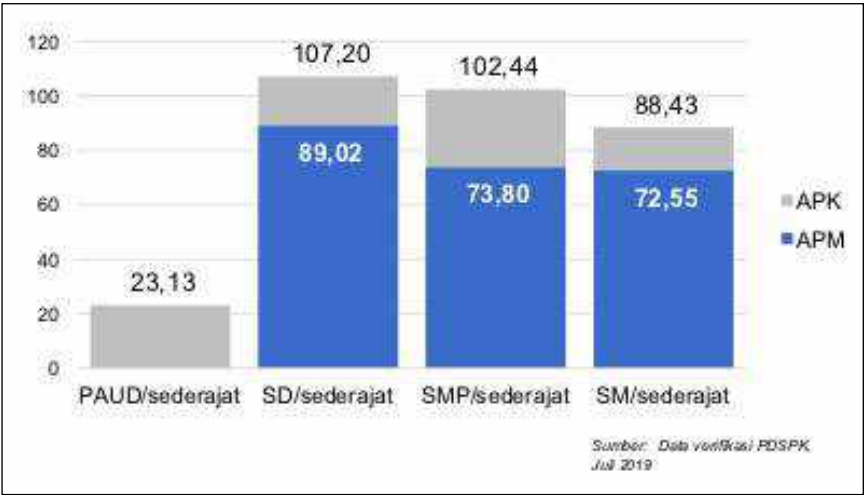
Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat per jenjang usia sekolah, yaitu usia SD, usia SMP dan Usia SMA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada usia 13-15 tahun atau usia SMP, APS sebesar 94,76% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 74,65%. APS terendah berada pada usia 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi sebesar 27,80%. APS pada setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Nusa Tenggara Timur secara persentase mengalami peningkatan, bahkan pada usia SMA dan Perguruan Tinggi, APS NTT berada di atas APS nasional,



namun untuk usia SD dan SMP masih berada di bawah APS nasional.

Sedangkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni untuk siswa SMP dan SMA pada tahun 2018/2019 adalah APK sebesar 102,44% dan 88,43% . Sementara itu APM tingkat SMP dan SMS adalah 73,80% dan 72,55% seperti pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.9
APK dan APM Tingkat SMP dan SMA Provinsi NTT
Tahun 2018/2019

2.3.1.1.1.2.Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Rasio sekolah dengan murid mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah, dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 2.39
Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi NTT
Tahun 2013 - 2017

Rasio Sekolah Terhadap Siswa	2013	2014	2015	2016	2017
SD	1:179	NA	1:164	1 : 88	1 : 116
SMP	1:207	NA	1:206	1 : 96	1 : 109
SMA/MA/ SMA/LB	1:414	NA	1:299	1 : 84	1 : 136
SMK	1:336	NA	NA	1 : 73	1 : 108

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.1.3.Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru



agar tercapai mutu pengajaran.

Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
SD/MI	2013	4.910	867.045	24.892	34,83
	2014	4.977	817.680	25.872	31,60
	2015	5 116	840.208	54.827	15,32
	2016	5.171	823.742	53.447	15,41
	2017	5,226	800,926	50,685	15,80
SMP/MTs	2013	1.453	293.126	9.677	30,29
	2014	16.16	325.742	10.56	30,85
	2015	1 599	328.827	24.567	13,38
	2016	1.667	342.498	23.757	14,42
	2017	1,730	350,169	24,936	14,04
SMA/SMK/ MA	2013	623	202.081	25.205	8,02
	2014	864	221.371	21.585	10,26
	2015	748	223.436	17.509	12,76
	2016	792	253.361	18.452	13,73
	2017	825	267.469	20.169	13,26

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dalam periode 2013 – 2017, terjadi perbaikan rasio Murid-Guru di semua tingkatan, baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, rasio Murid-Guru mencapai 15,80 (SD/MI), 14,04 (SMP/MTs) dan 12,26 (SMA/SMK/MA). Angka-angka ini sudah lebih baik dari pada standar yang diatur dalam Permendikbud 23 tahun 2013.

2.3.1.1.1.4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data dari kemendikbud, angka putus sekolah dasar (SD/MI) di tahun 2013 sebesar 1,88 persen, capaian kondisi akhir di tahun 2017 menjadi sebesar 1,04 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,53 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,70 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 3,77 persen, jauh lebih tinggi dari pada angka nasional sebesar 1,76 persen.



Berikutnya di tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,80 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,57 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,55 persen.

Tabel 2.41
Angka Putus Sekolah Provinsi NTT Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	NAS
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	1,88	1,32	0,69	0,30	1,04	0,53
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1,70	1,31	1,23	6,02	3,77	1,76
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1,80	0,59	2,49	8,60	4,57	3,55

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.1.5. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.42
Angka Melanjutkan Pendidikan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					NAS
		2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	NA	NA	85,34	84,61	91,33	90,08
2	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	NA	NA	86,97	74,38	85,45	77,50

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD/MI) ke tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) tahun 2015 sebesar 85,34 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 menjadi sebesar 91,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 90,08 persen. Berikutnya angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs) ke tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka melanjutkan pendidikan tahun 2015 sebesar 86,97 persen turun menjadi 85,45 persen di tahun 2017, namun masih lebih tinggi dari pada rata-rata nasional sebesar 77,50 persen.

2.3.1.1.1.6. Kompetensi Guru

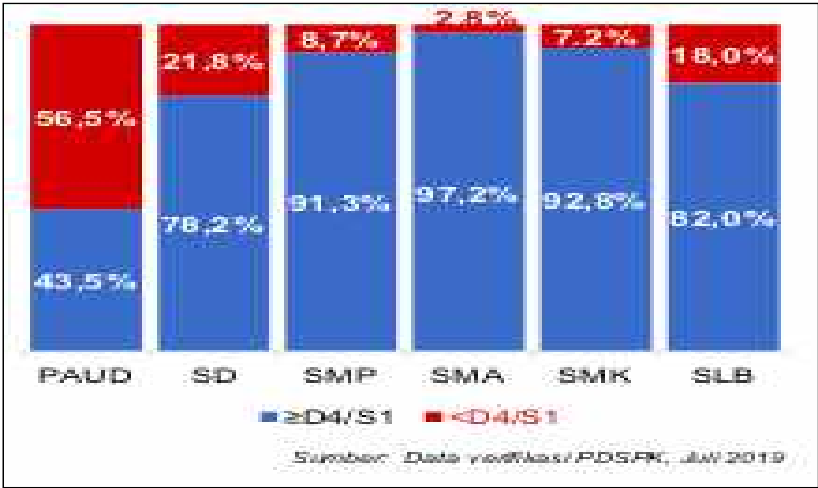
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,



mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Melalui arahan dan bimbingan guru yang profesional, peserta didik bisa berkembang menjadi sosok yang cerdas dan terpelajar. Peserta didik diharapkan menjadi generasi yang handal dan berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

Guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan, sehingga kualifikasi dan kompetensi guru perlu dievaluasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, sementara kompetensi guru diperoleh melalui standar pendidikan profesi. Menurut Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

- 2.3.1.1.1.6.1. Guru pada SD/MI atau bentuk lain sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi yang terakreditasi.
- 2.3.1.1.1.6.2. Guru pada SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/ Sederajat dan SMK/MAK/ Sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.



Gambar 2.10
Persentase Guru yang memiliki Ijazah



D4/S1 Provinsi NTT Tahun 2016

Pada Tahun 2019, Persentase Guru yang memiliki ijazah D4/S1 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jenjang SMP, SMA dan SMK diatas 90% dengan rincian pada jenjang SMP sebesar 91,3%, SMA 97,2% dan untuk Jenjang SMK sebesar 92,8%. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD, persentase guru yang memiliki ijazah D4/S1 sebesar 78,2%.



Gambar 2.11
Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Provinsi NTT
Tahun 2016

Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi NTT pada Tahun 2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masih berada dibawah rata-rata Nasional.

2.3.1.1.1.7. Akreditasi Sekolah

Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dengan mengacu pada 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



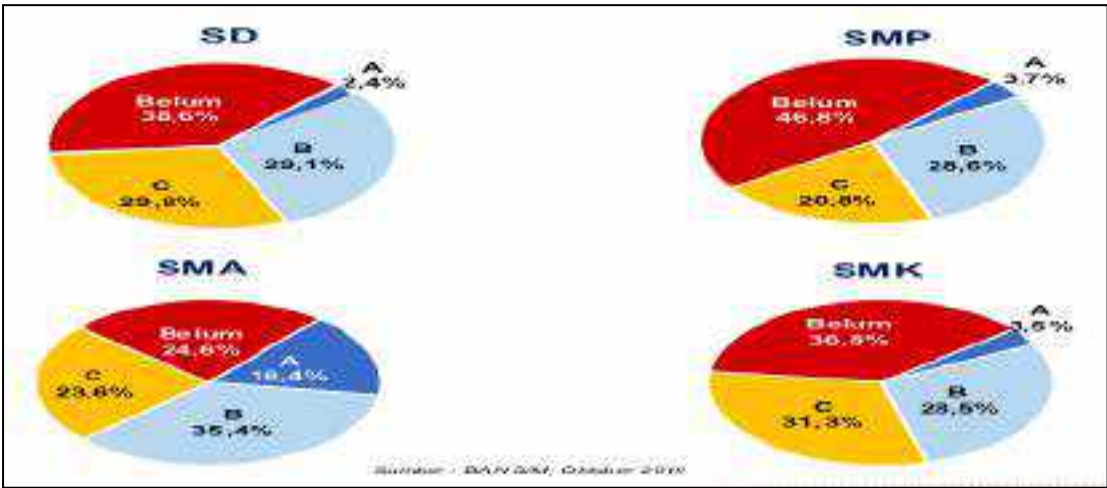


Gambar 2.12
Hasil Akreditasi Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi NTT Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2019, kondisi akreditasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih di dominasi oleh kelompok sekolah yang belum terakreditasi, dengan rincian untuk jenjang SD sebesar 38,6%, SMP sebesar 46,8,4%, SMA sebesar 26,6% serta SMK sebesar 36,8%. Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi A untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sebesar 2,4% dan 3,7%, SMA sebesar 16,4% serta SMK sebesar 3,5%. Hal ini menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan di Provinsi NTT yang masih sangat amat rendah.

2.3.1.1.1.8. Kompetensi Lulusan

Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.



Gambar 2.13
Rata-Rata Hasil Ujian Nasional dan Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017



Pada Tahun 2017, rata-rata hasil ujian nasional untuk jenjang pendidikan SMP, SMA IPA, SMA IPS dan SMK masih berada di bawah rata-rata nasional. Demikian juga rata-rata Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 masih berada di bawah rata-rata nasional.

2.3.1.1.1.9. Pendidikan Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam undang-undang tersebut dikemukakan hal-hal yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, salah satunya yaitu pada Bab IV Pasal 5 (2). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3). Warganegara di daerah terpencil atauterbekas serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4). Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak hanya yang bersifat regional dan nasional, tetapi juga yang bersifat internasional. Beberapa diantaranya adalah: a. Deklarasi tentang Hak Azasi Manusia 1948, termasuk di dalamnya hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang – PBB. b. Konvensi tentang Hak Anak 1989 (PBB, dipublikasikan tahun 1991) c. Pendidikan untuk Semua 1990: Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand yang menyatakan bahwa: (1) memberi kesempatan kepada semua anak untuk sekolah; dan (2) memberikan pendidikan yang sesuai bagi semua anak. Dalam kenyataannya, pernyataan tersebut belum termasuk di dalamnya anak luar biasa (UNESCO, dipublikasikan tahun 1991 dan 1992) d. Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan untuk Orang-orang Penyandang Cacat 1993 (PBB, dipublikasikan tahun 1994).

Pada Tahun 2017/2018, penduduk Provinsi NTT yang menerima layanan pendidikan luar biasa sebanyak 2.563 siswa, dengan komposisi terbesar pada jenjang umur 7-12 tahun sebesar 37%, dan usia 13-15 tahun sebesar 29%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2.43.



Tabel 2.43
Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa menurut Kelompok Umur
Provinsi NTT Tahun 2017/2018

No.	Jenjang	< 7 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		> 18 tahun		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Pendidikan Luar Biasa (PLB)	42	1.64	955	37	736	29	582	23	-	-	2563	100
	Negeri	16	0.84	727	38	557	29	415	22	197	10	1913	100
	Swasta	26	3.99	228	35	179	28	167	26	51	7.8	651	100

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah sekolah luar biasa pada tahun 2017/2018 berjumlah 37 unit dengan rincian SDLB sebanyak 4 unit, SMPLB sebanyak 3 unit, SMLB sebanyak 4 unit serta SLB sebanyak 26 unit. Sedangkan menurut jenis pendidikan, sebanyak 7 unit SLB adalah sekolah swasta dari total 37 unit. Rincian gambaran mengenai sekolah luar biasa dapat dilihat pada Tabel 2.44, 2.45 dan 2.46.

Tabel 2.44
Gambaran Pendidikan Luar Biasa Provinsi NTT Tahun 2015/2016
sampai dengan 2017/2018

No	Indikator	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1.	Jumlah Sekolah	34	34	37
	Negeri	25	27	30
	Swasta	9	7	7
2.	Jumlah Siswa Baru	33	594	524
	Negeri	28	481	383
	Swasta	5	113	141
3.	Jumlah Siswa	2209	2429	2563
	Negeri	1679	1859	1912
	Swasta	530	570	651
4.	Jumlah Siswa Mengulang	N/A	N/A	84
	Negeri	N/A	N/A	44
	Swasta	N/A	N/A	40
5.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	N/A	N/A	18
	Negeri	N/A	N/A	9
	Swasta	N/A	N/A	9
6.	Jumlah Siswa Yang Lulus	281	188	76
	Negeri	214	139	-
	Swasta	67	49	76
7.	Jumlah Guru	554	487	615
	Negeri	442	390	522
	Swasta	112	97	93
8.	Jumlah Tenaga Kependidikan	554	57	87
	Negeri	442	54	82
	Swasta	112	3	5
9.	Jumlah Rombongan Belajar	389	517	512
	Negeri	306	422	427



No	Indikator	2015/2016	2016/2017	2017/2018
	Swasta	83	95	85
10.	Jumlah Ruang Kelas	359	373	439
	Negeri	287	304	370
	Swasta	72	69	69

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.45
Persentase Guru Pendidikan Khusus sesuai Kualifikasi Pendidikan
Provinsi NTT Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Persentase Guru dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 ke atas (%)	NA	79,10	82
2	Persentase Guru dengan Kualifikasi Pendidikan di bawah D4/S1 (%)	NA	21,90	18

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Provinsi NTT, 2019

Tabel 2.46
Persentasi Guru SLB Tersertifikasi
Provinsi NTT Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Persentasi Guru SLB tersertifikasi (%)	NA	17	21,20
2	Persentasi Guru SLB yang belum tersertifikasi (%)	NA	83	78,80

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Provinsi NTT, 2019

2.3.1.1.1.10. Jumlah Guru Jenjang SMA/SMK/SLB

Jumlah Guru pada Jenjang SMS/SMK dan SLB se Provinsi NTT dikategorikan menjadi Guru PNS, Kontrak Provinsi, Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) yang dapat di lihat pada Tabel 2.47 di bawah ini.

Tabel 2.47
Jumlah Guru Jenjang SMA/SMK/SLB
Provinsi NTT Tahun 2017 - 2019

Kabupaten / Kota	PENGABAS	Guru PNS	KONTRAK PROVINSI	GTY	GTTY	KEMITE	TOTAL
Kota Kupang	29	1000	108	367	333	145	2383
Kab. Kupang	5	532	209	136	95	737	1794
Kab. Timor Tengah Selatan	3	438	82	248	401	952	1746
Kab. Timor Tengah Utara	1	383	138	140	180	438	1250
Kab. Belu		343	91	157	361	359	1051
Kab. Malaka		184	123	264	285	334	1090
Kab. Ator	8	434	404	88	75	441	1404
Kab. Lembata	3	328	69	78	99	341	615
Kab. Flores Timur	8	377	58	270	134	247	1046
Kab. Sikka	3	434	58	430	289	163	1377
Kab. Ende	1	513	52	195	176	360	1197
Kab. Ngakao		349	27	133	94	136	609
Kab. Ngada	5	371	25	170	129	145	741
Kab. Manggarai Timur	1	325	94	154	67	638	1319
Kab. Manggarai	4	313	36	578	387	268	1592
Kab. Manggarai Barat	9	306	69	176	134	339	1033
Kab. Sumba Timur	1	377	133	33	50	360	893
Kab. Sumba Tengah	1	150	81	13	10	44	298
Kab. Sumba Barat	3	178	184	18	67	56	503
Kab. Sumba Barat Daya	1	314	141	338	656	171	1621
Kab. Rote-Ndoo	1	323	92	49	46	95	605
Kab. Sabu Reijua	1	198	104	5	9	79	395
Grand Total	89	7918	2340	3654	3661	4057	14217



2.3.1.1.2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah memelihara kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menambah kuantitas fasilitas kesehatan terkait dengan kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta peningkatan kualitas melalui standarisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan melalui akreditasi.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan posyandu mengalami peningkatan namun rasionya fluktuatif dengan satuan balita yang dilayani pada tahun 2013 - 2017. Rasio tahun 2013 sebesar 15.18, tahun 2014 sebesar 16.45 dan pada tahun 2017 sebesar 15.89 yang berarti 15 posyandu dapat menampung 1.000 balita (15:1.000). Walaupun sudah melewati kondisi ideal dimana 10 posyandu untuk melayani 1.000 balita, namun keaktifan posyandu itu sendiri masih rendah, dimana pada tahun 2017 persentase posyandu aktif hanya mencapai 50,78%. Perkembangan posyandu dan rasio seperti pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Posyandu	9.368	10.323	5.954	10.033	10.053
Jumlah Balita	617.216	627.547	622.757	627.471	632.639
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	15,18	16,45	9,56	15,99	15,89

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

b. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Pada tahun 2016 jumlah puskesmas 384 dengan rasio sebesar 1:13.550 jiwa dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 396 puskesmas dengan rasio 1:13.351 jiwa, sudah berada dalam kondisi ideal di mana 1 puskesmas harus melayani 16.000 penduduk, namun dengan kondisi geografis dirasa perlu ditingkatkan jumlah puskesmas agar dapat melayani penduduk di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pertambahan jumlah puskesmas juga diimbangi dengan meningkatnya



jumlah polindes dan klinik/balai kesehatan yang pada tahun 2017 masing-masing dengan rasio 1:5.513 jiwa untuk polindes dan rasio 1:550.760 jiwa untuk klinik/balai kesehatan. Namun untuk Puskesmas Pembantu mengalami penurunan sehingga rasio puskesmas pembantu pada tahun 2017 sebesar 1 : 4.979 yang berarti belum memenuhi rasio ideal sebesar 1 : 1.500 penduduk.

Tabel 2. 49
Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan
Per Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Puskesmas	368	379	383	384	396
- Rasio Puskesmas	1:13.461	1:13.289	1:13.368	1:13.550	1:13.351
Puskesmas Pembantu	1.080	1.081	1.088	1.081	1.062
- Rasio Puskesmas Pembantu	1:4.587	1:4.659	1:5.625	1:4.814	1:4.979
Polindes	755	1,022	710	944	959
- Rasio Polindes	1:6.561	1:4.928	1:7.211	1:5.512	1:5.513
Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	29	96
- Rasio Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	1:179.431	1:550.760
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit dalam periode 2013-2017 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 43 rumah sakit, meningkat pada tahun 2017 menjadi 50 rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk pada tahun 2013-2017 belum mencukupi, pada tahun 2017 tercatat rasio sebesar 1:103.672 penduduk, sementara idealnya 1 rumah sakit untuk 1000 penduduk (WHO). Penambahan fasilitas Rumah sakit dan rasionya seperti pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Sakit	43	44	46	47	51
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302
Rasio Rumah Sakit	1:115.208	1:114.474	1:111.305	1:110.713	1:103.672

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018



Beberapa desa yang ada di pulau-pulau kecil dan pulau besar yang memiliki kondisi topografi berupa gunung dan lembah yang sulit dijangkau oleh pelayanan medis sehingga membutuhkan pelayanan khusus lewat laut dan kasus- kasus emergensi yang membutuhkan rujukan cepat via transportasi udara.

d. Rasio Dokter Dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan tenaga medis dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) sebesar 17 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2013 sebesar 14 per 100.000 penduduk. Rasio bidan naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 56 per 100.000 penduduk menjadi 74 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat turun dari keadaan tahun 2013 sebesar 108 per 100.000 penduduk menjadi 97 per 100.000 penduduk di tahun 2017.

Untuk tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, keterampilan fisik dan keteknisan medik) naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 39 per 100.000 penduduk menjadi 67 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Walaupun rasio tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah kondisi standar.

Tabel 2.51
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Tenaga Kesehatan	Ratio Tenaga Kesehatan NTT per 100.000 penduduk tahun					Standar
	2013	2014	2015	2016	2017	
Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62
Bidan	56	56	72	72	74	100
Perawat	108	108	91	92	97	173
Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

e. Angka kesakitan

Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Provinsi NTT fluktuatif dari tahun 2013 sampai ke tahun 2017. Angka kesakitan Malaria, Tuberkolosis, HIV, Diare dan DBD mengalami penurunan yang berarti, namun tetap belum memenuhi target secara keseluruhan. Rincian angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.52.



Tabel 2.52
Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kesakitan Malaria (Annual Paracite Index – API) per 1.000 Penduduk	22	13,59	7,05	5,5	5,39
2	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	210	68	92	106	61
3	prevalensi HIV (%) pada populasi penduduk dewasa usia (15-49 tahun)	0,2	0,3	0,1	0,001	0,001
4	Angka kesakitan diare per 1.000 Penduduk	8,96	6	8	6	6
5	Angka kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	10,7	2,45	1,06	19,82	4,00
6	Prevalensi Kusta per 1.000 Penduduk	0,6	0,90	1,00	0,30	1,18
7	Angka Kesakitan Filariasis per 1.000 penduduk	1	1,20	0,69	6,08	3,70
8	Persentase penduduk dengan Hipertensi	NA	49,12	4,64	4,72	14,30
9	Persentase penduduk obesitas	NA	16,74	0,01	3,26	12,61
10	Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	NA	3,54	0,89	12,56	0,71
11	Persentase tumor/ benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	NA	2,76	1,50	1,33	12,11

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

f. Persentase Desa Siaga Aktif

Persentase Desa Siaga Aktif adalah jumlah Desa Siaga Aktif dibagi dengan jumlah Desa Siaga dikalikan 100 persen. Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Tabel 2.66. Persentase Desa Siaga Aktif meningkat dari keadaan tahun 2013 sebesar 57,17% menjadi 79,75%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pembentukan desa siaga di masyarakat.

Tabel 2.53
Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Desa Siaga Aktif	57,17	50,78	59,47	70,81	79,75

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

g. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup masyarakat NTT masih berada di bawah 70 point atau di bawah rata – rata Indonesia. Hal ini dapat di lihat pada Tabel 2.55 di bawah ini.



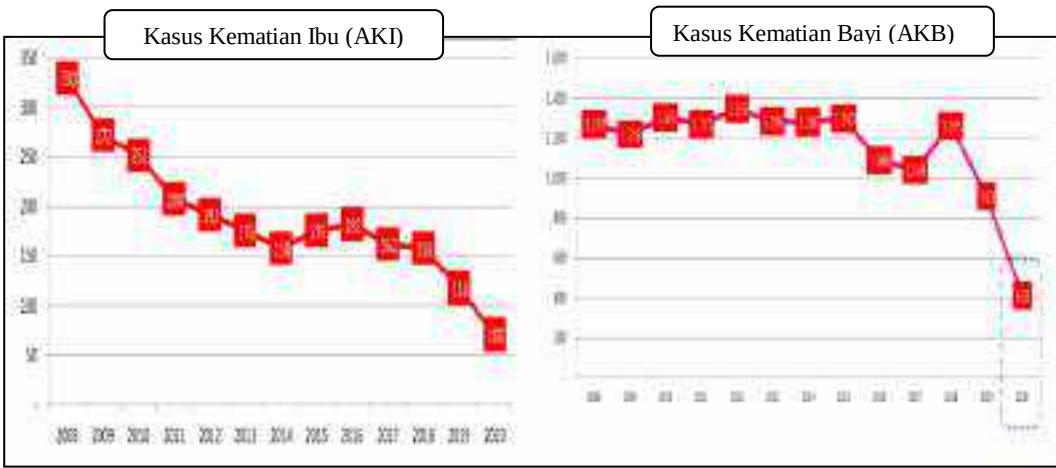
Tabel 2.54
Usia Harapan Hidup di Provinsi NTT
Tahun 2015 – 2019

Usia Harapan Hidup	2015	2016	2017	2018	2019
NTT	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85
INDONESIA	70,77	71,04	71,28	71,20	71,34

Sumber : BPS NTT, 2020

h. Kasus Kematian Ibu (AKI) dan Kasus Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



Gambar 2.14
Kasus Kematian Ibu (AKI) dan Kasus Kematian Bayi (AKB)
Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017

2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.1.3.1. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai penghubung antar wilayah di Provinsi NTT perlu diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian. Panjang jalan Provinsi NTT berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017 adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% terletak di pulau- pulau Timor Alor Rote Sabu, 39,73% di pulau Flores- Lembata dan 17,80% di pulau Sumba.

Tabel 2.55
Total Panjang Jalan Provinsi NTT tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Provinsi (Km)	1.397,12	1.737,37	1.737,37	1.737,37	2.650

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018



Peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang dilakukan tiap tahunnya. Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabiltasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan jembatan Provinsi (Km)	41,87	55,18	59,89	38,13	87,76

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Pada tahun 2017 kondisi jalan dalam keadaan baik 54,49%, sementara jalan rusak ringan 9,41%, jalan rusak sedang sebesar 9,35% dan jalan dengan kondisi rusak berat 26,75%. Proporsi kondisi jalan pada tahun 2017 dapat Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Kondisi Jalan Provinsi NTT Tahun 2017

Kondisi Jalan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Persentase	54,49	9,41	9,35	26,75

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.3.2. Jaringan Irigasi Provinsi

Pada tahun 2017, ada 52 Daerah Irigasi Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha dengan luas fungsional 31.356 Ha (23,4 persen). Daerah Irigasi Provinsi sebanyak 36 daerah irigrasi dengan luas potensialnya 49.326 Ha, luas fungsional 27.589 Ha (55,6 Persen) dan untuk Daerah Irigasi Kabupaten/Kota luas fungsional 67.223 Ha.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR RI, Kabupaten dengan luas Daerah Irigasi terbesar adalah Manggarai (8.250 Ha), Sumba Timur (6.910 Ha), Manggarai Barat (4.731 Ha), Ngada (4.544 Ha) dan Sumba Barat Daya (3.589 Ha).

Tabel 2.58
Kondisi Baik Jaringan Irigasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	58.555 ha	58.555 ha	60.328 ha	60.328 ha	60.328 ha

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.57, dapat dilihat bahwa tingkat kondisi baik jaringan irigasi terus meningkat dari 58.555 hektar are di tahun 2013 menjadi



60.328 hektar are di tahun 2017.

2.3.1.1.3.3. Sumber Air Minum Rumah Tangga

Jika dilihat sumber air minum rumah tangga, sampai dengan tahun 2017 sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen) dan disusul oleh Sumur Terlindungi (18,31 persen).

Sementara layanan air ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh swasta) dan sumur bor/pompa.

Tabel 2.59
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Tahun	Air kemasan/ isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindungi	Mata air terlindungi	Sumur/ mata air tidak terlindungi	Lainnya
2013	5,43	13,62	3,45	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8,42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2014-2017

Sedangkan untuk indikator yang diukur yaitu persentase sarana air bersih perdesaan naik dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60,16% pada tahun 2017. Sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak meningkat dari 43,33% dari tahun 2013 menjadi 65,20% pada tahun 2017.

Tabel 2.60
Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga
dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47,99	57,46	54,68	60,16
2	Rumah tangga dengan sumber air minum layak	43,33	54,88	62,72	60,04	65,20

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.3.4. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga



lain tertentu. Pada tahun 2013 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 24,91 persen, mengalami kenaikan sebesar 20,40 poin pada tahun 2017 menjadi 45,31%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 67,89%, maka tentunya masih berada di bawah rata-rata nasional. Gambar di bawah memperlihatkan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak selama kurun waktu 2013-2017.



Sumber : Statistik Perumahan Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.15
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

2.3.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian agenda prioritas nasional dan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan mengarahkan Peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut meliputi pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

2.3.1.1.4.1. Indikator Rumah Layak Huni

Pada tahun 2013 jumlah rumah dengan atap seng mencapai 80,91 persen menjadi 88,16% tahun 2017 atau meningkat 7,25%. Untuk lantai rumah terluas menunjukkan tertinggi lantai semen mencapai 46,65% tahun 2013 menjadi 49,89% tahun 2017 atau meningkat 3,24%. Lantai rumah yang perlu menjadi prioritas peningkatan yaitu rumah lantai tanah yang mencapai 23,37% dan lainnya 6,64% tahun 2017. Khusus untuk rumah adat karena tradisi lebih memilih lantai kayu atau semen,



sehingga perlu dilakukan pendekatan khusus sehingga secara budaya tetap terjaga dan dari kebutuhan kelayakan tetap dapat dipenuhi.

Tabel 2.61
Persentase Rumah Layak Huni Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Layak Huni	63,3	63,4	64	NA	63

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase rumah layak huni mengalami fluktuasi pada selama tahun 2013 sampai 2017, namun mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 sebesar 63,3%, menurun tipis pada tahun 2017 menjadi sebesar 63%.

2.3.1.1.4.2. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sampai dengan 2017, masih ada 426.990 unit rumah tidak layak huni di NTT, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 399.739 unit. Jumlah RTLH tertinggi ada di Kabupaten Sumba Barat Daya (70.213 unit), Kabupaten TTS (52.784 unit) dan Kabupaten TTU (30.046 unit).

Jumlah RTLH terendah ada di Kabupaten Sumba Barat (3.380 unit), Kota Kupang (4.964 unit) dan Kabupaten Ngada (6.156 unit).

2.3.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas. Jumlah linmas di tahun 2017 sebanyak 44.876 orang. Dalam rangka Peningkatan Ketahanan Seni Budaya, untuk memperkaya puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat



jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama.

Dari 22 Kabupaten/Kota kaya akan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar di berbagai mobil, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti *art and culture center*.

2.3.1.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial-ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa Kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT, yaitu fakir miskin, anak terlantar dan korban bencana alam. Data PMKS di Provinsi NTT tahun 2013-2017 tersaji dalam Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2013	2014	2015	2016	2017
Anak Balita Terlantar	14.529	14.529	17.081	33.939	33.939
Anak Terlantar	62.092	62.092	58.170	120.876	120.876
Korban Tindak Kekerasan	1.470	1.470	1.663	1.429	519
Anak Jalanan	3.672	3.672	2.965	1.259	1.259
Anak Cacat	5.001	5.001	6.706	5.775	5.775



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2013	2014	2015	2016	2017
Lansia Terlantar	-	-	36.022	52.666	-
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	58.511	58.511	45.276	57.236	70.185
Penyandang Cacat	34.079	22.862	30.782	30.400	30.400
Pemulung	1.218	1.218	1.274	1.045	1.045
Tuna Susila	823	823	1.953	1.797	1.797
Penyandang HIV/AIDS	2.351	319	3.700	3.700	3.700
Pengemis	7	7	614	604	604
Gelandangan	8	8	272	265	265
Eks Narapidana	7.215	7.215	7.267	7.211	7.211
Korban Penyalahgunaan Napza	166	166	345	370	370
Keluarga Fakir Miskin	504.852	610.495	421.799	597.413	216.914
Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	15.792	15.792	-	-	-
Korban Bencana Alam	51.765	51.765	36.039	86.106	86.106
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.515	-	2.359	2.142	2.142
Komunitas Adat Terpencil	12.522	-	10.964	5.071	5.071
Pekerja Migran/ Deportan	362	-	1.701	805	805
Anak Berhadapan Dengan Hukum	-	3.114	190	234	234
Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	1.024	519	519
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	61	106	106
Kelompok Minoritas	-	-	499	693	693
Korban Tarffiking	-	-	424	225	-
Korban Bencana Sosial	-	-	2.884	805	805

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2. **Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar**

2.3.1.2.1. **Tenaga Kerja**

Berdasarkan data Sakernas, penduduk usia kerja tahun 2013 mencapai 3.191.748 Orang yang meningkat menjadi 3.471.856 Orang atau naik 2,11%. Penduduk usia kerja dominan ada di pedesaan atau 79,63% dan menurun menjadi 76,33%. Berdasarkan kondisi tersebut menunjukan



adanya pergeseran angkatan kerja dari pedesaan ke perkotaan dengan peningkatan mencapai 7,28%, sedangkan pedesaan meningkat 0,71%.

Tabel 2.63
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

PUK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	1.558.416	48,83	1.592.960	48,84	1.628.065	48,86	1.662.622	48,87	1.697.137	48,88
Perempuan	1.633.332	51,17	1.668.379	51,16	1.704.335	51,14	1.739.453	51,13	1.774.719	51,12
L+P	3.191.748	100	3.261.339	100	3.332.400	100	3.402.075	100	3.471.856	100
Daerah										
Kota	649.969	20,36	667.059	20,45	754.201	22,63	787.953	23,16	821.888	23,67
Desa	2.541.779	79,64	2.594.280	79,55	2.578.199	77,37	2.614.122	76,84	2.649.968	76,33
K+D	3.191.748	100	3.261.339	100	3.332.400	100	3.402.075	100	3.471.856	100

Sumber: Sakernas, 2018

2.3.1.2.1.1. Angkatan Kerja (AK)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan. Kondisi angkatan kerja tahun 2013-2017 berdasarkan jenis kelamin dan daerah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

AK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	1.244.946	57,33	1.274.336	56,70	1.311.858	56,85	1.324.755	56,29	1.357.673	56,60
Perempuan	930.225	42,77	973.102	43,30	995.879	43,15	1.028.893	43,71	1.040.936	43,40
L+P	2.175.171	100	2.247.438	100	2.307.737	100	2.353.648	100	2.398.609	100
Daerah										
Kota	365.88	16,82	388.987	17,31	440.178	19,07	506.468	21,52	478.616	19,95
Desa	1.809.291	83,18	1.858.451	82,69	1.867.559	80,93	1.847.180	78,48	1.919.993	80,05
K+D	2.175.171	100	2.247.438	100	2.307.737	100	2.353.648	100	2.398.609	100

Sumber: Sakernas, 2018

Jumlah angkatan kerja tahun 2013 mencapai 2.175.171 orang meningkat menjadi 2.298.609 pada tahun 2017 orang atau meningkat 2,19%. Berdasarkan domisili menunjukkan ada peningkatan angkatan kerja perkotaan dari 18,82% menjadi 19,95%. Proporsi angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak 56,60% laki- laki dan 43,40% perempuan.

2.3.1.2.1.2. Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk



usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Kondisi bukan angkatan kerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

BAK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	313.470	30,84	318.624	31,43	316.207	30,86	337.867	32,23	339.464	31,63
Perempuan	703.107	69,16	695.277	68,57	708.456	69,14	710.56	67,77	733.783	68,37
L+P	1.016.577	100	1.013.901	100	1.024.663	100	1.048.427	100	1.073.247	100
Daerah										
Kota	284.089	27,95	278.072	27,43	314.023	30,65	281.485	26,85	343.272	31,98
Desa	732.488	72,05	735.829	72,57	710.64	69,35	766.942	73,15	729.975	68,02
K+D	1.016.577	100	1.013.901	100	1.024.663	100	1.048.427	100	1.073.247	100

Sumber: Sakernas. 2018

Jumlah penduduk bukan angkat kerja tahun 2013 mencapai 1.016.577 orang meningkat menjadi 1.073.247 orang tahun 2017 atau meningkat 1,92%. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin komposisi penduduk bukan angkatan kerja laki-laki mencapai 31,63% jauh di bawah perempuan yang mencapai 68,37%. Komposisi bukan angkatan kerja dominan di perdesaan mencapai 68,02% dan di perkotaan hanya mencapai 31,63%.

2.3.1.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dihitung dari banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

TPAK	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-laki	79,89	80,00	80,58	79,68	80,00
Perempuan	56,95	58,33	58,43	59,15	58,65
Laki-laki + Perempuan	68,15	68,91	69,25	69,18	69,09



Kota	56,29	58,31	58,36	64,28	58,23
Desa	71,18	71,64	72,44	70,66	72,45
Kota + Desa	68,15	68,91	69,25	69,18	69,09

Sumber : Sakesnas, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2013 sebesar 68,15% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 69,09%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPAK dari tahun 2013 sampai tahun 2017 lebih tinggi pada perempuan dengan kenaikan sebesar 1,7% dibanding laki-laki sebesar 0,11%. Berdasarkan wilayah tahun 2013 sampai tahun 2017, kenaikan pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan, dimana pada wilayah perkotaan TPAK naik sebesar 1,94% sedangkan pada wilayah perdesaan sebesar 1,27%.

2.3.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTT cenderung mengalami fluktuatif.

Pada tahun 2017, TPT terendah mencapai 8,22%. TPT tertinggi tahun 2013 yang mencapai 9,22%.

Tabel 2.67
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2013-2017

TPT	NTT Tahun					Indonesia
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Jenis Kelamin						
Laki-laki	2,81	3,23	3,19	2,88	3,41	
Perempuan	3,84	3,30	4,68	3,73	3,10	
L+P	3,25	3,26	3,83	3,25	3,27	5,50
Daerah						
Kota	7,40	8,05	8,80	5,56	8,66	6,79
Desa	2,41	2,25	2,66	2,62	1,93	4,01
K+D	3,25	3,26	3,83	3,25	3,27	5,50

Sumber : Sakernas, 2018

Berdasarkan Tabel 2.66, dapat dilihat bahwa TPT mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebesar 3,25% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 3,83%, kemudian turun di tahun 2016 menjadi 3,25% lalu naik lagi pada tahun 2017 menjadi 3,27%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPT tahun 2017 lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, sedangkan berdasarkan wilayah pada tahun 2017, TPT pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Jika dibandingkan



dengan angka nasional sebesar 5,50% maka TPT NTT sudah berada di bawah nasional. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja.

Tabel 2.68
Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi NTT
Tahun 2015-2017

Pendidikan	Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)		
	2015	2016	2017
SD Ke bawah	15.146	13.401	14.985
SLTP	9.264	8.873	7.116
SLTA Ke atas	64.036	54.306	56.447
Jumlah	88.446	76.580	78.548

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Proporsi tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada tahun 2017 adalah pengangguran dengan pendidikan SLTA ke atas dengan 71,86%, turun dari proporsi tahun 2015 sebesar 72,40%. Pengangguran dengan tingkat pendidikan SLTP proporsinya menurun dari 10,47% pada tahun 2015 menjadi 9,06% di tahun 2017, sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah naik proporsinya dari 17,12% di tahun 2015 menjadi 19,08% di tahun 2017.

2.3.1.2.1.5. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT

Jumlah PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri menurun dari tahun 2013 sebanyak 4.095 orang menjadi 1.739 orang di tahun 2017. Malaysia menjadi negara yang paling banyak menyerap PMI asal NTT dengan total PMI sebanyak 1.478 orang. Jumlah PMI ilegal pada tahun 2016 sebanyak 443 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 510 orang. Sedangkan jumlah PMI yang meninggal tahun 2016 sebanyak 46 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 62 orang, dan pada tahun 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 104 orang. Jumlah sebaran PMI berdasarkan Negara tujuan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Sebaran PMI Asal NTT Berdasarkan Negara Tujuan
Tahun 2013-2017

No	Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malaysia	3.471	3.504	2.449	1.853	1.478
2	Singapura	430	296	184	151	124
3	Hongkong	62	30	37	22	29
4	Brunai Darussalam	6	7	15	16	93
5	Arab Saudi	5	3	-	-	-
6	Qatar	21	-	-	1	4
7	Taiwan	-	3	1	-	1



No	Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017
8	Cyprus	1	-	-	-	-
9	Oman	30	10	3	1	2
10	Kuwait	1	-	-	-	-
11	Uni Emirat Arab	67	-	1	-	2
12	Timor Leste	-	-	-	-	2
13	Kongo	1	-	-	-	-
14	Italia	-	3	-	-	-
15	Papua New Guinea	-	1	-	-	-
16	Bahrain	-	6	10	-	-
17	New Zealand	-	-	-	2	-
18	Makao	-	-	2	-	-
19	Sudan	-	-	-	-	1
20	Uzbekistan	-	-	-	-	1
21	Turki	-	-	-	-	1
19	Solomon	-	-	4	-	1
Jumlah		4.095	3.856	2.706	2.046	1.739

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.1.6. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK di Provinsi NTT sampai tahun 2018 berjumlah 8 unit, yaitu BLK Ruteng di Kabupaten Manggarai, BLK Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, BLK Kabupaten Flores Timur, BLK UKM Ende di Kabupaten Ende, BLK Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, BLK Alor di Kabupaten Alor, BLK Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya dan UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang di Kota Kupang.

2.3.1.2.1.7. Tenaga Kerja sesuai Sektor Usaha yang menjadi Unggulan

Berdasarkan sektor usaha yang menjadi unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan III tahun 2020, maka Jumlah tenaga kerja yang terserap dapat dijabarkan pada Tabel 2.70, dimana Jumlah Tenaga kerja paling banyak terdapat pada sektor usaha Perdagangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel sedangkan Jumlah tenaga kerja yang paling sedikit adalah pada Sektor Usaha Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 2.70
Jumlah Tenaga Kerja per Sektor yang menjadi Unggulan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Sektor / KLUI	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)			
		WNI	WNA	L	P
Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan	301	2.306	19	1.506	800
Pertambangan dan Penggalian	26	620	-	432	188
Industri Pengolahan	261	5.218	-	4.023	1.195

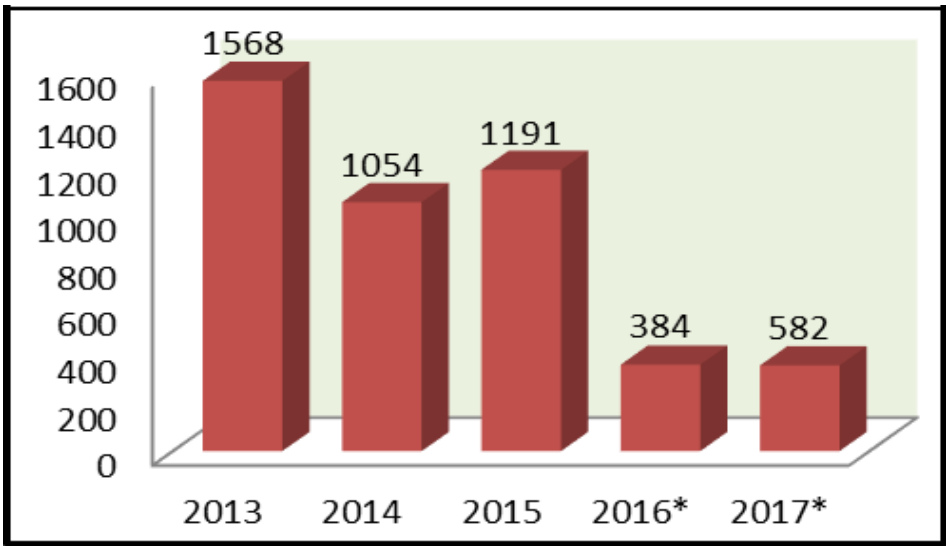


Sektor / KLUI	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)			
		WNI	WNA	L	P
Listrik, Gas dan Air	70	1.664	65	987	677
Bangunan	1.085	7.550	-	4.502	3.048
Perdagangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	3.400	51.284	26	29.904	21.380
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	196	1.608	38	820	788
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perusahaan	295	2.205	35	1.301	904
Jasa Pemasyarakatan Sosial dan Perorangan	225	1.266	88	848	418
JUMLAH	5.859	73.721	271	44.323	29.398

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, 2020

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk dengan indikator sebagai berikut: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di mana DP3A mencatat terdapat 4.542 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2013-2017; Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebesar 305; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) Perempuan yaitu sebesar 64,41% lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23%; perempuan yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 35,52% dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30% dan laki-laki sebesar 3,23 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dari 1.568 kasus di tahun 2013 menjadi 582 kasus di tahun 2017. Walaupun pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2016 sebanyak 384 kasus, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018



Gambar 2.16
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Kasus kekerasan terhadap anak NTT pada tahun 2017 mencapai 305 kasus, di mana kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada anak perempuan daripada laki- laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2017 sebanyak 282 kasus dan anak laki-laki sebanyak 21 kasus.

Tabel 2.71
Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut /Kota
Provinsi NTT Tahun 2017

NO	KAB / KOTA	GENDER		TOTAL
		L	P	
1	Kabupaten Nagekeo	0	1	1
2	Kabupaten Alor	1	5	6
3	Kabupaten Belu	1	16	17
4	Kabupaten Ende	2	10	12
5	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
6	Kabupaten Kupang	1	19	20
7	Kabupaten Lembata	3	25	28
8	Kabupaten Malaka	0	0	0
9	Kabupaten Manggarai	0	0	0
10	Kabupaten Manggarai Barat	1	9	10
11	Kabupaten Manggarai Timur	0	12	12
12	Kabupaten Ngada	1	1	3
13	Kabupaten Rote Ndao	2	21	24
14	Kabupaten Sabaraijua	0	9	9
15	Kabupaten Sikka	0	1	1
16	Kabupaten Sumba Barat	0	25	25
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	1	1
18	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0
19	Kabupaten Sumba Timur	0	4	4
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	4	18	22
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	3	67	70
22	Kota Kupang	2	40	42
TOTAL		21	282	305

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Jumlah Perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di Kabupaten Malaka 24%, TTS 20% dan Ngada 20%, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD.

Tabel 2.72
Jumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan PNS
Provinsi NTT Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Perempuan (Anggota DPRD) :					
- Provinsi	4	6	7	7	7



- Kabupaten/Kota	49	64	63	60	69
- PNS	3.958	2.546	2.746	6.885	6.782

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.3. Pangan

Data Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk konsumsi per kapita per hari di NTT mengalami penurunan dalam kelompok pangan sumber energi (nabati dan hewani) dari 3.449 tahun 2015 menjadi 3.294 tahun 2017. Penurunan juga terjadi di kelompok makanan sumber lemak dari 73,41 tahun 2015 menjadi 56,89 di tahun 2017. Sementara di kelompok sumber protein terjadi peningkatan dari 77,23 tahun 2015 menjadi 92,80 tahun 2017.

Kemampuan daya dukung dan daya tampung yang didukung berdasarkan pengembangannya sesuai peruntukan ruang, yaitu kawasan untuk usaha pertanian, perikanan, pertambangan, industri menengah dan besar, industri kecil/rumah tangga, kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan permukiman. Luas dan peran jasa ekosistem untuk penyediaan pangan di NTT menunjukkan bahwa potensi wilayah yang menopang penyediaan pangan yang berkategori tinggi sampai sangat tinggi adalah 32,98% (1.522.695 ha) dan berkategori sedang luasnya 14,09% (650.340 ha).

Dengan demikian, potensi penyediaan pangan untuk keseluruhan wilayah NTT relatif cukup besar. Kisaran persentasi potensi wilayah berdasarkan luas masing-masing Kabupaten yang berkategori sangat tinggi adalah 0,02 sampai 1,2%. Pada kategori ini, lima Kabupaten terendah dalam persentasi luasan wilayahnya dalam penyediaan pangan adalah Belu, Rote-Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Sedangkan lima Kabupaten terluas dalam kategori ini adalah Manggarai, Ngada, Flores Timur, Lembata dan Alor.

Tabel 2.73
Jumlah Cadangan Pangan Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah Cadangan Pangan	100	109,23	178,27	146,32

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.4. Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang



dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di NTT disajikan pada Tabel 2.74. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat dominan Provinsi NTT hingga tahun 2018 adalah sebesar 72,07 persen

Tabel 2.74
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1960–2018

Uraian	HGB	HGU	HM	HPL
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	6,00	4,26	72,08	2,57

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup meliputi perencanaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) untuk melihat daya dukung, daya tampung, jasa ekosistem dan risiko lingkungan bagi seluruh aktifitas pembangunan.

Daya dukung lingkungan mencakup ketersediaan air permukaan, kondisi DAS, pangan, fungsi lindung dan lahan terbangun. Daya tampung lingkungan terkait dengan kemampuan lahan, kondisi udara dan air. Sedangkan kinerja jasa ekosistem mencakup penyedia dan pengendali air, penyedia pangan, informasi kerentanan terhadap perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kearifan lokal, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati. Risiko Lingkungan mencakup kawasan rawan bencana dan persampahan.

2.3.1.2.5.1. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup didukung kawasan lindung terdiri



dari: kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Kawasan hutan lindung di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total kurang lebih 652.916 ha. Pembangunan lingkungan hidup juga didukung pada kawasan budidaya.

2.3.1.2.5.2. Kondisi Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan kualitas kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan tingkat kekritisannya. Luas lahan kritis menjadi ancaman dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Dari total lahan dalam kawasan hutan seluas 1.808.774.65 ha yang tidak kritis hanya seluas 116.983,72 ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 713.206,87 ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 2.926.215,79 ha. Kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar di 21 Kabupaten/Kota yang terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dan kawasan taman.

Tabel 2.75
Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan Provinsi NTT Tahun 2017

No	Kondisi	2017	Persentase (%)
A	Dalam Kawasan Hutan		
1	Tidak Kritis	116.983,74	7,34
2	Potensial Kritis	932.980,00	32,17
3	Agak Kritis	676.702,80	58,49
4	Kritis	75.832,75	1,18
5	Sangat Kritis	6.275,34	0,82
	Jumlah	1.808.774,64	100
B	Luar Kawasan Hutan		
1	Tidak Kritis	713.206,87	1,09
2	Potensial Kritis	304.114,51	49,31
3	Agak Kritis	1.024.667,13	16,37
4	Kritis	872.502,7	32,53
5	Sangat Kritis	11.724,58	0,71
	Jumlah	2.926.215,79	100

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.5.3. Akses Air Minum

Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Pada tahun 2017 layanan air minum 65,20%, seperti yang



terlihat pada Gambar 2.17.



Sumber : Susenas 2014-2017

Gambar 2.17
Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2017

Berkaitan dengan rumah tangga di NTT yang memiliki akses terhadap air minum layak, jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,52 poin. Akan tetapi jika dipilah menurut daerah tempat tinggal, maka perbedaan yang besar besar antara akses air layak penduduk perkotaan dan perdesaan.

Masih sekitar 40% penduduk perdesaan masih mengkonsumsi air tidak layak. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, disebutkan bahwa kondisi hingga tahun 2017, capaian akses air minum layak sebesar 60,04% dan target akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%, sehingga terdapat gap sebesar 39,96%. Daya tampung sumber air minum layak sampai dengan tahun 2017, sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen), disusul oleh sumur terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh swasta) dan sumur bor/pompa.

Tabel 2.76
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Provinsi NTT Tahun 2013-2017



Tahun	Air kemasan/ Isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya
2013	5,43	13,62	3,45	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8.42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2013-2017

Mengenai distribusi luas dan peran jasa ekosistem terhadap penyediaan air bersih berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten yang memiliki potensi jasa penyediaan air bersih dalam kategori tinggi memiliki luas lahan berkisar antara 0,01 sampai 0,5% dari luas wilayah masing-masing Kabupaten. Tiga belas Kabupaten yang memiliki persentasi luasan terkecil dalam kategori ini adalah Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sikka, Lembata, Alor, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Sementara tiga Kabupaten yang memiliki persentasi luasan tertinggi berdasarkan luas Kabupaten masing-masing adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Belu.

Secara umum, lahan yang ada di Provinsi NTT memberikan jasa pengaturan pemurnian air yang tergolong tinggi. Kabupaten yang tergolong memiliki persentase besar lahan berpotensi tinggi dalam penyediaan jasa ini adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 256.807,63 ha atau 5,56%, Kabupaten Kupang seluas 255.092,86 ha atau 5,53%, dan Ende seluas 154.900,03 ha atau 3,36% dari total lahan yang ada. Untuk lahan yang terbilang luas, tetapi berpotensi sangat rendah hingga rendah dalam penyediaan jasa pengaturan pemurnian air terdapat di Kabupaten Sumba Timur.

Luas lahan di Kabupaten ini yang berpotensi sangat rendah adalah 212.835,90 ha atau 4,61% dan yang berkategori rendah seluas 323.353,59 ha atau 7,0% total luas lahan di NTT. Kabupaten Sumba Timur memiliki banyak air permukaan yang mengalir dari Kabupaten tetangganya. Akan tetapi, vegetasi yang relatif jarang membuat air sulit untuk memurnikan diri yang menyebabkan rendahnya kualitas air di Kabupaten ini.

2.3.1.2.5.4. Daerah Aliran Sungai (DAS)



Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192 pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada, maka terdapat 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan luas 1.527.900 ha perlu dikelola secara intensif dengan memanfaatkan rencana pengelolaan DAS terpadu. Saat ini sudah terdapat 4 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yaitu RPDAST Benain, RPDAST Noelmina, RPDAST Aesesa, dan RPDAST Kambaniru.

2.3.1.2.5.5. Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dalam hal jasa pengaturan iklim, Kabupaten/Kota di NTT umumnya hanya memiliki lahan yang relatif sempit yang mampu mempengaruhi iklim secara signifikan. Tiga Kabupaten yang memiliki persentase tertinggi potensinya dalam mengatur iklim adalah berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah adalah: Kabupaten Alor (seluas 137.138,02 ha (2,97% dari total lahan di NTT), Manggarai Barat (124.451,76 ha atau 2,70%) dan Ende (119.637,20 ha atau 2,59% total lahan). Jasa pengaturan iklim berkategori tinggi terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (seluas 175.358,10 ha atau 3,80%) dan Kabupaten Kupang (156.731,75 ha atau 3,39% luas total lahan di NTT). Lahan yang didominasi oleh pegunungan berhutan lebat dan perkebunan serta sungai, bendungan dan embung-embung di kelima Kabupaten ini membuat kelimanya melampaui Kabupaten lainnya dalam hal pengaturan iklim. Dengan tutupan vegetasi yang luas membuat suhu di Kabupaten- Kabupaten ini menjadi lebih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya di NTT.

Dari segi tata air dan pengaturan banjir, tiga Kabupaten yang menyumbang lahan paling luas untuk jasa berkategori sangat baik adalah: Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 187.840,89 ha atau 4,07%, Kabupaten Kupang seluas 153.664,00 ha atau 3,33% dan Kabupaten Alor seluas 140.164,67 ha atau 3,04%. Kabupaten Kupang juga menyumbang lahan seluas 119.486,23 ha atau 2,59% untuk kategori jasa pengaturan tata air dan banjir berpotensi baik. Lahan berpotensi baik lainnya untuk tata air dan banjir terdapat juga di Kabupaten Ngada seluas 107.044,85 ha atau 2,32% dan Manggarai Timur seluas 101.154,89 ha atau 2,19%.

Sebaliknya, lahan terluas yaitu 407.747,37% atau 8,83% berpotensi jasa yang sangat rendah terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Lahan potensinya sangat rendah juga terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 123.864,85 ha atau 2,68% dan Kabupaten Sumba Tengah seluas 110.076,28 ha atau 2,38% total luas lahan di NTT.

Jasa pengaturan selanjutnya adalah pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana. Kabupaten yang memiliki persentase paling tinggi dalam menyediakan jasa pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah Kabupaten Alor seluas 107.517,34 ha atau 2,33% dan Manggarai Barat seluas 102.379,81 ha atau 2,22%. Sedangkan lahan



yang menyediakan jasa pengaturan pencegahan bencana berpotensi baik terdapat di Manggarai Timur seluas 126.379,80 ha atau 2,74% total luas lahan. Sebaliknya, Kabupaten yang jasa perlindungan bencananya berpotensi sangat rendah adalah Kabupaten Kupang seluas 459.146,80 ha atau 9,95%, Sumba Timur seluas 448.369,50 ha atau 9,71% dan di Timor Tengah Selatan seluas 333.792,19 ha atau 7,23% luas total lahan di NTT.

2.3.1.2.5.6. Kualitas Udara

Eko-region yang ada di NTT memberikan jasa pemeliharaan kualitas udara mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Meskipun demikian, luasan eko-region yang menghasilkan jasa sangat rendah dan rendah relatif besar dan tidak berbeda dengan eko-region yang menyediakan jasa tinggi hingga sangat tinggi. Lahan yang berpotensi sangat rendah hingga rendah dalam pemeliharaan kualitas udara di NTT mencapai luasan sebesar 1.708.601,05 atau sekitar 37,01% dari total lahan yang ada. Luasan ini berimbang dengan lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi yang mencapai luasan sebesar 1.714.155,15 ha atau 37,13% dari keseluruhan lahan yang terdapat di NTT.

2.3.1.2.6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi adalah ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala Provinsi. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2017 berada dalam kategori “ada”.

Tabel 2.77
Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017



Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

a. **Persentase PKK Aktif**

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.78, di mana persentase PKK Aktif tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 2.78
Persentase PKK Aktif di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

b. **Persentase Posyandu Aktif**

Persentase Posyandu aktif adalah jumlah Posyandu aktif dibagi dengan jumlah Posyandu dikalikan 100 persen. Persentase Posyandu aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.80. Persentase Posyandu Aktif menurun dari keadaan tahun 2013 sebesar 51,22% menjadi 50,78%. Hal ini menjadi masalah karena Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat.

Tabel 2.79
Persentase Posyandu Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Posyandu Aktif	51,22	50,50	57,54	57,34	50,78

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.8. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

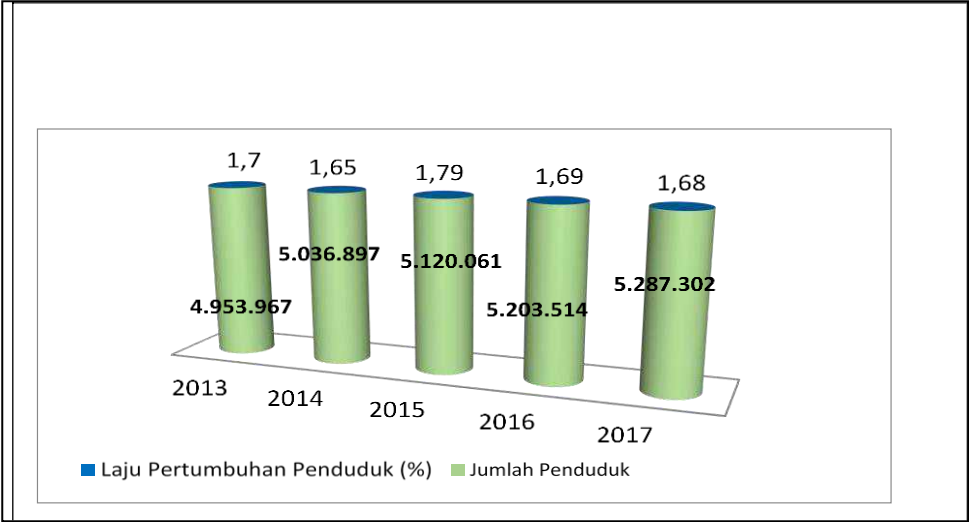
Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4Terlalu; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun).

a. **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Kondisi laju pertumbuhan penduduk fluktuatif yaitu 1,7% tahun 2013 dengan jumlah penduduk 4.953.967 jiwa sedangkan tahun 2016 tumbuh



1,69% dengan jumlah penduduk 5.203.541 jiwa.



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk
di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,68% dengan jumlah penduduk 5.237.302 jiwa atau turun 0,01% dibanding tahun 2016.

b. Cakupan Peserta KB aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Tabel 2.80
Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	60,10	45,69	52,64	57,19	32,51

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Peserta KB aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan signifikan terjadi dari tahun 2016 sebesar 57,19% menjadi 32,51% pada tahun 2017. Ini menunjukkan semakin menurunnya pemahaman dan kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB yang aktif.

c. Cakupan peserta KB Baru

Peserta KB baru (PB) adalah jumlah orang yang pertama kali



menggunakan metode kontrasepsi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan program untuk menarik PB dari segmen masyarakat yang belum memanfaatkan Program KB. Cakupan peserta KB baru Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Cakupan Peserta KB Baru Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Peserta KB Baru (%)	11,6	10,6	8,8	8,6	5,2

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Peserta KB Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2013 cakupan peserta KB baru sebesar 11,6% namun pada tahun 2017 turun menjadi hanya 5,2%. Ini menunjukkan penurunan tingkat kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB.

d. Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan pembentukan kampung KB untuk meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non-pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pencanangan Kampung KB dari tahun 2016 sebesar 25 Kampung KB, kemudian naik menjadi 320 Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pencanangan Kampung KB mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan hanya sebesar 218 Kampung KB, sehingga total Kampung KB yang telah terbentuk di Provinsi NTT sebanyak 563 Kampung KB. Jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk di Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
Jumlah Kampung KB yang Sudah Dibentuk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun Pencanangan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Sumba Barat	-	6	-	6
2	Sumba Timur	3	26	8	37
3	Kupang	1	26	12	39
4	Timor Tengah Selatan	1	15	2	18



No	Kabupaten/Kota	Tahun Pencanangan			Jumlah
		2016	2017	2018	
5	Timor Tengah Utara	-	32	9	41
6	Belu	4	12	3	19
7	Alor	-	16	5	21
8	Lembata	2	6	4	12
9	Flores Timur	1	20	2	23
10	Sikka	1	24	3	28
11	Ende	-	23	34	57
12	Ngada	2	10	5	17
13	Manggarai	-	12	10	22
14	Rote Ndao	1	21	8	30
15	Manggarai Barat	2	8	26	36
16	Sumba Tengah	1	5	5	11
17	Sumba Barat Daya	2	10	18	30
18	Nagekeo	1	7	6	14
19	Manggarai Timur	1	20	42	63
20	Sabu Raijua	1	2	11	14
21	Malaka	1	12	5	18
22	Kota Kupang	-	7	-	7
Nusa Tenggara Timur		25	320	218	563

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.9. Perhubungan

2.3.1.2.9.1. Jumlah Terminal

Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang dan barang, berdasarkan keputusan menteri perhubungan dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/Kep/HK/2010, di NTT terdapat 20 Terminal, yaitu: Terminal Type A 1 unit, Type B 15 unit dan Terminal Type C 4 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTT. Dalam tahun 2014 terjadi penambahan terminal Type A : 1 unit yaitu di Naiola–Kabupaten TTU dan Terminal Type B 1 unit di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) sehingga jumlah keseluruhan Terminal menjadi 22 unit.

2.3.1.2.9.2. Jumlah Pelabuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) di Provinsi NTT saat ini sudah memiliki 74 (tujuh puluh empat), dimana sebelumnya hanya 42 (empat puluh dua) Pelabuhan Laut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan Nasional, terjadi penambahan 32 (tiga puluh dua) pelabuhan. Berdasarkan hirarki dan fungsinya Pelabuhan Laut di NTT terdiri dari: 1 (satu) Pelabuhan



Utama, 9 (sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 64 (enam puluh empat) Pelabuhan Pengumpan (Regional & Lokal). Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu :

2.3.1.2.9.2.1. Pelabuhan Utama, dari aspek penggunaan, hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 1 (satu) Pelabuhan Utama yaitu **Pelabuhan Laut Tenau Kupang**. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar-Provinsi.

2.3.1.2.9.2.2. Pelabuhan Pengumpul, adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi. Di Provinsi NTT terdapat 9 (sembilan) pelabuhan pengumpul.

2.3.1.2.9.2.3. Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal), adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Berdasarkan hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 64 (enam puluh empat) pelabuhan pengumpan, yang terdiri dari : **Pengumpan Regional**, ada 6 (enam) yaitu Pelabuhan Kalabahi Kabupaten Alor, Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Terong/Waiwerang Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Baranusa Kabupaten Alor, Pelabuhan Marapokot Kabupaten Nagekeo dan Pelabuhan Moru Kabupaten Alor. Pelabuhan **Pengumpan Lokal** berjumlah 58 (lima puluh delapan).

Alur pelayaran sistem transportasi laut terdiri dari :

- Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang - Timor Leste, Atapupu - Timor Leste dan Kalabahi - Timor Leste;
- Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba - Maumere - Makasar- Pare Pare - Nunukan - Tarakan, Larantuka - Makasar - Batu Licin - Semarang - Tanjung Priuk - Tanjung Pinang, Ende - Waingapu - Benoa - Surabaya - Dumai - Surabaya; dan
- Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang - Ndao - Sabu - Raijua - Ende - Pulau Ende - Maumbawa - Mborong - Waingapu - Waikelo - Labuan Bajo, Kupang - Naikliu - Wini - Kalabahi - Maritaing - Lirang - Kisar - Leti, Kupang - Mananga - Lewoleba - Balauring - Baranusa - Kalabahi - Atapupu, Kupang - Mananga - Maumere - Marapokot - Reo -



Labuan Bajo – Bima, Kupang – Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua – Kupang, dan Kupang – Mananga – Maumere – Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo –Labuan Bajo – Bima.

2.3.1.2.9.3. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor serta Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat dari tahun 2013 sebanyak 439.708 unit menjadi 679.991 unit di tahun 2017 atau meningkat sebanyak 54,6%.

Tabel 2.83
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Perkembangan Jumlah Kendaraan di NTT				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	24.918	24.918	34.423	30.999	33.222
Bus/Mikro Bus	1.390	1.390	1.400	1.623	1.662
Truk/ Pick Up	21.055	21.055	30.659	28.107	31.271
Alat Berat *)	0	0	0	156	165
Sepeda Motor	392.345	439.832	507.545	561.795	613.671
Jumlah	439.708	487.195	574.027	622.680	679.991

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

*) = (Data Tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak tersedia)

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi NTT naik dari keadaan tahun 2013 sebanyak 1.109 kecelakaan menjadi 1.342 kecelakaan pada tahun 2017. Kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas sejalan dengan kenaikan jumlah korban, dimana korban mati naik dari 423 orang pada tahun 2013 menjadi 499 orang pada tahun 2017, korban luka berat naik dari 378 orang pada tahun 2013 menjadi 398 orang pada tahun 2017, dan korban luka ringan naik dari 1.182 orang di tahun 2013 menjadi 1.743 orang di tahun 2017. Data kecelakaan lalu lintas tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	1.109	982	1.104	1.338	1.342
2	Mati	423	403	349	440	499
3	Luka Berat	378	396	411	437	398
4	Luka Ringan	1.182	970	1.408	1.699	1.743

Sumber : Kepolisian Daerah NTT, 2018



2.3.1.2.9.4. Arus Kunjungan dan Penumpang

Arus kunjungan kapal laut terindikasi meningkat, hal ini seiring dengan bertambahnya unit kapal laut yang beroperasi di wilayah NTT. Namun meningkatnya arus kunjungan kapal laut tidak diikuti dengan arus penumpang naik dimana terjadi penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2017, sedangkan untuk arus penumpang turun mengalami kenaikan. Arus kunjungan kapal laut dan penumpang kapal Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Arus Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Arus Kunjungan Kapal Laut					
- Datang	29.659	14.238	1.274.787	1.687.407	39.052
- Berangkat	29.659	14.223	1.286.504	1.653.065	0
Arus Penumpang Kapal Laut					
- Naik	1.034.014	575.990	122.084	1.023.639	1.028.030
- Turun	987.503	577.232	110.483	1.091.522	1.002.119

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Sementara arus penumpang pesawat mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Hal ini mengindikasikan perubahan alat angkutan yang digunakan dalam mobilisasi antar-daerah dari penggunaan sarana angkutan kapal laut ke pesawat udara.

Tabel 2.86
Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Bandar Udara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2016 (Orang)									
	Berangkat					Datang				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Tambolaka	57.227	63 507	66.964	78.331	96.970	59.240	59.701	64.048	75.755	93.081
Umbu Mehang Kunda	42.443	49 766	55.974	77.027	79.685	43.115	48.331	56.881	76.083	77.044
Terdamu	9.424	8 322	8.837	6.631	5.487	9.413	7.547	7.660	6.024	4.872
A. A. Bere Tallo, Belu	2.52	3 109	11.146	37.936	41.321	2.396	2.842	11.425	36.773	41.668
Mali	32.937	29 044	33.401	51.197	57.789	31.281	28.120	34.150	50.804	57.482
Wunopito	9.229	11 766	12.253	13.101	13.827	9.785	11.458	11.932	12.843	13.572
Gewayantana	15.766	12 611	24.300	36.906	44.088	14.677	14.130	25.162	37.566	44.208
Frans Seda	66.684	68 190	68.548	108.988	90.837	65.204	69.327	72.464	107.493	93.264
H.H. Aroebusman	73.613	77 467	77.046	91.389	100.945	74.059	77.816	74.066	97.094	100.670
Turelelo	15.774	13 808	23.735	34.161	35.451	16.638	12.488	22.863	30.773	31.691



Bandar Udara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2016 (Orang)									
	Berangkat					Datang				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Frans Sales Lega	18.961	12 276	16.270	9.805	9.880	16.840	16.109	16.507	12.701	11.308
Lekunik	1.932	2 532	12.653	20.420	22.170	2.149	2.355	12.349	21.309	22.892
Komodo	89.154	117 692	120.437	189.755	238.287	94.733	108.303	112.851	174.404	217.922
El Tari	663.121	668 019	754.940	897.418	847.294	693.762	627.463	752.429	947.785	913.804
Jumlah	1.098.317	1.137.909	1.286.504	1.653.065	1.684.031	1.133.292	1.085.990	1.274.787	1.687.407	1.723.415

Sumber : Survei Transportasi Udara, 2018

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

2.3.1.2.10.1. Keberadaan Website Milik Pemerintah dan Jumlah Nama Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah

Dalam upaya peningkatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah Provinsi kepada masyarakat, maka diperlukan keberadaan *website* milik pemerintah Provinsi. Status keberadaan *website* milik Pemerintah Provinsi NTT dan jumlah nama domain yang dikelola pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Status Website Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
1	Website Pemprov NTT	Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara online	Masyarakat	5 terbitan (setiap tahun ditebitkan)
2	Website PPID	Penyebarluasan informasi pemerintahan berupa profil perangkat daerah, program kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah dan laporan keuangan serta informasi-informasi lain sesuai peraturan yang berlaku	Masyarakat	5 terbitan (setiap tahun diterbitkan)
3	Domain resmi pemerintah (.go.id)	Tersedianya domain website resmi khusus pemerintah sebagai media hosting	Perangkat Daerah	20 sub domain
4	Domain Resmi e- mail (.go.id)	Tersedianya domain e- mail resmi pemerintah	Perangkat Daerah	100 alamat e- mail

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018



Berdasarkan Tabel 2.87, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah adalah website Pemprov, NTT, website PPID, serta tersedia 20 sub domain milik pemerintah dan 100 alamat email dengan domain resmi. Sementara penyebaran informasi publik milik pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Penyebaran Informasi Publik Milik Pemerintah Provinsi NTT
Tahun 2013-2018

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
1	Kegiatan Pameran	Penyebarluasan informasi pembangunan dan capaian kinerja pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Masyarakat	5 kali (100 %)
2	Kegiatan Dialog Radio/TV/ Publik	Penyebarluasan informasi program/kegiatan pemerintah yang actual melalui media elektronik dan media tatap muka	Kelompok stakeholder terkait dan masyarakat	Dialog TV 5 kali Dialog Radio 10 kali Dialog publik 18 kali
3	Pemutaran Film	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan wawasan kebangsaan yang edukatif	Masyarakat Pedesaan	25 kali tersebar di 21 Kabupaten
4	Media Luar Ruang Publik	Penyebarluasan informasi program dan himbauan-himbauan yang aktual melalui media Baliho dan Spanduk	Masyarakat	50 media baliho/ spanduk
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Penyebarluasan informasi program pemerintah melalui pembentukan kelompok informasi masyarakat pedesaan melalui media online dan tradisional	Masyarakat Pedesaan	22 Kelompok dan kegiatan setiap tahun

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Penyebaran informasi publik milik pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan Pameran, Dialog Radio/TV/Publik, Pemutaran Film di desa-desa, media penyampaian informasi luar ruang publik, serta melalui kelompok informasi masyarakat. Sementara itu layanan jumlah layanan publik yang diselenggarakan dengan aplikasi melalui sistem e-government terdiri dari PPID, Free Hotspot, e- Surat, e-Absensi, e-Report, E-Jadwal dan E-Agenda.

2.3.1.2.10.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi

Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan komputer dan internet. Walau demikian,



angka ini masih relatif rendah dibandingkan Nasional. Data Susenas menunjukkan bahwa pengguna komputer di NTT tahun 2017 sebesar 12,98% dan pengguna internet sebanyak 17,88%. Padahal pengguna internet secara Nasional sudah mencapai 54,68%. Laki- laki lebih banyak menggunakan internet daripada perempuan, walaupun perbedaannya tidak signifikan.

Tabel 2.89
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	2013	2014	2015	2016	2017
Telepon dan Komputer					
Telepon	2,70	2,60	1,33	3,52	0
Telepon Seluler	69,20	72,05	36,65	37,96	40,97
Komputer	10,83	11,84	11,52	9,69	12,89
Internet					
Pria		8,25	10,98	13,61	19,44
Wanita		6,81	9,07	12,02	16,36
Jumlah		7,52	10,01	12,81	17,88

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.1.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2013 jumlah koperasi di NTT sebanyak 2.720 unit dengan jumlah koperasi yang aktif sebesar 2.408 unit atau sebesar 88,53%. Tahun 2017 persentase koperasi aktif naik menjadi 91,27% atau sebanyak 3.776 unit dari jumlah keseluruhan koperasi sebesar 4.137 unit.

Tabel 2.90
Persentase Koperasi Aktif Provinsi NTT Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
2013	2.720	2.408	88,53
2014	3.130	2.818	90,03
2015	3.707	3.394	91,56
2016	4.059	3.752	92,44
2017	4.137	3.776	91,27

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11.2. Jumlah Koperasi Unit Desa

Jumlah koperasi meningkat dari 2.720 koperasi pada tahun 2013



menjadi 4.137 di tahun 2017. Sayangnya, hanya terdapat 175 adalah Koperasi Unit Desa (4%). Sementara anggota koperasi meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama. Jumlah Koperasi Unit Desa juga hanya bertambah 7 unit dari keadaan 2013 sebesar 168 unit.

Tabel 2.91
Jumlah Koperasi Unit Desa Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1. Koperasi Unit Desa	168	171	149	109	175
2. Koperasi Lainnya	2.552	2.597	3.245	3.305	3.962
Jumlah	2.720	2.768	3.394	3.414	4.137
Total Anggota Koperasi	585.695	695.699	727.218	997.050	1.206.390

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11.3. Posisi Kredit Usaha Kecil

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) perbankan di Provinsi NTT fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2016, dimana meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2015, lalu menurun pada tahun 2016. Rincian Posisi KUK Perbankan menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT tahu 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	109.414	140.266	159.302	178.723	196.776
Sumba Timur	166.819	199.159	250.912	315.887	285.662
Kupang	118.276	153.317	282.959	358.554	250.208
TTS	99.795	146.167	192.695	183.922	222.649
TTU	154.816	184.293	199.357	252.668	258.080
Belu	256.866	312.413	371.850	448.287	395.189
Alor	87.174	109.026	148.649	197.028	199.395
Lembata	85.870	128.674	147.018	172.141	173.248
Flores Timur	151.982	202.693	246.921	265.089	259.639
Sikka	285.649	325.970	379.041	457.177	388.000
Ende	229.101	282.965	328.495	366.365	350.590
Ngada	149.083	189.759	213.234	221.728	244.543
Manggarai	279.241	373.573	444.541	428.623	368.092
Rote Ndao	20.934	42.521	85.051	125.518	85.025
Manggarai Barat	39.744	49.556	98.557	152.212	213.325
Sumba Tengah	3.004	8.376	16.942	19.907	21.420
SBD	8.962	17.238	52.751	77.125	91.367
Nagekeo	12.606	33.278	70.226	119.054	117.496



Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota				
	2012	2013	2014	2015	2016
Maggarai Timur	9.070	40.869	75.018	98.524	107.877
Sabu Raijua	-	1.873	5.578	16.068	20.128
Malaka	-	-	-	-	-
Lainnya / Others Kota / Municipality	-	-	-	-	1.432
Kota Kupang	1.028.806	1.184.524	1.465.060	1.746.060	934.966
Jumlah / Total	3.297.212	4.126.507	5.234.157	6.201.300	5.185.107

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di NTT per 30 Nopember 2018 sebanyak Rp 1,471 Triliun atau meningkat Rp.199,805 Milyar (13,58%) dari penyaluran KUR tahun 2017. Jumlah tersebut hanya sebesar 1,24% saja dari total penyaluran KUR di Indonesia (Rp.118,290,743). Namun jumlah penyaluran KUR di NTT pada tahun 2017 (Rp.1,271 Triliun) justru berkurang 5,13% dari jumlah penyaluran KUR tahun 2016 (Rp.1,340 Milyar). Total penyaluran KUR di NTT per 30 Nopember 2018, terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp.853.909 Milyar ditambah KUR Kecil sebesar Rp.616.118 Milyar dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp.1,170 Milyar. Penyaluran KUR di Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Penyaluran KUR di Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi	Keterangan
2013	NA	tidak ada data
2014	NA	tidak ada data
2015	NA	tidak ada data
2016	1.340.155.000.000	per 31 Desember 2016
2017	1.271.391.500.000	per 31 Desember 2017
2018	1.471.197.000.000	per 30 Nopember 2018

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha dengan syarat aset maksimal Rp 500 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil bersyarat aset antara Rp 50 Juta sampai Rp 500 Juta dan omzet antara Rp 300 Juta sampai Rp 2,5 Milyar.

Sedangkan usaha menengah bersyarat besar aset antara Rp 500 Juta sampai Rp 10 Milyar dan omzet sebesar Rp 2,5 Milyar sampai Rp 50 Milyar. Ketiga bentuk kewirausahaan ini merupakan indikator penting untuk menilai perkembangan ekonomi masyarakat, karena dikelola langsung oleh masyarakat dan biasanya padat karya (melibatkan banyak tenaga kerja) yang berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan. Perkembangan dan persebaran usaha mikro, kecil dan



menengah di NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Data Sebaran Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah Di NTT
Tahun 2013- 2017 (Per Desember Setiap Tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Unit Usaha Mikro	70.558	70.558	76.668	79.316	76.670
a	Asset	444.515.400	444.515.400	444.515.000	444.515.400	544.515.400
b	Omset	2.998.410.200	2.998.410.200	2.998.410.200	2.998.410.200	3.283.410.200
c	Tenaga Kerja	70.588	70.588	76.668	79.260	76.670
2	Jumlah Unit Usaha Kecil	24.936	24.936	24.936	24.936	24.947
a	Asset	1.620.800.000	1.620.800.000	1.620.800.000	1.620.800.000	2.224.800.000
b	Omset	14.213.755.000	14.213.755.000	14.213.755.000	14.213.755.000	17.083.755.000
c	Tenaga Kerja	24.936	24.936	24.936	24.936	24.947
3	Jumlah Unit Usaha Menengah	2.103	2.103	2.103	2.149	2.103
a	Asset	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000
b	Omset	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000
c	Tenaga Kerja	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.95 menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan jumlah unit usaha mikro di NTT dalam kurun waktu 2013-2017 (hanya 9%). Bahkan unit usaha kecil dan menengah relatif tidak bertambah. Tetapi dalam hal aset dan aset, ada peningkatan 22% untuk usaha mikro, dan 37% untuk usaha kecilSedangkan omzet usaha mikro meningkat 10% dan usaha kecil meningkat 20%. Walau terjadi peningkatan aset dan omzet sebagaimana dijelaskan, tetapi tidak terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan di usaha mikro (hanya 9%) dan tidak terjadi penambahan tenaga kerja di unit usaha kecil. Berdasarkan data di atas, terjadi stagnasi usaha menengah di NTT dalam kurun waktu 2013-2017, baik dalam hal jumlah unit usaha, jumlah aset, omset maupun penyerapan tenaga kerja.

2.3.1.2.12. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Tabel 2.95
Realisasi Investasi Provinsi NTT Periode Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)



Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan Tenaga Kerja Penanaman Modal					
- Proyek	9	94	8	16	97
- Tenaga Kerja	0	0	1,807	1,327	12,567
Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	47.111,78	109.130,97	1.296.677,02	505.619,50	2.538.516.04
Jumlah Realisasi Proyek PMA dan Tenaga Kerja					
- Proyek	37	93	55	45	72
- Tenaga Kerja	0	0	1,255	3,215	108
Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	155.464,12	484.145,49	991.346,97	1.641.450,53	963.451, 27

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.95 menunjukkan bahwa NTT merupakan Provinsi yang diminati oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri yang terlihat dari meningkatnya besaran proyek, tenaga kerja maupun nilai investasi. Hal ini menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTT dalam prospek pengembangan ekonomi di masa depan.

2.3.1.2.13. **Kepemudaan dan Olahraga**

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan olahraga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan dan pengaderan anggota secara berkesimbangan yaitu PMKRI, GMKI GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, Karang Taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan ditangani semakin profesional dengan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Tabel 2.96
Data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan	12	47	82	117	152
Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina	3	7	11	15	19
Jumah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina	11	15	19	23	27
Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina	56	2	5	5	5

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018



Dari Tabel 2.96 di atas terlihat bahwa jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan mengalami kenaikan yang berarti dari tahun 2013 sebesar 12 orang menjadi 152 orang pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan keberhasilan pembinaan atlet. Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina dari 3 organisasi pada tahun 2013 menjadi 19 organisasi pada tahun 2017, dan jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina dari 11 organisasi pada tahun 2013 menjadi 27 organisasi pada tahun 2017. Sedangkan jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina turun dari 56 organisasi di tahun 2013 menjadi 5 organisasi saja di tahun 2017. Hal ini menunjukkan fokus pembinaan organisasi pada lima tahun terakhir yang lebih pada organisasi lingkungan dan ekonomi daripada organisasi sosial.

Tabel 2.97
Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017

No	Indikator	Capaian 2017
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	41 organisasi
2	Jumlah wisaswasta aktif	875 orang
3	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 cabor
4	Jumlah atlet bersertifikat	750 atlet
5	Jumlah pelatih bersertifikat	333 atlet
6	Jumlah atlet berprestasi	180 atlet
7	Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan	324 medali
8	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	4.299 lapangan
9	Jumlah pemuda NTT Yang masih menganggur	78.548 pemuda

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif sampai saat ini berjumlah 41 Organisasi Kepemudaan, Persentase wirausaha yang aktif sebanyak 875 orang, cakupan pembinaan olahraga dari 40 Cabang Olahraga dan 5 Cabang Prioritas, ada 6 Cabang olahraga yang menjadi binaan yaitu Kempo, Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencak silat, Karate. Jumlah atlet yang bersertifikat sebanyak 750 atlet dengan jumlah atlet berprestasi 180 atlet, sedangkan Jumlah Pelatih yang bersertifikat 333 Pelatih. Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan (Cabang Kempo, Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencak Silat dan Karate) di kejuaraan nasional dan internasional adalah 291 medali dengan rincian 121 medali emas, 82 medali perak, 88 medali perunggu. Jumlah pemuda NTT yang masih menganggur sebanyak 78.548 Pemuda. Sedangkan untuk sarana dan prasarana olahraga, jumlah gedung olahraga sebanyak 27 gedung terdiri dari 5 buah GOR, 3 buah gedung serba guna dan 19 buah stadion. Sedangkan jumlah lapangan olahraga di Desa berjumlah 4.299



lapangan olahraga, terdiri dari 1.477 lapangan sepakbola, 2.139 lapangan bola voli, 282 lapangan bulutangkis, 78 lapangan bola basket, 279 lapangan tenis meja dan 44 lapangan futsal.

2.3.1.2.14. Statistik

Dalam penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan pemerintah, diperlukan data yang akurat agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen berupa “Provinsi Dalam Angka” dan Buku “PDRB Provinsi” mutlak dibutuhkan. Kedua dokumen tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.98
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Sementara itu sampai dengan tahun 2018 belum ada rekomendasi pelaksanaan survei yang dikeluarkan oleh BPS, padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, setiap survei yang ingin dilaksanakan oleh pihak lain harus meminta rekomendasi oleh BPS.

2.3.1.2.15. Persandian

Penetration Test untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut sehingga relatif aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini baru 3 (tiga) aplikasi yang sudah dilakukan *penetration test*, yaitu SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Server dan Email nttprov.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika, SIPD di Bappelitbangda. Data tentang alat dan kondisi alat pengamanan informasi yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.99
Data Alat Dan Kondisi Alat Pengamanan Informasi
Milik Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Jammer	1	Belum digunakan
2	Counter Surveilans	1	Belum digunakan
3	Email Sanapati	1	Baik



Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi NTT belum berjalan maksimal, karena alat pengamanan informasi belum digunakan. Selain itu dari tahun 2013-2017 hanya 2 (dua) orang SDM yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai persandian.

2.3.1.2.16. Kebudayaan

Sebagai Provinsi kepulauan, NTT mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. Untuk menjamin kelestariannya, maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayaan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra. Pembangunan kebudayaan juga mendukung peningkatan pariwisata budaya melalui pengembangan desa adat, desa budaya dan kekuatan kultur organisasi.

Tabel 2.100
Jenis Sarana Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2017

No	Jenis	Jumlah
1	Cagar Budaya	2
2	Desa Adat	25
3	Museum	4
4	Rumah Budaya Nusantara	5
5	Sanggar dan Komunitas	25
6	Warisan Budaya Tak Benda	20
Jumlah		81

Sumber : Ditjen Kebudayaan, 2017

Jumlah sarana kebudayaan Provinsi NTT sampai tahun 2017 sebanyak 81 sarana, dimana jumlah terbanyak adalah desa adat dan juga sanggar dan komunitas yang berjumlah masing-masing 25 unit.

Tabel 2.101
Persentase Obyek Budaya Provinsi NTT yang Tertangani Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase obyek budaya yang tertangani	55	71	71	100	48,67

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase obyek budaya yang ditangani cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 55% menjadi 48,67% di tahun 2017. Walaupun di tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan.



2.3.1.2.17. Perpustakaan

2.3.1.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Provinsi NTT pada Tahun 2013 sebanyak 248.013 orang, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi 48.086 orang. Pengunjung perpustakaan di Provinsi NTT dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTT
Tahun 2012-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	248.013	12.440	32.916	38.585	48.086

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Sedangkan jumlah koleksi perpustakaan, data tenaga pustakawan, data tenaga teknis fungsional umum dan data tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Jumlah Koleksi Perpustakaan, Data Tenaga Pustakawan, Data Tenaga Teknis Fungsional Umum Dan Data Tenaga Penilai Angka Kredit yang Memiliki Sertifikat Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah koleksi buku perpustakaan	6.009 judul/ 14.088 eksemplar
2	Jumlah tenaga pustakawan	13 orang
3	Jumlah tenaga teknis fungsional umum	46 orang
4	Jumlah tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat	4 orang

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT sampai tahun 2018 sebanyak 6.009 judul dengan jumlah keseluruhan 14.088 eksemplar, dengan jumlah tenaga pustakawan sebanyak 13 orang. Jumlah tenaga teknis fungsional umum yang membantu mengelola perpustakaan sebanyak 46 orang, sedangkan tersedia 4 orang tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat. Secara umum keadaan perpustakaan di Provinsi NTT Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
Keadaan Perpustakaan Di Nusa Tenggara Timur s/d 2018

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Umum	21



2	Khusus	630
3	Sekolah	6.693
a.	SD/MI	4.819
b.	SMP/MTS	1.320
c.	SMA/SMK/MA	554
7	Perguruan Tinggi	40
8	Desa/Kelurahan	1.083
9	Rumah Ibadah	1.763
10	Taman Bacaan Masyarakat	224
11	Puskesmas	10
Jumlah		10.395

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah perpustakaan di NTT sampai tahun 2018 berjumlah 10.395 buah, dimana sebagian besar terdapat di sekolah-sekolah dengan jumlah 6.693, sedangkan sisanya terdapat di rumah ibadah, desa/kelurahan, serta fasilitas sosial lainnya.

2.3.1.2.18. Kearsipan

Aspek pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan pengelolaan SDM arsip. Untuk mewujudkan tatakelola arsip, maka telah dilaksanakan empat kegiatan utama sebagai dasar program, yaitu perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, peningkatan kualitas pelayanan informasi, pembinaan dan pengembangan aparatur. Jumlah tenaga fungsional kearsipan (arsiparis) yang ada di NTT sampai tahun 2018 adalah sebanyak 168 orang, di mana 50 orang berstatus pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan 118 orang berstatus pegawai Pemerintah Provinsi NTT. Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018

Uraian	Perangkat Daerah	Memenuhi Standar Baku Kearsipan	Belum Memenuhi Standar Baku Kearsipan
JUMLAH	49	23	26
%	100	46,9	53,1

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.106 terlihat bahwa walaupun memiliki 118 arsiparis namun pengelolaan kearsipan lingkup Pemerintah Provinsi NTT belum baik, terbukti dari rendahnya persentase perangkat daerah Provinsi NTT yang memenuhi standar baku kearsipan sebesar 46,9%. Hal ini



membuktikan tenaga arsiparis belum tersebar di Perangkat Daerah Provinsi NTT secara merata menyebabkan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah belum berjalan opimal. Padahal tertib penyelenggaraan kearsipan merupakan bagian penilaian dari indeks reformasi birokrasi.

Peningkatan kapasitas SDM kearsipan bagi pengelola di Provinsi NTT dari tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.106
Data Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2014-2018

Tahun	No	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Jumlah
2018	1	Bimtek aparaturng pengelola JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD di Provinsi NTT	25 orang
	2	Bimtek pengawasan kearsipan bagi arsiparis/pengelola arsip pada perangkat Daerah	50 orang
2017	1	Diklat penyusutan arsip	1 orang
	2	Bimtek pengelolaan arsip elektronik/SIKD bagi aparaturng pengelola arsip di Provinsi NTT	25 orang
2016	1	Diklat pengelolaan arsip inaktif	1 orang
	2	Bimtek kearsipan bagi Sekdes/Seklur di 2 Kabupaten	70 orang
2015	1	Diklat program arsip vital	1 orang
	2	Diklat penyusunan jadwal retensi arsip	1 orang
	3	Diklat pengangkatan arsiparis ahli	1 orang
	4	Diklat pengelolaan arsip dinamis	1 orang
	5	Diklat layanan informasi kearsipan	2 orang
	6	Diklat pengelolaan arsip berbasis TIK	1 orang
2014	1	Diklat teknik akuisisi bagi arsiparis / pengelola arsip di lembaga kearsipan sedaratan flores, lembata dan alor	30 orang
	2	Bimtek arsip masuk desa	65 orang
TOTAL			274 orang

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Menurut Tabel 2.106, dari tahun 2014 sampai 2018 sudah 274 orang tenaga pengarsipan di Provinsi NTT yang ditingkatkan kapasitasnya melalui arsip melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Peningkatan kapasitas tenaga dilaksanakan dengan sasaran tenaga pengarsipan itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan



kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan. Sektor Perikanan turut berkontribusi pada PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK yang terus meningkat dalam periode 2013 sampai 2017. Dalam tahun 2017, kontribusi sektor ini pada PDRB- ADHB sebesar 5,01% dan PDRB-ADHK sebesar 5,37%.

Potensi budidaya lainnya yang potensial yaitu rumput laut yang telah menjadi sumber utama ekonomi pada beberapa wilayah. Produksi Rumput Laut tahun 2013 mencapai 1.802.090 ton dan 1.836.847 ton tahun 2016 dengan sentral produksi terbesar Kabupaten Kupang yang mencapai 1.342.582 ton dan kontribusi produksi Kabupaten lainnya yaitu Alor, Flores Timur, Rore Ndao dan Sabu Raijua.

Panjang garis pantai di seluruh wilayah Provinsi NTT adalah 5.700 Km dengan jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 Juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya.

Tabel 2.107
Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Laut dan Kontribusi terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan- Miliar/Persen) di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Perikanan Laut		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan Laut	Ton	127.156	108.009	118.292	175.992	179.296
Rumah Tangga Perikanan Budidaya	-	37.009	38.931	38.443	37.267	0*
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.805.184	1,971,792	2,062,164	1,841,882	0*
PDRB Menurut Lapangan Usaha						
Sektor Perikanan (PDRB- ADHB)	Milyar	2.747,7	3.235,0	3.628,4	4.091,1	4.569,3
	%	4,48	4,72	4,77	4,87	5,01
Sektor Perikanan (PDRB- ADHK)	Milyar	2.344,6	2.518,2	2.643,8	2.794,7	2.944,9
	%	4,06	7,41	4,99	5,71	5,37

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018
* (Data tahun 2017 Tidak Tersedia)



Potensi lestari perikanan tangkap sebesar ± 491.700 ton/tahun, tangkapan yang diperbolehkan sebanyak ±393.360 ton/thn, produksi tahun 2016 sebesar 123.765 (31, 5%). Luas lahan budidaya air tawar di NTT adalah 51,870 Ha dan pemanfaatannya berupa kolam ikan lele, karper dan nila seluas 570 Ha/1,1% (Data tahun 2016). Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya laut dengan luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha dengan pemanfaatan budidaya rumput laut dan kerapu seluas 11.245 Ha/20,92%. (Data Tahun 2016).

Terdapat 5 (lima) Kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi NTT adalah Kabupaten Kupang, Alor, Rote Ndao, Flores Timur dan Sumba Timur. Produksi Rumput Laut paling tinggi dihasilkan dari Kabupaten Kupang, dengan produksi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 produksi rumput laut mencapai 1.548.467 ton, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1. 342.582 ton.

Tabel 2.108
Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	199,46	59,95	160	154,7
Sumba Timur	18.773,29	19.648	21.546,5	21.546,5
Kupang	1.305.333,3	1.431.933,3	1.548.467	1.342.582
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-	-
Belu	255,6	-	-	-
Alor	86.138,67	197.464,53	161.347,6	161.347,6
Lembata	6.418,67	4.735,07	7.375	7.375
Flores Timur	70.846,13	84.738,32	92.849,01	124.526,06
Sikka	264	16	20	20
Ende	84	38,99	25,9	25,76
Ngada	2.599,05	283,46	35	35
Manggarai	452,87	2.219,94	32,41	681,15
Rote Ndao	111.213,33	145.840,83	145.840	128.595,13
Manggarai Barat	63,47	157,65	183,88	185,79
Sumba Tengah	276	236,29	96,19	76,47
Sumba Barat Daya	62.390,53	3.744,83	280,04	160,37
Nagekeo	87,38	-	9,87	9,87
Manggarai Timur	1.894,55	2.006,96	2.311,39	1.311,2
Sabu Raijua	134.800	74.720,55	75.571,72	48.214,49
Malaka	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1.802.090,3	1.967.844,7	2.056.151,5	1.836.847,1

Sumber : Statistik Perikanan, 2017

Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya air payau, dengan luas



lahan budidaya air payau 35.455 Ha dan pemanfaatan untuk budidaya bandeng, dan udang seluas 1.356 Ha/3,82 %. Teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Berdasarkan data series dari tahun 2012-2016, mayoritas rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha mayoritas menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2016.

Tabel 2.109
Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha
Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016
Tanpa Perahu	7.609	7.937	4.828	4.828
Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016
Perahu Tanpa Motor	17.738	16.290	13.302	13.302
Motor Tempel	5.483	5.941	5.516	6.734
Kapal Motor	6.585	6.682	7.115	7.283
<5 GT	4.744	4.719	4.291	4.458
5 GT ke atas	1.841	1.963	2.824	2.825
Jumlah	37.415	36.850	30.761	32.147

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.110
Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/tahun				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Kota Kupang	Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima	5	0.5	-	60	-	-	5	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran (tidak ada tidak lanjut pendampingan dari Pemda Kota Kupang)
Kabupaten Kupang	Desa Oeteta Kec. Sulamu	30	25	40	40	60	60	30	25	Tambak Garam Rakyat
	Desa Buipolo Kec. Sulamu	500	400	40	40	60	60	500	400	Tambak Garam Rakyat
	Desa Merdeka Kec. Sulamu	1,000	100	40	40	60	60	1,000	100	Tambak Garam Rakyat
	Desa Nunkurus dan Desa Oebelo	2,720	-	-	-	-	-	2,720	-	



Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/tahun				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Timor Tengah Selatan	Desa Toineke Kec. Kualin	50	1	40	80	120	120	50	1	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Timor Tengah Utara	Desa Oesoko Kec. Insana	500	2	40	80	120	120	500	2	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Belu	Wewiku	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Tasifeto Timur	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Malaka	Betun	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	Tambak Garam Rakyat
Lembata	Ileape	15	2	40	40	40	40	15	2	Tambak Garam Rakyat
	Lebatukan	5	4	40	40	40	100	5	4	sebelum tahun 2016 masih menggunakan tambak tanah. 2016 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Alor	Pantar Tengah	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Alor Besar Alor Barat laut	1	0.5	40	60	130	130	1	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Flores Timur	Desa Pledo Kec. Witihama	10	0.5	80	-	-	-	10	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
	Desa Kolidateng	2	1	40	-			2	1	Tambak Garam Rakyat
Sikka	Desa Nangahale Kec. Talibura	4	0.5	70	84	100	100	4	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Ende	Desa Wewaria	500	100	40	40	40	40	500	100	Tambak Garam Rakyat
Ngada	Kaburea	100	10	40	40	40	40	100	10	Tambak Garam Rakyat
	Desa Waekoka, Kec. Aesesa	1,000	5	40	40	40	40	1,000	5	Tambak Garam Rakyat (Tanah Pemda)
	Desa Totumala, Kec. Mbay	100	50	40	40	40	40	100	50	Tambak Garam Rakyat



Kab/ Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/tahun				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Nagekeo	Desa Anapoli, Kec. Wolowae	100	-	-	-	-	-	100	-	
	Desa Totonala, Kaburea - Kec. Wolowae	200	-	-	-	-	-	200	-	
Manggarai Timur	Desa Reo	5	3	40	40	40	40	5	3	Tambak Garam Rakyat
Sumba Timur	Pandawai	4	4	40	40	40	40	4	4	Tambak Garam Rakyat
	Umalolu	2	1	40	40	40	40	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Haharu	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Kayuri, Kec. Umalulu	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-
Sumba Barat Daya	Laura	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Sumba Tengah	Mamboro	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Katikutana Selatan	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
Sabu Raijua	Lokasi Menyebar Di seluruh Kec.		121	40	1000	1800	9000		121	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Rote Ndao	Rote Tengah	5	1	40	10	10	10	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Rote Timur	30	1	40	10	10	10	30	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Daudolu Kec. Rote Barat Laut	3	3	40	10	10	10	3	3	Tambak Garam Rakyat
	Desa Netenanen Kec. Rote Barat Laut	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Kec. Lobalain	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Oenggae Desa Tungganamo Kec. Pante Baru	2	2	60	80	100	100	2	2	Tambak Garam Teknologi Geomembran
	Desa Seru Beba Kec. Rote Timur	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Faifua Kec. Rote Timur		1	40	10	10	10		1	Tambak Garam Rakyat

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.2.2. Pariwisata



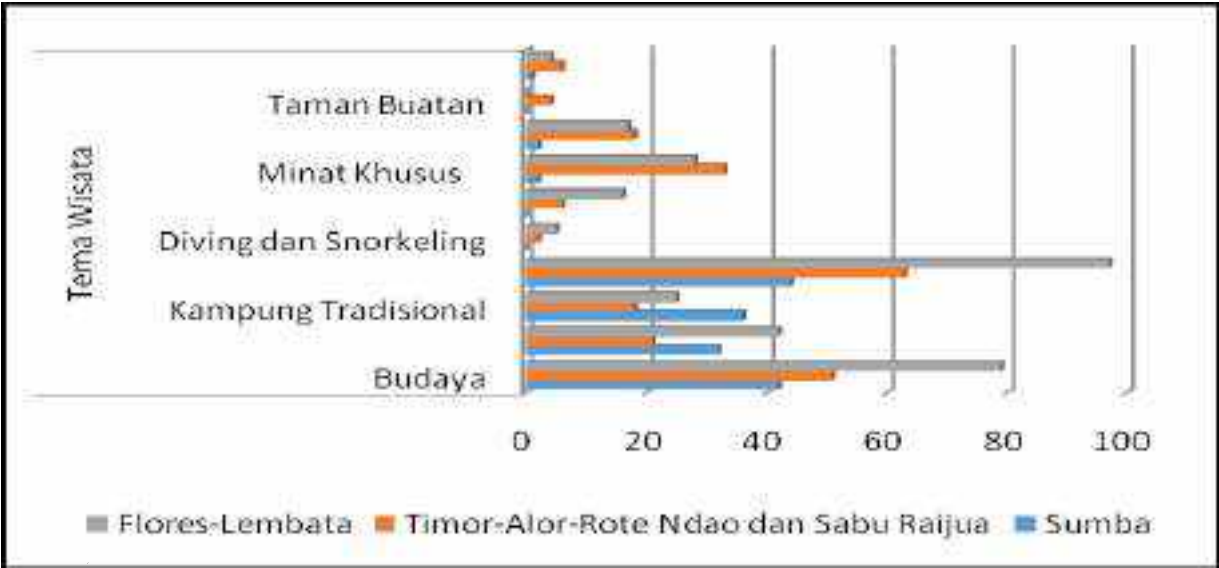
Pariwisata merupakan masa depan ekonomi NTT, karena mempunyai *multiplier-effect* yang banyak. NTT merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dan Labuan Bajo sebagai salah satu KPSN dari 10 yang ada secara nasional. Pariwisata mengalami perkembangan cukup pesat dengan selama periode 2013-2017 seperti pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111
Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Manca Negara	45.107	65.939	66.860	65.499	93.455
Domestik	318.658	331.604	374.456	430.582	523.083
Total	363.765	397.543	441.316	496.081	616.538
Rata-Rata Lama Menginap					
Tamu Asing	2,19	1,99	2,26	2,23	2,15
Tamu Domestik	1,79	1,95	1,84	1,85	1,86
Tingkat Penghunian Kamar					
Hotel Bintang	39,48	47,29	45,98	51,48	54,56
Hotel Non Bintang	19,65	18,55	18,82	19,63	22,20

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan disertai dengan pilihan yang bervariasi sesuai dengan potensi wisata yang ada di seluruh wilayah. Perkembangan berdasarkan minat wisatawan seperti pada Gambar 2.17.



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 2018

Gambar 2. 17
Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata sesuai Wilayah di NTT

Sesuai dengan pengembangan *The Ring of Beauty* pariwisata NTT,



yaitu Wilayah Pulau-Pulau Timor-Sumba dan Flores menunjukkan variasi minat wisatawan. Berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa pariwisata alam dan budaya pada wilayah Lembata-Flores, Timor dan Sumba mendapat kunjungan wisatawan tertinggi. Kunjungan wisatawan lainnya yang diminati, yaitu pantai dan kampung tradisional.

Meningkatnya kunjungan wisatawan mendukung peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan makan-minum pada perekonomian daerah. Perkembangan kontribusi yang dicapai pada Tahun 2013-2017 seperti pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penyediaan Akomodasi dan Makan- Minum (ADHB)	Milyar	367,8	422,4	487,1	586,1	675,9
	%	0,60	0,62	0,64	0,70	0,70
- Penyediaan Akomodasi (ADHB -Milyar)	Milyar	188,6	213,8	246,5	312,8	375,1
	%	0,31	0,31	0,32	0,37	0,41
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHB-Milyar)	Milyar	179,2	208,7	240,6	273,3	300,9
	%	0,29	0,30	0,32	0,33	0,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan- Minum (ADHK)	Milyar	299,6	318,3	337,9	386,8	439,3
	%	7,34	6,25	6,17	14,46	13,59
- Penyediaan Akomodasi (ADHK -Milyar)	Milyar	155,9	164,9	174,4	210,7	249,3
	%	6,97	5,78	5,78	20,81	18,31
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHK-Milyar)	Milyar	143,7	153,4	163,5	176,1	190,0
	%	7,76	6,77	6,59	7,69	7,93

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan perkembangan kontribusi pada PDRB menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi dan makan-minum berdasarkan ADHB meningkat perannya dari 0,60% menjadi 0,70% tahun 2017. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan perkembangan yaitu 7,34% menjadi 13,59%.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas dan *awarenenss* serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan yang menantang memberi sensasi.

NTT sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang



pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi NTT. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun dari wisatawan manca negara (turis asing).

2.3.2.3. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu urusan penting terkait dengan perannya dalam pembinaan petani yang jumlahnya mencapai 59% lebih dari seluruh angkatan kerja yang bekerja. Pertanian juga merupakan penyumbang terbesar pada PDRB Nusa Tenggara Timur yang mencapai 28,72%. Perkembangan kontribusi PDRB-ADHB sektor pertanian dan sub sektornya seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.113
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sektor Pertanian dan Kehutanan (ADHB)	Milyar	18.272,8	20.456,3	22.752,4	24.316,9	26.183,6
		%	29,80	29,86	29,89	28,97	28,72
2.	Sektor Pertanian, Peternakan, dan Jasa Peternakan	Milyar	15.437,1	17.120,5	19.009,8	20.103,7	21.485,5
		%	25,17	24,99	24,97	23,95	23,57
3.	Sektor Kehutanan	Milyar	88,1	100,8	114,3	122,1	128,9
		%	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB menunjukkan penurunan yaitu 29,80% tahun 2013 menjadi 28,72% atau menurun sebesar 1,08%.

A. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun 2017 menunjukkan peningkatan luas tanam (ha), luas panen (ha) dan produksi (ton) jagung dalam periode 2013-2017. Tetapi terjadi penurunan produktivitas (ton/ha) dari 2,62 ton/ha tahun 2013 menjadi 2,59 ton/ha tahun 2017 atau menurun sebanyak 0.26 persen.



Kecenderungan yang sama juga terjadi pada tanaman padi. Walau dalam kurun waktu 2013-2017 luas tanam (ha) meningkat 9,09%, luas panen meningkat 4,12% dan produksi meningkat 3,86%, tetapi produktivitas (ton/ha) menurun 0,26%. Luas lahan sawah dengan irigasi di NTT meningkat dari 119.413 ha tahun 2013 menjadi 122.746 ha tahun 2017. Kabupaten dengan lahan sawah beririgasi terluas tahun 2017 adalah Sumba Timur (15.209 ha) dan Manggarai Barat (11.559 ha). Sedangkan lahan sawah beririgasi terkecil pada tahun yang sama ada di Kabupaten Lembata (74 ha) dan Kota Kupang (205 ha).

Luas sawah non-irigasi di NTT juga meningkat dari 80.878 ha (tahun 2013) menjadi 93.049 ha (tahun 2017). Kabupaten dengan sawah non-irigasi terluas tahun 2017 adalah Kabupaten Kupang (16.896 ha) dan Kabupaten Rote Ndao (14.785 ha). Sedangkan yang tersempit ada di Kabupaten Lembata (8 ha) dan Kota Kupang (197 ha).

Berdasarkan kemampuan produksi, ada lima Kabupaten mampu memenuhi kebutuhan sendiri, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo dan Rote Ndao. Berdasarkan kemampuan produksi yang mencapai lebih dari 500.000 ton masih dibutuhkan 200.000 ton lebih dengan asumsi konsumsi per kapita sebanyak 112 kg/kapita per tahun.

B. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor ke luar negeri. Produksi perkebunan yang menonjol yaitu kelapa 68.347 ton, kopi 22.228 ton, kakao 19.096 ton, vanili 463 ton dan pinang 4.984 ton.

C. Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang menonjol pada tahun 2013- 2017 sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.114
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi	823.134	865.731	899.577	984.551	1.285.360
Kerbau	133.786	134.457	141.075	156.927	174.875
Kuda	111.047	112.948	111.047	112.557	149.523
Kambing	592.365	677.012	626.431	637.969	2.018.130
Domba	63.877		65.421	66.884	321.667
Babi	1.739.481	1.755.058	1.812.449	1.845.408	3.464.686



Ayam Kampung	10.681.149	10.766.948	10.585.385	10.662.627	11.093.152
Ayam Ras	770.095	931.746	551.299	5.039.677	5.574.589
- Pedaging	590.45		350.537	4.838.166	5.540.704
- Petelur	179.645		200.762	201.511	33.885
Itik	302.096	315.417	322.923	344.942	203.03

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Perkembangan populasi ternak menunjukkan perkembangan yang positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi (1.854.408) diikuti Sapi (984.508) Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan NTT sebagai pendukung swasembada daging.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 54 RPH Pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Jumlah ternak yang dipotong tahun 2016 adalah babi sebesar 158.459 ekor dan sapi sebanyak 69.121 ekor per tahun. Khusus untuk ternak sapi menunjukkan perkembangan pemotongan dan pengiriman yang meningkat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan (%)
Populasi Sapi (ekor)	865.731	899.534	984.508	1.003.752	3,83
Kuota	62.605	57.536	66.150	70.800	3,48
Realisasi	49.568	52.811	63.429	66.574	7,90
Pemotongan	77.709	81.991	82.944	83.212	1,75
Konsumsi Lokal (ekor)	77.709	81.991	82.944	83.212	1,75
Antar Pulau (ekor)	49.614	52.811	63.429	66.574	7,88
Jumlah Dimanfaatkan	127.323	134.802	146.373	149.786	4,20

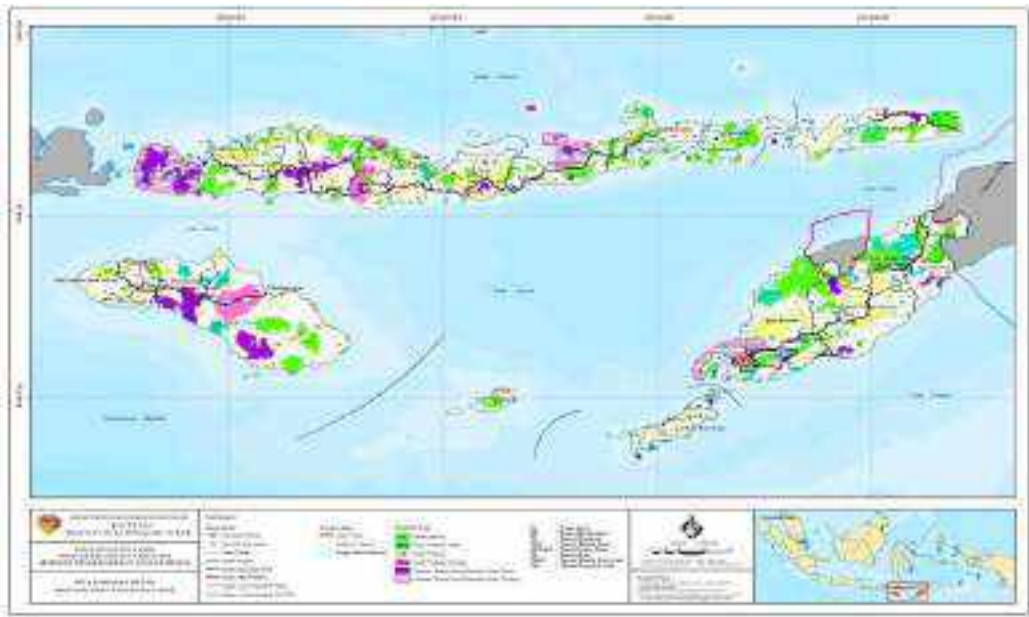
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Populasi ternak sapi pada tahun 2014 mencapai 856.731 ekor menjadi 1.00.752 ekor atau tumbuh 3,83%. Ternak sapi menjadi potensi utama mendukung perdagangan dan untuk memenuhi potensi pasar dalam negeri.



2.3.2.4. Kehutanan

Laju deforestasi di NTT cukup tinggi. Menurut Statistik Kehutanan, pada tahun 2014-2015 terjadi deforestasi sebesar 13.932 ha, dimana 2.835 ha adalah hutan tetap. Sektor kehutanan sendiri bukanlah sektor yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2017, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB hanya 0,14% yang diperoleh dari penjualan kayu, menurun 0,01 persen dari tahun 2014. Padahal, dari segi pelestarian air dan lingkungan, hutan adalah faktor penting.



Gambar 2.18
Sebaran Tutupan Hutan Provinsi NTT Tahun 2015

2.3.2.5. Energi Dan Sumber Daya Mineral
A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sumber penerangan rumah tangga terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, Listrik non PLN dan bukan listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.116
Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Provinsi NTT
Tahun 2013-2017



Sumber Penerangan Utama	NTT Tahun					Indonesia
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Listrik PLN	59,85	65,47	64,11	64,96	66,02	95,99
Listrik Non PLN	10,82	8,73	9,79	7,18	11,34	2,15
Bukan Listrik	29,33	25,80	26,09	27,86	22,64	1,86

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.116, terlihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dari 59,85% pada tahun 2013 menjadi 66,02% pada tahun 2017. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN dari 10,82% di tahun 2013 menjadi 11,34% pada tahun 2017, sehingga persentase rumah tangga yang sumber penerangan utama bukan listrik turun menjadi 22,64% di tahun 2017 dari keadaan tahun 2013 sebesar 29,33%.

Jika dibandingkan dengan angka nasional di mana persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 95,99% dan Listrik non PLN sebesar 2,15% dan bukan listrik sebesar 1,86%, maka dapat dikatakan kondisi NTT masih jauh dari harapan. Data terakhir dari kementerian ESDM bahwa rasio elektrifikasi (RE) Provinsi NTT sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terendah se-Indonesia, yakni sebesar 60,38%.

Tabel 2.117
Kapasitas Listrik di Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (Mega Watt)	158,69	160,54	272,8	297,25	337,73
Tenaga Listrik yang (GWh)	643,87	717,66	730,93	820,2	908,97
Listrik yang Didistribusikan (GWh)	567,32	639,57	702,26	749,76	829,59

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi NTT mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 158.69 MW menjadi 337.73 MW pada tahun 2016. Tenaga listrik yang dibangkitkan pada tahun 2012 sebesar 643.87 GWh mengalami peningkatan menjadi 908.97 GWh pada Tahun 2016. Sedangkan Listrik yang didistribusikan pada Tahun 2012 sebesar 567.32 GWh juga mengalami peningkatan menjadi 829.59 GWh.

B. Jumlah Usaha Pertambangan

Jumlah usaha pertambangan di Provinsi NTT meningkat 68 unit, dari 253 unit di tahun 2015 menjadi 321 unit di tahun 2017. Peningkatan tertinggi usaha pertambangan ada di Kabupaten Kupang yang meningkat 40



usaha dan Manggarai Barat yang bertambah 14 usaha pertambangan.

Tabel 2.118
Jumlah Usaha Pertambangan per Kabupaten/Kota
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan		
	2015	2016	2017
Sumba Barat	1	1	1
Sumba Timur	2	1	1
Kupang	36	58	76
Timor Tengah Selatan	74	74	75
Timor Tengah Utara	43	45	45
Belu	35	35	36
Alor	4	6	7
Lembata	0	1	1
Flores Timur	0	1	3
Sikka	0	2	2
Ende	6	9	9
Ngada	4	5	5
Manggarai	13	14	13
Rote Ndao	11	9	9
Manggarai Barat	1	1	15
Sumba Tengah	1	1	1
Sumba Barat Daya	2	2	2
Nagekeo	2	2	2
Manggarai Timur	3	7	4
Sabu Raijua	2	2	2
Malaka	10	10	10
Kota Kupang	3	3	2
Nusa Tenggara Timur	253	289	321

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3.2.6. Perdagangan

Kegiatan perdagangan NTT didukung perdagangan Dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor.

Tabel 2.119
Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2013-2017 (Juta US \$ / Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nusa Tenggara Timur					
- Ekspor	21,24	20,79	23.94	33.15	22,68
- Impor	27,06	31,92	7.87	29.09	73,71
- Selisih	- 5,82	- 11,13	16.07	4.06	-51,02
- PDRB (ADHB)	1.196.29	1.383,71	1.834,22	1.776,70	2.282,87
Miliar					
- Net Ekspor	(27.025,	(32543,1	(38.889,0	(42.425,	(46.100,
Antar Daerah	56)	4)	4)	10)	56)
(ADHB)					
Miliar					
Indonesia					



- Ekspor	182.552	176.292	150.366	145.186	168.828
- Impor	186.629	178.178	142.695	135.653	156.986
- Selisih	- 4.077	- 1.886	7.672	9.533	11.843

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB NTT Tahun 2017, terbesar adalah dari perdagangan besar dan eceran reparasi mobil serta sepeda motor yang menyumbang 11,05% PDRB.

Secara nominal, kontribusi sektor ini meningkat stabil dalam Periode 2013-2017.

2.3.2.7. Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu: Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3,44%), Industri Anyaman 344 Desa (11,60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9,74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33,68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18,88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%).

Pengembangan Industri menengah dan besar di Provinsi NTT di pusatkan pada Kawasan Industri Bolok atau disingkat KIB ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 1997 yang kemudian disahkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1998. Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 16 tahun 1998 dibentuklah organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok.

Lahan yang berada dalam Kawasan Industri Bolok yakni 900,1750 ha yang terdiri dari 4 hamparan. Hamparan I seluas 203 Ha dan siap untuk disewa kepada investor karena sudah *clear and clean*.

Dari hamparan I tersebut telah digunakan seluas 107,577 Ha oleh beberapa investor diantaranya :

1. PLTU seluas 25 ha.
2. PT. Dwi Sejati Beton seluas 4,277 ha.
3. PT. Gulf Mangan Grup seluas 10 ha.
4. PT. Sarana Mas Abadi seluas 30 ha.
5. PT. Kupang Resources seluas 5 ha.
6. PT. Bunga Raya Lestari seluas 15 ha.
7. PT. Binusindo Energi Indonesia seluas 18,3 ha.
8. Jaringan Jalan seluas 19,40 ha.
9. Ruang Terbuka Hijau seluas 35,90 ha.



Dibentuknya Kawasan Industri Bolok dilatarbelakangi oleh perkembangan sektor industri yang masih rendah dan lamban yang mengakibatkan kontribusi sector industri terhadap pembentukan Produk Domestic Regional Bruto (PPKD) dan sangat kecil. Di sisi lain sector pertanian (sub sektor peternakan, perikanan, perkebunan dan tanaman pangan) masih dikelola secara sub sistem dan tradisional sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sektor industri, dengan dikelolanya Kawasan Industri Bolok secara professional maka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri, pertambangan, perdagangan dan sektor jasa sebagai motor penggerak pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan penerimaan daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan KIB maka sedang dilakukan perubahan status badan hukum dari Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok menjadi PT. Kawasan Industri Bolok. Dengan demikian maka Kawasan Industri Bolok akan dikelola secara profesional dan full berorientasi bisnis.

Adapun kedudukan Bolok di dalam RTRW Provinsi sangat didukung dari kepentingan transportasi melalui pengembangan jaringan jalan dan rencana pengembangan jaringan jalan baik di dalam Wilayah KI Bolok maupun sekitarnya. Kedudukan KI Bolok dengan Pulau Timor secara keseluruhan dihubungkan melalui ruas Jalan Arteri Primer yang merupakan rangkaian dari Jalan Lintas Pulau Timor dengan menghubungkan Bolok – Tenau sebagai ruas jalan pendukung pertumbuhan pusat industri baru. Selanjutnya KI Bolok merupakan bagian dari Jalan Strategis Nasional Rencana yang akan menghubungkan ruas jalan titik tengah ruas jalan Bolok - Tenau dengan Simpang Lapangan Terbang. KI Bolok juga akan dilayani Jaringan Jalan Provinsi yaitu Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) – Jaringan Jalan di Kota Kupang (Jalan Dalam KI Bolok).

Dengan demikian, posisi strategis KI Bolok dalam rangka perdagangan antar pulau baik melalui daratan, laut dan udara terkoneksi secara efektif dan efisien.

2.3.2.8. Transmigrasi



Transmigrasi merupakan suatu program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di wilayah lainnya. Agar program ini berjalan lancar, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi penduduk yang berminat untuk bertransmigrasi. Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi di Provinsi NTT dapat dilihat di Tabel 2.120 yang menunjukkan peningkatan persentasi peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi dari 52,8% di tahun 2013 menjadi 62,89% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah untuk dapat melaksanakan program transmigrasi secara maksimal.

Tabel 2.120
Besaran Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi	52,8	33,69	50,63	67,52	62,89

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.3. Fokus Fungsi Penunjang

2.3.3.1. Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005- 2025. RPJMD Provinsi NTT sebagai penjabaran RPJPD telah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2013-2018. Selama periode 2013-2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu:

- (1) Dokumen Perencanaan: tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA; tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.
- (2) Dokumen pengendalian rencana pembangunan dan Hasil evaluasi tahunan rencana pembangunan.
- (3) Dokumen pengendalian pelaksanaan



dan hasil pengendalian pembangunan sesuai Peraturan Gubernur.

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk memandu dan mengintegrasikan pembangunan daerah sesuai visi-misi kepala daerah. Kualitas perencanaan sangat menentukan capaian kinerja pembangunan. Untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, maka melalui kerjasama Badan Pusat Statistik telah dikembangkan NTT Satu Data pembangunan yang didukung pemetaan melalui dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG).

2.3.3.2 Keuangan

A. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance*. Audit rutin tata kelola keuangan dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan menghasilkan opini dalam pelaporan kinerja pemerintah Daerah Provinsi. Pada Periode Tahun 2013- 2015, Opini BPK terhadap LKPD mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2013 dan 2014. Sedangkan sejak tahun 2015 hingga 2017 mencapai kinerja dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

B. Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Realisasi PAD Provinsi terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang masih kurang dari dinas-dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaring penerimaan bagi Pemerintah Provinsi. Perkembangan PAD tahun 2013-2017 seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.19
Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2013-2017



2.3.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum dijalankan melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun dalam RPJMD 2013-2018 terhadap pelaksanaan aspek dan urusan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB ADHK	5.41	5.05	4.92	5.17	5.16		
1.1.1.2	Laju inflasi	8.41	7.76	4.92	2.48	2.00		
1.1.1.3	PDRB ADHK per kapita (dalam juta)	10.4	10.74	11.09	11.49			



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.1.1.4	Indeks Gini	0.35	0.36	0.34	0.36	0.36	0.39	
1.1.1.5	Jumlah Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	8,002	8,070	8,085	8,195	8,649		
1.1.1.6	Rasio Penduduk yang Bekerja			96.17		96.73		
1.1.1.7	Tingkat Pengangguran Terdidik							
1.1.1.8	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat							
1.1.1.9	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
1.1.1.10	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66.2	65	71.3	73			
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Sosial Kemasyarakatan							
1.2.1.1	IPM	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	70.81	
1.2.1.2	Umur Harapan Hidup	65.82	65.91	65.96	66.04	66.07	71.06	
1.2.1.3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	82.27	36.53					
1.2.1.4	Indeks Pembangunan Gender	91.74	92.76	92.91	92.72	92.44	90.96	
1.2.1.5	Indeks Pemberdayaan Gender	59.81	63.06	64.75	65.07	63.76	71.74	
1.2.2	Pendidikan							
1.2.2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6.76	6.85	6.93	7.02	7.15	8.42	
1.2.2.2	Harapan Lama Sekolah	12.27	12.65	12.84	12.97	13.07		
1.2.2.3	Persentase Penduduk Miskin	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38	10.12	
1.2.2.4	Angka Partisipasi Kasar :							
1.2.2.4.1	SD/MI	113.44	114.68	116.46	114.12	114.05	108.5	
1.2.2.4.2	SMP/MTs	80.25	88.66	88.96	89.56	91.35	90.23	
1.2.2.4.3	SMA/SMK/MA	64.85	71.86	75.54	79.34	78.83	82.84	
1.2.2.5	Angka Partisipasi Murni							
1.2.2.5.1	SD/MI	93.60	94.56	94.95	95.24	95.40	97.19	
1.2.2.5.2	SMP/MTs	59.24	65.86	66.32	66.56	67.16	78.40	
1.2.2.5.3	SMA/SMK/MA	47.31	52.15	52.51	52.87	53.32	60.37	
1.2.2.6	Angka Partisipasi Sekolah							
1.2.2.6.1	7 - 12 tahun	92.34	97.99	98.13	98.24	98.27	99.14	
1.2.2.6.2	13 - 15 tahun	89.39	94.26	94.39	94.60	94.76	95.08	
1.2.2.6.3	16 - 18 tahun	64.90	73.96	74.25	74.56	74.65	71.42	
1.2.2.6.4	19 - 24 tahun	22.88	26.22	26.54	26.75	27.80	24.77	
1.2.2.6.5	Angka Buta Huruf	8.5	8.82	7.27	7.40	7.25		
1.2.3	Kesehatan							
1.2.3.1	Kasus Kematian							
1.2.3.1.1	Ibu	176	158	176	182	163		



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.2.3.1.2	Bayi	1,286	1,280	1,300	1,088	1,044		
1.2.3.1.3	Balita	1,478	1,437	1,480	1,268	1,174		
1.2.3.2	Persentase Balita Gizi Buruk dan Kurang							
1.2.3.2.1	Balita Gizi Buruk	1.10	1.00	0.96	0.87	0.87		
1.2.3.2.2	Balita Gizi Kurang	6.90	7.15	4.16	2.50	2.84		
1.2.3.2.3	Baduta stunting	NA	NA	32.7	32.1	29.8	20.1	
1.2.3.2.4	Baduta wasting	NA	NA	11.7	17.5	17.9	12.8	
1.2.3.2.5	Baduta underweight	NA	NA	18.9	23.0	22.8	14.8	
1.2.3.2.6	Balita stunting	NA	NA	41.2	38.7	40.3	29.6	
1.2.3.2.7	Balita wasting	NA	NA	13.6	17.4	15.8	9.5	
1.2.3.2.8	Balita underweight	NA	NA	25.6	28.2	28.3	17.8	
2)	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi Sekolah	97.34	97.99	98.13	98.24	98.27		
2.1.1.1.2	Rasio Guru terhadap murid	34.83	31.6	15.32	15.41	15.8		
2.1.1.1.3	Angka Putus Sekolah	1.88	1.32	0.69	0.30	1.04		
2.1.1.1.3.1	SD	1 : 179	NA	1 : 164	1 : 88	1 : 116		
2.1.1.1.3.2	SMP	1 : 207	NA	1 : 206	1 : 96	1 : 109		
2.1.1.1.3.3	SMA/MA/ SMA/LB	1 : 414	NA	1 : 299	1 : 84	1 : 136		
2.1.1.1.3.4	SMK	1 : 336	NA	NA	1 : 73	1 : 108		
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.1.1	SMP/MTs	89.39	94.26	94.39	94.6	94.76		
2.1.1.2.1.2	SMA/SMK/MA	64.81	73.96	74.25	74.56	74.65		
2.1.1.2.2	Rasio Guru terhadap murid							
2.1.1.2.2.1	SMP/MTs	30.29	30.85	13.38	14.42	14.04		
2.1.1.2.2.2	SMA/SMK/MA	8.02	10.26	12.76	13.73	13.26		
2.1.1.2.3	Angka Putus Sekolah							
2.1.1.2.3.1	SMP/MTs	1.7	1.31	1.23	6.02	3.77		
2.1.1.2.3.2	SMA/SMK/MA	1.8	0.59	2.49	8.6	4.57		
2.1.1.2.4	Angka Melanjutkan Pendidikan							
2.1.1.2.4.1	SMP/MTs			85.34	84.61	91.33		
2.1.1.2.4.2	SMA/SMK/MA			86.97	74.38	85.45		
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	15.18	16.45	9.56	15.99	15.89		
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
	Puskesmas	1 : 13.461	1 : 13.289	1 : 13.368	1 : 13.550	1 : 13.351	1 : 16.000	
	Puskesmas Pembantu	1 : 4.587	1 : 4.659	1 : 5.625	1 : 4.814	1 : 4.979	1 : 1.500	
	Polindes	1 : 6.561	1 : 4.928	1 : 7.211	1 : 5.512	1 : 5.513		



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1 : 115.208	1 : 114.474	1 : 111.305	1 : 110.713	1 : 103.672	1 : 1.000	
2.1.2.4	Rasio Tenaga Kesehatan							
2.1.2.4.1	Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62	
2.1.2.4.2	Bidan	56	56	72	72	74	100	
2.1.2.4.3	Perawat	108	108	91	92	97	173	
2.1.2.4.4	Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83	
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)				54.41	54.49		
2.1.3.2	Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	58.555 ha	58.555 ha	60.328 ha	60.328 ha	60.328 ha		
2.1.3.3	Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47.99	57.46	54.68	60.16		
2.1.3.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	24.91	16.12	23.9	40.46	45.31		
2.1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
2.1.4.1	Persentase Persentase Rumah Layak Huni	63.3	63.4	64	NA	63		
2.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Persentase Ormas dan LSM aktif							
2.1.5.2	Jumlah Linmas					44,876		
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase PMKS yang Tertangani							
2.1.7	Tenaga Kerja							
2.1.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68.15	68.91	69.25	69.18	69.09		
2.1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.25	3.26	3.83	3.25	3.27	5.5	
2.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.8.1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	1568	1054	1191	384	582		



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.8.2	Kasus Kekerasan Terhadap Anak							
2.1.9	Pangan							
2.1.9.1	Jumlah cadangan pangan provinsi (ton)	100	109.23	178.27	146.32			
2.1.10	Pertanahan							
2.1.10.1	Persentasi Luas Lahan Bersertifikat							
2.1.11	Lingkungan Hidup							
2.1.11.1	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	43.33	54.88	62.72	60.04	65.2		
2.1.11.2	Indeks Kualitas Air	50.14	52.48	53.35	NA	39.63		
2.1.11.3	Indeks Kualitas Udara	85.41	77.13	NA	NA	91.18		
2.1.11.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan							
2.1.12	Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.1.12.1	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.1.13.1	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	
2.1.13.2	Persentase Posyandu Aktif	51.22	50.5	57.54	57.34	50.78		
2.1.13.3	Persentase Desa Siaga Aktif	57.17	50.78	59.47	70.81	79.75		
2.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.1.14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.7	1.65	1.79	1.69	1.68		
2.1.14.2	Cakupan Peserta KB Aktif	60.1	45.69	52.64	57.19	32.51		
2.1.14.3	Cakupan Peserta KB Baru	11.6	10.6	8.8	8.6	5.2		
2.1.14.4	Unmeet Need							
2.1.15	Perhubungan							
2.1.15.1	Jumlah Terminal	20	22	22	22	22		
2.1.15.2	Jumlah Pelabuhan	74	74	74	74	74		
2.1.16	Komunikasi dan Informatika							
2.1.16.1	Keberadaan Website Milik Pemerintah	Ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.17.1	Persentase Koperasi Aktif	88.53	90.03	91.56	92.44	91.27		
2.1.17.2	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	168	171	149	109	175		
2.1.18	Penanaman Modal							
2.1.18.1	Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	47,112	109,131	1,296,677	505,620	253,851, 604		
2.1.18.2	Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	155,464.12	484,145.49	991,346. 97	1,641,450.53	963,451. 27		
2.1.19	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.19.1	Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan	12	47	82	117	152		
2.1.19.2	Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina	3	7	11	15	19		
2.1.19.3	Jumah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina	11	15	19	23	27		
2.1.19.4	Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina	56	2	5	5	5		
2.1.20	Statistik							
2.1.20.1	Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.20.2	Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.21	Persandian							
2.1.21.1	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang Terlindungi	3	3	3	3	3		
2.1.22	Budaya							
2.1.22.1	Persentase obyek budaya yang tertangani	55	71	71	100	48.67		
2.1.23	Perpustakaan							
2.1.23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	248,013	12,440	32,916	38,585	48,086		
2.1.24	Kearsipan							
2.1.24.1	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan					46,94%	100	
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Kelautan dan Perikanan							
2.2.1.1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		4.72	4.77	4.87	5.01		
2.2.1.2	Produksi Perikanan (ton)	127,156	108,009	118,292	175,992	179,296		



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.2	Pariwisata							
2.2.2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		5.83	5.89	6.09	6.16		
2.2.2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan							
2.2.2.2.1	Manca Negara	45,107	65,939	66,860	65,499	93,455		
2.2.2.2.2	Domestik	318,658	331,604	374,456	430,582	523,083		
2.2.2.3	Rata-rata Lama Menginap							
2.2.2.3.1	Tamu Asing	2.19	1.99	2.26	2.23	2.15		
2.2.2.3.2	Tamu Domestik	1.79	1.95	1.84	1.85	1.86		
2.2.3	Pertanian							
2.2.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		24.99	24.97	23.95	23.57		
2.2.4	Kehutanan							
2.2.4.1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		0.15	0.15	0.15	0.14		
2.2.5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.2.5.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	70.67	74.2	73.9	72.14	77.36	98.14	
2.2.5.2	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB		1.44	1.41	1.39	1.3		
2.2.6	Perdagangan							
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		10.65	10.87	11.1	11.05		
2.2.7	Perindustrian							
2.2.7.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		1.23	1.24	1.23	1.26		
2.2.8	Transmigrasi							
2.2.8.1	Persentase Transmigran Swakarsa		1	1	1	1		
3)	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	240,207	267,584	298,180	312,312	399,251		
3.2	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non- Makanan	191,846	225,504	235,710	264,315	282,232		
3.3	Nilai tukar petani	99.05	100.26	101.91	101.07	102.18		
3.4	Rasio Ketergantungan	68.34	68.34	66.75	65.99	65.29		



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
3.5	Jumlah Penumpang Kapal Laut							
3.5.1	Penumpang Naik	1,034,014	575,990	122,084	1,023,639	1,028,030		
3.5.2	Penumpang Turun	987,503	577,232	110,483	1,091,522	1,002,119		
3.6	Jumlah Penumpang Pesawat							
3.6.1	Penumpang Berangkat	1,098,317	1,137,909	1,286,504	1,653,065	1,684,031		
3.6.2	Penumpang Datang	1,133,292	1,085,990	1,274,787	1,687,407	1,723,415		
3.7	Ketersediaan Akomodasi							
3.7.1	Jumlah Hotel			334	334	365		
3.7.2	Jumlah Kamar			6,491	6,491	8,316		
3.8	Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan	959	975	976	1,683	2,149		

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah diolah dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga. Semakin besar konsumsi, semakin atraktif bagi peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi dihitung berdasarkan pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Pola pengeluaran konsumsi ini juga menjadi salah satu alat menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran berarti semakin buruk kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena, makanan adalah prioritas pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, sehingga tidak banyak pendapatan yang tersisa untuk kebutuhan non makanan. Perkembangan pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan penduduk NTT bisa dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.122
Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut
Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 – 2017

Wilayah	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
NTT	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	240.207	267.584	298.180	312.312	399.251
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	191.846	225.504	235.710	264.315	282.232
	Persentase makanan terhadap total pengeluaran	56%	54%	56%	54%	59%
NASIONAL	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	356.435	388.350	412.462	460.639	527.956
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	347.126	387.682	456.361	485.619	508.541
	Persentase makanan terhadap total pengeluaran	51%	50%	47%	49%	51%

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara merata, pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan di NTT tidak banyak berubah sejak tahun 2013 sampai 2017, dan hanya terjadi sedikit peningkatan. Ada penurunan pada tahun 2014, tetapi kembali meningkat tahun 2015 dan 2017 sehingga, pada tahun 2017, persentase pengeluaran untuk kelompok makanan mendominasi pengeluaran keluarga dengan angka 59%. Dibandingkan konsumsi berdasarkan kelompok pengeluaran secara nasional, persentase NTT tetap lebih tinggi, walaupun persentase nasional juga tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2017, persentase pengeluaran kelompok makanan penduduk NTT sebesar 59%, sedangkan secara nasional sebesar 51%. Ini berarti, NTT masih butuh peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk agar persentase pengeluaran untuk makanan bisa menurun dan konsumsi keluarga bisa lebih atraktif. Ini bukan saja meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi positif untuk ekonomi daerah.



2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan di bayar (Ib) petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, bila NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.123
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
- NTP	99,05	100,26	101,91	101,07	102,18
Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor					
- Tanaman Bahan Makanan	97,06	99,24	105,04	103,43	104,84
- Hortikultura	93,21	97,41	99,89	98,78	101,24
- Tanaman Perkebunan Rakyat	94,65	98,71	88,57	95,10	95,45
- Peternakan	113,06	104,95	105,30	105,95	106,18
- Perikanan	113,88	102,77	104,01	103,67	105,67

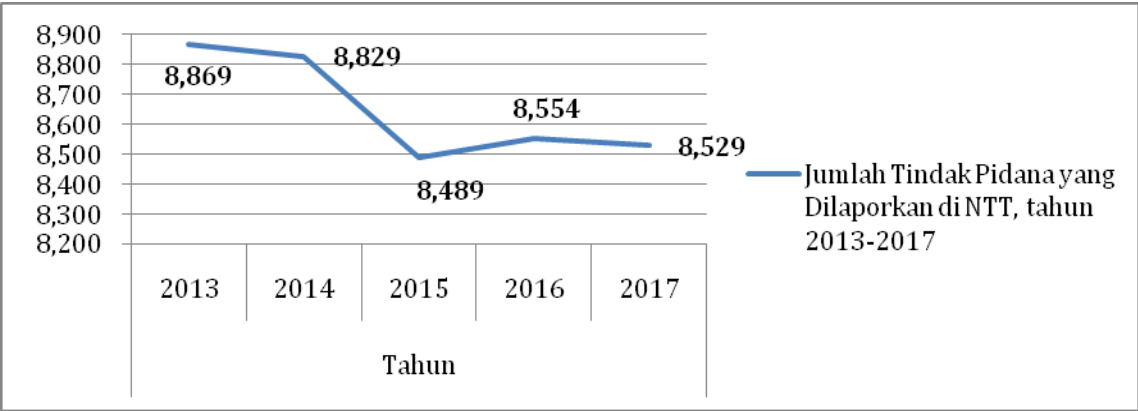
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

NTP Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir berkisar antara 99,05 (2013) sampai 102,18 (2017). Secara umum, NTP terus meningkat, tetapi NTP menurut sub sektor mengalami variasi. NTP untuk tanaman bahan makanan mengalami NTP yang membaik setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Sementara NTP untuk sub sektor tanaman perkebunan rakyat, walaupun cenderung lebih baik daripada periode tahun dasar dalam lima tahun terakhir, tetapi belum mencapai angka 100. Demikian juga NTP hortikultura yang baru mencapai 101,24 pada tahun 2017. NTP pada sub sektor peternakan dan perikanan justru cenderung menurun. NTP peternakan menurun dari 113,06 pada tahun 2013 menjadi 106,18 tahun 2017, dan NTP perikanan menurun dari 113,88 menjadi 105,67. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan tukar produk peternakan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian dalam program pembangunan NTT.



2.4.3. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas diukur dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan persentase penyelesaian tindak pidana kriminalitas.



Sumber: BPS RI, 2018

Gambar 2. 20
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan di NTT tahun 2013-2017

NTT menunjukkan kecenderungan tindak pidana kriminalitas yang menurun dari tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2013, tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 8.869 kasus, sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 8.529 kasus. Kabupaten Sumba Barat (data masih termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) dan Kota Kupang adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan tertinggi di NTT sepanjang 2013 sampai 2017. Selain tindak pidana yang dilaporkan, tingkat kriminalitas juga terkait dengan persentase penyelesaian kasus kriminalitas. Dibandingkan dengan persentase nasional,

Tabel 2.124
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2016

Tahun	NTT	INDONESIA
2013	51,34	52,92
2014	55,10	54,26
2015	62,79	58,13
2016	60,87	58,74

Sumber: BPS RI, 2018

Penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas di NTT semakin membaik dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2013, hanya 51,34% kasus kriminalitas yang diselesaikan, sementara rata-rata nasional sebesar 52,92%. Tetapi pada tahun 2016, persentasi penyelesaian mencapai 60,87%, jauh lebih baik daripada rata-rata nasional yang sebesar 58,75%. Kabupaten Sumba Barat (termasuk data dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) serta Kota Kupang masih menjadi Kabupaten/Kota dengan kemampuan penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas terendah di NTT.



2.4.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, artinya makin banyak yang harus ditanggung dan dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan di Provinsi NTT dibandingkan Indonesia bisa dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125
Rasio Ketergantungan NTT dan Indonesia

Tahun	2010	2015
NTT	70,60	66,70
INDONESIA	50,50	48,60

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Rasio ketergantungan NTT menurun dari 70,60 tahun 2010 menjadi 66,70 tahun 2015. Ini artinya, dari 100 penduduk usia produktif di NTT tahun 2015 harus menanggung 66,7 penduduk bukan usia produktif. Walaupun menurun, Rasio Ketergantungan NTT masih di atas rata-rata Nasional, yakni 50,5 (tahun 2010) dan 48,60 (tahun 2015). Selain itu, rasio ketergantungan NTT adalah yang tertinggi secara nasional dalam pengukuran tahun 2010 dan 2015, sementara yang terendah adalah DKI Jakarta dengan rasio 37,4 (tahun 2010) dan 39,9 (tahun 2015). Proyek Rasio Ketergantungan tahun 2020 dan 2025, NTT masih akan menduduki posisi tertinggi nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi, dimana selain usaha menciptakan lebih banyak lapangan kerja, juga menanggung konsekuensi dari profil demografi yang relatif menua. Rasio ketergantungan dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.



Tabel 2.126
Rasio Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Penduduk Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Umur	2013		2014		2015		2016		2017	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen
0-14	1.770.012	35,73	1.799.637	35,73	1.799.021	35,14	1.813.199	34,85	1.827.378	34,56
15-64	2.942.795	59,40	2.992.061	59,40	3.070.775	59,98	3.134.874	60,25	3.198.817	60,50
65+	241.160	4,87	245.199	4,87	250.265	4,89	255.441	4,91	261.107	4,94
0-14 & 65+	2.011.172	40,60	2.044.836	40,60	2.049.286	49,02	2.068.640	39,75	2.088.485	39,50
Total	4.953.967	100,00	5.036.897	100,00	5.120.061	100,00	5.203.514	100,00	5.287.302	100,00
Dependency Ratio	68,34		68,34		66,75		65,99		65,29	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Rasio ketergantungan mengalami penurunan, di mana secara numerik berada di atas 50, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit lebih banyak penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Itu berarti, kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) masih kurang mampu menekan beban ketergantungan sampai pada tingkat terendah yang berguna mendorong pembangunan ekonomi.

2.4.5. Akomodasi

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel dan kamar di NTT dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan akumulatif sebanyak 21 hotel, dari 334 (tahun 2015) menjadi 365 (tahun 2017). Jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Barat dalam periode ini bertambah 22 unit dan di Kabupaten Rote Ndao bertambah 10 unit, sementara di Kabupaten Ende justru berkurang 13 unit dan di Kabupaten Sikka berkurang 6 unit.

Tabel 2.127
Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kabupaten/Kota (unit)
Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Barat	7	7	9	162	162	195
Sumba Timur	8	8	14	157	157	352
Kupang	3	3	2	51	51	39
Timor Tengah Selatan	10	10	13	237	237	305
Timor Tengah Utara	9	9	10	187	187	236



Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Belu	14	14	11	310	310	285
Alor	6	6	7	123	123	150
Lembata	5	5	6	135	135	167
Flores Timur	16	16	15	207	207	221
Sikka	31	31	25	530	530	567
Ende	34	34	21	405	405	440
Ngada	23	23	27	290	290	328
Manggarai	18	18	14	299	299	282
Rote Ndao	8	8	18	118	118	204
Manggarai Barat	50	50	72	801	801	1272
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	8	8	6	163	163	167
Nagekeo	7	7	12	88	88	153
Manggarai Timur	7	7	6	66	66	71
Sabu Raijua	6	6	5	55	55	58
Malaka	-	-	4	-	-	60
Kota Kupang	64	64	68	2107	2107	2764
Nusa Tenggara Timur	334	334	365	6491	6491	8316

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

2.4.6. Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke NTT, baik penduduk nasional maupun mancanegara. Perkembangan jumlah restaurant dan rumah makan bisa dilihat di Tabel 2.128.

Tabel 2.128
Jumlah Restoran dan Rumah Makan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Wilayah	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	21	21	21	21	21
Sumba Timur	14	14	14	14	33
Kupang	15	15	15	15	35
Timor Tengah Selatan	15	15	15	15	144



Wilayah	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Timor Tengah Utara	52	52	52	62	62
Belu	78	78	78	82	82
Alor	11	11	11	11	15
Lembata	23	23	23	23	41
Flores Timur	24	24	24	70	90
Sikka	55	55	55	55	130
Ende	53	53	53	53	82
Ngada	88	104	104	104	50
Manggarai	72	72	72	72	119
Rote Ndao	29	29	29	29	36
Manggarai Barat	33	33	33	33	106
Sumba Tengah	5	5	6	6	6
Sumba Barat Daya	6	6	6	21	21
Nagekeo	92	92	92	92	122
Manggarai Timur	12	12	12	12	42
Sabu Raijua	8	8	8	8	36
Malaka	-	-	-	39	-
Kota Kupang	253	253	253	846	876
Nusa Tenggara Timur	959	975	976	1683	2149

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah rumah makan dan restoran di Provinsi NTT, yaitu dari 959 unit (tahun 2013) menjadi 2.149 unit (tahun 2017) atau naik sebanyak 1.190 unit dalam lima tahun terakhir. Rata-rata semua Kabupaten mengalami peningkatan jumlah, kecuali Kabupaten Ngada yang justru berkurang sebanyak 54 unit dari 104 menjadi 50 unit.



2.5. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Target RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013- 2018, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.129
RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
1	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam rangka terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	8	4	1	3	Data tidak lengkap
		Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	2	-	1	1	Data tidak lengkap
		Meningkatnya kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan	18	13	-	5	
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	4	2	2	-	
		Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan	6	1	2	3	Data tidak lengkap
		Meningkatnya Pendataan, Pengkajian, Pelestarian, Pembinaan, Pemanfaatan, Pengembangan, pendokumentasinya dan penyebarluasan kebudayaan	5	-	3	2	Data tidak lengkap
		Mewujudkan Generasi Pemuda yang Cerdas dan Kreatif	2	1	-	1	
		Menumbuhkan kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirasahaan bagi pemuda	1	-	-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi	2	2	-	-	
		Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga	1	-	-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan	3	-	-	3	Tidak ada data



No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
2	Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan yang dapat dijangkau seluruh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu	7	4	-	3	
		Penurunan Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	7	5	1	1	
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	3 7	1 1	3	2 3	Data tidak lengkap
		Meningkatnya akses pembiayaan kesehatan masyarakat	2	2	-	-	
3	Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal	Meningkatnya pendapatan petani	2	-	1	1	Data tidak lengkap
		Meningkatkan potensi hasil hutan	3	3	-	-	
		Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahanan pangan nasional	10	1	1	8	Data tidak lengkap
		Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	4	1	3	-	
		Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan	4	1	1	2	Data tidak lengkap



No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		Meningkatnya pendapatan peternak	6	4	2	-	
		Meningkatnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan	3	2	-	1	
		Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor	2	2	-	-	
		Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi dan UMKM	7	6	-	1	
		Meningkatnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana	2	1	1	-	Data tidak lengkap
		Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri	1	1	-	-	
		Meningkatnya jumlah dan volume kegiatan investasi	3	2	-	1	
		Meningkatnya pelayanan Perizinan sesuai SPM	1	1	-	-	
		Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	2	1	-	1	
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	4	-	2	2	
		Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT	2	1	1	-	
4	Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah	Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemprov NTT	5	3	-	2	Data tidak lengkap
		Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif	3	3	-	-	
		Terwujudnya aparatur yang profesional	6	3	-	3	Data tidak lengkap
		Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT dan terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat	4	2	-	2	Data tidak lengkap
		Terwujudnya komitmen dan koordinasi hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum serta terwujudnya P5 HAM	5	2	-	3	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	1	-	-	1	Tidak ada data



No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional	2	-	-	2	Tidak ada data
		Meningkatnya penghayatan, pengamalan, pelestarian dan pengamanan idiologi pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam berdemokrasi	2	-	-	2	Tidak ada data
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	2	-	-	2	Tidak ada data
		Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD	4	3	-	1	Data tidak lengkap
		Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)	2	2	-	-	
		Meningkatnya pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah	3	-	1	2	
		Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemprov	1	1	-	-	
		Meningkatnya sumber daya pendidikan kejuruan yang berbasis inovasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja sendiri	1	-	-	1	
		Menciptakan korporasi kegiatan ekonomi produktif dan inovatif antar Desa Mandiri Anggur Merah menuju kemandirian ekonomi lokal	1	-	-	1	
		Efektivitas dan dampaknya dalam pelaksanaan Pemilu Kada Langsung	1	-	1	-	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti	1	-	1	-	



No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
5	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup	Tersusunnya Rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan	5	2	-	3	Data tidak lengkap
		Terciptanya konektivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa	1	1	-	-	
		Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyarakat dan produktifitas layanan jaringan irigasi teknis	1	1	-	-	
		Meningkatnya profesionalisme masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur	1		-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan	1	-	-	1	Data tidak lengkap
		Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	1	1	-	-	
		Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan	1	1	-	-	
		Review Kawasan Hutan	1	-	-	1	Tidak ada data
		Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 50%	3	-	-	3	Tidak ada data
		Rehabilitasi dan Lahan seluas 3.500 Ha	4	-	-	4	Tidak ada data
		Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	1	-	-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik	2	-	-	2	Tidak ada data
		Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2	-	-	2	Tidak ada data
		Kelestarian Lingkungan hidup	3	-	-	3	Tidak ada data
		Perlindungan dan pengawasan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	1	-	-	1	Tidak ada data



No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		Penggunaan Energi Baru Terbarukan	1	1	-	-	
		Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan	1	-	-	1	Tidak ada data
6	Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak	Meningkatnya kapasitas perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan	1	-	-	1	
		Meningkatnya Kelompok usaha perempuan	2	1	-	1	Data tidak lengkap
		Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif	1	1	-	-	
		Terbentuknya Desa Layak Anak	2	2	-	-	
7	Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD	4	2	2	-	
		Meningkatnya SDM kelautan dan Perikanan	1	-	-	1	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi	3	1	-	2	
		Jumlah investor dan industri perikanan mendukung peningkatan PDRB	2	1	-	1	
8	Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan	Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk dari 20,03 % menjadi 15,0 %	6	1	-	5	
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	3	3	-	-	
		Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	1	1	-	-	
		Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah	2	2	-	-	

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

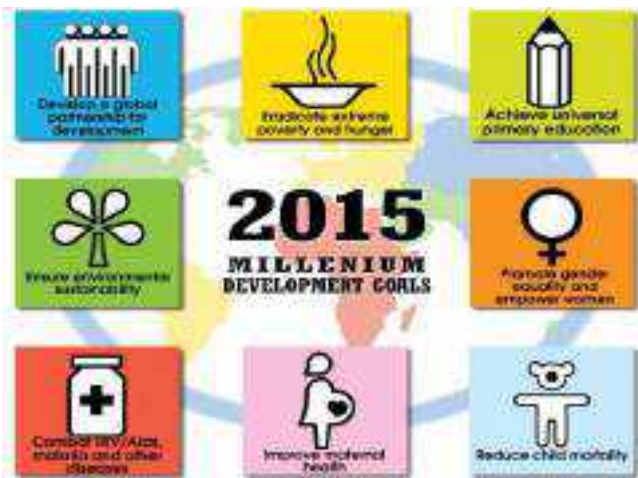


Dari hasil evaluasi terlihat bahwa:

1. Pada misi 1, dari 52 indikator, terdapat 24 indikator yang tercapai, 3 Indikator akan tercapai dan 20 Indikator yang tidak tercapai;
2. Pada misi 2, dari 53 indikator, terdapat 22 indikator yang tercapai, 4 Indikator akan tercapai dan 27 Indikator yang tidak tercapai;
3. Pada misi 3, dari 56 indikator, terdapat 27 indikator yang tercapai, 12 Indikator akan tercapai dan 17 Indikator yang tidak tercapai;
4. Pada misi 4, dari 44 indikator, terdapat 15 indikator yang tercapai, 7 Indikator akan tercapai dan 22 Indikator yang tidak tercapai;
5. Pada misi 5, dari 30 indikator, terdapat 8 indikator yang tercapai, 1 Indikator akan tercapai dan 21 Indikator yang tidak tercapai;
6. Pada misi 6, dari 6 indikator, terdapat 3 indikator yang tercapai, 0 Indikator akan tercapai dan 3 Indikator yang tidak tercapai;
7. Pada misi 7, dari 10 indikator, terdapat 3 indikator yang tercapai, 3 Indikator akan tercapai dan 4 Indikator yang tidak tercapai;
8. Pada misi 8, dari 12 indikator, terdapat 7 indikator yang tercapai, 0 Indikator akan tercapai dan 5 Indikator yang tidak tercapai.

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian terhadap target RPJMD hanya mencapai 42,43%. Angka ini adalah akumulasi dari pencapaian target pada 8 misi. Penyebab utama rendahnya angka capaian karena Perangkat Daerah yang tidak memasukkan data hasil realisasi capaian indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

2.6. Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)



MDGs (*millennium development goals*) merupakan kesepakatan dari 189 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) yang dijalankan mulai September tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Indonesia sebagai Negara yang ikut mendeklarasikan MDGs, tentunya memiliki kewajiban untuk

melaksanakan upaya untuk mencapai target dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaiannya. NTT sebagai bagian dari



Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebijakan berkewajiban pula untuk melaksanakan dan mengevaluasi pencapaian MDGs.

Target dari MDGs ini adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat tahun 2015 di mana untuk mencapai target tersebut, terdapat

8 (delapan) butir tujuan di dalamnya, yaitu : (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk mengetahui hasil pencapaian target MDGs, maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator yang dibagi dalam 3 (Tiga) kategori, yaitu target sudah tercapai, target yang akan tercapai dan target yang perlu perhatian khusus. Kondisi pencapaian MDGs Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.130
Evaluasi Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi NTT

Tujuan MDGs	Jumlah Indikator	Indikator Sudah Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator masih perlu perhatian khusus
1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	11	4		7
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua	3		2	1
3. Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	7	3		4
4. Menurunkan Angka Kematian Anak	4	1	1	2
5. Meningkatkan kesehatan ibu	7	1	3	3
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya	10		4	6
7. Menjamin daya dukung lingkungan Hidup	12	1	4	7
TOTAL	54	10	14	30

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.129 memperlihatkan bahwa dari 54 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 10 indikator atau 18,5% sudah mencapai target, sedangkan 14 indikator atau 25,9% akan mencapai target,



sedangkan 30 indikator atau 55,6% masih jauh dari target sehingga perlu perhatian khusus. Tujuan dengan persentase indikator tercapai terbesar adalah Tujuan 3 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana 3 dari 7 indikator (42,9%) telah tercapai, sedangkan tujuan dengan indikator belum tercapai sama sekali adalah Tujuan 2 terkait mencapai pendidikan dasar untuk semua dan Tujuan 6 terkait memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Rincian tujuan, sasaran dan pencapaian indikator MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.131
Tujuan, Sasaran dan Pencapaian Indikator MDGs Provinsi NTT

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1.1	Presentase penduduk yang hidup di bawah kemiskinan Nasional	23,31% (Sep 2009)	22,58% (Sep 2015)	7,55%	Perlu perhatian khusus	BPS
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	8,27 (200*)	4,62% (Sep 2015)	Berkurang	Sudah tercapai	BPS, Nakertrans
1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,43 (Maret 2010)	1,44 (Sept 2015)	Berkurang	Perlu perhatian khusus	BPS
Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	3,24 (2017)	6,56 (2014)			BPS
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	72,53 (2017)	66,67 (2014)			Sekretariat MDG's, BPS
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	50,93% (2009)	49,99% (2014)	Menurun	Sudah tercapai	Sekretariat MDG's, BPS
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015						
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi	33,6% (Risksdas 2007)	32,10% (SDT 2014)	15,5%	Perlu perhatian khusus	STD (Studi Diet Total) Kemenkes



Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
1.8a	Prevalensi Balita Gizi Buruk	9,4% (Risikesdas 2007)	11,5% (SDT 2014)	3,6%	Perlu perhatian khusus	STD (Studi Diet Total) Kemenkes
1.8b	Prevalensi Balita Gizi Kurang	24,2% (Risikesdas 2007)	21,5% (SDT 2014)	11,9%	Perlu perhatian khusus	STD (Studi Diet Total) Kemenkes
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum :					
-	< 1.400 Kkal/kapita/hari	13,4% (2005)	26,79% (2015)	8,50%	Perlu perhatian khusus	BPS NTT
-	< 2.000 Kkal/kapita/hari	45,38% (2005)	72,35% (2015)	35,32%	Perlu perhatian khusus	BPS NTT
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua						
Target 2 A : Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.						
2.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI	91,72% (2008)	98% (2015)	100%	Akan tercapai	Dinas Pendidikan, BPS
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI	62,27% (2008)	97,26% (2012)	100%	Akan tercapai	Sekretariat MDGs
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 thn, perempuan dan laki-laki	P : 86,99% L : 90,21% (2008)	P : 88,51% L : 91,21% (2014, Sekretariat MDGs)	100%	Perlu perhatian khusus	Sekretariat MDGs
Tujuan 3 : Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015						
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi.					
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD/MI	99,51 (2001,BPS)	96,73% (2015) (APM perempuan/ APM laki- laki x 100%	100	Perlu perhatian khusus	Dinas P & K
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	108,4 (2007,BPS)	93,80% (2015) (APM perempuan/ APM laki- laki x 100%	100	Perlu perhatian khusus	Dinas P & K



Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	105,6 (2007,BPS)	84% (2015) (APM perempuan/ APM laki- laki x 100%	100	Perlu perhatian khusus	Dinas P & K
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi	151,5 (2005,BPS)	103,34%	100	Sudah tercapai	Sekretarian MDGs BPS NTT
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Perempuan : 98,79% Laki-laki : 96,35% (2008) Rasio 2007 : 101,17	Perempuan : 98,81% Laki-laki : 98,24% (2010) Rasio 2013 : 100,31	100	Sudah Tercapai	Sekretariat MDGs
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	24,99 (2005)	38,30% (2014)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	KPUD, Kesbangpol, Biro Pemerintahan dan BPPPA
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	7,20% / 2004 7,37% / 2009	8,93% (2014)	Meningkat	Sudah tercapai	KPUD, Kesbangpol, Biro Pemerintahan dan BPPPA
Tujuan : Menurunkan Angka Kematian Anak						
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015						
4.1	Angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup	73 (SDKI 2002-2003)	58/1000KH (SDKI,201 2) AKB	32/1000 KH	Perlu perhatian khusus	Kemenkes, Profil Dinkes Provinsi
			Konversi dari kasus kematian di NTT 2015 : 12/1000			
4.2	Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran hidup	57/1000 KH (SDKI 2002-2003)	45/1000KH (SDKI,201 2) AKB Konversi dari kasus kematian di NTT 2015 : 12/1000	23/1000 KH	Perlu perhatian khusus	Kemenkes, Profil Dinkes Provinsi
4.2a	Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	31/1.000 (2007)	26/1.000 (SDKI 2012)	Menurun	Akan tercapai	Sekretariat MDGs
4.3	Proporsi anak berusia 1 tahun yang diimunisasi campak	78,10% (Profil 2008)	81,77% (Profil 2014)	Meningkat	Sudah tercapai	Disnkes Provinsi
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu						
Target 5 A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015						



Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
5.1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	554 (Surkesnas 2004)	306 (SDKI 2007)	102	Perlu perhatian khusus	BPS Kemenkes
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan yang terlatih (%)	79,1% (profil 2008)	75,4% (profil 2014)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	Dinkes Provinsi
Target 5 B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua tahun 2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, semua cara	33,8% (Statistik Indonesia 2005)	42,98% (2015)	Meningkat	Akan tercapai	APENAS/ BPS
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, cara modern	30% (2007,BPS)	40,03% (2014, Sekretariat MDGs)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	Sekretariat MDGS BPS
5.5	Cakupan Pelayanan antenatal (sedikitnya 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan)					
-	1 kunjungan	85,0% (profil 2007)	82% (Profil 2014)	Meningkat	Akan tercapai	Dinkes
-	4 kunjungan	64,1% (profil 2018)	63,2% (profil 2014)		Akan tercapai	Dinkes
5.7	Unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang tidak terpenuhi)	17,4% (SDKI 2007)	15,70% (2013 BKKBN)	Menurun	Sudah tercapai	BKKBN Dinkes
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya						
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015.						
6.1	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	10,03/ 2011	10,57/2012	Menurun	Perlu perhatian khusus	Dinkes, BPS, P3BM
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi	(2002/3) : 12,8 (SKRRI-BPS)	27,5% (Riskesdas 2010)	Meningkat	Akan tercapai	Dinkes
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	29,2% (Riskesdas 2007)	30,9% (Riskesdas 2010)	Meningkat	Akan tercapai	Dinkes
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015.						



Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral	98,3% (Profil 2009)	91,3% (Profil 2010)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	Dinkes
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015						
6.6	Angka kematian akibat malaria	0.0083 (2011)	15 (2014)			Dinkes, BPS, P3BM
6.6.a	Angka kejadian malaria (per 1000 penduduk)	24,72/1000 (2011)	23,33/1000 (2012)	Menurun	Perlu perhatian khusus	Dinkes
6.9	Angka kejadian prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis					
6.9.c	Tingkat kematian karena tuberculoisis (per 100.000 penduduk)	1,52 (2011)	2 (profil 2014)		Perlu perhatian khusus	Dinkes Provinsi
6.10	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS					Dinkes, BPS, P3BM
6.10a	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	41,45 (2011)	87,97 (2014)	70%	Perlu perhatian khusus	Dinkes provinsi
6.10b	Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh melalui DOTS(cure rate)	81,15 (2011)	79,03 (2014)	85%	Akan tercapai	Dinkes Provinsi
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
Target 7 A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang bersinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang						
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey	34,3 (2009)	52,43 (2010)	Meningkat	Akan tercapai	Kementerian kehutanan
7.2	Jumlah emisi karbondioksida (CO2)	1.711.626 Gg CO2e (2008)	381.410CO2eq (2010)	Berkurang 26% pada 2020	Perlu perhatian khusus	Hasil perhitungan RAD GRK Prov.NTT
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	27,80% (2000)	34,97% (2012)	Tidak melebihi batas	Akan tercapai	BPS, Bappeda



Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	26,40% (2008)	59,79% (2009)	Meningkat	Akan tercapai	Kementerian Kehutanan
7.6	Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	4,35% (2009)	76,50% (2010)	Meningkat	Akan tercapai	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target 7 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015						
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan dengan akses terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	40,16% (1993)	62,72% (2015)	68,87%	Perlu perhatian khusus	Susenas, BPS, Pokja AMPL NTT
7.8a	Perkotaan	76,97% (2009)	83,10% (2015)	75,29%	Sudah tercapai	
7.8b	Perdesaan	39,00% (1993)	23,90% (2015)	65,81%	Perlu perhatian khusus	
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan.	6,53% (1993)	23,90% (2015)	62,41%	Perlu perhatian khusus	Susenas, BPS, Pokja AMPL NTT
7.9a	Perkotaan	35,43% (2009)	49,28% (2015)	76,82%	Perlu perhatian khusus	
7.9b	Perdesaan	10.80% (2009)	27,35% (2015)	55,55%	Perlu perhatian khusus	
Target 7 D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020.						
7.9b	Perdesaan	10.80% (2009)	27,35% (2015)	55,55%	Perlu perhatian khusus	
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	33,7% (2006,BPS)	61,07% (2015)	6%	Perlu perhatian khusus	Susenas, Sekretariat MDGs Nasional

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

2.7. Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Dalam pencapaian pembangunan secara nasional

antara



digunakan tujuan SDGs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **pencapaian pembangunan dengan** jumlah 169 indikator sebagai tolak ukur.

Kondisi pencapaian TPB hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.132
Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan TPB Provinsi NTT Tahun 2019

Nomor TPB	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target RPJMN 2019	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target RPJMN 2019	Total Jumlah Indikator yang sudah dilaksanakan
1	1	10	11
2	0	7	7
3	10	12	22
4	8	0	8
5	4	7	11
6	0	3	3
7	0	0	0
8	4	3	7
9	0	1	1
10	1	3	4
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	1	1
15	1	1	2
16	3	9	12
17	0	0	0
TOTAL	32	57	89

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

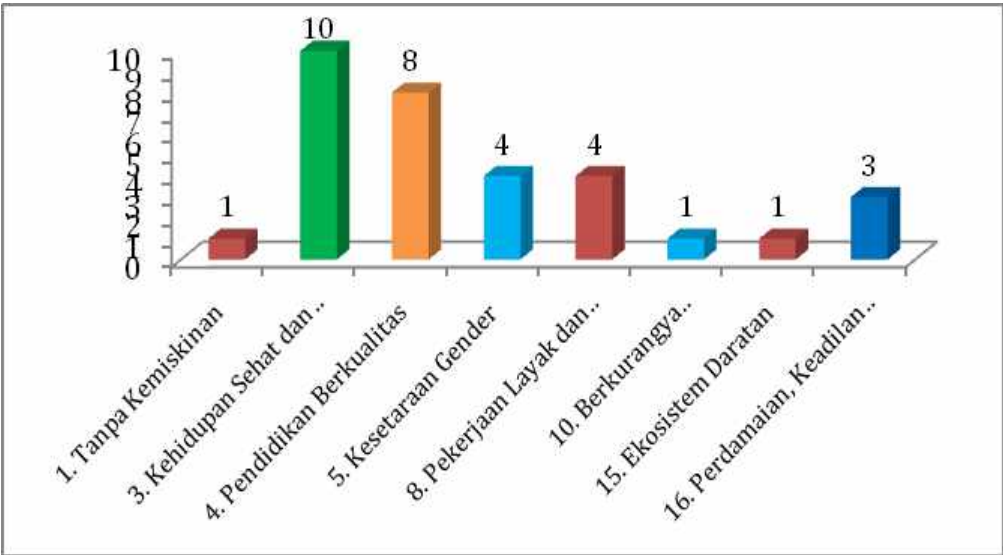
Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan terdapat pada *pilar sosial*, yaitu mencapai 59 indikator atau 66,29%, sedangkan indikator yang paling rendah dilaksanakan terdapat pada *pilar lingkungan*, yakni baru mencapai 6 (enam) indikator atau 6,74%. Berdasarkan jumlah indikator yang telah dilaksanakan, indikator terbanyak yang sudah mencapai target nasional juga terdapat di *pilar sosial* sebesar 23 Indikator, sedangkan indikator paling rendah yang sudah mencapai target nasional adalah *pilar*



lingkungan sebesar 1 (satu) indikator.

2.7.1. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

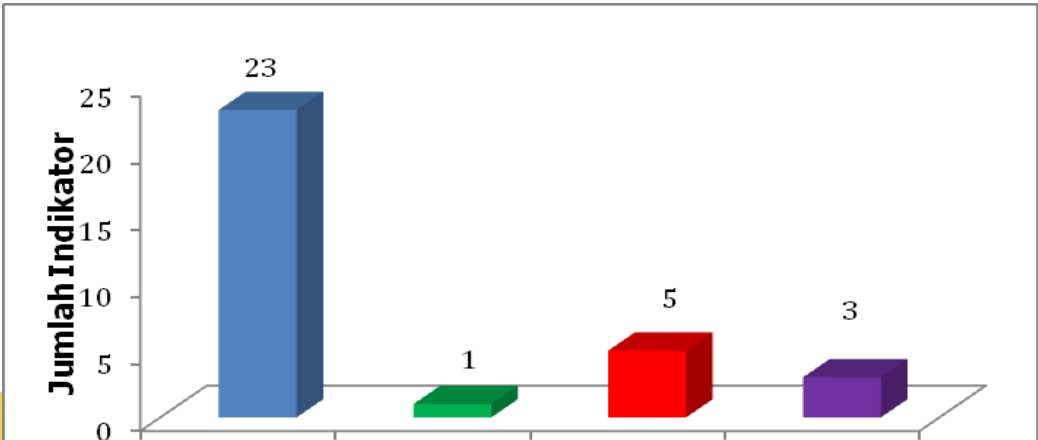
Dalam pelaksanaan pencapaian TPB, Provinsi NTT telah berhasil mencapai 32 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 15,76% dari 203 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi NTT. Capaian tersebut proporsinya adalah 35,95%, jika dibandingkan dengan jumlah indikator TPB yang telah dilaksanakan di Provinsi NTT sebesar 89 indikator. Jumlah indikator yang telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Gambar 2.21.



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.21
Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah Tujuan 3: *Kehidupan Sehat dan Sejahtera*, dengan jumlah 10 indikator, sedangkan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional ditunjukkan pada Gambar 2.22.

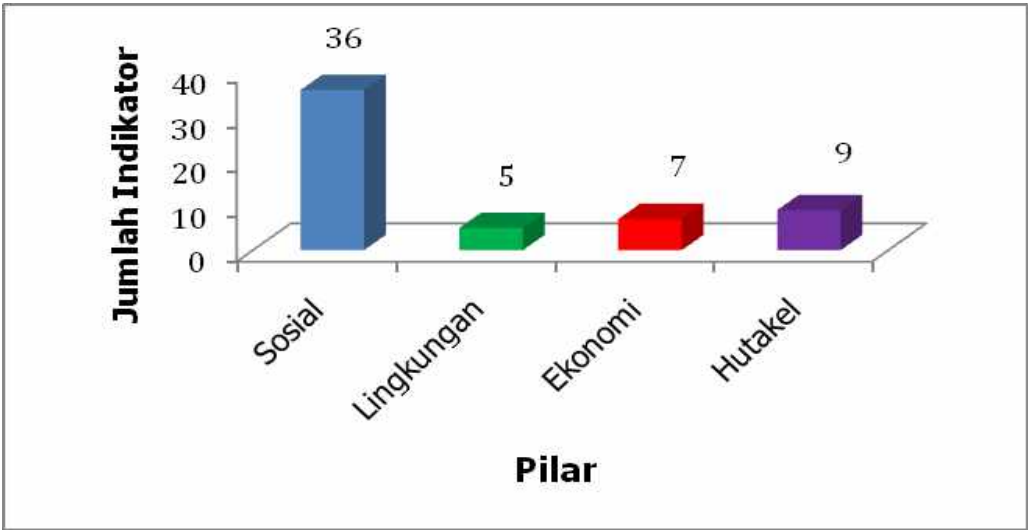


Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.22
Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

2.7.2.Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional terdapat di **Pilar Sosial** sebanyak 36 Indikator, sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional adalah **Pilar Lingkungan** sebanyak 5 (lima) indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional pada setiap pilar TPB ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

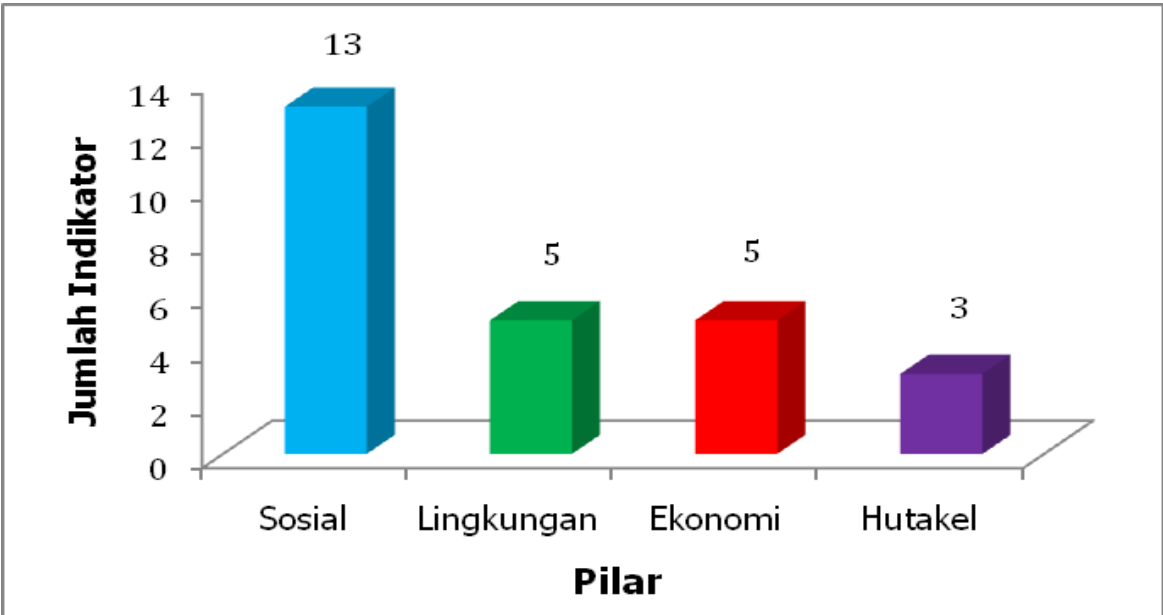
Gambar 2. 23
Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

2.7.3.Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional di Provinsi NTT adalah 26 Indikator atau 12,81% dari total



203 indikator. Indikator TPB terbanyak belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional terdapat di **Pilar Sosial** sebesar 13 Indikator, sedangkan indikator paling rendah yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah **Pilar Hukum** dan **Tata Kelola** sebesar 3 (tiga) indikator. Jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

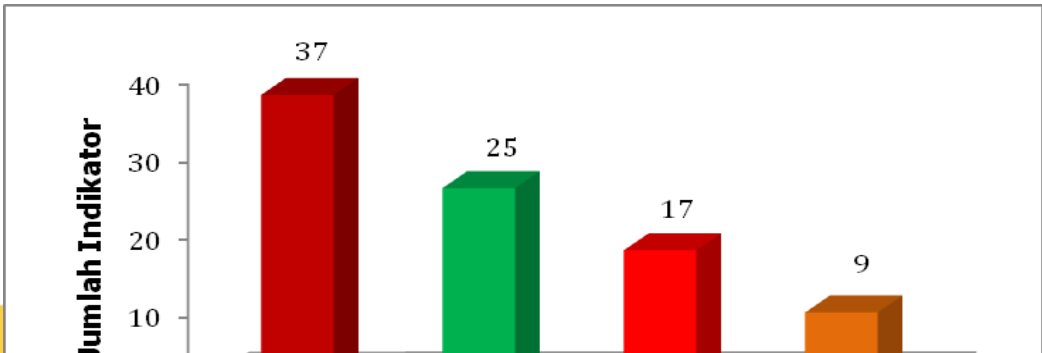


Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.24
Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

2.7.4. Indikator TPB Dengan Data Belum Tersedia Pada Setiap Pilar

Kategori Indikator TPB yang belum ada data di Provinsi NTT mencapai 88 Indikator atau 43,35% dari total 203 indikator. Indikator TPB terbanyak yang belum ada data terdapat di **Pilar Sosial**, yaitu 37 Indikator (42%), sedangkan indikator paling rendah yang belum ada data adalah **Pilar Hukum dan Tata Kelola** sebesar 9 (sembilan) indikator atau 10%. Jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.25
Jumlah Indikator TPB dengan Data Belum Tersedia
pada Setiap Pilar

Berdasarkan data yang disajikan dalam Gambar 2.21 hingga 2.25, tampak bahwa pelaksanaan pencapaian indikator TPB di Provinsi NTT masih menghadapi tantangan yang cukup berat, karena dari 203 indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi NTT baru 32 indikator atau 15,76% yang telah mencapai target nasional. Capaian indikator TPB Provinsi NTT terhadap target nasional disajikan pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133
Capaian Indikator TPB Provinsi NTT Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional	32	15,76
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	57	28,08
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	26	12,81
4.	Indikator yang belum/tidak memiliki data	88	43,35
	TOTAL	203	100

Sumber: Hasil olahan data KLHS, 2018

Tabel 2.134
Capaian Indikator SDGs Provinsi NTT Tahun 2017

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun				
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	22,19	21,85
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	50	70
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	NA	NA
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	NA	NA
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	69,18	73,05
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	45,54	40,54



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	45,08	43,84
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	60,4	65,2
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	40,46	45,31



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	59,67	23,9
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	95,24	95,04
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	66,56	67,16
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	NA	NA
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	53,67	56,65
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	NA	NA
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan				
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	28,2	28,3



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan	100	100
		kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	NA	NA
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	38,8	40,3
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	32,2	30
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,69	0,69
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	NA	NA
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	76,3	77,8
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	73	77,8



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	NA	NA
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	NA	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian.	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	NA	NA
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia				
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	131	120



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	NA	NA
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	NA	NA
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7	9
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	845	699
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1088	874
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	5,67	72,19



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	29.200/29, 117	22.300/30.232
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	NA	NA
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	2,17	3,39
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	45,1	30
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	44,8	32,3
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	38,3	41,2
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	3,4	3,4
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	NA	NA
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100	100



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the <i>Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	19,35	17,06
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>The Doha Declaration</i> tentang the <i>TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	86,54	59
Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua				
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara,	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	36	40



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	27	30
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	26,10	30
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	114,12	114,05
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	89,56	91,35
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	79,34	78,83
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	NA	NA
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	25,27	27,44



Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	22,71	24,35
TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	98,52	100,16
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat;	120,42	112,42
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;	113,89	118,83
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	130,56	89,63



Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki- laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	91,52	91,68
Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan				
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	13	16
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	49	50



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	39	56
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	NA	NA
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	79,34	78,83
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	NA	NA
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	5	6
Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua				



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	60,04	65,2
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	NA	NA
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	40,46	45,31
terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan				
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	NA	NA
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	NA	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	NA	NA
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	NA	NA
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	NA	NA
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	NA	NA
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	NA	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 : Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua				
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	58,68	59,85
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	NA	NA
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	NA	NA
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	NA	NA
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	NA	NA
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua				
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	8,51	6,87
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	16,13	17,24



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	48,13 (L) 54,71(P)	42,47(L) 59,32(P)
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	25,2	24,14
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	52,33	53,28
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	NA	NA
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	NA	NA
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2,88(L) 3,73(P)	3,41(L) 3,1(P)



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	NA	NA
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	3,28
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	11.985	136.436
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	541.555	592.326
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi				
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan,	25	25



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	NA	NA
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	1,23	1,26
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri	4,98	7,36
lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang,		manufaktur.		
Target 9.4 Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan. dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	(Catatan: Indikator tidak relevan. Capaian Tingkat Penurunan Emisi adalah untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. Untuk sektor industri diklaim menjadi capaian nasional oleh Kemenperin dan tidak diklaim lagi oleh provinsi agar tidak double counting (arahan Bappenas)	



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	NA	NA
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	37,96	40,97
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara				
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata mnasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,362	0,359
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	22,01	21,38
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	NA	NA
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 : Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan				



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	NA	NA
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	NA	NA
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	NA	NA
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 : Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan				
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang	12.4.1.(a)	Jumlah peserta yang mencapai minimal ranking BIRU.	NA	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	NA	NA
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Jumlah TPS3R yang dibangun	NA	NA
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	NA	NA
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 : Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*				
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	NA	NA
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	NA	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1*	~~Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.~~		
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	NA	NA
	13.2.2	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD- GRK	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 : Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan				
14. Ekosistem Lautan	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrument terkait penataan ruang laut nasional.	NA	NA
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	631693	673943
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang Mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	2	2
	4.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	6818	6818



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati				
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	73,21	73,21
	15.1.2	Luas taman kehati	NA	NA
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	NA
	15.2.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,01	0,08
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	NA
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,01	0,08



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Persentase Tutupan Hutan	NA	NA
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	NA	NA
Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1.	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level				
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	9	16
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	NA	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	CC	B
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	65,92	NA
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12,07	9,23
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	9,43	11,32
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	66,46	NA



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	96,25	NA
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	81,86	NA
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	53,66	56,65
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 : Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan				
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	NA	NA
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	NA	NA

Sumber: Bappeda Provinsi NTT), 2018



2.8. Integrasi RTRW dalam RPJMD

2.8.1. Rencana Struktur Ruang

2.8.1.1. Rencana Sistem Perkotaan

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah Provinsi NTT merupakan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi, yang dapat terdiri dari:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa Provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa Provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. PKW ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan dengan kriteria:



- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. PKSN ditetapkan dengan kriteria:

- a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga
- c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

Rekomendasi hirarki Sistem Pusat Kegiatan dikaji dengan memperhatikan Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan. Sistem Pusat Kegiatan berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.27. Pada tabel ini dapat dilihat rekomendasi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN promosi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKW promosi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi :

- a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT;
- b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka;
- c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;



- d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo;
- e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba’a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
- f. PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

Sistem Perdesaan mencakup seluruh pusat Kecamatan diluar Sistem Perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, dengan Kecamatan strategis tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Kecamatan Strategis di Provinsi NTT

Kabupaten/ Kota	Kecamatan Strategis
Kota	-
Kupang	Kupang Barat, Amarasi, Sulamu, Amfoang Utara
Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan, Kolbano, Boking, Amanatun Utara, Mollo Utara
Timor Tengah Utara	Miomafo Timur, Miomafo Barat, Insana, Biboki Anleu
Belu	Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Kobalima
Rote Ndao	Rote Timur, Rote Barat Daya
Alor	Alor Barat Daya, Alor Timur, Pantar
Lembata	Omesuri, Atadei
Flores Timur	Wulang Gitang, Solor Timur, Adonara Timur
Sikka	Paga, Waigete, Magepanda
Ende	Nangapenda, Wolowaru, Wewaria
Nagekeo	Nangaroro, Mauponggo, Boawae
Ngada	Golewa, Aimere, Wolomese
Manggarai Timur	Kota Komba, Sambu Rampas, Poco Ranaka
Manggarai	Satar Mese, Cibai
Manggarai Barat	Lembor, Kuwus
Sumba Barat Daya	Kodi Bangedo, Wewewa Timur
Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat
Sumba Timur	Kambera, Lewa, Umalulu, Ngadu Ngala
Sabu	Hawu Mehara

Sumber Data: Hasil Analisis RTRW 2018



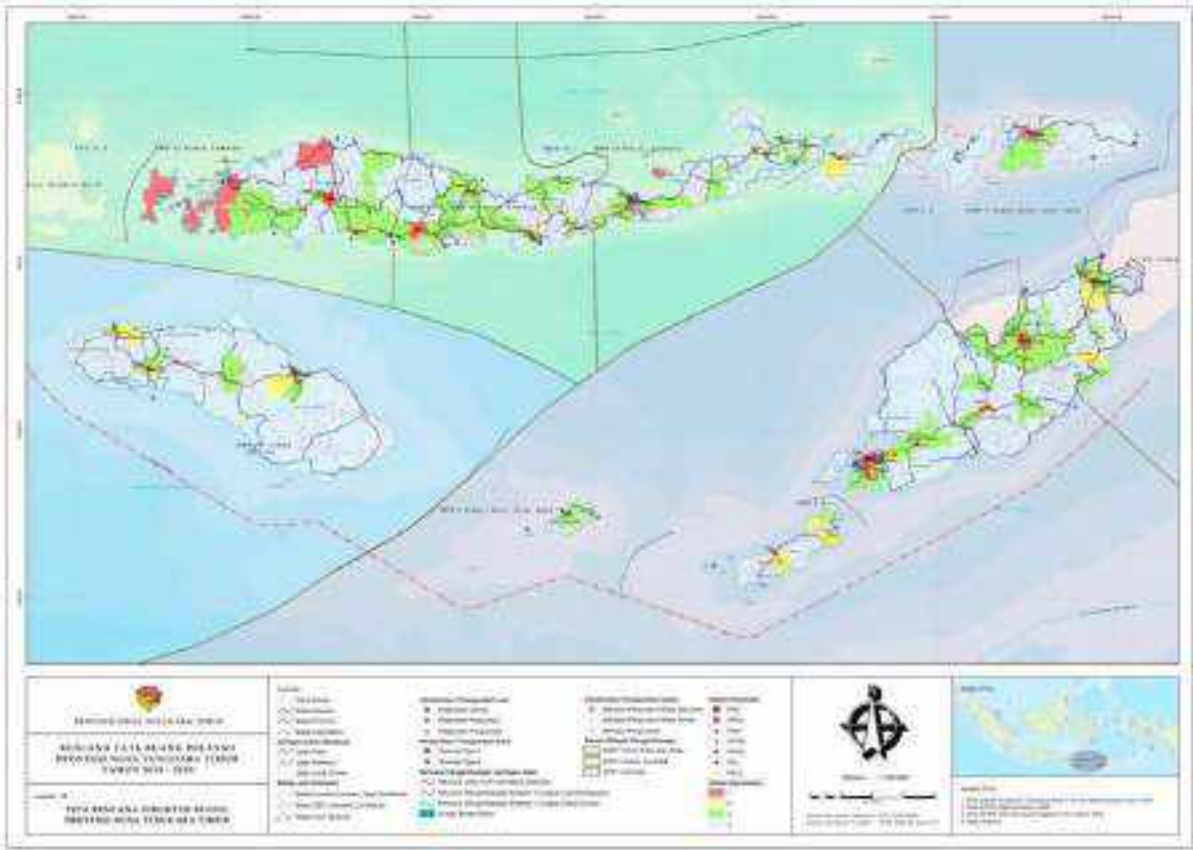
2.9. RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH

2.9.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, Sistem jaringan transportasi laut dan Sistem jaringan transportasi udara.

2.9.1.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat yang terdapat di Provinsi NTT meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan lalu lintas angkutan dan jalan meliputi jaringan jalan serta jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.26
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi NTT

Jaringan Jalan terdiri dari:

Jaringan jalan strategis nasional rencana, meliputi:

1. Ruas jalan yang menghubungkan Wailebe – Waiwadan – Kolilanang – Sagu – Waiwuring di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur;
2. Ruas jalan yang menghubungkan Lewoleba – Balauring di Pulau Lembata;
3. Ruas jalan yang menghubungkan Baranusa – Kabir di Pulau Pantar, Kabupaten Alor;



4. Ruas jalan yang menghubungkan Batuputih – Panite – Kalbano – Oinlasi – Boking – Wanibesak – Besikama – Webua – Motamasin – Batas Timor Timur di Pulau Timor;
 5. Ruas jalan yang menghubungkan titik tengah ruas jalan Bolok – Tenau dengan Sp. Lap. Terbang di Kabupaten Kupang;
 6. Ruas jalan yang menghubungkan Mesara – Seba – Bolow di Pulau Sabu;
 7. Ruas jalan yang menghubungkan Batutua – Baa – Pantebaru – Papela – Eakun di Pulau Rote;
 8. Ruas jalan yang menghubungkan Nggorang – Kondo – Hita – Kendidi dan ruas jalan yang menghubungkan Reo – Pota – Waikelambu – Riung – Mboras
– Danga – Nila – Aeramo – Kaburea – Nabe – Ronokolo – Maurole – Kotabaru – Koro – Magepanda – Maumere di Pulau Flores; dan
 9. Ruas jalan yang menghubungkan Waingapu – Melolo – Ngalu – Baing di Pulau Sumba.
- b. Jaringan jalan arteri primer, dengan status jalan nasional, meliputi:
1. Jalan Lintas Pulau Flores meliputi ruas jalan Labuan Bajo – Malwatar, Malwatar – Bts Kota Ruteng, Jln Komodo (Kota Ruteng), Bts Kota Ruteng – Km 210, Jln A. Yani (Kota Ruteng), Jln Ranaka (Kota Ruteng), Km 210 – Bts Kab. Manggarai, Bts Kab. Manggarai – Sp. Bajawa, Bts Kota Bajawa – Malanuza, Jl. Gatot Subroto (Bajawa), Jl. A.Yani (Bajawa), Jl. Soekarno-Hatta (Bajawa), Malanuza – Gako, Gako – Aegela, Aegela – Bts Kota Ende, Jl. Arah Bajawa (Ende), Jl. Perwira (Ende), Jl. Soekarno (Ende), Jl. Katedral (Ende), Bts Kota Ende – Detusoko, Jl. A. Yani (Ende), Jl. Gatot Subroto (Ende), Detusoko – Wologai, Wologai – Junction, Junction – Wolowaru, Wolowaru – Lianunu, Lianunu – Hepang, Hepang – Nita, Nita – Woloara, Woloara – Bts Kota Maumere, Jl. Gajahmada (Maumere), Jl. Nongmeak (Maumere), Jl. Sugiyo Pranoto (Maumere), Jl. Kontercius (Maumere), Bts Kota Maumere – Waepare, Jl. A. Yani (Maumere), Waepare – Km 180, Km 180 – Waerunu, Waenuru – Bts Kota Larantuka, Jl. Basuki Rahmat (Larantuka), Jl. Hermanfernandes (Larantuka), Jl. Yoakim Bl. Derosari (Larantuka), Jl. Renha Rosari (Larantuka), Jl. Yos Sudarso (Larantuka); dan
 2. Jalan Lintas Pulau Timor meliputi ruas jalan Bolok – Tenau, Jl. Ke Tenau (Kupang), Jl. Tua Bata (Kupang), Jl. Pahlawan (Kupang), Jl.



Soekarno (Kupang), Jl. A.Yani (Kupang), Jl. Siliwangi (Kupang), Jl. Sumba – Sumatera (Kupang), Jl. Timor – Timur (Kupang), Simpang Oesapa – Lap.Terbang Eltari, Jl. Raya Eltari, Oesapa – Oesao, Oesao – Bokong, Bokong – Batuputih, Batuputih – Bts Kota Soe, Jl. Gajahmada (Soe), Jl. Sudirman (Soe), Bts Kota Soe – Niki-niki, Jl. Diponegoro (Soe), Jl. A. Yani (Soe), Niki-niki – Noelmuti, Noelmuti – Bts Kota Kefamenanu, Jl. Pattimura (Kefamenanu), Jl. Kartini (Kefamenanu), Jl.Eltari (Kefamenanu), Jl. Basuki Rahmat (Kefamenanu), Bts Kota Kefamenanu – Maubesi, Jl. A. Yani (Kefamenanu), Maubesi – Nesam (Kiupukan), Nesam (Kiupukan) – Halilulik, Halilulik – Bts Kota Atambua, Jl. Suprpto (Atambua), Jl. Supomo (Atambua), Jl. M.Yamin (Atambua), Jl. Basuki Rahmat (Atambua), Bts Kota Atambua – Motaain, Jl. Martadinata (Atambua), Jl.Yos Sudarso (Atambua).

c. Jaringan jalan kolektor primer K1, dengan status jalan nasional, meliputi:

1. Jalan Lintas Pulau Flores pada ruas jalan Bts Kota Ruteng – Reo – Kendidi, Jl. Mutang Rua (Ruteng), Jl. Wae Cees (Ruteng), dan Jl. Satar Tacik (Ruteng);
2. Jalan Lintas Pulau Timor pada ruas jalan Bts Kota Kefamenanu – Oelfaub, Jl. Diponegoro (Kefamenanu), Jl. Sukarno (Kefamenanu), dan Jl. Ketumbar (Kefamenanu);
3. Jalan Lintas Pulau Sumba meliputi ruas jalan Waikelo – Waitabula/ Tambolaka, Waitabula/Tambolaka – Bts Kota Waikabubak, Jl. Sudirman (Waikabubak), Bts Kota Waikabubak – Bts Kab. Sumba Timur, Bts Kab. Sumba Timur – Km 35, Km 35 – Bts Kota Waingapu, Jl. Suprpto (Waingapu), Jl. Panjaitan (Waingapu), Jl. MT.Haryono (Waingapu), Jl. A. Yani (Waingapu), Jl. Diponegoro (Waingapu), Jl. Gajahmada (Waingapu), Jl. Adam Malik (Waingapu), Jl. Matawi Amahul (Waingapu), dan Jl. Nansa Mesi (Waingapu); dan
4. Jalan Lintas Pulau Alor meliputi ruas jalan Bts Kota Kalabahi – Taramana, Jl. Kartini (Kalabahi), Jl. Dewi Sartika (Kalabahi), Jl. Sudirman (Kalabahi), Jln Panglima Polim (Kalabahi), Jl Gatot Subroto (Kalabahi), Jl. Samratulangi (Kalabahi), Jl. Pattimura (Kalabahi), Taramana – Lantoka – Maritaing, dan Junction - Lapangan Terbang Mali.

d. Jaringan jalan kolektor primer, dengan status jalan Provinsi, meliputi ruas jalan:

1. Jaringan jalan yang ada di Pulau Timor, meliputi ruas jalan Oelmasi – Amarasi, Oelmasi – Sulamu – Amfoang Utara – Oepoli, Takari – Amfoang Utara, Oepoli – Eban – Kefamenanu, Batu Putih – Amanuban Selatan.,

- Amanuban Tengah – Boking, Amanatun Selatan – Amanatun Utara, Soe – Mollo Utara, Kefamenanu – Napan, Kefamenanu – Wini – Biboki Anleu – Atapupu, Atambua – Lamaknen – Haekesak, dan Malaka Tengah – Boking – Kolbano – Amanuban Selatan – Amarasi – Kupang Barat (Selatan Timor);
2. Jaringan jalan yang ada di Pulau Sumba, meliputi ruas jalan Waitabula (Tambolaka) – Kodi Utara – Kodi – Lamboya – Wanokaka – Waikabubak – Loli – Mambo, Waingapu – Umalulu – Rindi – Wula Waijelu – Ngadu Ngala – Karera – Tabundung – Katala Hamu Lingu, dan Waingapu – Kambaera – Matawai La Pawu – Paberiwai;
 3. Jaringan jalan yang ada di Pulau Flores, meliputi ruas jalan Maumere – Magepanda – Maurole – Wewaria – Aesesa – Riung – Sambi Rampas – Reok– Labuan Bajo (Flores Utara), Ende – Wewaria, Aesesa – Boawae – Mauponggo – Golewa, Bajawa – Wolomese – Riung, Satar Mese – Langke Rembong – Cibal – Reok, dan Nangalili – Lembor;
 4. Jaringan jalan yang ada di Pulau Rote, yaitu ruas jalan Batutua – Ba’a – Papela;
 5. Jaringan jalan yang ada di Pulau Alor, yaitu ruas jalan Kalabahi – Alor Barat Daya;
 6. Jaringan jalan yang ada di Pulau Lembata, yaitu ruas jalan Nubatukan – Buyasuri dan Nubatukan – Atadei; dan
 7. Jaringan jalan yang ada di Pulau Sabu, yaitu ruas jalan Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara.
- e. Jaringan jalan perbatasan meliputi ruas jalan:
1. Ruas jalan Wini – Maubesi – Sakato – Wini – Atapupu;
 2. Ruas Mota’ain – Atapupu – Atambua;
 3. Napan – Kefamenanu;
 4. Motamasin – Halilulik;
 5. Haekesak – Atambua;
 6. Ba’a – Papela;
 7. Kalabahi – Taramana- Maritaing;
 8. Seba – Bollow; dan
 9. Haumeni Ana – Soe.
2. Jaringan prasarana lalu lintas terdiri dari:
- a) Terminal tipe A terdapat di Kabupaten Kupang;
 - b) Terminal tipe B terdapat di Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Ende di Kabupaten Ende;



c) Terminal tipe terdapat di C Kalabahi, Maumere, Ende, Bajawa.

Rencana pengembangan terminal Tipe A terdapat di Mota'ain sebagai penghubung perbatasan antar negara disesuaikan dengan kapasitas pelayanan dan jumlah penumpang. Rencana pengembangan terminal Tipe B terdapat di Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Maumere di Kabupaten Sikka, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Ende di Kabupaten Ende, dan Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya disesuaikan dengan kapasitas pelayanan dan jumlah penumpang. Prasarana lalu lintas lainnya adalah Timbangan Jembatan yang ada di Provinsi meliputi : Nggorang, Watu Alo, Oesapa, Nunbaun Sabu, Motaain dan Waikelo

3. Rencana pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari :

- a. Rencana pengembangan pelabuhan terdiri dari: Pelabuhan Lewoleba, Marapokot, dan Sabu. Dermaga Labuan Bajo II, Dermaga Bolok III, Dermaga Larantuka II, Kalabahi II, Waiwerang (P. Adonara), Hansisi (P. Sema), P. Solor, P. Raijua;
 - b. Pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi terdiri dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Pelabuhan Tenau di Kota Kupang; dan
 - c. Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota terdiri dari Pelabuhan Bolok di Kabupaten Kupang, Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Pelabuhan Balauring dan Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata, Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Ende di Kabupaten Ende, Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada, Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Pelabuhan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao, Pelabuhan Maritaing dan Kalabahi di Kabupaten Alor, Pelabuhan Labuan Bajo dan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka, dan Pelabuhan Teluk Gurita di Kabupaten Belu.
- a. Lintas penyeberangan, terdiri dari:
 1. Rute Lintas Penyeberangan Kalabahi – Ilwaki, Pelabuhan Maropokot, Bolok Hansisi, Larantuka – P. Solor dan Sabu – Raijua;
 2. Lintas penyeberangan antar provinsi terdiri dari jalur Labuan Bajo – Sape (Bima), Komodo – Sape (Bima), Maumere – Surabaya, Ende – Surabaya, Teluk Gurita – Kisar (Maluku), Waikelo – Bima dan



Waingapu – Bima;

3. Lintas penyeberangan yang menghubungkan titik-titik pergerakan antar pulau dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, terdiri dari jalur Kupang – Pante Baru, Kupang – Seba, Kupang – Aimere, Kupang - Larantuka, Kupang - Lewoleba, Kupang – Waingapu, Kupang – Maritaing, Larantuka – Lewoleba – Baranusa, Baranusa – Atapupu, Waingapu – Seba, Waikelo – Aimere, Baranusa – Balauring, Labuan Bajo – Komodo, Kupang – Ende, dan Kupang – Maumere.



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.27
Peta Rencana Jaringan Transportasi Darat Provinsi NTT

2.9.1.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Rencana sistem jaringan transportasi laut di Propinsi NTT, terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan terdiri dari:

1. Pelabuhan utama;
 2. Pelabuhan pengumpul;
 3. Pelabuhan pengumpan; dan
 4. Terminal khusus.
1. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Nusa Lontar - Tenau di Kabupaten Kupang yang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, ekspor, dan angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, seni, dan pelayanan sembilan bahan pokok.



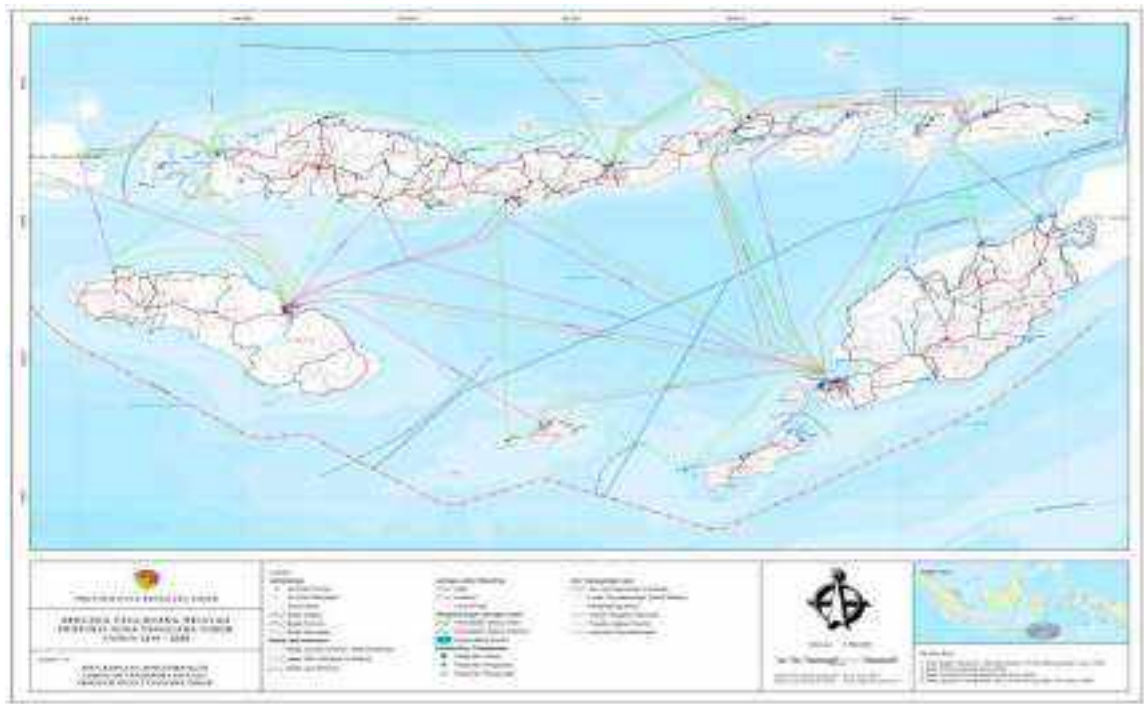
2. Pelabuhan pengumpul terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
 - b. Pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;
 - c. Pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
 - d. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - e. Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - f. Pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
 - g. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - h. Pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
 - i. Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - j. Pelabuhan Maumere/Lorensius Say di Kabupaten Sikka;
 - k. Pelabuhan Waingapu di Sumba Timur;
 - l. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - m. Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata; dan
 - n. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor.
3. Pelabuhan pengumpan terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor;
 - b. Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - c. Pelabuhan Moru di Kabupaten Alor;
 - d. Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur;
 - e. Pelabuhan Waiwerang di Kabupaten Flores Timur;
 - f. Pelabuhan Maropokot di Kabupaten Nagekeo;
 - g. Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
 - h. Pelabuhan Palue di Kabupaten Sikka.

Terminal khusus terdiri dari:

- a. Pelabuhan untuk kepentingan bongkar muat bahan bakar di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Lembata;
- b. Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan El Nusa di Kabupaten Kupang yang merupakan pelabuhan khusus minyak/energi yang berfungsi sebagai pelabuhan distribusi/transit bahan bakar;
- c. Pelabuhan rakyat dikembangkan di wilayah Provinsi yang berfungsi sebagai pelabuhan kapal rakyat;
- d. Pelabuhan terpadu di Kabupaten Sumba Tengah untuk pengembangan ekonomi dengan fungsi perikanan, wisata dan pelabuhan umum;
- e. Pelabuhan Ecoport di Kota Kupang untuk pengembangan pelabuhan berwawasan lingkungan dengan fungsi pariwisata, umum dan pendaratan ikan yang berwawasan lingkungan; dan



f. Pelabuhan Militer TNI AL di Kabupaten Kupang.



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.28
Peta Rencana Jaringan Transportasi Laut Provinsi NTT

Alur pelayaran terdiri dari :

- a. Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang - Timor Leste, Atapupu - Timor Leste dan Kalabahi - Timor Leste;
- b. Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba - Maumere - Makasar - Pare Pare - Nunukan - Tarakan, Larantuka - Makasar - Batu Licin - Semarang - Tanjung Priuk - Tanjung Pinang, Ende - Waingapu - Benoa - Surabaya - Dumai - Surabaya; dan
- c. Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang - Ndao - Sabu - Raijua - Ende - Pulau Ende - Maumbawa - Mborong - Waingapu - Waikelo - Labuan Bajo, Kupang - Naikliu - Wini - Kalabahi - Maritaing - Lirang - Kisar - Leti, Kupang - Mananga - Lewoleba - Balauring - Baranusa - Kalabahi - Atapupu, Kupang - Mananga - Maumere - Marapokot - Reo - Labuan Bajo - Bima, Kupang - Sabu Raijua - Raijua - Sabu Raijua - Kupang, dan Kupang - Mananga - Maumere - Sukun - Palue - Maurole - Marapokot - Reo - Labuan Bajo - Bima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran untuk pelayaran diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Laut.

2.9.1.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara



Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara, terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Sistem jaringan transportasi udara terdiri dari:

- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
- b. Ruang udara untuk penerbangan. Tatanan kebandarudaraan terdiri dari:
 - 1) Bandar udara pengumpul skala sekunder;
 - 2) Bandar udara pengumpul skala tersier; dan
 - 3) Bandar udara pengumpan.

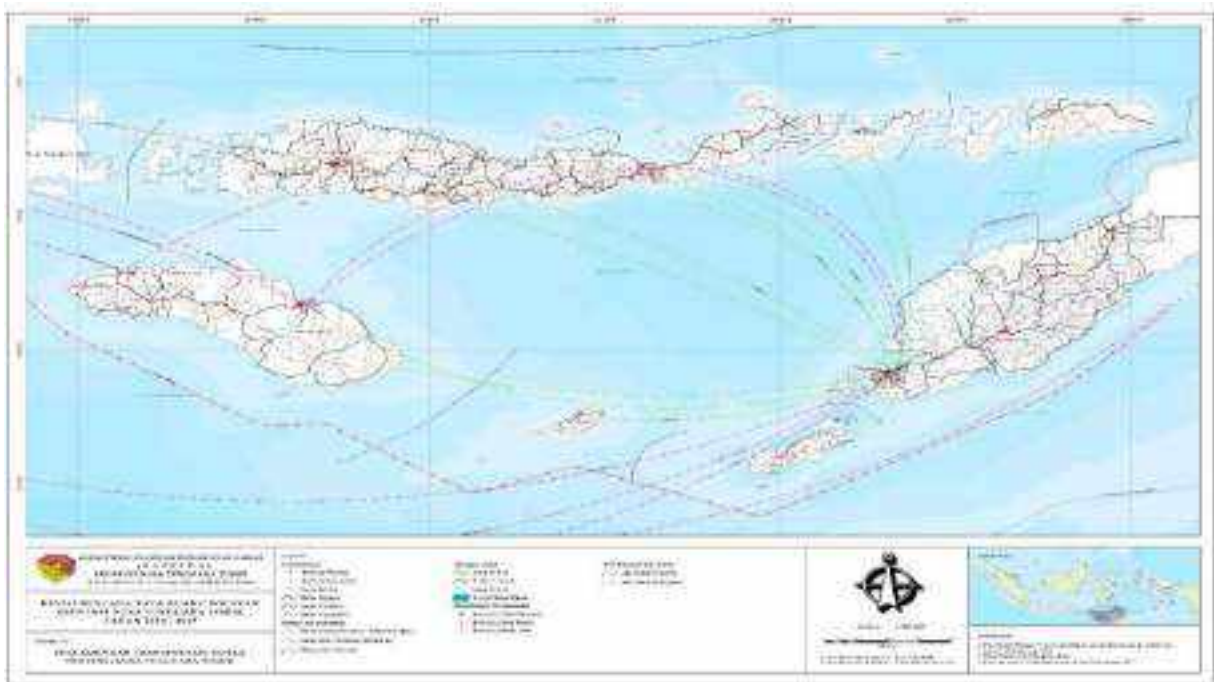
Bandar udara pengumpul skala sekunder, yaitu Bandar Udara El Tari di Kota Kupang dengan penggunaan sebagai bandar udara internasional regional yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri, serta berfungsi untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di Kota Kupang.

Bandar udara pengumpul skala tersier terdiri dari:

- a) Bandar Udara Wai Oti (Frans Seda) di Kabupaten Sikka;
- b) Bandar Udara Mau Hau (Ir. Umbu Meheng Kunda) di Kabupaten Sumba Timur;
- c) Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende; dan
- d) Bandar Udara Haliwen di Kabupaten Belu. Bandar udara pengumpan terdiri dari:
 - e) Bandar Udara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - f) Bandar Udara Lekunik di Kabupaten Rote Ndao;
 - g) Bandar Udara Terdamu di Kabupaten Sabu Raijua;
 - h) Bandar Udara Satartacik di Kabupaten Manggarai;
 - i) Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
 - j) Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
 - k) Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata;
 - l) Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada; dan
 - m) Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.

Rencana peningkatan kelas Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi bandar udara pengumpul skala tersier sesuai dengan peningkatan jumlah penumpang dan kapasitas pelayanan. Rencana pengembangan Bandar Udara Surabaya II di Kabupaten Nagakeo menjadi bandar udara pengumpan.





Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.29
Peta Rencana Jaringan Transportasi Udara dan Jalur Penerbangan
Provinsi NTT

Ruang udara untuk penerbangan yaitu antara lain berupa jalur penerbangan, terdiri dari:

- a. Jalur penerbangan dari luar Provinsi menuju Bandara El Tari di Kota Kupang, Wai Oti/Frans Seda di Kabupaten Sikka, Umbu Meheng Kunda di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Komodo di Manggarai Barat.
- b. Jalur penerbangan lokal, terdiri dari:
 - 1) Jalur penerbangan dari Bandara El Tari ke Bandara Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Wai Oti/Frans Seda, Hasan Aroboesman, Surabaya II, SoA, Satar Tacik, Komodo, Umbu Meheng Kunda, Tambolaka, Lekunik dan Tardamu;
 - 2) Jalur penerbangan dari Bandara Wai Oti dan Komodo ke Bandara Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Umbu Meheng Kunda, Tambolaka, Lekunik dan Tardamu; dan
 - 3) Jalur penerbangan dari Umbu Meheng Kunda dan Tambolaka ke Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Komodo, Lekunik dan Tardamu.
 - 4) Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam Rencana



Induk Bandar Udara.

2.9.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pengembangan sistem jaringan energi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik, transmisi dan Bahan Bakar Minyak;

Sistem jaringan energi terdiri dari :

- a. Pembangkit tenaga listrik;
- b. Gardu induk;
- c. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. Depot Bahan Bakar Minyak

Pembangkit tenaga listrik terdiri dari :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, meliputi:
 1. PLTD Alak dan Koanino di Kota Kupang;
 2. PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 3. PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 4. PLTD Manggarai di Kabupaten Manggarai;
 5. PLTD Maumere di Kabupaten Sikka;
 6. PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
 7. PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 8. PLTD Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 9. PLTD Kalabahi di Kabupaten Alor; dan 10. PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao.
 10. PLTD Betun di Kabupaten Malaka;
 11. PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; dan
 12. PLTD Borong di Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb) meliputi:
 1. PLTPb Ulumbu di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 2 x 2,5 MW;
 2. PLTPb Mataloko di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 1 x 2,5 MW;
 3. PLTPb Atadei di Kabupaten Lembata dengan kapasitas 2 x 2,5 MW;
 4. PLTPb Sukoria di Kabupaten Ende dengan kapasitas 2 x 2,5 MW.
 5. PLTPB Manuwolu di Kabupaten Sumba Tengah;
 6. PLTPB Mataloko Kabupaten Ngada;
 7. PLTPB Atadei di Kabupaten Lembata;
 8. PLTPB Oelbubuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan;



9. PLTPB Hambapraing di Kabupaten Sumba Timur;
 10. PLTPB Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur;
 11. PLTPB Bukapiting di Kabupaten Alor;
 12. PLTPB Ulumbu 5 di Kabupaten Manggarai;
 13. PLTPB Mataloko (FTP) di Kabupaten Ngada ;
 14. PLTPB Sokoria di Kabupaten Ende,
 15. PLTB Ulumbu 6 di Kabupaten Manggarai;
 16. PLTPB Sokoria (FTP 2) di Kabupaten Ende;
 17. PLTPB Oka Ile Ange (FTP 2) di Kabupaten Flores Timur;
 18. PLTPB Sokoria (FTP 2) di Kabupaten Ende;
 19. PLTPB Waisano di Kabupaten Manggarai Barat;
 20. PLTPB Lesugoko di Kabupaten Manggarai;
 21. PLTPB Atadei di Kabupaten Lembata; dan
 22. PLTPB Oka Larantuka di Kabupaten Flores Timur
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi
1. PLTU Larantuka di Kabupaten Flores Timur kapasitas 2 x 4 MW ke PLTU Apoik di Kabupaten Belu; dan
 2. PLTU Ropa di Kabupaten Ende berkapasitas 2 x 7 MW.
 3. PLTU Bolok di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 2 x 16,5 MW interkoneksi ke PLTU Apoik di Kabupaten Belu; dan
 4. PLTU Ropa di Kabupaten Ende berkapasitas 2 x 7 MW.
 5. PLTU Timor di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 6. IPP Kupang di Kabupaten Kupang;
 7. PLTU Alor di Kabupaten Alor;
 8. PLTU Rote di Kabupaten Rote;
 9. PLTU Timor I di Kabupaten Kupang;
 10. PLTU Timor II di Kabupaten Kupang;
 11. PLTU Atapupu di Kabupaten Belu;
 12. PLTU Maumere di Kabupaten Sikka; dan
 13. PLTU Atambua di Kabupaten Belu.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Ogi di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 60 KW;
 2. PLTM Waigaret di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 80 KW; dan
 3. PLTM Lokomboro di Sumba Barat Daya dengan kapasitas 800 KW.
 4. PLTM di Desa Umbu Kawolu, Desa Praimadeta, Desa Sambililoku, Desa Wangga Wainyengu, Desa Maradesa, Desa Waimanu Kabupaten Sumba Tengah;
 5. PLTM Nuapin di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 6. PLTM Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;



7. PLTM Oepopo di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 8. PLTM Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 9. PLTM di Desa Wolokisa, Kampung Wulu, Selalejo di Kabupaten Nagekeo;
 10. PLTM Wae Musur Sita-Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
 11. PLTM Wae Lampang Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Sambi Rampas di Kabupaten Manggarai Timur;
 12. PLTM Wae Lega di Kabupaten Manggarai;
 13. PLTM Cunca Polo di Kabupaten Manggarai Barat;
 14. PLTM Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat;
 15. PLTM Wae Racang I di Kabupaten Manggarai;
 16. PLTM Wae Racang II di Kabupaten Manggarai;
 17. PLTM Soru di Kabupaten Sumba Timur;
 18. PLTM Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
 19. PLTM Harunda di Kabupaten Sumba Timur;
 20. PLTM Wanokaka I di Kabupaten Sumba Barat;
 21. PLTM Wae Roa di Kabupaten Ngada;
 22. PLTM Ndungga di Kabupaten Ende;
 23. PLTM Wolodaesa di Kabupaten Sikka;
 24. PLTM Gilkes, PLTM Barata, PLTM Wae Lega dan PLTM Sita di Pulau Flores;
 25. PLTM Maidang, PLTM Lewa, dan PLTM Praikalala di Kabupaten Sumba Timur dan;
 26. PLTM Kudungawa, PLTM Umbuwangu, PLTM Peduhunga dan PLTM Kambaniru di Pulau Sumba.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) meliputi:
1. PLTH Nemberala dengan kapasitas 147 KW di Pulau Rote, terdiri dari tenaga surya 22 KW, tenaga bayu 90 KW dan tenaga diesel 135 kW;
 2. PLTH Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Distrik Oecusi, Timor Leste, dengan kapasitas 390 KW, terdiri dari tenaga surya 120 KW, tenaga bayu 90 KW dan tenaga diesel 180 KW;
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SoE di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kapasitas 1 MW.
- g. PLTBio Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan PLTBio Umbuwango di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- h. PLTS di Kupang dan Atambua di Kabupaten Belu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Desa Oledewa di Kabupaten Sumba Tengah; terpusat di Desa Rana Mbata dan Desa Mokel, PLTS terpusat di Desa Tedamude, Desa Tedakisa dengan, PLTS terpusat di Desa Nggolonio, Desa Mbaebuamuri dan rencana pengembangan PLTMH pada DAS Aesesa dan



daerah-daerah kepulauan di Kabupaten/Kota;

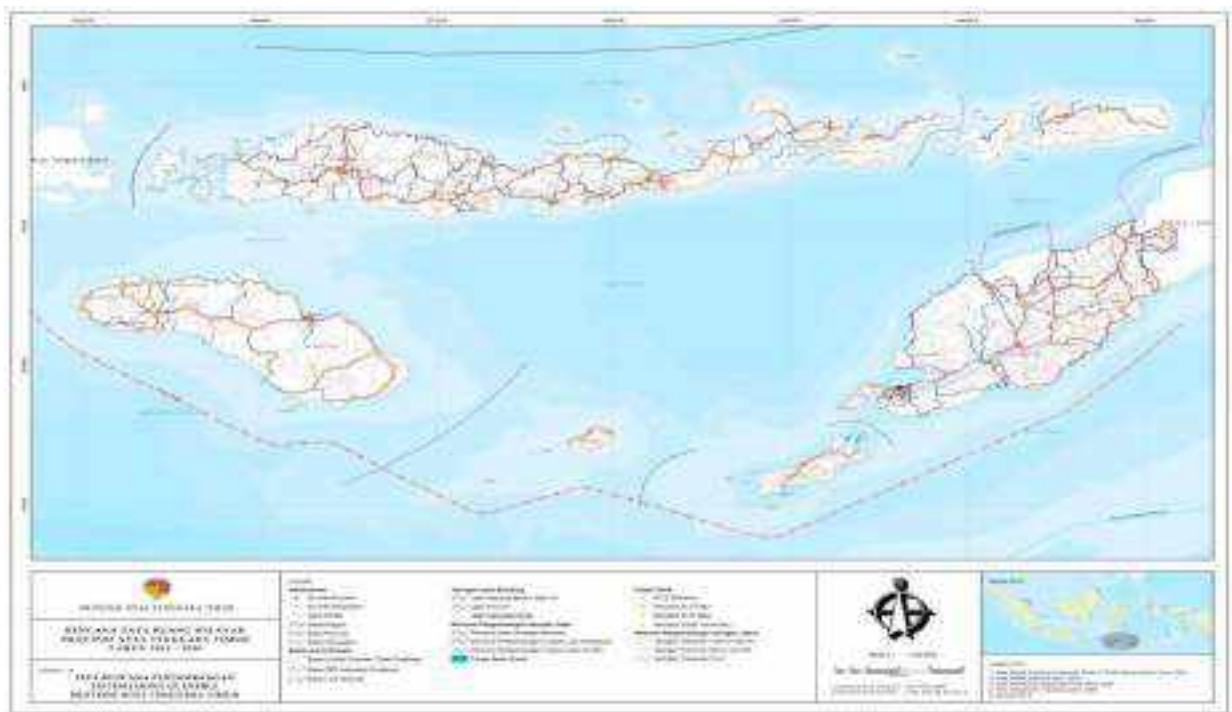
- i. PLTA di Maubesi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kudungawa, Ubungawu III dan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Temef dan PLTA Wae Racang di Kabupaten Manggarai Timur.
- j. PLTMG Kupang Peaker, Kupang Peaker II di Kabupaten Kupang, Maumere Peaker di Kabupaten Sikka, PLTG/MG Mobile PP NTT (Kupang), Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Alor di Kabupaten Alor, Rote I, Rote II dan Rote III di Kabupaten Rote Ndao, dan Timor I di Kabupaten Kupang, PLTMG MPP Flores (Labuan Bajo) di Kabupaten Manggarai Barat, PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata, PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- k. PLTAL di Kabupaten Flores Timur, Bolok di Kabupaten Kupang, Selat Alas, Selat Linta, Selat Molo, Selat Flores, Selat Lewotobi, Selat Solor;
- l. PLTGB Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
- m. PLTBM di Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sumba Timur, dan;
- n. PLTG di Rana Masak dan Rana Roko, PLTG Wae Mapos, PLTG Pinggan Ras, PLTG Wodong dan Wae Loe di Kabupaten Manggarai Timur.

Gardu Induk terdiri dari :

1. GI Maulafa di Kota Kupang kapasitas 60 MW dan tegangan 70/20 KV;
2. GI Bolok di Kabupaten Kupang kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
3. GI Naibonat di Kabupaten Kupang kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
4. GI Nonohamis / Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
5. GI Atambua di Kabupaten Belu kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
6. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara kapasitas 20 MW tegangan 70/20 KV;
7. GI Ende di Kabupaten Ende dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
8. GI Ropa di Kabupaten Ende kapasitas 10 MW dan tegangan 70/20 KV;
9. GI Maumere di Kabupaten Sikka kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
10. GI Bajawa di Kabupaten Ngada kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;



- 11. GI Ruteng di Kabupaten Manggarai kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
- 12. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat kapasitas 20 MW tegangan 70/20 KV.



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2. 30
Peta Rencana Jaringan Listrik Provinsi NTT

Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri dari:

- 1. Jaringan transmisi tenaga listrik nasional berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota Kupang – Oelmasi – Soe – Kefamenanu – Atambua di Pulau Timor dan Labuan Bajo – Ruteng – Bajawa – Ende – Maumere di Pulau Flores;
- 2. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan PLTP Sukoria ke Ropa di Kabupaten Ende, PLTU Bolok ke Maulafa, Maulafa ke Naibonat, Naibonat ke Nonohamis / Soe, Kefamenanu – Atambua, PLTU Ropa ke Incomer (Ende – Maumere), Ende – Maumere, Bajawa ke Ruteng (PLTU Ulumbu), Bajawa ke Ende, Nonohamis/Soe ke Maulafa, dan Ruteng (PLTP Ulumbu) ke Labuan Bajo; dan
- 3. Jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan:
 - a. Larantuka – Maumere – Ende – Bajawa - Borong – Mbay di Pulau Flores.
 - b. Waitabula (Tambolaka) – Waikabubak – Waibakul dan Lewa – Melolo di

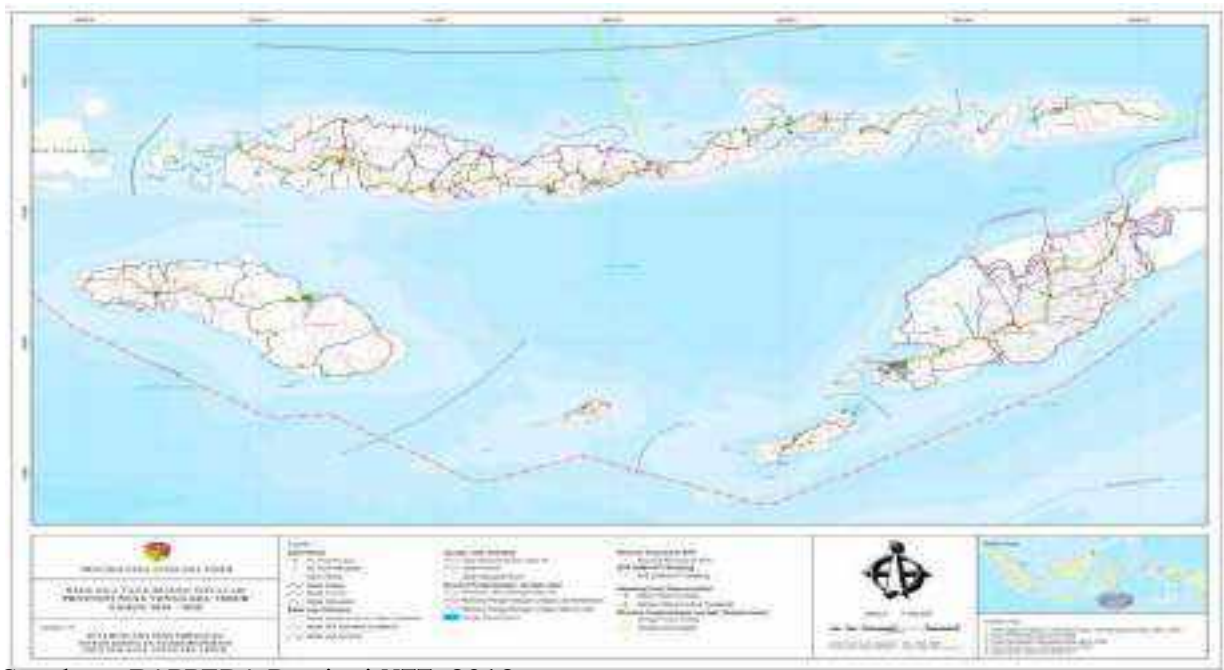


- Pulau Sumba.
- c. Pantai Baru – Rote Barat di Pulau Rote.
- d. Nubatukan – Buyasuri – Atadei di Pulau Lembata.
- e. Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara di Pulau Sabu; dan
- f. Kalabahi – Alor Barat Daya di Pulau Alor.

Depot Bahan Bakar Minyak terdiri dari: Depot Waingapu, Depot Reo, Depot Ende, Depot Maumere, Depot Kupang, Depot Kalabahi, dan Depot Atapupu.

2.9.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota.



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.31
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Provinsi NTT

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari: Jaringan terrestrial dikembangkan di Kota Kupang, Oelamasi di Kabupaten Kupang, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Atambua dan Betun di Kabupaten Belu, Kalabahi di Kabupaten Alor, Lewoleba di Kabupaten Lembata, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Maumere di Kabupaten Sikka, Ende di Kabupaten Ende, Bajawa di Kabupaten Ngada, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, Waingapu di Kabupaten Sumba



Timur, Baa di Kabupaten Rote Ndao, dan Seba di Kabupaten Sabu Raijua.

Jaringan satelit berupa Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Jaringan Fiber Optik dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi bawah laut bersifat antar pulau dengan sistem kabel Fiber Optic Junction/ Backbone.

2.9.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan air di Provinsi NTT adalah sebesar milyar m3/tahun. Rincian kebutuhan air di Provinsi NTT sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.136
Kebutuhan Air Provinsi NTT Tahun 2017

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan (liter/hari/orang)	m3/tahun
Jumlah Penduduk	5,287,302	Orang	120	231,583,828
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Liter/detik/Ha	m3/tahun
Lahan Padi	122,746	Ha	1	3,873,569,216
Lahan Padi Tadah Hujan	92,816	Ha	0.3	263,614,519
Lahan Kering Lainnya	1,600,000	Ha	0.3	4,543,765,737
Industri	12,675	Jiwa	500	2,313,188
Total				8,914,846,487

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018 (data diolah)

Tabel 2. 137
Daya Dukung Air Provinsi NTT Tahun 2017

No	Daya Dukung Air Permukaan Nusa Tenggara Timur pada 2017	Milyar m3	Ket.
1	Ketersediaan Air Permukaan dan Mata Air	3,86	
2	Kebutuhan Air (layak untuk seluruh kegiatan manusia 1.000 m³/kapita/tahun standar WHO)	5,52	
3	Kebutuhan Air per Kegiatan	8,91	
4	Defisit pemenuhan kebutuhan air layak	5,05	56,66%
5	Daya Dukung Air Permukaan	0,09	
6	Potensi CAT lintas dan dalam kabupaten kota	8,43	



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018 (data diolah)

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya air di Daerah Aliran Sungai, dan kawasan cekungan air tanah lintas Kabupaten maupun Kota. Data Wilayah Sungai yang disebut Satuan Wilayah Sungai (SWS) adalah sebagai berikut:

a. SWS Timor – Rote Ndao – Alor;

1. Daerah Aliran Sungai Manikin;
2. Daerah Aliran Sungai Oesao;
3. Daerah Aliran Sungai Batu Merah;
4. Daerah Aliran Sungai Nain;
5. Daerah Aliran Sungai Tuasene;
6. Daerah Aliran Sungai Noelmina;
7. Daerah Aliran Sungai Powu;
8. Daerah Aliran Sungai Kaubele;
9. Daerah Aliran Sungai Haekto;
10. Daerah Aliran Sungai Mena;
11. Daerah Aliran Sungai Talau;
12. Daerah Aliran Sungai Benanain;
13. Daerah Aliran Sungai Nobelu;
14. Daerah Aliran Sungai Haekesak;
15. Daerah Aliran Sungai Waelombur;
16. Daerah Aliran Sungai Bukapiting;
17. Daerah Aliran Sungai Sabu;
18. Daerah Aliran Menggelama.

b. SWS Flores - Lembata

1. Daerah Aliran Sungai Waikomo;
2. Daerah Aliran Sungai Flores Timur;
3. Daerah Aliran Sungai Bama;
4. Daerah Aliran Sungai Konga;
5. Daerah Aliran Sungai Mati;
6. Daerah Aliran Sungai Warlelau;
7. Daerah Aliran Sungai Ili Getang;
8. Daerah Aliran Sungai Mebe;
9. Daerah Aliran Sungai Kaliwajo;
10. Daerah Aliran Sungai Wolowana;
11. Daerah Aliran Sungai Mautenda;
12. Daerah Aliran Sungai Nangapanda;



13. Daerah Aliran Sungai Pamondiwal;
14. Daerah Aliran Sungai Aesesa;
15. Daerah Aliran Sungai Dampek;
16. Daerah Aliran Sungai Waikaap;
17. Daerah Aliran Sungai Reo;
18. Daerah Aliran Sungai Waemese.

c. SWS Sumba

1. Daerah Aliran Sungai Wanokaka;
2. Daerah Aliran Sungai Payeti;
3. Daerah Aliran Sungai Wanga;
4. Daerah Aliran Sungai Kakaha;
5. Daerah Aliran Sungai Kambaniru;
6. Daerah Aliran Sungai Pola Pare;
7. Daerah Aliran Sungai Wai Ha;
8. Daerah Aliran Sungai Wee Wagha;
9. Daerah Aliran Sungai Wee Lambora;
10. Daerah Aliran Sungai Wee Kalowo;
11. Daerah Aliran Sungai Loko Kalada;
12. Daerah Aliran Sungai Bewi;
13. Daerah Aliran Sungai Pamalar.

Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari:

- a) Wilayah sungai lintas negara;
- b) Wilayah sungai strategis nasional;
- c) Wilayah sungai lintas kabupaten/ kota;
- d) Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum;
- e) Jaringan air baku untuk pertanian;
- f) Sumber air baku di wilayah perbatasan; dan
- g) Sistem pengendalian banjir.

Wilayah sungai lintas negara terdiri dari: Wilayah Sungai Benanain yang melintasi Kabupaten Belu – Timor Leste dan Wilayah Sungai Noel – Mina yang melintasi Kabupaten Timor Tengah Selatan – Kabupaten Kupang – Oekusi di Timor Leste.

Wilayah Sungai Strategis Nasional yaitu Wilayah Sungai Aesesa yang melintasi Kabupaten Manggarai – Manggarai Timur – Ngada – Nagekeo – Ende – Sikka. Wilayah sungai lintas Kabupaten/ Kota, terdiri dari Wilayah Sungai Wae – Jamal yang melintasi Kabupaten Manggarai Timur – Manggarai – Manggarai Barat, Wilayah Sungai Flores – Lembata – Alor,



Wilayah Sungai yang melintasi Kabupaten Sumba Timur – Sumba Tengah – Sumba Barat. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum terdiri dari:

- a. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum berupa Bendungan yang menjadi kewenangan nasional, meliputi:
 - Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang;
 - Bendungan Welikis di Kabupaten Belu;
 - Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu;
 - Bendungan Napungetedi Kabupaten Sikka;
 - Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang;
 - Bendungan Pola Pare di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bendungan Waebara di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - Bendungan Wee Koe di Kabupaten Ngada.
- b. Sumber mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; dan
- c. Air tanah.

Jaringan air baku untuk pertanian yaitu berupa Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi. Penetapan Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dilakukan dengan memperhatikan Daerah Irigasi kewenangan Nasional. Data Daerah Irigasi kewenangan Nasional adalah sebagai berikut:

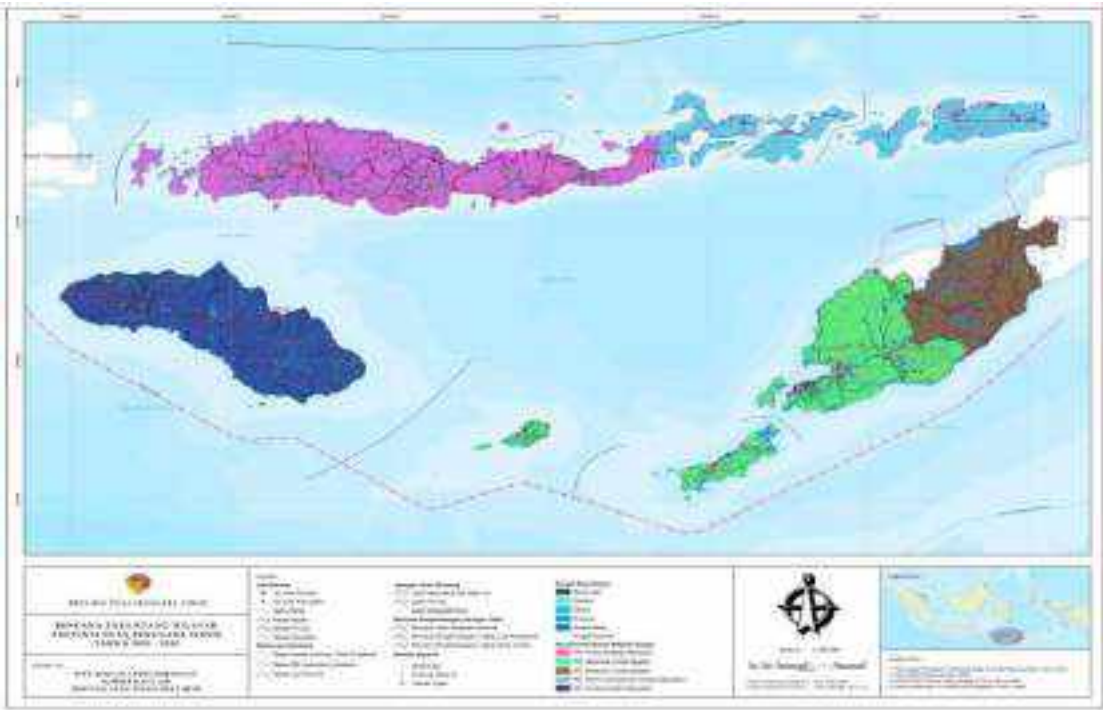
1. Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri dari DI Baus dan DI Bena;
2. Kabupaten Kupang, terdiri dari DI Batu Merah; DI Lokopehapo, DI Manikin, DI Oesao dan DI Tilong
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri dari DI Baus dan DI Bena;
4. Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri dari DI Beluana, DI Haekto dan DI Mena;
5. Kabupaten Belu, terdiri dari DI Haekesak dan DI Malaka;
6. Kabupaten Alor, yaitu DI Benleang;
7. Kabupaten Rote Ndao, yaitu DI Danau Tua;
8. Kabupaten Nagekeo, yaitu DI Mbay;
9. Kabupaten Ngada, yaitu DI Ngada dan DI Penginanga;
10. Kabupaten Manggarai, yaitu DI Wae Dingin dan DI Wae Laku, DI Wae Mantar dan DI Wae Musur, DI Wae Bobo dan DI Wae Peot;
11. Kabupaten Manggarai Barat, yaitu DI Lembor, DI Nggorang dan DI Terang.

Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu terdiri



dari:

- a. Daerah Irigasi (DI) Lintas Kabupaten/ Kota dengan luas total 1.630 Ha, meliputi: DI Haekto, DI Batu Putih, dan DI Lurasik;
- b. Daerah Irigasi (DI) Dalam Kabupaten/ Kota dengan luas total 56.925 Ha, meliputi: DI di Kabupaten Kupang, terdiri dari DI Air Sagu, DI Enorain, DI Kuanfeu, DI Mapuhaba, DI Netemnamu, DI Oenitas, DI Pakubaun;
- c. DI di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri dari DI Aroki, DI Mena/ Kaubele, dan DI Ponu;
- d. DI di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu DI Oebelo;
- e. DI di Kabupaten Belu terdiri dari DI Alas, DI Fatubesi, DI Maubusa dan DI Obor;



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.32
Peta Rencana Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
Provinsi NTT

- f. DI di Kabupaten Sikka terdiri dari DI Kolesia dan DI Magepanda;
- g. DI di Kabupaten Ngada terdiri dari DI Zaa, DI Malawitu, DI Luwuweton,
- h. DI Ganggong, DI Nuakua, dan DI Malatawa;
- i. DI di Kabupaten Sumba Timur, terdiri dari DI Kakaha, DI Mangili, dan DI Mataiyang;
- j. DI di Kabupaten Sumba Barat, terdiri dari DI Waekelo Sawah dan DI Wanokaka;



- k. DI di Kabupaten Rote Ndao, yaitu DI Manubulu;
- l. DI di Kabupaten Manggarai Barat, terdiri dari DI Wae Ganggang, dan DI Wae Racang;
- m. DI di Kabupaten Manggarai, terdiri dari DI Buntal, DI Satar Belang, DI Wae Ces, DI Wae Mokek;
- n. DI di Kabupaten Lembata, terdiri dari DI Wai Muda dan DI Watobluwo; dan
- o. DI di Kabupaten Flores Timur, yaitu DI Konga (Hewa, Wae, Kuma, Konga).

Sumber Air Baku di Wilayah Perbatasan yaitu: Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Malibaka, Motamuru, Noelbesi, Welulik, Murabesi dan Napan.

Sistem pengendalian banjir terdiri dari:

- a. Upaya konservasi lahan;
- b. Penetapan zona banjir;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir terdiri dari peninggian tanggul, perkuatan tebing, sudetan, penambahan darurat tanggul bobol, dan rehabilitasi bangunan konstruksi tebing sungai; dan
- d. Normalisasi sungai.

2.9.5. Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan yaitu berupa:

- a. Sistem penyediaan air minum;
- b. Sistem prasarana pengelolaan sampah; dan

Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari:

- a. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
- b. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan
- c. Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.

Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. Pengelolaan sampah; dan
- b. Penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair domestik.

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);

- b. Pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode **sanitary landfill**, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
- d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.

2.9.6. Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tiap negara mempunyai kategorisasi sendiri untuk penetapan kawasan yang dilindungi, di mana masing-masing negara memiliki tujuan dan perlakuan yang mungkin berbeda-beda.

Namun, di tingkat internasional, WCPA (World Commission on Protected Areas) yang dulunya Commision on National Parks and Protected Areas (CNPPA) yaitu sebuah komisi dibawah IUCN (The World Conservation Union) memiliki tanggungjawab khusus dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi secara umum di dunia, baik untuk kawasan darat maupun perairan.

Tabel 2.138
Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT Tahun 2017

No	Nama Kawasan	Status	Jenis	Luas (ha)	Pengelola
1	TNP Laut Sawu	Penetapan	Taman Nasional Perairan	1.811.950,52	BKKPN Kupang
2	TN Komodo	Penetapan	Taman Nasional	176.961,64	BTN Komodo
3	SM Harlu	Penetapan	Suaka Margasatwa	2.243,55	BBKSDA NTT
4	SAP Selat Pantar	Penetapan	Suaka Alam Perairan	271.297,80	Pemprov NTT
5	TWAL 17 Pulau Riung	Penetapan	Taman Wisata Alam Laut	7.300,75	BBKSDA NTT
6	TWAL Teluk Maumere	Penetapan	Taman Wisata Alam Laut	72.007,58	BBKSDA NTT
7	TWAL Teluk Kupang	Penetapan	Taman Wisata Alam Laut	63.927,75	BBKSDA NTT



No	Nama Kawasan	Status	Jenis	Luas (ha)	Pengelola
8	DPL Sikka	Penetapan melalui Perdes	Daerah Perlindungan Laut	2.523,62	Pemprov NTT
9	KKPD Flores Timur	Pencadangan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	150.656,97	Pemprov NTT
10	KKPD Sikka	Pencadangan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	29.509,39	Pemprov NTT
11	Sumba Selatan	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	5.712,46	
12	Batu Gade	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	12.906,74	
13	Pulau Ende	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	88.875,67	
14	Maubesi	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	29.280,51	
15	Timur Laut Labuhan Bajo	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	23.466,42	
16	Laut Dalam Maubesi	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	57.754,11	
17	Laut Dalam Lembata	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	488.621,55	
18	Laut Dalam Flores Timur	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	220.552,62	
19	Laut Dalam Alor	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	158.101,21	
Total Luasan				3.673.650,85	

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018





Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Gambar 2.33
Peta Kawasan Konservasi Provinsi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 10 Kawasan Konservasi Perairan dengan luas total 2.588.379,57 ha di bawah pengelolaan BBKSDA, BKKPN Kupang serta Pemerintah Provinsi NTT. Sedangkan daerah penting calon kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT memiliki luas total 1.085.271,28 ha. Daerah penting calon kawasan konservasi perairan ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan baru.

Secara umum Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) merupakan pengelola yang mengelola kawasan konservasi perairan paling luas yakni 70% dari total seluruh kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT. Rincian kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037.

2.10. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

2.10.1 Bidang Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal



Pendidikan, bahwa jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Provinsi adalah :

- a. Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16 – 18 Tahun).
- b. Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia 14 – 18 Tahun).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel. 2.139
Target Pencapaian SPM Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	Tahun 2019
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

3. Realisasi

Tabel. 2.140
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	62,82	Tahun 2019
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	31,35	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada jenjang pendidikan menengah sebanyak 202.523 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 322.400 anak. Sedangkan, partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.511 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 6.751 anak.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM



Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mencakup:

a. Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar dilakukan dengan menyediakan perlengkapan dasar dan memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang belum terlayani.

Tabel. 2.141
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Penerima Pelayanan Dasar	Perlengkapan Dasar	Jumlah	Kualitas	Ket
SMA dan SMK	Buku teks pelajaran	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum	Belum terlaksana
	Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis	1 set per peserta didik per semester	Kondisi baru	Belum terlaksana
Pendidikan Khusus	Materi ajar	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum	Belum terlaksana
	Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis	1 set per peserta didik per semester	Kondisi baru	Belum terlaksana

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

b. Standar Jumlah Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel. 2.142
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Penerima Pelayanan Dasar	Tenaga Pendidik	Standar Kualitas Tenaga Pendidik	Jumlah (orang)	%
SMA	Guru mata pelajaran	memiliki ijazah D-IV/S1	12.870	86,84
		memiliki sertifikat pendidik	3.078	20,77
	Kepala Sekolah	memiliki ijazah D-IV/S1	552	100
		memiliki sertifikat pendidik	409	74,09



Penerima Pelayanan Dasar	Tenaga Pendidik	Standar Kualitas Tenaga Pendidik	Jumlah (orang)	%
		memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	182	32,98
	Guru mata pelajaran	memiliki sertifikat pendidik	1.655	23,02
SMK	Kepala Sekolah	memiliki ijazah D-IV/S1	292	100
		memiliki sertifikat pendidik	160	54,79
		memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	43	14,73
SMK	Guru kelas	memiliki ijazah D-IV/S1	212	65,03
		memiliki sertifikat pendidik	90	78,43
Pendidikan Khusus	Guru mata pelajaran	memiliki ijazah D-IV/S1	38	78,43
		memiliki sertifikat pendidik	40	13,07
		memiliki ijazah D-IV/S1	32	100
	Kepala Sekolah	memiliki sertifikat pendidik	24	75,00
		memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	12	37,50

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

2.10.2 Bidang Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

1. Jenis Pelayanan Dasar
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:
- a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (bab VII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018 – 2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing – masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel. 2.143
Target Pencapaian SPM Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Tahun 2019
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

3. Realisasi

Tabel. 2.144
Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	Tahun 2019
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	100	100	Tahun 2019



	Luar Biasa provinsi	berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

Dari tabel di atas, realisasi capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2019, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, dipilah wewenang antara provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena pembagian wewenang dimulai tahun 2019 maka tidak ada data pembandingan realisasi tahun 2019 dengan tahun sebelumnya.

2.10.3 Bidang Urusan Kesehatan (RSUD Prof.Dr.W.Z.Yohanes Kupang)

1. Jenis Pelayanan Dasar
- Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- a. Pelayanan Gawat Darurat

b. Pelayanan Rawat jalan.

c. Pelayanan Rawat Inap.

d. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU).

e. Pelayanan Bedah Sentral.

f. Pelayanan Rehabilitasi Medik.

g. Pelayanan Hemodialisa.

h. Pelayanan PKRS.

i. Pelayanan Farmasi.

j. Pelayanan Radiologi.

k. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.

l. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.

m. Unit Transfusi Darah/Bank Darah (UTD RS/BD RS).

n. Instalasi Pemulasaran Jenazah.

o. Instalasi Sterilisasi Pusat (Central Sterilization Supply Dept/ CSSD).

p. Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik.

q. Pelayanan Laundry.

r. Pelayanan Sanitasi/Pengolahan Limbah.

s. Pelayanan IPSRS.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel. 2.145
Target Pencapaian SPM Kesehatan
(RSUD Prof.Dr.W.Z.Yohanes Kupang)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
a.	Gawat Darurat dan Ambulance	1.	Kemampuan Menangani Life Saving Anak dan Dewasa	100%	Tahun 2019
		2.	Jam buka Pelayanan Gawat	100%	Tahun 2019
		3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS	100%	Tahun 2019
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Tahun 2019
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	lima menit terlayani, setelah pasien	Tahun 2019
		6.	Kepuasan Pelanggan	70 %	Tahun 2019
		7.	Kematian pasien< 24 Jam	per seribu (pindah ke pelayanan rawat dua inap setelah 8 jam)	Tahun 2019
		8.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	Tahun 2019
		9.	Waktu pelayanan ambulance	24 jam	Tahun 2019
		10.	Kecepatan memberikan Pelayanan ambulance di rumah sakit	30 menit	Tahun 2019
b.	Rawat jalan	1.	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	Tahun 2019
		2.	Ketersediaan Pelayanan	Klinik Anak, Klinik Penyakit dalam, Klinik Kebidanan Klinik Bedah	Tahun 2019
		3.	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 - 11.00	Tahun 2019
		4.	Waktu tunggu di rawat jalan	60 menit	Tahun 2019
		5.	Kepuasan Pelanggan	90 %	Tahun 2019
		6.	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	Tahun 2019
		7.	A Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	60 %	Tahun 2019
			B Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	60 %	Tahun 2019
c.	Rawat Inap	1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	Dr. specials	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
				perawat minimal pendidikan D3	Tahun 2019
		2.	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	Tahun 2019
d.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1.	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	
		2.	Kejadian Kematian di meja operasi	1 %	
		3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	Tahun 2019
		4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	
		5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	
		6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	
		7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	6 %	Tahun 2019
e.	Persalinan, perinatologi	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ? 1 %	Tahun 2019
				Pre-eklampsia ? 30 %	
				Sepsis ? 0,2 %	
		2.	Pemberi pelayanan persalinan	Dokter Sp.OG	Tahun 2019
				Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	
				Bidan	
		3.	Pemberi pelayanan Persalinan dengan Penyulit	Tim PONEK terlatih	Tahun 2019
		4.	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG Dokter Sp.A	Tahun 2019
				Dokter Sp.An	
		5.	Kemampuan menangani BBLR 1500gr – 2500gr	100%	Tahun 2019
		6.	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	Tahun 2019
		7.	a. Keluarga Berencana presentase KB (vasektomi & tubektomi) dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.OG, Sp.B, Sp.U dan dr. Umum terlatih	100%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
			b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	Tahun 2019
		8.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	Tahun 2019
f.	Intensif	1.	Rata – rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	Tahun 2019
		2.	Pemberi pelayanan unit intensif	Dokter Sp.Anestesi dan Dr Spesialis sesuai kasus yang ditangani	Tahun 2019
				100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	Tahun 2019
g.	Radiologi	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	Tahun 2019
		2.	Pelaksanaan ekspertisi	Dr. Sp. Rad	
		3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2%	
		4.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	
h.	Lab. Patologi Klinik	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin	Tahun 2019
		2.	Pelaksanaan Ekspertisi	Dr. Sp.PK	
		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	
		4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	
i.	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	Tahun 2019
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	Tahun 2019
		3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	Tahun 2019
j.	Farmasi	1.	Waktu tunggu pelayanan		
			- ≤ Obat jadi	≤ 30 menit	Tahun 2019
			- ≤ Racikan	≤ 60 menit	
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	Tahun 2019
		3.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
		4.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	Tahun 2019
k.	Gizi	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	≥ 90%	Tahun 2019
		2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	Tahun 2019
		3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	Tahun 2019
l.	Transfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	100%	Tahun 2019
		2.	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	Tahun 2019
m.	Pelayanan Masyarakat Miskin	Pelayanan terhadap pasien miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan		100%	
n.	Rekam Medik	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	Tahun 2019
		2.	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	Tahun 2019
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	Tahun 2019
		4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	Tahun 2019
o.	Pengelolaan Limbah	1.	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/l	Tahun 2019
				COD < 80 mg/l	
				TSS < 30 mg/l	
				PH 6-9	
		2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	Tahun 2019
p.	Administrasi dan Manajemen	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	Tahun 2019
		2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	Tahun 2019
		3.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	Tahun 2019
		4.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	Tahun 2019
		5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	Tahun 2019
		6.	Cost Recovery	≥ 40%	Tahun 2019
		7.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
		8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	Tahun 2019
		9.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	Tahun 2019
q.	Pemulasaraan Jenazah	1.	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	Tahun 2019
		2.	Waktu pelayanan kereta/mobil jenazah	24 jam	Tahun 2019
		3.	Kecepatan memberikan pelayanan kereta/mobil jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	Tahun 2019
r.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	≤ 80 %	Tahun 2019
		2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	Tahun 2019
		3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	Tahun 2019
s.	Pelayanan Laundry	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	Tahun 2019
		2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	Tahun 2019
t.	(PPI) Pencegahan Pengendalian Infeksi	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	75%	Tahun 2019
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	Tahun 2019
		3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (<i>Health Care Associated Infection</i>) di RS (minimal 1 parameter)	75%	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

3. Realisasi

Tabel. 2.146
Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan
(RSUD Prof.Dr.W.Z.Yohanes Kupang)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
a.	Gawat Darurat dan Ambulance				
	1.	Kemampuan Menangani Life Saving Anak dan Dewasa	100%	100%	Tahun 2019
	2.	Jam buka Pelayanan Gawat	24 jam	100%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
	3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	83%	Tahun 2019
	4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Tahun 2019
	5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 menit setelah	2,5 menit	Tahun 2019
	6.	Kepuasan Pelanggan	≥70 %	93%	Tahun 2019
	7.	Kematian pasien< 24 Jam	≤ dua per 0,002 seribu pelayan setelah 8 jam	0,01	Tahun 2019
	8.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tahun 2019
	9.	Waktu pelayanan ambulance	24 jam	24 jam	Tahun 2019
	10.	Kecepatan memberikan Pelayanan ambulance di rumah sakit	≤ 30 menit	100%	Tahun 2019
b.	Rawat jalan				
	1.	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 %	100 %	Tahun 2019
	2.	Ketersediaan Pelayanan	100 %	100 %	Tahun 2019
	3.	Jam buka pelayanan	100 %	100 %	Tahun 2019
	4.	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	77,46 menit	Tahun 2019
	5.	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	93%	Tahun 2019
	6.	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100 %	100 %	Tahun 2019
	7.	A . Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	≥ 82 %	Tahun 2019
		B . Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	≥ 82 %	Tahun 2019
c.	Rawat Inap				
	1.	Pemberi Pelayanan Di Rawat Inap	100 %	100 %	Tahun 2019
	2.	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100 %	Tahun 2019
d.	Bedah Sentral (Bedah saja)				
	1.	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	98%	Tahun 2019
	2.	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1%	0%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
	3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %	100 %	Tahun 2019
	4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	100 %	Tahun 2019
	5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %	100 %	Tahun 2019
	6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100 %	Tahun 2019
	7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6%	0%	Tahun 2019
e.	Persalinan, perinatologi				
	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1%	100%	Tahun 2019
			Pre-eklamsi ≤ 30%	100%	Tahun 2019
			Sepsis ≤ 0,2%	100%	Tahun 2019
	2.	Pemberi pelayanan persalinan	100%	100%	Tahun 2019
	3.	Pemberi pelayanan Persalinan dengan Penyulit	100%	100%	Tahun 2019
	4.	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	Tahun 2019
	5.	Kemampuan menangani BBLR 1500gr – 2500gr	100%	100%	Tahun 2019
	6.	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	46%	Tahun 2019
	7.	a. Keluarga Berencana presentase KB (vasektomi & tubektomi) dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.OG, Sp.B, Sp.U dan dr. Umum terlatih	100%	Tahun 2019	Tahun 2019
		b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	Tahun 2019
	8.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	93,25%	Tahun 2019
f.	Intensif				
	1.	Rata – rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	0%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
	2.	Pemberi pelayanan unit intensif	100%	65%	Tahun 2019
g. Radiologi					
	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	1 jam 20 menit	Tahun 2019
	2.	Pelaksanaan ekspertisi	100%	93,22%	Tahun 2019
	3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	≤ 2%	1,89%	Tahun 2019
	4.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	93,25%	Tahun 2019
h. Laboratorium Patologi Klinik					
	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	≤ 140 menit	Tahun 2019
	2.	Pelaksanaan Ekspertisi	100%	87,75%	Tahun 2019
	3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%	Tahun 2019
	4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	93,25%	Tahun 2019
i. Rehabilitasi Medik					
	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	31%	Tahun 2019
	2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	Tahun 2019
	3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	93,25%	Tahun 2019
j. Farmasi					
	1.	Waktu tunggu pelayanan			
		≤ Obat jadi	≤ 30	10	Tahun 2019
		≤ Racikan	≤ 60	16	Tahun 2019
	2.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	0%	Tahun 2019
	3.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	93,25%	Tahun 2019
	4.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	95%	Tahun 2019
k. Gizi					
	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	≥ 90%	99%	Tahun 2019
	2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	19%	Tahun 2019
	3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	99,81%	Tahun 2019
l. Tranfusi Darah					



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	100%	100%	Tahun 2019
	2.	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	0,24%	Tahun 2019
m.	Pelayanan Masyarakat Miskin				
	Pelayanan terhadap pasien miskin yang datang ke RS pada setiap unit		100%	100%	Tahun 2019
n.	Rekam Medik				
	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	83,5%	Tahun 2019
	2.	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	89,83%	Tahun 2019
	3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	11,19 menit	Tahun 2019
	4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15	12,41	Tahun 2019
o.	Pengelolaan Limbah				
	1.	Baku mutu limbah cair	< 30	50	Tahun 2019
	2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	72%	Tahun 2019
p.	Administrasi dan Manajemen				
	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	Tahun 2019
	2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	Tahun 2019
	3.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Tahun 2019
	4.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	Tahun 2019
	5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	45%	Tahun 2019
	6.	<i>Cost Recovery</i>	≥ 40%	88%	Tahun 2019
	7.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tahun 2019



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pencapaian		Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
	8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	2 jam	Tahun 2019
	9.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tahun 2019
q.	Pemulasaraan Jenazah				
	1.	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	1,56 jam	Tahun 2019
	2.	Waktu pelayanan kereta/mobil jenazah	24	24	Tahun 2019
	3.	Kecepatan memberikan pelayanan kereta/mobil jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	30 menit	Tahun 2019
r.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit				
	1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	≤ 80%	80%	Tahun 2019
	2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	76,55%	Tahun 2019
	3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	Tahun 2019
s.	Pelayanan Laundry				
	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tahun 2019
	2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	Tahun 2019
t.	Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)				
	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	75%	67%	Tahun 2019
	2.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	45%	Tahun 2019
	3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (<i>Health Care Associated Infection</i>) di RS (minimal 1 parameter)	75%	100%	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020



2.10.4 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal PUPR, jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi adalah :
- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah Kabupaten/Kota;

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten/Kota.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Bab VII) terdapat target untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (100%) setiap Tahun dari 2018 – 2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing – masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal PUPR dan juga tidak ada di Renstra maupun RKPD Dinas PUPR Tahun 2019.

Tabel. 2.147
Target Pencapaian SPM
Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Rencana Tindak dan Perencanaan SPAM Regional Kabupaten Sumba Tengah – Kabupaten Sumba Barat	100%	Tahun 2019
	Penyusunan Kajian Rencana Tindak dan Perencanaan SPAM Regional Kabupaten TTS – Kabupaten TTU	100%	Tahun 2019
	Penyusunan Kajian Rencana Tindak dan Perencanaan SPAM Regional Kabupaten Timor Tengah Utara – Kabupaten Belu	100%	Tahun 2019
	Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih Dedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo	100%	Tahun 2019



	Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kabupaten Kupang – Kota Kupang	100%	Tahun 2019
	Pembangunan, Pengembangan Jaringan Air Bersih Dedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo	100%	Tahun 2019
	Pembangunan, Pengembangan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kabupaten Kupang – Kota Kupang	100%	Tahun 2019
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten/Kota.	-	-	-

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

3. Realisasi

Tabel. 2.148
Target Pencapaian SPM
Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Rencana Tindak dan Perencanaan SPAM Regional Kabupaten Sumba Tengah – Kabupaten Sumba Barat	100%	100%	Tahun 2019
	Penyusunan Kajian Rencana Tindak dan Perencanaan SPAM Regional Kabupaten TTS – Kabupaten TTU	100%	100%	Tahun 2019
	Penyusunan Kajian RencanaTindak dan Perencanaan SPAM Regional Kabupaten TTU – Kabupaten Belu	100%	100%	Tahun 2019
	Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih Dedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo	100%	100%	Tahun 2019
	Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kabupaten Kupang – Kota Kupang	100%	100%	Tahun 2019



	Pembangunan, Pengembangan Jaringan Air Bersih Dedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo	100%	100%	Tahun 2019
	Pembangunan, Pengembangan Jaringan Air Bersih SPAM Reginal Kabupaten Kupang - Kota Kupang	100%	100%	Tahun 2019
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten / Kota	Khusus untuk jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten/Kota belum di alokasikan kegiatan dan anggaran karena pada saat perencanaan untuk anggaran 2019 masih berpatokan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal PUPR dilakukan pada tahun 2019 sehingga masih fokus pada kondisi jalan mantap dan ketersediaan air baku.			

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

2.10.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

1. Jenis Pelayanan Dasar
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Bab VII) terdapat target untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (100%) setiap tahun selama periode tahun 2018 s.d. 2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing-masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, begitu juga pada Rencana Strategi dan RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

Tabel. 2.149
Target Pencapaian SPM



Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

3. Realisasi

Tabel. 2.150
Target Pencapaian SPM
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

2.10.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal urusan Bencana, termasuk dalam SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Namun tidak diatur rincian jenis SPM Daerah Provinsi. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM termuat jenis pelayanan dasar daerah Provinsi yakni huruf c: pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) dan huruf g, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Provinsi (Dinas PUPR).

Walaupun tidak diatur secara khusus jenis Pelayanan Dasar yang dikerjakan oleh BPBD Provinsi, namun dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, BPBD Provinsi NTT telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung SPM sub urusan Bencana di daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 11 : Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

a. Pelayanan informasi rawan bencana;

- 1) BPBD telah memiliki kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat kecamatan dan oleh Kabupaten/Kota dijabarkan lebih lanjut sampai ke tingkat desa dan RT/RW. Kajian risiko bencana dan peta rawan bencana tersebut dapat diakses oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana BPBD Provinsi NTT melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung KIE rawan bencana di desa-desa dengan tingkat kerawanan yang tinggi melalui fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di desa-desa rawan bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- 1) Memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Risiko Bencana melalui kegiatan Advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten/Kota.
- 2) Memfasilitasi penyusunan rencana kontijensi di Kabupaten/Kota.
- 3) Melaksanakan gladi dan simulasi kesiapsiagaan terhadap bencana.



- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Dilakukan melalui gladi dan simulasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Kantor SAR Kupang untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Bab VII) terdapat target untuk Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah (100%) setiap Tahun dari 2018 – 2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing – masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 (tiga) target yang harus dicapai dan target tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dukungan pencapaian SPM di Kabupaten/Kota, yakni :

- a. Penambahan rencana kontijensi dan sistem peringatan dini bencana : 1 sistem.
- b. Kabupaten yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana dan RAD-PB API : 13 Kabupaten.
- c. Peningkatan jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana: 80 Desa/Kelurahan.

3. Realisasi

- a. Penambahan rencana kontijensi dan sistem peringatan dini bencana : target 1 sistem, tercapai 1 sistem (100%).
- b. Kabupaten yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana dan RAD-PB API : Target : 13 Kabupaten, tercapai 9 Kabupaten (69,23%).
- c. Peningkatan jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana : target 80 Desa/Kelurahan, realisasi : 80 Desa/Kelurahan (100%).

2.10.6 Bidang Urusan Sosial (Dinas Sosial)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan kewenangan Provinsi adalah: Perlindungan dan



jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

- 1. Jenis Pelayanan Dasar
 - a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti.
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti.
 - d. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.
 - e. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial.

- 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Bab VII) terdapat target untuk Urusan Sosial yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan sosial (100%) setiap Tahun dari 2018 – 2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing – masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel. 2.151
Target Pencapaian SPM
Urusan Sosial (Dinas Sosial)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100	Tahun 2019
Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi	100	Tahun 2019



Panti	sosial dasar anak terlantar di dalam panti		
Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100	Tahun 2019
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	100	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

3. Realisasi

Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.152
Target Pencapaian SPM
Urusan Sosial (Dinas Sosial)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100	100	Tahun 2019
Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100	100	Tahun 2019
Rehabilitasi	Jumlah Warga	100	100	Tahun



sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			2019
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	100	100	Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan tetapi Dinas Sosial Provinsi hanya melaksanakan 4 Standar Pelayanan Minimal dari 5 Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal yang tidak dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di dalam Panti karena jumlah gelandang dan pengemis di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat sedikit dan proses pelayanannya tidak memerlukan pelayanan di dalam panti. Untuk teknis perhitungan Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia.

2.11. KONDISI AKIBAT COVID 19

Wabah Covid 19 yang mulai berkembang sejak awal 2020, mengakibatkan perekonomian NTT mengalami kontraksi pada Triwulan II-2020. Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini, laju pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha pada Triwulan I-2020 sebesar 2,98%, menurun tajam menjadi -1,96% pada Triwulan II-2020.

Tabel 2.153



Pertumbuhan PDRB NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	
				TW-1	TW-2
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.03	3.75	3.12	-0.34
2	Pertambangan dan Penggalian	1.94	3.32	-7.18	-12.96
3	Industri Pengolahan	5.16	9.14	-3.28	-4.10
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	9.57	0.82	14.50	-11.76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.47	5.44	-2.00	2.46
6	Konstruksi	6.39	4.43	-0.01	-9.80
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.33	7.64	4.64	-7.75
8	Transportasi dan Pergudangan	7.92	3.42	5.28	-23.22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.16	5.99	-8.64	-42.36
10	Informasi dan Komunikasi	4.89	5.59	6.13	15.36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.50	3.22	1.88	12.32
12	Real Estate	4.85	0.00	0.26	-5.58
13	Jasa Perusahaan	1.67	3.86	0.87	-52.51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.56	8.17	5.26	6.75
15	Jasa Pendidikan	2.41	5.34	-0.90	-2.38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.11	5.67	7.49	5.49
17	Jasa lainnya	6.47	6.55	4.63	-21.19
	PDRB	5.13	5.20	2.98	-1.96

Sumber: BPS-NTT, Laporan Perekonomian NTT, 2018-2019; TW 1 dan 2 Tahun 2020

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup besar pada TW1-2020 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya pada TW2-2020, lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup besar adalah pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas dan produksi es, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Berdasarkan assesment lapangan usaha yang dilakukan Bank Indonesia KPW-NTT, penyebab Kontraksi pada sejumlah lapangan usaha dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. **Pertanian**; penurunan pada sub sektor peternakan disebabkan virus flu babi Afrika dan pada sub sektor tanaman pangan disebabkan curah hujan yang tidak setinggi tahun 2019.
2. **Perdagangan**; implementasi kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas diluar rumah sebagai antisipasi penyebaran Covid 19 berpengaruh langsung pada penurunan transaksi sektor perdagangan. Selain itu penutupan PLBN mulai Maret 2020, menurunkan ekspor barang ke Timor Leste dan mengurangi arus wisatawan ke NTT.
3. **Konstruksi**; penundaan sementara tender proyek tahun anggaran 2020 (refocusing anggaran) untuk mendukung penanganan Covid 19, dan tertundanya realisasi investasi swasta (baik dalam negeri maupun luar negeri) menekan laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi.
4. **Transportasi**; penghentian dan pembatasan operasi moda transportasi udara dan laut untuk mengangkut penumpang, serta pembatasan angkutan darat sejak April 2020 menjadikan kinerja transportasi terkontraksi cukup besar.



5. **Akomodasi dan Makan/Minum**; mengalami kontraksi cukup besar akibat pembatasan kunjungan wisatawan, penutupan obyekwisata dan penundaan event yang melibatkan banyak orang, serta pembatasan layanan ditempat bagi restoran/rumah makan sejak Maret 2020.

Tabel 2.154
Pertumbuhan PDRB NTT Berdasarkan Pengeluaran

NO	PENGELUARAN	2018	2019	2020	
				TW-1	TW-2
1	Pengeluaran Konsumsi RT	4.45	5.40	4.41	-4.40
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.76	5.21	-2.72	-13.10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.45	2.51	1.53	-7.49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.44	3.38	0.67	-8.57
5	Perubahan Inventori	48.76	12.16	17.96	7.01
6	Ekspor Luar Negeri	-19.45	-19.83	-19.74	-48.16
7	Impor Luar Negeri	30.79	-28.65	55.44	-47.07
8	Net Impor AntarDaerah	3.82	3.14	0.15	-14.97
	PDRB	5.13	5.20	2.98	-1.96

Sumber: BPS-NTT, Laporan Perekonomian NTT, 2018-2019; TW 1 dan 2 Tahun 2020

Dari sisi pengeluaran sebagaimana tampak pada tabel 2.10.2, kontraksi yang cukup besar terjadi pada pengeluaran konsumsi RT, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor dan impor luar negeri serta net impor antar daerah. Mengingat kontraksi terjadi pada jenis pengeluaran yang pangasanya terhadap PDRB relatif besar, maka dampak kontraksi berupa penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan relatif besar pula. Berdasarkan assesment sisi pengeluaran Bank Indonesia KPw-NTT, penyebab Kontraksi pada sejumlah lapangan usaha dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. **Pengeluaran Konsumsi RT**; mengalami kontraksi cukup tajam disebabkan implementasi kebijakan *physical distancing* yang mengakibatkan penurunan produktivitas pekerja berbasis upah tetap, dan banyak pekerja berbasis upah harian kehilangan pendapatan.
2. **Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**; mengalami kontraksi karena pemotongan dana transfer dari pusat $\pm 10,21\%$.
3. **Investasi (Perubahan Inventori)**; mengalami kontraksi karena para pengusaha memilih sikap hati-hati (*wait and see*) dan diikuti pula dengan pelemahan investor asing.
4. **Net Impor (Luar Negeri dan Antar Daerah)**; mengalami kontraksi



karena menurunnya kunjungan wisatawan asing serta kegiatan ekspor impor sebagai akibat pembatasan akses untuk mencegah mekuasnya penyebaran Covid 19.

Betatapun pada TW2 dan TW3 - 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, akan tetapi pada TW3-2020 dan TW4-2020, baik BPS-NTT maupun Bank Indonesia KPw-NTT, memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan segera membaik (beranjak positif), sehingga secara keseluruhan, Bank Indonesia KPw-NTT memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan berada pada kisaran 2,95% - 3,35%. Capaian ini mengakibatkan target RPJMD untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 6,6% tidak tercapai.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu (2018-2019) maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan yang akan datang.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU (TAHUN 2018-2019)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dibentuk dalam sistem pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu untuk melakukan analisis pengelolaan kinerja keuangan masa lalu diperlukan analisis pelaksanaan APBD, yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan komponen tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kerangka pendanaan di masa yang akan datang atau pendanaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang ada.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran



baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, melihat realisasi pertumbuhan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir (2018-2019).

Dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat dikemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pelaksanaan anggaran tahun 2018-2019 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 s.d 2019 yang berbasis akrual.

Pada Rancangan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2023, realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.1
Kinerja Pendapatan Daerah 2017 – 2019

No Urut	URAIAN	TA. 2017		TA. 2018		TA. 2019	
		REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	4,700,213,492,589	97.98	4,781,089,962,593	97.37	5,354,574,772,919	96.29
1	Pendapatan Asli Daerah	1,047,491,567,026	103.10	1,095,269,978,577	100.44	1,280,122,363,490	95.12
	a. Pendapatan Pajak Daerah	814,122,727,711	104.11	866,157,779,773	104.62	908,207,117,663	95.08
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	24,266,495,631	96.26	27,570,244,733	100.27	60,831,986,435	86.92
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	67,209,561,753	99.43	72,415,455,930	98.57	70,662,452,308	85.93
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	141,892,781,931	100.45	129,126,498,141	79.90	240,420,807,084	100.84
	2 Pendapatan Dana Perimbangan	3,643,692,862,110	96.86	3,680,327,636,180	96.87	4,067,952,844,498	97.46
	a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	87,876,729,182	100.88	64,495,737,073	74.63	38,360,205,100	60.72
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1,784,462,326,000	100.00	1,827,412,640,000	100.00	1,875,182,301,000	100.00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,771,353,806,928	93.70	1,788,419,259,107	94.86	2,154,410,338,398	96.36
	3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	9,029,063,453	46.87	5,492,347,836	26.58	6,499,564,931	15.79
	a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang	-	-	-	-	-	-
	b. Dana Hibah	1,529,063,453	13.00	5,492,347,836	26.58	6,499,564,931	15.79
	c. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	e. Dana Penyesuaian dan Otonomi	7,500,000,000	100.00	-	-	-	-
	f. Bantuan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas pendapatan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pembangunan dan Pembiayaan. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2017-2019

No Urut	URAIAN	TA. 2016	REALISASI			Rata-rata
		REALISASI	2017	2018	2019	Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	3,875,554,164,669	4,700,213,492,589	4,781,089,962,593	5,354,574,772,919	11.66
	1 Pendapatan Asli Daerah	995,186,120,952	1,047,491,567,026	1,095,269,978,577	1,280,122,363,490	8.90
	a. Pendapatan Pajak Daerah	745,481,335,512	814,122,727,711	866,157,779,773	908,207,117,663	6.82
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	40,418,137,792	24,266,495,631	27,570,244,733	60,831,986,435	31.43
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	77,139,883,317	67,209,561,753	72,415,455,930	70,662,452,308	(2.52)
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	132,146,764,331	141,892,781,931	129,126,498,141	240,420,807,084	28.19
	2 Pendapatan Dana Perimbangan	2,839,657,758,567	3,643,692,862,110	3,680,327,636,180	4,067,952,844,498	13.28
	a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	91,213,201,567	87,876,729,182	64,495,737,073	38,360,205,100	(23.60)
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1,337,091,848,000	1,784,462,326,000	1,827,412,640,000	1,875,182,301,000	12.83
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,411,352,709,000	1,771,353,806,928	1,788,419,259,107	2,154,410,338,398	15.65
	3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	40,710,285,150	9,029,063,453	5,492,347,836	6,499,564,931	(32.88)
	a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang	-	-	-	-	
	b. Dana Hibah	6,871,462,150	1,529,063,453	5,492,347,836	6,499,564,931	66.60
	c. Dana Darurat					
	d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	
	e. Dana Penyesuaian dan Otonomi	33,838,823,000	7,500,000,000	-	-	(59.28)
	f. Bantuan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.4.700.213.492.589 atau 97,98%, tahun 2018 realisasi menjadi sebesar Rp. 4.781.089.962.593,22 namun demikian secara prosentase realisasi menurun menjadi hanya sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 pada tahun 2019, tetapi lagi-lagi secara presentase realisasinya menurun, hanya sebesar 96,29%. Berdasarkan sumber pendapatan yang paling dominan adalah Dana Perimbangan (dana Transfer) yang diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi paling sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat tergantung pada Pemerintah



Pusat melalui Dana Perimbangan. Kenaikan Realisasi pendapatan pada tahun 2019 menunjukkan telah berjalannya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya baik dalam bentuk kegiatan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah disamping adanya penerimaan yang merupakan kebijakan baru dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Ke depan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2017	4.700.213.492.589,00	1.047.491.567.026,00	22,29
2018	4.781.089.962.593,22	1.095.269.978.577,22	22,91
2019	5.354.092.405.679,30	1.258.958.953.288,30	23,91

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah.

Dilihat dari tabel diatas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil walaupun terjadi peningkatan proporsi pada tahun 2019 dari tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar 23,91%. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1.047.491.567.026,00	5,26
2018	1.095.269.978.577,22	4,56
2019	1.280.122.363.490,00	16,88

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah.



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah meningkat pesat pada tahun 2019 menjadi sebesar 16,88%, peningkatan tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah, pembenahan manajemen data penerimaan PAD, Peningkatan peran dan fungsi UPT pada dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan kantor bersama Samsat, Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, kemitraan swasta dalam pengelolaan aset dan perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran kinerja neraca Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Neraca Provinsi NTT Tahun 2018-2019

URAIAN	JUMLAH	
	2019	2018
ASET	9.148.346.887.827,31	7.518.932.730.629,95
ASET LANCAR	463.602.595.083,15	395.016.202.633,89
Kas dan Setara Kas	282.629.763.941,55	212.794.972.828,55
Piutang Pendapatan	80.907.124.782,10	76.786.774.541,10
Piutang Lainnya	4.363.398.661,00	3.197.674.232,00
Penyisihan Piutang	- 11.255.680.501,53	- 11.645.569.022,16
Beban Dibayar Dimuka	690.075.268,17	-
Persediaan	106.267.912.931,86	113.882.350.054,40
INVESTASI JANGKA PANJANG	592.998.225.439,52	620.603.887.555,27
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.975.834.273,00	1.968.588.490,00
Investasi Jangka Panjang	585.022.391.166,52	618.635.299.065,27



URAIAN	JUMLAH	
	2019	2018
Permanen		
ASET TETAP	7.973.851.665.808,35	6.381.894.681.395,48
Tanah	2.816.892.864.072,79	1.609.557.601.368,48
Peralatan dan Mesin	992.497.810.336,38	832.770.831.749,38
Gedung dan Bangunan	1.782.045.724.355,76	1.638.448.707.118,81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.350.087.932.132,91	4.078.890.379.794,85
Aset Tetap Lainnya	147.934.201.305,68	132.002.655.668,68
Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567,49	167.010.200.683,50
Akumulasi Penyusutan	- 2.480.534.355.962,66	-2.076.785.694.988,22
ASET LAINNYA	117.894.401.496,29	121.417.959.045,31
Tagihan Jangka Panjang	30.507.462.571,82	21.088.657.814,78
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	33.060.950.000,00	32.579.350.000,00
Aset Tidak Berwujud	9.566.707.974,87	1.554.224.519,33
Aset Lain-lain	44.759.280.949,60	66.195.726.711,20
JUMLAH ASET	9.148.346.887.827,31	7.518.932.730.630
KEWAJIBAN	56.929.422.509,42	105.745.952.223,70
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56.929.422.509,42	105.745.952.223,70
Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.834	1.230.995.000,00
Utang Belanja	27.674.966.720	30.792.055.931,70
Utang Jangka Pendek Lainnya	27.703.639.956	73.722.901.292,00
JUMLAH KEWAJIBAN	- 56.929.422.509,42	- 105.745.952.223,70
EKUITAS	9.091.417.465.317,89	7.413.186.778.406,25
EKUITAS	9.091.417.465.317,89	7.413.186.778.406,25
Ekuitas	9.091.417.465.317,89	7.413.186.778.406,25
JUMLAH EKUITAS DANA	9.091.417.465.317,89	7.413.186.778.406,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.148.346.887.827,31	7.518.932.730.629,95

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah.

Adapun rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018- 2019 dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2019

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET	21,67
ASET LANCAR	17,36
Kas dan Setara Kas	32,82
Piutang Pendapatan	5,37
Piutang Lainnya	36,46
Penyisihan Piutang	(3,35)
Bebang Dibayar Dimuka	-
Persediaan	(6,69)



URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
INVESTASI JANGKA PANJANG	(4,45)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	305,15
Investasi Jangka Panjang Permanen	(5,43)
ASET TETAP	24,94
Tanah	75,01
Peralatan dan Mesin	19,18
Gedung dan Bangunan	8,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,65
Aset Tetap Lainnya	12,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	118,51
Akumulasi Penyusutan	19,44
ASET LAINNYA	(2,90)
Tagihan Jangka Panjang	44,66
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1,48
Aset Tidak Berwujud	515,53
Aset Lain-lain	(32,38)
JUMLAH ASET	21,67
KEWAJIBAN	(46,16)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(46,16)
Pendapatan Diterima Dimuka	25,98
Utang Belanja	(10,12)
Utang Jangka Pendek Lainnya	(62,42)
JUMLAH KEWAJIBAN	(46,16)
EKUITAS	22,64
Ekuitas	22,64
JUMLAH EKUITAS DANA	22,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21,67

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah

a. Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari tabel diatas aset pemerintah



daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,67%.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar (46,16%). Beberapa kewajiban yang belum direalisasi sehingga terjadinya penurunan rata-rata pertumbuhan antara lain Utang belanja Barang dan jasa Tahun 2019 pada BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang yang belum terbayarkan per tanggal 31 Desember 2019 serta utang jangka pendek yang belum terbayarkan per tanggal 31 Desember 2019.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan ekuitas Provinsi NTT selama tahun 2018-2019 tumbuh rata-rata sebesar 22,64%.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauhmana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 terdiri dari :



1. Belanja Tidak Langsung, yang meliputi:
 - 1.1. Belanja Pegawai
 - 1.2. Belanja Bunga;
 - 1.3. Belanja Subsidi;
 - 1.4. Belanja Hibah;
 - 1.5. Belanja Bantuan Sosial;
 - 1.6. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
 - 1.7. Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
 - 1.8. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung, yang meliputi:
 - 2.1. Belanja Pegawai;
 - 2.2. Belanja Barang dan Jasa;
 - 2.3. Belanja Modal.

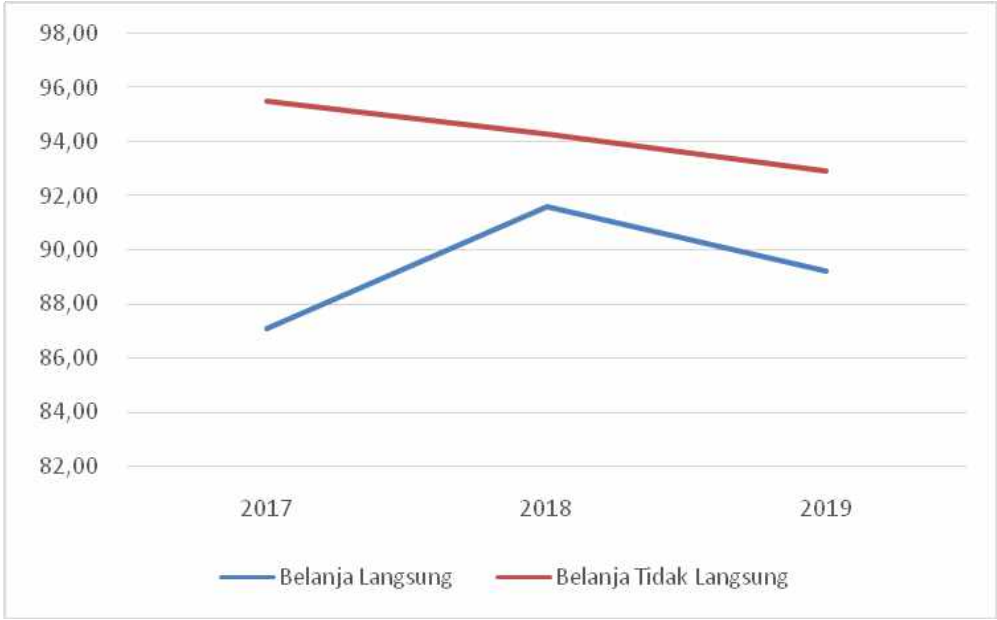
Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kemampuan pengelolaan belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2019 terlihat pada Gambar 3.1. Realisasi belanja tidak langsung menunjukkan trend menurun. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja langsung relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan realitas pembangunan. Juga ada



peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Prosentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana Gambar 3.1.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

Gambar 3.1.
Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2017 - 2019

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7, Proporsi Belanja pada Tabel 3.8 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.9.

Tabel 3.7
Kinerja Belanja Daerah 2017 - 2019

No Urut	URAIAN	PROPORSI			RATA-RATA PROPORSI
		2017	2018	2019	
2	BELANJA	100	100.00	100.00	100.00
	1 Belanja Tidak Langsung	66.68	66.41	62.02	65.04
	Belanja Pegawai/Personalia	27.23	26.53	27.13	26.96
	Belanja Hibah	29.08	30.57	24.47	28.04
	Belanja Bantuan Sosial	0.46	0.40	0.56	0.47
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.83	8.82	9.78	9.48
	Belanja Bantuan Keuangan	0.07	0.08	0.05	0.07
	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.04	0.01
	2 Belanja Langsung	33.32	33.59	37.98	34.96
	Belanja Pegawai/Personalia	3.07	2.88	3.91	3.29
	Belanja Barang dan Jasa	19.84	19.79	18.94	19.52
	Belanja Modal	10.42	10.93	15.12	12.16

Sumber : Badan Keuangan Daerah



Tabel 3.8
Rata – Rata Proporsi Belanja Daerah 2017 - 2019

No Urut	URAIAN	PROPORSI			RATA-RATA PROPORSI
		2017	2018	2019	
2	BELANJA	100	100.00	100.00	100.00
	1 Belanja Tidak Langsung	66.68	66.41	62.02	65.04
	Belanja Pegawai/Personalia	27.23	26.53	27.13	26.96
	Belanja Hibah	29.08	30.57	24.47	28.04
	Belanja Bantuan Sosial	0.46	0.40	0.56	0.47
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.83	8.82	9.78	9.48
	Belanja Bantuan Keuangan	0.07	0.08	0.05	0.07
	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.04	0.01
	2 Belanja Langsung	33.32	33.59	37.98	34.96
	Belanja Pegawai/Personalia	3.07	2.88	3.91	3.29
	Belanja Barang dan Jasa	19.84	19.79	18.94	19.52
	Belanja Modal	10.42	10.93	15.12	12.16

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 3.9
Rata – Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2017 – 2019

No Urut	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH			RATA-RATA PERUMBUHAN
		2017	2018	2019	
2	BELANJA	4,634,876,188,618	4,846,839,267,378	5,277,547,018,227	12.88
	1 Belanja Tidak Langsung	3,090,398,949,142	3,218,631,037,313	3,273,344,848,123	11.66
	Belanja Pegawai/Personalia	1,261,870,373,634	1,285,969,369,989	1,431,820,149,817	48.55
	Belanja Hibah	1,347,982,296,400	1,481,857,799,120	1,291,513,467,414	(3.78)
	Belanja Bantuan Sosial	21,423,300,000	19,426,000,000	29,353,167,000	46.42
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	455,802,033,793	427,541,748,500	515,982,681,892	15.31
	Belanja Bantuan Keuangan	3,264,679,000	3,710,934,400	2,702,406,000	(32.24)
	Belanja Tidak Terduga	56,266,315	125,185,304	1,972,976,000	501.14
	2 Belanja Langsung	1,544,477,239,476	1,628,208,230,065	2,004,202,170,105	15.48
	Belanja Pegawai/Personalia	142,185,667,732	139,382,893,672	206,611,451,303	28.70
	Belanja Barang dan Jasa	919,366,667,404	959,064,301,790	999,366,462,957	20.10
	Belanja Modal	482,924,904,340	529,761,034,603	798,224,255,845	13.52

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (a/b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2017	1.529.292.242.422	4.714.411.988.617	32,44
2	Tahun Anggaran 2018	1.210.578.887.682	4.846.839.267.378	24,98
3	Tahun Anggaran 2019	1.475.434.579.041	5.288.295.982.227	27,90

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah



Tabel – tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan anggaran belanja selama periode yang direncanakan. Setelah mengetahui perilaku belanja, perlu dilakukan analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4,700,213,492,589	4,781,089,962,593	5,354,574,772,919
	Dikurangi Realisasi :			
2	Belanja Daerah	4,634,876,188,618	4,846,839,267,378	5,277,547,018,227
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	79,535,800,000	-	10,748,964,000
	DEFISIT RIIL	(14,198,496,029)	(65,749,304,784)	66,278,790,692

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019 digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT
Tahun 2017-2019

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI TA.2018	REALISASI TA.2019
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	3.015.331.781	227.099.937.249
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.015.331.781	216.350.973.249
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	3.015.331.781	212.794.972.828
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	920.255	212.794.972.828
6.1.1.02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-
6.1.1.03.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	274.106.022.307	-
6.1.1.08.	Pelampauan /(Pengurangan) Penerimaan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Lalu	-	-
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	4.688.175.051	3.556.000.421
6.1.5.04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	4.688.175.051	3.556.000.421
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	10.748.964.000
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	10.748.964.000
6.2.2.07.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	10.748.964.000
6.3.	PEMBIAYAAN NETTO	278.795.117.613	205.602.009.249
6.3.1.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	212.898.620.418	282.629.763.941

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020.

Realisasi pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 pembiayaan daerah sebesar Rp. 3.015.331.781,00 meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 227.099.937.249,55. Peningkatan pembiayaan daerah tersebut merupakan implikasi dari selisih Jumlah Pendapatan daerah dengan belanja daerah. Untuk menutupi selisih tersebut, maka dilakukan kebijakan investasi melalui Penerimaan Pembiayaan antara lain Investasi Non Permanen Roda Dua dan Roda Empat, dimana dalam periode 2018-2019 menjadi penyumbang penerimaan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen yang paling signifikan yaitu sebesar Rp. 4.688.175.051,00 pada Tahun 2018 dan sebesar Rp. 3.556.000.421,00 pada Tahun 2019 serta pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada item Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 212.794.972.828,55 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya.



3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dilakukan proyeksi perlu memperhatikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan membantu mengarahkan agar proyeksi yang dilakukan lebih akurat. Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 – 2019 sebagaimana terlihat berikut.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan

Kemampuan daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat ditentukan juga oleh kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan dan atau subsidi pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan dan kewenangan kepada Daerah untuk menghimpun pendapatan daerah, baik yang konvensional, yaitu dari pajak dan retribusi daerah ataupun sumber pendapatan daerah yang non-konvensional seperti obligasi daerah atau bahkan pinjamandaerah.

Ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT yang cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat, menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih belum berubah dari 5 (lima) tahun yang lalu, yaitu bersumber dari rendahnya kemampuan PAD, selain alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif, serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.



Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan keuangan ke depan, adalah menetapkan arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, termasuk akibat pengalihan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal pendapatan daerah, misalnya, masih ada potensi pendapatan yang secara kewenangan sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi, namun secara aturan terkait pendapatan kewenangan untuk menarik pendapatan masih menjadi hak Kabupaten/Kota. Hal ini ke depan perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat.

Kebijakan terkait Pendapatan ini, akan mempengaruhi proyeksi pendapatan, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah.

B. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan menggali sumber- sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkan-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
- 5) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.



- 6) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 7) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
- 8) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
- 9) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 10) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
- 11) Peningkatan Pendapatan Lewat Retribusi Jasa Usaha Tanaman Marungga sebesar 5.000 Hektar dengan bekerjasama BumDes.
- 12) PAD harus mencapai Rp 3 T pada akhir periode 2019-2023.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah disusun dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan daerah selama periode 2017-2019. Rata-rata kedenderungan (*trend*) pertumbuhan pendapatan daerah periode 2017-2019 dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 s.d 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Trend dan Proyeksi Pertumbuhan PAD

No Urut	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN	RATA-RATA PROYEKSI PERTUMBUHAN
1	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah	8.90	25.21
	a. Pendapatan Pajak Daerah	6.82	18.40
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	31.43	93.67
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(2.52)	30.13
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	28.19	44.64

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah, diolah

Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan, berdasarkan skenario investasi pada pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian dengan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), peningkatan produksi beras, peningkatan populasi ternak (sapi, babi, kambing dan unggas) dan pembangunan pabrik pakan ternak, pengembangan perikanan budidaya dengan budidaya ikan kerapu, kakap putih maupun rumput laut, pengembangan



garam, pengembangan kelor, sektor-sektor lain yang potensial untuk bisa memberikan kontribusi pendapatan berupa Retribusi Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah serta optimalisasi asset-aset Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 138 ayat (1 dan 2). Begitu pula Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dimana diharapkan akan memberikan kontribusi pendapatan berupa deviden.

Pengembangan garam dengan teknologi *geomembran* dan juga optimalisasi tanaman kelor (*Moringa Oleifera*) dengan pendekatan 2 (dua) skenario, yaitu *pertama* dengan penyertaan modal kepada BUMD atau *kedua* melalui Tugas Pembantuan kepada desa lewat pengelolaan hasil marungga dengan melibatkan Bumdes diharapkan mampu mendatangkan pendapatan dari *profit sharing*. Namun, dalam merealisasikannya perlu dipersiapkan dan dialokasikan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.

Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, karena komponen terbesarnya adalah penerimaan jasa giro dan bunga deposito, ke depan, tidak dibenarkan menyimpan uang yang tidak digunakan terlalu lama, karena akan mempengaruhi alokasi DAU dengan pola dinamis.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut, maka perlu menciptakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menghimpun pendapatan daerah baik yang konvensional yaitu dari pajak dan retribusi ataupun sumber pendapatan daerah yang tidak konvensional seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kewenangan menarik pungutan pajak dan retribusi daerah segera disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, bisa dikaji agar pengalokasian belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang berakibat mendatangkan penerimaan daerah, misalnya terkait dengan UPTD yang mengelola pendapatan, termasuk penyewaan sarana prasarana olahraga bisa dialokasikan melalui pembiayaan daerah dengan konsep investasi daerah yang anggarannya harus dikembalikan ke Pemerintah.



Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik- baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaporan dan pengelolaan dana DAK yang baik dengan memastikan realisasi penyerapan DAK sesuai target, penyusunan program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, perencanaan dengan didukung ketersediaan data yang baik untuk proses pengusulan sesuai aplikasi dan menu yang disediakan. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak Provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi NTT 2019 s/d 2023 diproyeksikan 3,28%, meliputi: pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 2%, pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 3,42% dan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sebesar 4,29%. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan anggaran untuk pemenuhan SPM harus dapat dipastikan sumber pembiayaannya dari DAK, sekaligus ada peningkatan alokasi DAK untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar. Proyeksi pertumbuhan dana perimbangan Provinsi NTT tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Proyeksi Pertumbuhan Dana Perimbangan
Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
DANA PERIMBANGAN	32,96	3,82
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,12	2,00
Dana Alokasi Umum	15,46	3,42
Dana Alokasi Khusus	118,42	4,29

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Proyeksi pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi NTT tahun 2019 s/d 2023 sebesar 2,00%, meliputi:



Pendapatan Hibah sebesar 2,00%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Proyeksi Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	(66,28)	2,00
Pendapatan Hibah		2,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(67,75)	
Penerimaan Dari Pihak Ketiga	(100,00)	
JUMLAH	18,45	13,14

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan komponen pendapatan di atas, maka proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 s/d 2023 secara keseluruhan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.16
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

No Urut	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN	RATA-RATA PROYEKSI PERTUMBUHAN
1	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah	8.90	25.21
	a. Pendapatan Pajak Daerah	6.82	18.40
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	31.43	93.67
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(2.52)	30.13
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	28.19	44.64
2	Pendapatan Dana Perimbangan	13.28	3.82
	a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	(23.60)	2,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	12.83	3,42
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	15.65	4,29
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	(32.88)	2,00
	a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang		
	b. Dana Hibah	66.60	2,00
	c. Dana Darurat		
	d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya		
	e. Dana Penyesuaian dan Otonomi	(59.28)	
	f. Bantuan dari Pihak Ketiga		

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 s/d 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.17
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021-2023

URAIAN		ANGGARAN INDIKATIF TAHUN		
		2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH		6,283,641,817,542	6,715,590,100,741	7,901,387,827,832
PENDAPATAN ASLI DAERAH		2,033,518,433,142	2,212,635,953,007	3,229,352,276,426
1	Pajak Daerah	1,533,311,726,456	1,375,708,488,765	1,870,374,846,155
2	Retribusi daerah	205,905,117,783	204,130,055,760	224,543,061,336
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan	94,348,316,130	162,072,349,391	259,315,759,025
4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	199,953,272,773	470,225,059,091	874,618,609,910
PENDAPATAN TRANSFER		4,182,128,447,000	4,433,599,311,586	4,601,293,618,535
	Transfer Pemerintah pusat	4,182,128,447,000	4,341,885,753,675.40	4,507,745,789,466
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		67,994,937,400	69,354,836,148	70,741,932,871
1	Hibah	67,994,937,400	69,354,836,148	70,741,932,870.96
2	Dana Darurat			
3	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU			

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah, diolah

C. Proyeksi Belanja

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misipembangunan lima tahun kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.



Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- b. **Prioritas.** Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- c. **Tolok ukur dan target kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- d. **Optimalisasi Belanja.** Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.



- e. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka perencanaan dan penganggaran telah menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

Belanja daerah tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami pengurangan yang cukup besar dibandingkan tahun 2021, mengingat pada tahun 2022 dan 2023 tidak dilakukan pinjaman daerah, sehingga ada pengurangan belanja kira-kira sebesar pinjaman daerah untuk infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2021. Di sisi lain, tetap terdapat kenaikan belanja terkait pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat maupun akibat kebijakan dari pusat, misalnya mengakomodir dana DAK. Tahun 2023 harus dialokasikan dana cukup besar pada Belanja Hibah, terkait kebutuhan untuk pelaksanaan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan pada komponen belanja lain. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah tahun 2017-2019 diproyeksikan 4,20%, sehingga proyeksi Belanja Daerah tahun 2017- 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.18.

Pertumbuhan belanja pegawai diproyeksikan sebesar 10,22%, di mana 2,5% adalah untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 10% untuk menampung kenaikan tunjangan kinerja baik untuk ASN maupun untuk tenaga pendidik dan kependidikan, serta kebijakan terkait belanja pegawai, seperti pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tunjangan Hari Raya (THR), dan lain sebagainya. Proyeksi pertumbuhan belanja barang dan jasa sebesar 12,90%, belanja bunga 50%, belanja bantuan sosial 3,48%, belanja hibah sebesar 16,39%.



Tabel 3.18
Proyeksi Belanja daerah 2021-2123

URAIAN		ANGGARAN INDIKATIF TAHUN		
		2021	2022	2023
BELANJA DAERAH		7.476.335.787.792	6.313.395.950.992	7.499.193.678.082
1	BELANJA OPERASI	4.662.019.956.640	4.423.599.000.774	5.385.261.156.059
	a. Belanja Pegawai	1.506.964.157.609	1.566.549.856.522	1.720.171.690.553
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.539.560.263.063	1.513.113.741.225	1.770.343.077.234
	c. Belanja Bunga	39.307.557.170	39.307.557.170	39.307.557.170
	d. Belanja Subsidi	-		
	e. Belanja Hibah	1.545.265.975.472	1.274.129.756.870	1.823.879.408.620
	f. Belanja Bantuan Sosial	30.922.003.326	30.498.088.986	31.559.422.482
2	BELANJA MODAL	2.150.718.266.207	1.230.718.265.974	1.440.859.268.999
	a. Belanja Tanah	25.000.000.000		
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	289.307.735.826		
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	404.065.029.715		
	d. Belanja Jalan			
	e. Belanja Irigasi dan Jaringannya	1.429.998.402.258		
	f. Belanja Aset tetap lainnya	2.347.098.408		
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.541.384.000	5.000.000.000	5.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	643.056.180.945	654.078.684.244	668.073.253.023
	a. Belanja Bagi Hasil	610.056.180.945	611.178.684.244	612.303.253.023
	b. Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000	42.900.000.000	55.770.000.000
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.192.693.970.250)	402.194.149.750	402.194.149.750

Sumber: Bappelitbangda, 2020, diolah

Pada akhir tahun perencanaan alokasi belanja hibah bertambah, terkait belanja untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2023. Kenaikan pada belanja hibah ini akan berakibat berkurangnya pertumbuhan pada lainnya. Pada Belanja Bantuan Keuangan, terjadi kenaikan yaitu pada Belanja Bantuan Keuangan bagi partai politik 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, di mana dari muatan materi perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi nilai besaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah yang bersumber dari APBD Provinsi yang dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam



Negeri, peruntukkan bantuan keuangan kepada partai politik, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari partai politik.

Proyeksi belanja modal akan mengalami pertumbuhan minus sebesar 17,64%, sebab pada tahun 2022 dan 2023 alokasi dana infrastruktur akan mengalami penurunan karena tidak lagi dilakukan pinjaman daerah. Begitu pula untuk belanja tidak terduga, mengalami pertumbuhan minus. Sedangkan proyeksi pertumbuhan belanja transfer adalah 2,815. Pagu indikatif tahun 2021 didasarkan pada KUA-PPAS tahun 2021 yang telah ditetapkan.

D. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Provinsi dalam aspek pembiayaan adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan bagi daerah, optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan dan peluang pinjaman jangka panjang daerah untuk membiayai program prioritas, dan pembangunan infrastruktur sebaik mungkin.

Dengan demikian, Pembiayaan Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun ke depan akan di arahkan pada:

- 1) Memberikan peluang-peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan, termasuk bagi UPTD untuk mengembangkan usahanya.
- 2) Menciptakan pembiayaan anggaran dengan risiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari:
 - a. Dana SILPA.
 - b. Dana pinjaman jangka panjang yang terkait langsung dengan proyek-proyek yang terukur profitabilitasnya baik dari segi nilai maupun kurun waktu yang diperlukan untukmenghasilkannya (pinjaman reguler untuk pembiayaan infrastruktur).
 - c. Pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Pemulihan Ekonomi Daerah untuk membiayai sektor-sektor produktif, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dengan pola pendekatan investasi, bukan sekedar pelaksanaan proyek.
 - d. Pemanfaatan dana PEN Kementerian/Lembaga.
- 3) Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
- 4) Mengembangkan pola kerja sama dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan model sharing pendanaan



baik dari pusat, kabupaten/kota swasta, dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)*, maupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD dan BUMDES sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan BUMDES yang bersangkutan.

Secara riil, penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SILPA, namun demikian tidak diperkenankan untuk memproyeksi SILPA. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan cukup besar dari proyeksi sebelumnya. Hal ini untuk mengakomodasi penyertaan modal dan pola investasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan pendapatan, yang belum dimulai pada tahun 2019.

Tabel 3.19
Proyeksi Pembiayaan Daerah

URAIAN		ANGGARAN INDIKATIF TAHUN		
		2021	2022	2023
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.602.470.210.250	7.582.090.250	7.582.090.250
1	SILPA	-	-	-
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	7.582.090.250	7.582.090.250
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		409.776.240.000	409.776.240.000	409.776.240.000
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	264.776.240.000	264.776.240.000
2	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000
3	Pembentukan Dana Cadangan			
4	Pemberian Pinjaman Daerah			
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya yang sesuai PUU			
PEMBIAYAAN NETTO		1.192.693.970.250	(402.194.149.750)	(402.194.149.750)
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (SILPA)		-		

Sumber: Bappelitbangda, 2020, diolah



Tabel 3.20
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 2021-2023

URAIAN		ANGGARAN INDIKATIF TAHUN		
		2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH		6.283.641.817.542	6.715.590.100.741	7.901.387.827.832
PENDAPATAN ASLI DAERAH		2.033.518.433.142	2.212.635.953.007	3.229.352.276.426
1	Pajak Daerah	1.533.311.726.456	1.375.708.488.765	1.870.374.846.155
2	Retribusi daerah	205.905.117.783	204.130.055.760	224.543.061.336
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan	94.348.316.130	162.072.349.391	259.315.759.025
4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	199.953.272.773	470.225.059.091	874.618.609.910
PENDAPATAN TRANSFER		4.182.128.447.000	4.433.599.311.586	4.601.293.618.535
	Transfer Pemerintah pusat	4.182.128.447.000	4.341.885.753.675,40	4.507.745.789.466
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		67.994.937.400	69.354.836.148	70.741.932.871
1	Hibah	67.994.937.400	69.354.836.148	70.741.932.870,96
2	Dana Darurat			
3	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU			
BELANJA DAERAH		7.476.335.787.792	6.313.395.950.992	7.499.193.678.082
1	BELANJA OPERASI	4.662.019.956.640	4.423.599.000.774	5.385.261.156.059
a.	Belanja Pegawai	1.506.964.157.609	1.566.549.856.522	1.720.171.690.553,29
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.539.560.263.063	1.513.113.741.225	1.770.343.077.233,78
c.	Belanja Bunga	39.307.557.170	39.307.557.170	39.307.557.170
d.	Belanja Subsidi	-		
e.	Belanja Hibah	1.545.265.975.472	1.274.129.756.870,35	1.823.879.408.619,64
f.	Belanja Bantuan Sosial	30.922.003.326	30.498.088.985,74	31.559.422.482
2	BELANJA MODAL	2.150.718.266.207	1.230.718.265.974	1.440.859.268.999
a.	Belanja Tanah	25.000.000.000		
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	289.307.735.826		
c.	Belanja Bangunan dan Gedung	404.065.029.715		
d.	Belanja Jalan	1.429.998.402.258		
e.	Belanja Irigasi dan Jaringannya			
f.	Belanja Aset tetap lainnya	2.347.098.408		
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.541.384.000	5.000.000.000	5.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	643.056.180.945	654.078.684.244	668.073.253.023
a.	Belanja Bagi Hasil	610.056.180.945	611.178.684.244	612.303.253.023
b.	Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000	42.900.000.000	55.770.000.000
SURPLUS / (DEFISIT		(1.192.693.970.250)	402.194.149.750	402.194.149.750
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.602.470.210.250	7.582.090.250	7.582.090.250
1	SiLPA	-	-	-



URAIAN		ANGGARAN INDIKATIF TAHUN		
		2021	2022	2023
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	7.582.090.250	7.582.090.250
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		409.776.240.000	409.776.240.000	409.776.240.000
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	264.776.240.000	264.776.240.000
2	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000
3	Pembentukan Dana Cadangan			
4	Pemberian Pinjaman Daerah			
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya yang sesuai PUU			
PEMBIAYAAN NETTO		1.192.693.970.250	(402.194.149.750)	(402.194.149.750)
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (SILPA)		-		

Sumber: Bappelitbangda dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah, 2020, diolah



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional serta perkembangan global sesuai review RPJMD sebelumnya, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan (2013-2018).

Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati, sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

Masalah lainnya yang masih dihadapi provinsi NTT adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di NTT pada tahun 2017 adalah sebesar 1.142.17 jiwa atau 21,35 persen, dari jumlah penduduk miskin tersebut NTT merupakan provinsi termiskin ke 3 dari 34 provinsi yang ada di



Indonesia. Kondisi kesejahteraan masyarakat lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM NTT yang masih berada jauh dibawah rata-rata IPM Indonesia. Kondisi IPM NTT tahun 2017 adalah sebesar 63,73, sementara IPM Indonesia adalah 70,81.

Selain masalah kesejahteraan masyarakat masalah lainnya yang juga memiliki keterkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi NTT dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, kondisi pada tahun 2017 nilai PDRB NTT mencapai Rp 60,79 triliun. Ini menunjukan bahwa pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91%. Pembentukan struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Tingkat Pengangguran di NTT tahun 2018 sebesar 74,7 ribu orang, sebagian besar penduduk di NTT bekerja pada sektor pertanian yakni sebesar 1,46 Juta orang. Jika dilihat dari status pekerjaan utama, maka sebagian besar penduduk NTT bekerja pada sektor informal yakni sebesar 76,95 persen dibandingkan dengan bekerja pada sektor formal yang sebesar 23,05 persen.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografis wilayah yang sulit, NTT juga masih diperhadapkan dengan masalah jumlah dan mutu infrastruktur yaitu jalan, jembatan, dermaga dan bandara yang dapat membuka isolasi fisik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang ada di NTT.

Pandemi Covid - 19

Pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada triwulan I tahun 2020 tidak hanya menyebabkan tekanan terhadap sektor kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi



kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak Covid-19 menurut para ahli diperkirakan akan lebih besar dan lama. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing* dan *social distancing*).

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari *baseline*, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik.

Berdasarkan substansi masalah-masalah di atas, diperoleh isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun program baru untuk dicari solusinya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:



4.1.1. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan di NTT antara lain: (1) belum optimalnya mutu layanan pendidikan; dan, (2) belum meratanya akses layanan pendidikan.

Kedua permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa sub- masalah sebagai berikut:

- a) Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan;
- b) Distribusi guru yang belum merata antar-daerah serta masih rendahnya ketersediaan tenaga pendidik khusus untuk mengajar di lembaga pendidikan khusus;
- c) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru non-PNS;
- d) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi;
- e) Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah;
- f) Nilai Rata-rata UAN yang masih rendah;
- g) Pengangguran terbesar berasal dari lulusan pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan tinggi;
- h) Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah;
- i) Rendahnya literasi masyarakat NTT;
- j) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

- a) Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT;
- b) Tingginya kasus gizi buruk dan stunting;
- c) Tingginya kasus kematian ibu dan bayi di NTT;
- d) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular;
- e) Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- f) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

- 1) Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang



masih tinggi;

- 2) Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi.
- 3) Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan.

b) Sumber Daya Air

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi;
- 2) Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.

c) Air Minum dan Sanitasi

- 1) Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih;
- 2) Kualitas air minum dan sanitasi layak;
- 3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih.

d) Jasa Konstruksi

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah;
- 2) Masih tingginya bangunan mangkrak dikarenakan keterlambatan pekerjaan oleh pelaku jasa konstruksi;
- 3) Belum tersedianya informasi kondisi kelayakan bangunan aset milik daerah.

e) Penataan Ruang

- 1) Aspek pemanfaatan ruang terkendala pada pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- 2) Aspek pengendalian pemanfaatan ruang terkendala pada belum disusunnya seluruh perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a) Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
- b) Masih tingginya rumah tidak layak huni;
- c) Masih rendahnya akses Rumah tangga terhadap sanitasi layak;
- d) Masih rendahnya akses Rumah tangga terhadap air bersih;



- e) Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;
- f) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.

5. Bidang Kamtibnas dan Perlindungan Masyarakat

- a) Meningkatnya ancaman terorisme dan intoleransi, serta ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang membutuhkan pencegahan dan penanganan secara komprehensif serta terpadu;
- b) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- c) Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah rata-rata target KPU;
- d) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah;
- e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kamtibmas.

6. Bidang Sosial

- a) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan kepada anak, perempuan dan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- c) Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS;
- d) Belum optimalnya penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial
- e) Masih tingginya potensi konflik sosial;
- f) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- g) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.

4.1.2. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Non-Layanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

- a) Terbatasnya lapangan pekerjaan;
- b) Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki kompetensi rendah, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri;
- c) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah;
- d) Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru);



- e) Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi;
- f) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- g) Masih tingginya pengangguran dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah;
- c) Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di NTT;
- d) Masih tinggi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

3. Bidang Pangan

- a) Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten di NTT masih timpang atau belum merata;
- b) Jumlah masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi;
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi;
- d) Rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat;
- e) Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan akses terhadap pangan serta distribusi pangan.

4. Bidang Pertanian

- a) Belum optimalnya dukungan penyediaan lokasi untuk pembangunan fasilitas umum;
- b) Masih cukup luas kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikat;
- c) Banyak lahan potensial untuk investasi tetapi terhambat karena



status tanah serta banyak persoalan konflik agraria.

5. Bidang Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif;
- b) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
- c) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pengelola Kabupaten/Kota, menyebabkan proses pelayanan Dokumentasi Administrasi Kependudukan terhambat dalam menjangkau daerah terpencil;
- b) Kurang meratanya aksesibilitas jaringan komunikasi antara Kabupaten/Kota yang akan melakukan perekaman data;
- c) Masih banyak sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di Kabupaten/Kota yang rusak dan tidak layak operasi;
- d) Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL), sehingga terjadi keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah yang menyebabkan rendah dan lamanya proses penerbitan KTP di daerah;
- e) Masih tingginya jumlah anak yang belum memiliki akta lahir, sehingga mereka tidak tercantum dalam Kartu Keluarga.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum sinergis dan terpadu program/kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Masih diperlukan peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana desa;



- c) Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat dan ekonomi Pancasila di desa;
- d) Rendahnya Pendapatan Asli Desa PADes, yang mengakibatkan tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer;
- e) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDES belum memahami manajemen BUMDES (pelaksana teknis hingga kepala desa);
- f) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari tingginya tingkat fertilitas;
- b) Cakupan peserta KB aktif menurun drastis;
- c) Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan kontrasepsi.
- d) Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.

9. Bidang Perhubungan

- a) Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata;
- b) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;
- c) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi;
- d) Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi;
- e) Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi;
- f) Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik);
- g) Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian;
- h) Tingginya permintaan izin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan *taksi online*;
- i) Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan



- konflik sosial (masalah tanah);
- j) Adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a) Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan *website* dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- b) Rendahnya kapasitas dan inovasi SDM pengelola aplikasi Pemerintah;
- c) Masih banyak terdapat layanan teknologi informasi (TI) yang belum didukung dengan payung hukum atau regulasi/kebijakan yang dapat mengikat dan mengatur implementasi dan operasional layanan TI;
- d) Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur TI;
- e) Belum optimalnya kepatuhan dalam implementasi kebijakan, regulasi, dan prosedur layanan TI.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Belum optimalnya pendampingan pada kelembagaan koperasi;
- b) Rendahnya skala pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c) Masih rendahnya akses terhadap sumberdaya oleh koperasi dan UMKM;
- d) Rendahnya tingkat produktivitas koperasi dan UMKM;
- e) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM.

12. Bidang Penanaman Modal

- a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- b) Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata;
- c) Masih perlu ditingkatkan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat secara lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah; dan
- d) Belum berjalannya perizinan terpadu satu pintu berbasis *One Single Submission* (OSS).

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga



- a) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar;
- b) Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
- c) Kurangnya berkesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan *stakeholders*;
- d) Masih rendahnya prestasi atlet pada berbagai *event* kejuaraan olahraga pada level nasional maupun internasional;
- e) Masih tingginya pemuda NTT yang menganggur dikarenakan kurangnya *basic skill* dan minat berwirausaha.

14. Bidang Statistik

- a) Masih belum tersedia data/informasi yang terpercaya, mutakhir dan relevan guna menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi;
- b) Belum berfungsi NTT satu data dan satu peta.

15. Bidang Persandian

Masih diperlukan peningkatan sistem pengamanan data pada jaringan komunikasi dan sistem informasi.

16. Bidang Kebudayaan

- a) Masih rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan Hak Paten terhadap budaya lokal;
- b) Masih rendahnya apresiasi terhadap pelaku budaya;
- c) Belum optimalnya peran museum dalam pelestarian budaya;
- d) Kurang optimalnya promosi budaya lokal lewat peningkatan literasi.

17. Bidang Perpustakaan

- a) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen serta sarana pelayanan yang standar;
- b) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas pustakawan maupun teknisi perpustakaan;
- c) Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau semua daerah tertinggal, terjauh dan terluar;
- d) Belum optimalnya Pustakawan dalam peningkatan literasi masyarakat NTT;
- e) Belum baik layanan buku dan perpustakaan elektronik.

18. Bidang Kearsipan

- a) Ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan belum sesuai



- standar kearsipan;
- b) Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan;
- c) Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif;
- d) Belum tersedianya pelayanan arsip elektronik.

4.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

- a) Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir;
- b) Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan;
- c) Kerusakan wilayah perairan;
- d) Belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut;
- e) Belum optimalnya produksi dan produktivitas garam daerah.

2. Bidang Pariwisata

- a) Belum adanya konsep dan penerapan *community-based tourism*;
- b) Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan kinerja sesuai potensinya;
- c) Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial wisata belum sadar wisata;
- d) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
- e) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga);
- f) Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- g) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif.

3. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan

- a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
- b) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada *on-farm*;
- c) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
- d) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana



pertanian;

- e) Belum adanya konsep penerapan pertanian terpadu yang berorientasi industri pengolahan;
- f) Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong inovasi pertanian;
- g) Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim NTT.

4. Bidang Peternakan

- a) Kurangnya kontrol pengeluaran ternak besar betina produktif keluar NTT;
- b) Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak;
- c) Ketergantungan bibit ayam Broiler pedaging dan petelur dari luar NTT;
- d) Ketergantungan akan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT;
- e) Belum adanya database pemetaan potensi ternak, lahan padang penggembalaan dan lahan hijauan pakan ternak yang *ter-update* secara *on-line*;
- f) Belum adanya inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit ternak, khususnya berbasis teknologi informasi secara *on-line*;
- g) Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen);
- h) Kurangnya jumlah rumah potong hewan;
- i) Belum adanya pabrik pengolahan daging;
- j) Masih minimnya jumlah usaha pembibitan ternak yang intensif dan berkelanjutan.

5. Bidang Kehutanan

- a) Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan;
- b) Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik;
- c) Belum adanya hutan pendidikan, riset dan wisata (*arboretum*);
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- e) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan.



6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Belum optimalnya evaluasi terhadap perizinan dan praktek pertambangan;
- b) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak;
- c) Masih tingginya investasi energi terbarukan (ET) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan ET karena energi fosil harganya masih lebih murah;
- d) Eksploitasi air bawah tanah yang tidak berbasis pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan sistem KARST daerah.

7. Bidang Perdagangan

- a) Belum tersedianya informasi pasar secara *real time*;
- b) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
- c) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
- d) Dominasi barang impor (barang impor lebih besar dari ekspor);
- e) Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan informasi pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- f) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan berbasis *on- line* ke depan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0), dimana model distribusi pasar mengalami perubahan secara mendasar ke depannya.

8. Bidang Perindustrian

- a) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- b) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat;
- c) Belum adanya data kelompok industri;
- d) Belum adanya industri minuman beralkohol tradisional yang berlisensi dan bermerek;
- e) Pengembangan Status Kawasan Industri Bolok dari Badan



Pengelola menjadi Persero Terbatas.

9. Bidang Transmigrasi

- a) Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
- b) Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah:

- a) Menurunnya persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;
- b) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, dikarenakan kesalahan penjabaran dalam merumuskan indikator kegiatan kedalam item kegiatan- kegiatan pendukung;
- c) Belum adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPRD dalam rangka penetapan usulan hasil Musrenbang dan hasil kunjungan kerja;
- d) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencanaan.

2. Bidang Keuangan

- a) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Belum optimal penerapan system penerimaan pendapatan daerah secara on-line dari hasil pajak dan non pajak;
- c) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar;
- d) Belum diterapkan metode penerapan standar biaya dalam anggaran;
- e) Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana-prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan.

3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a) Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan;
- b) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis



- jabatan dan formasi jabatan pegawai;
- c) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
- d) Belum optimalnya penerapan SAKIP;
- e) Belum dilakukan rencana pengembangan sumberdaya manusia ASN;
- f) Tingginya jumlah pegawai honorer;
- g) Masih adanya ketimpangan gender dalam pengisian jabatan struktural.

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan fungsi lainnya

- a) Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b) Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang Iptekin;
- c) Belum optimalnya peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP serta pendampingan untuk memfasilitasi Kabupaten/Kota;
- d) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e) Belum sinergisnya kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- f) Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah NTT;
- g) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

4.2. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4.2.1. Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi ancaman/tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) TPB / SDGs

Isu global yang berkaitan dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) 2000-2015 dan diganti dengan *Platform* baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030.

SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan



secara berkelanjutan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama- sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya



- kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Perekonomian Global dan Perdagangan Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhannya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan



ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

3. Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu).

Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

4. Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia dan bahkan Nusa Tenggara Timur ke depan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dunia, yang merupakan potensi untuk pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi



peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

5. Pariwisata Dunia

Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kenaikan tercepat kunjungan wisatawan yang merupakan hasil dari transformasi digital. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) menyatakan berbagai keberhasilan kebijakan *visa free*, *sustainable tourism observatories* dan *conservatories*, *go digital*, *story telling on tourism*, dan *homestay* yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. “*Sustainable Tourism Development*” di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan lima (5) *Sustainable Tourism Observatories (STOs)* yang terus mengalami perkembangan yang sangat prospektif.

Dalam RPJMN 2020-2024, prioritas pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara termasuk di dalamnya Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk pengembangan pariwisata. Labuan Bajo juga ditetapkan sebagai salah satu destinasi Super prioritas dan super premium dari 10 lokasi destinasi wisata prioritas di Indonesia. Ini menyebabkan Labuan Bajo menjadi pintu gerbang dan pendorong pariwisata daerah sekitarnya.

6. Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo

A. Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo

Pemerintah telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sektor pariwisata dipercaya akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2018 yaitu 12,58% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenpar pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas yaitu: 1) Digital tourism (e-



tourism); 2) Homestay; 3) Air accessibility; 4) Branding; 5) Top 10 origination; 6) Top 3 main destination (15 destination branding); 7) Develop 10 new priority tourism destinations; 8) Certified human resources in tourism & tourism awareness movement; 9) Tourism investment growth; dan 10) Crisis center management (Kemenpar, 2019).

Untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas melalui Rapat Koordinasi Kementerian pada tanggal 14 September 2015, antara lain Danau Toba, Kep. Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Bajo.



Gambar 4.1
Destinasi Wisata Prioritas

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah resmi diberlakukan sebagai pedoman pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, melalui penetapan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, peningkatan nilai tambah pariwisata menjadi perhatian penting. Dalam lima tahun mendatang, fokus nilai tambah pariwisata akan diarahkan pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan 3A



(Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk itu, percepatan kesiapan 10 DPP, termasuk DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L), yang sifatnya strategis dan menjadi unggulan, atau yang dikenal sebagai Major Projects RPJMN 2020-2024 saat ini telah ditetapkan, antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan DPP Labuan Bajo. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk kawasan strategis prioritas.



Sumber: Lampiran 1. Perpres No. 18 Tahun 2020

Gambar 2.
Lokasi DPP Labuan Bajo dan Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Kepulauan Nusa Tenggara

Pengembangan kawasan strategis prioritas DPP Labuan Bajo tersebut nantinya didukung pelabuhan pengumpan (*feeder*) di Pelabuhan Tenau Kupang; dukungan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Selain itu, dikembangkan pula kawasan Bandar Udara Komodo sebagai pusat pertumbuhan baru



dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Dalam perkembangannya, Labuan Bajo sebagai satu dari 5 (lima) *Destinasi Pariwisata Super Prioritas* di Indonesia terus berbenah dalam memperkuat posisinya, yang sejak Juli 2019 telah menyandang status sebagai *Destinasi Wisata Premium* yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai *Destinasi Pariwisata Super Premium*. Tujuan akhir “wisata super premium” di Labuan Bajo adalah meningkatkan jumlah pengunjung yang bernilai tinggi ini untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai “destinasi pariwisata super premium”, pengembangan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya akan membidik segmen pasar wisatawan yang total pengeluarannya jauh lebih besar dari wisatawan kebanyakan, yang selanjutnya dikategorikan dengan “wisatawan super premium”. Wisatawan super premium ini memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, sosial budaya dan ekologi) yang berbeda dari manfaat yang diperoleh dari pariwisata biasa.

Strategi pengembangan “pariwisata super premium” secara berkelanjutan di Labuan Bajo Flores (*sustainable luxury Labuan Bajo Flores*) difokuskan kepada berkembangnya suatu narasi tentang pengalaman baru berupa kesempurnaan dari setiap perspektif, yang menunjukkan kemewahan khusus dan jaminan eksklusivitas serta keunikan berwisata. Sesuatu yang belum pernah dijelajahi, tidak terjamah, dimana tidak semua orang dapat mencapai, jauh dari massa dan dengan kemampuan untuk berbagi pengalaman unik yang emosional, eksperimental, memungkinkan para wisatawan super premium ini untuk memiliki sedikit ruang untuk menikmatinya. Para wisatawan super premium akan berkesempatan untuk me-rekonseptualisasi pencarian dan komitmennya pada kekayaan alam yang unik, serta produk dan layanan wisata dengan standar *sustainability*. Keberadaan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi ekspektasi dan pengalaman unik wisatawan dengan segmentasi premium diatas, baik dari sektor



daratan maupun laut (bahari).

B. Ruang Lingkup

Kebijakan dan Tata Cara Kemitraan pada Wilayah Kawasan Konservasi Peraturan mengenai tata cara kerja sama pada kawasan konservasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 43 menerangkan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional atau pihak lainnya untuk kepentingan Penguatan Fungsi KSA dan KPA serta kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri LHK No 44/MENLHK/SETJEN/KUM/2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, pada Pasal 3 diterangkan bahwa Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman Hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya pada Pasal 5 diterangkan bahwa mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA berupa badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya.

Peraturan mengenai tata cara pengajuan izin pengusahaan pariwisata alam (IUPJWA dan IUPSWA) tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK Jo Peraturan Menteri LHK No 5/MENLHK/SETJEN/KUM/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK. Peraturan Menteri LHK No 8/MENLHK/SETJEN/KUM/2019 tentang pengusahaan



pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, pada Pasal 4 diterangkan bahwa usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan pada zona/blok Taman nasional (kecuali zona inti) dan pada zona pemanfaatan Taman Nasional untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. Selanjut Pasal 19 menerangkan permohonan IUPJWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pasal 26 menerangkan permohonan IUPSWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD).

Dari beberapa uraian rezim perizinan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMD dalam mengembangkan destinasi wisata potensial pada kawasan konservasi, terutama taman nasional memungkinkan untuk dilakukan sepanjang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sesuai peraturan diatas.

2) Pengembangan Ekowisata Premium Komodo

Setiap destinasi pariwisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Tata kelola wisata premium komodo perlu dikembangkan konsep yang seimbang antara nilai etika, estetika, lingkungan, ekonomi serta lokalitas untuk menciptakan kualitas pengalaman berwisata serta memaksimalkan manfaat yang inklusif bagi masyarakat dan lingkungan.

Taman Nasional Komodo dibentuk pada tahun 1980 dan dinyatakan sebagai *World Haritage Site* dan *Man and Biosphere Reserve* oleh Unesco pada tahun 1986. TNK pada awalnya dibentuk untuk melindungi satwa unik Komodo (*Varanus komodoensis*), dan habitatnya. Jenis-jenis satwa darat lain yang khas termasuk burung gosong (*Megapodius reinwardt*), tikus Rinca (*Rattus rintjanus*), dan rusa Timor (*Cervus timorensis*). Sekitar 70% dari kawasan terestrial berupa hutan savana padang rumput. Tipe habitat daratan yang lain berupa hutan tropis musim (monsoon) dan hutan kuasi awan di atas



500 m sepanjang punggung dan puncak gunung. Selain daratan, Taman Nasional Komodo (TNK) meliputi salah satu kawasan laut yang paling kaya di dunia. Taman Nasional ini meliputi 1,214 kilometer persegi habitat laut dengan keanekaragaman tinggi, termasuk karang, mangrove, rumput laut, gunung laut, dan teluk yang semi tertutup.

Habitat-habitat tersebut mempunyai lebih dari 1000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang, dan 70 spesies bunga karang. Dugong (*Dugong dugon*), lumba-lumba (10 spesies), paus (6 spesies), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*) beruaya di Taman Nasional ini.

Pada saat ini, Taman Nasional dihadapkan pada berbagai masalah, baik di darat maupun perairan termasuk:

- Tekanan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan sumberdaya alam mengarah pada degradasi sumberdaya darat dan perairan;
- Kegiatan penangkapan ikan yang merusak di kawasan ini merupakan ancaman terbesar bagi sumberdaya perairan;
- Kelebihan kunjungan wisatawan;
 - Polusi meningkat karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat untuk MCK dan sampah, tumpahan minyak/bahan bakar ke lingkungan perairan, dan sisa pupuk dan pestisida;
 - Perburuan pakan komodo, dll

Balai Taman Nasional Komodo telah melakukan kajian daya dukung wisata di TN Komodo dimana beberapa rekomendasinya antara lain : menetapkan kuota kunjungan wisata untuk masing-masing lokasi sesuai *kapasitas* data dukungannya, membangun mekanisme pengaturan dan pemberian kuota kunjungan kepada pelaku wisata serta menerapkan sistem tarif yang berbeda pada lokasi tertentu. Harapan kedepannya adalah tata kelola wisata alam berkelanjutan yang tetap memperhatikan etika sosial dan keunikan lingkungan yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo.

Dalam mewujudkan “wisata premium komodo”, salah satu persyaratan utama *adalah* terjaganya keidahan alam yang luar biasa di kawasan ini, terutama keberadaan satwa Komodo dan habitatnya. Pengembangan wisata di kawasan TN komodo kedepannya tidak lagi cukup menempuh upaya atau langkah yang biasa-biasa saja, namun



perlu inovasi dalam melihat dinamika kebutuhan wisata dimasa akan datang. Destinasi wisata yang ada di kawasan TN Komodo harus diproyeksikan menjadi destinasi kelas dunia yang dicirikan dengan penerapan konsep ekowisata berkelanjutan yang mengoptimalkan potensi pariwisata yang otentik dan mengedepankan kondisi asli serta terjaganya kekayaan alam dan budaya lokal. Mempersiapkan kawasan TN Komodo sebagai wisata premium bukan berarti menutup peluang wisata menengah kebawah, akan tetapi lebih ke bagai mana mengatur dan mendistribusikan kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada di Kawasan TN Komodo sesuai dengan segmentasi yang disepakati.

Sebagaimana yang *telah* di sepakati di dalam meeting konkuren antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menjaga aspek konservasi TN Komodo, maka akan diterapkan konsep Kawasan Wisata Super Premium dengan sistem Premium Membership. Di harapkan dengan system Premium Membership ini maka jumlah wisatawan akan dibatasi dengan maksimum jumlah kartu keanggotaan yang hanya 50.000 (lima puluh ribu) keanggotaan per tahun. Untuk dapat menunjang rencana strategis ini maka diperlukan pula langkah untuk mengidentifikasi peluang peluang bisnis turunan lainnya yang dapat menjaga sustainabilitas dari konsep super premium ini.

3) Optimalisasi Peran BUMD Flobamor

Berbagai macam isu lingkungan dan sosial-budaya serta ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Kawasan Pariwisata Super Prioritas Nasional dimana Kawasan Taman Nasional Komodo ada didalamnya, maka dirasa perlu kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian administratif wilayah melalui Badan Usaha nya (BUMD Flobamor) didalam mengembangkan wisata alam yang memperhatikan kaidah sosial dan lingkungan dengan mendorong berbagai pola kemitraan dengan pengelola kawasan TN Komodo dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, keterlibatan BUMD Flobamor didalam perusahaan kepariwisataan Labuan Bajo,



khususnya wisata alam kawasan TN Komodo diharapkan akan memberikan peningkatan langsung terhadap PAD daerah khususnya sektor pariwisata.

Kolaboratif pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan UPT melalui kemitraan baik dalam bentuk Kerja Sama Peningkatan Kawasan maupun tata kelola wisata pada zona pemanfaatan melalui IPPA, merupakan bentuk upaya bersama atau listas wewenang dalam menjaga keberadaan kawasan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan. Bentuk-bentuk kemitraan yang akan didorong oleh BUMD Flobamor dengan UPT BTNK antara lain: 1) Kemitraan dengan Taman Nasional Komodo dalam upaya penguatan fungsi dan peningkatan kapasitas kawasan Taman Nasional Komodo, 2) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan 3) Kemitraan Konservasi dengan Masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo.

Rencana mengenai pengembangan kawasan pariwisata premium di taman nasional komodo menitik beratkan pengelolaan pariwisata alam berkelanjutan yang memperhatikan kaidah-kaidah sosial-budaya, keunikan lingkungan serta kemampuan daya dukung pariwisata di taman nasional komodo. Pengembangan konsep pariwisata premium taman nasional komodo ini diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan yang terjadi dewasa ini, baik dari sisi pengelolaan pariwisata maupun pelaku usaha sehingga konsep ekowisata berkelanjutan dapat terwujud di kawasan taman nasional komodo. Pertukaran pengetahuan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program sehingga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan dan Labuan Bajo khususnya, dan warga Provinsi NTT pada umumnya.

Pengembangan pariwisata premium taman nasional komodo dengan pencirian utama adanya segmentasi destinasi wisata terbatas dan member/keanggotaan khusus bukan berarti “memprioritaskan” orang-orang kaya atau wisatawan mancanegara yang berkunjung, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada pengaturan ruang segmen wisata serta upaya mendukung perlindungan dan pelestarian ekosistem yang “eksotis” yang berada dalam kawasan taman nasional komodo. Kesadaran berbagi ruang ini diharapkan akan mendorong



kegiatan pengusahaan yang berkelanjutan baik dari sektor kepariwisataan maupun keberadaan flora dan fauna dalam mendukung kelestarian ekosistem kawasan taman nasional komodo dimasa akan datang.

4.2.2. Lingkungan Nasional

1. Kebhinekaan Indonesia dari sisi etnis, ras, suku, sosial, budaya dan agama

Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang membuat kondisi tersebut sebagai peluang sekaligus menjadi tantangan pembangunan ke depan. Modal sosial berupa keberagaman, toleransi, kerjasama, saling kepercayaan (trust) dapat dijadikan sebagai fundasi penguat bangunan bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerawanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

2. Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi NTT. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Buku IV RPJMN 2020-2024 memuat agenda pembangunan wilayah Nusa Tenggara yang disampaikan dalam Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN
untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,60	6,50	5,90	7,3	7,5
2	Tingkat Kemiskinan	18	17,35	16,15	14,56	12,35
3	Tingkat Pengangguran	2,70	2,70	2,60	2,20	2
4	Kebutuhan Investasi	57,35	63,91	71,47	80,94	91,78

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024

Berdasarkan analisis atas indikator kinerja, secara umum pembangunan Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sampai tahun 2019 bertumbuh 5,20% masih perlu kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan yang diamanatkan RPJMN pada tahun 2020 sebesar 5,60%; tingkat kemiskinan NTT tahun 2019 adalah 20,62% juga masih jauh dari target RPJMN tahun 2020 sebesar 18%, sedangkan tingkat pengangguran tahun 2019 sebesar 3.35% juga masih di bawah target RPJMN tahun 2020 yang sebesar 2,70%.

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah



KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2020

Dalam pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku IV RPJMN 2020 - 2024, sebagai berikut:

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor unggulan

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).



- c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
- c. Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan feeder yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, seperti:
 - 1) Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
 - 2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor



industri (Ekonomi kreatif, khususnya otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.

3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.

4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah.

b. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Ende, Manggarai, Manggarai. Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara.

c. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;



- d. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
- e. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur;
- g. Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
- h. Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- i. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69 persen di NTT; dan
- j. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi:
 - 1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - 2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;



3) Peningkatan konservasi hutan.

k. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua;



13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:

- a) Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
- b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
- c) Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
- d) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
- e) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- f) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
- g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral;
- h) Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- i) Pembentukan bank tanah;
- j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
- k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

- a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya melalui pemanfaatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), masyarakat dan logistik kebencanaan;
- b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
- c) Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan
- d) Meningkatkan riset – riset dan penjangkauan informasi dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan adaptasinya.

15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:



- a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
- b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
- c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
- d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
- e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
- f) Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
- g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- i) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
- j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
- k) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

3. Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024, Proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan Bajo;
- 2. Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
 - a. PKSN Atambua dan
 - b. PKSN Kefamenanu; dan
- 3. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba.

4. Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang harus dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran



dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025.

Isu strategis dalam RPJP NTT 2005-2025, yaitu:

- a) Angka kemiskinan yang masih tinggi;
- b) Indeks Pembangunan Manusia NTT yang masih rendah;
- c) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
- d) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
- e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah :

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:

A. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :

- 1) Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- 2) Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti



terpuji.

- 3) Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- 4) Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- 5) Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

B. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- 2) Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- 5) Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 7) Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

C. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan



agenda :

- 1) Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- 2) Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- 3) Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- 4) Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- 5) Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

D.Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- 2) Menumbuhkan kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

E.Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- 1) Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- 2) Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- 3) Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan



lingkungan.

- 5) Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

F. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda:

- 1) Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

G. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- 1) Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- 3) Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2018-2023).

Tabel 4.3.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025



sampai dengan tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi	
		Target RPJPD	Realisasi 2017
1.	IPM	80	63.73
2.	APK SD/MI SMP/MTS SMA/MA	130	114.05
		85	91.35
		80	78.83
3.	AKB	35/100	NA
4.	AKI	200/100.000	NA
5.	Angka Kemiskinan	12%	21.38%
6.	Pertumbuhan Ekonomi	5,8%	5.19%
7.	Pendapatan Perkapita	9.500.000	11.490.000
8.	Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat		
9.	Good governance dan penegakan hukum dan HAM		
10	Pembangunan yang responsif gender		
11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan		

Berdasarkan target indikator kinerja pembangunan RPJPD NTT tahun (2005- 2025) dan kondisi samapai dengan tahun 2017 yang merupakan periode ke empat dari RPJPD dapat digambarkan sebagai berikut indikator kinerja pembangunan IPM sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 63,73 dari target RPJPD 80, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Tahun 2017 adalah 91,35% sudah melampaui target RPJPD yang sebesar 80% sedangkan untuk SMA/MA pada tahun 2017 baru mencapai 78,83% dari target RPJPD 80%. Angka kemiskinan tahun 2017 adalah sebesar 21,38% masih jauh dari target RPJPD yang sebesar 12%. Pendapatan perkapita tahun 2017 adalah sebesar Rp 11.490.000 melampaui target RPJPD yang sebesar Rp. 9.500.000.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi

Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni



melibatkan semua *stakeholders* dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat adalah:

A. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

B. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor



pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km² atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga



masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertanian dengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

C. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

D. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial.



Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

E. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-



rata Nasional sebesar 70,81%.

F. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut



menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

G. Dampak Covid 19

Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja disebabkan dampak Covid 19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran,



dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar.

Dari sisi ini, isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan.

Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi.

Dilihat dari lapangan usahanya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun) pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian, listrik/gas/air minum, akomodasi, makanan/minuman dan konstruksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar/eceran. Fakta ini menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk lapangan usaha lebih luas dibanding korporasi. Kelebihan UMKM seperti perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik melalui sektor perbankan maupun pemerintahan, untuk membiayai pengembangan usaha UMKM.

Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan



pembatasan sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki UMKM untuk tetap memproduksi pada sektor perdagangan eceran, pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) perlu terus didorong.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) hendaknya diarahkan pada pengembangan *market place* bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan gambaran pernyataan kondisi yang dicita-citakan untuk terjadi pada tahun 2023. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

5.1 VISI

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut, maka visi RPJMD NTT Tahun 2018-2023 harus berpadanan dengan visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 yang mengusung visi:

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu :

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.



Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan dapat menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'tidur panjang' untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan



yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bahagian integral dari suatu *nation and character building*.

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visidaerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.



2. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang di dukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

5.2.1. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

Visi RPJMD NTT 2018-2023 tidak terlepas dari visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTT 2005-2025. Tabel di bawah ini menjelaskan hubungan logis antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.



Tabel 5. 1
Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Dengan VISI
MISI RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Visi RPJMD 2018-2023		Visi RPJPD 2005-2025
NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Selaras dengan	Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi RPJMD		Misi RPJPD
Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	→	Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	→	Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global
Misi III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	→	Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	→	Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
Misi V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	→	Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
	→	Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
	→	Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim

5.2.2. KESELARASAN VISI, MISI RPJMD DENGAN VISI MISI RPJPN 2005 – 2025 DAN RPJMN 2015-2019

Keselarasan visi, misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 dengan visi, misi RPJMN 2015-2019 sebagaimana terlihat di bawah ini :

Visi RPJPN 2005-2025 : Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan makmur

- 1. **Visi RPJMN 2020-2024** : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
- 2. **Visi RPJMD 2018-2023** : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia



Sedangkan keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas nasional sebagai berikut :

Tabel 5. 2
Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas Nasional 2020-2024

Misi RPJMD NTT 2018-2023	Misi RPJMN 2015-2019	Agenda Prioritas Nawacita
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Misi2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing Misi 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan Misi 7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Nawacita 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Nawacita 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	Misi 2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing Misi 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan Misi 5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Nawacita 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Misi 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Nawacita 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Nawacita 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Nawacita 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Nawacita 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Misi 6: Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Nawacita 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	
	Misi 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	



5.2.3. KESELARASAN MISI RPJMD DENGAN SDGs

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Perpres ini menguraikan 17 Tujuan dari implementasi SDGs yang termasuk dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka penerapan SDGs dalam RPJMD 2018-2023 diselaraskan dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT dengan SDGs	
Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Pendidikan Berkualitas: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua



Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan	
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>) Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>) Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	Ekosistem Laut: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan



Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Ekosistem Daratan: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2018-2023. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga



berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui RPJMD tahun 2018-2023. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi sebagai berikut:

Tabel 5.4
Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019-2023

INDIKATOR	Baseline		TARGET 2023	
	2019	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	5,87 – 6,50	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3
PDRB per Kapita (Rp juta)	19,5	20-23	23-25	25 - 27
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	65,23	65.54 – 67,00	67.35 – 69,00	70 - 71
Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5
Rasio PAD (%)	23,90	25,31	30,12	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2 ^{eq})	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (poin)	60,37	65	69	71



Tabel 5.5
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	1.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33-6,90	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
			Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3-3,2	3– 3,2
			PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20-23	23-25	25- 27	25- 27
		1.1.2 Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12	15-12
			Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	1,12	1,05	0,98	0,85	0,85
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	4,13	4,02	3,91	3,40	3,40
		1.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,50	69,58	69,67	69,76	69,76
			Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)	43,141	46,583	48,509	50,360	50,360
			Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)	26,02	24,36	22,69	21,02	21,02
	1.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
		1.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	55,83	61,29	62,23	63,10	63,10
		1.2.3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)	64,10	63,50	62,79	62,08	61,36
		1.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	65	67	69	71	73
	1.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)		1.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
			Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	73,37	70,76	72,76	74,76	74,76
			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)	60	75	80	100	100
			Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)	60	75	80	100	100
	2.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	2.1.1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
			Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)	2,20	2,23	2,32	2,45	2,45
			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)	12,08	12,12	12,18	12,23	12,23
		2.1.2 Meningkatnya <i>Sumbangan</i> Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)	2	4	6	8	8
			Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
			Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.165.378	1.378.453	1.634.144	1.634.144



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN	3.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	3.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
			Dweling Time Pelabuhan (hari)	5	4	4	3	3
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
	3.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	3.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
		3.2.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
			Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)	73	83	85	100	100
			Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)	60	77	80	100	100
		3.2.2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
	3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan	3.3.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
		3.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ ^{eq})	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
		3.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	41,7	72,73	85,70	100	100
		3.3.4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	75	80	85	90	90
		3.3.1 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135
MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	4.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	4.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
		4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
			Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10-12	10-12
		4.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	5.1.1 Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
			Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	B	A	A	A	A
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
			Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi akan dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023.

6.1 STRATEGI

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur

VISI: “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
MISI I: MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL				
1.1	Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera			
		1.1.1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas Produksi • Meningkatkan produksi pertanian melalui : Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), Kelor/Marungga dan Hortikultura. • Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. • Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (Ikan Kerapu dan Kakap Putih di Mulut Seribu, Wae Klambu, Hasan Maubesi dan Hada Kewa). • Investasi di sektor Produktif dengan sumber pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berorientasi peningkatan PAD yang berbasis masyarakat. • Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian. • Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial. 2.Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan • Pembangunan Infrastruktur Pabrik Pakan Ternak sebagai penunjang ekonomi di Sektor Hulu dan Hilir. • Pengembangan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan/Kelautan. • Pengembangan Industri Kreatif .
				3. Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas olahan • Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/IKRT. • Peningkatan Volume Ekspor produk UMKM/IKRT. • Peningkatan volume ekspor komoditi Pertanian, Peternakan dan Perikanan/Kelautan.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				4. Pemberian Dukungan dan Fasilitas • Peningkatan fasilitasi perijinan dan mengatasi hambatan Investasi • Mendorong Peternakan Integrasi Hulu dan Hilir. • Penataan Industri Pengolahan untuk menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah yang tinggi. • Memperkuat kerjasama berbasis kontrak dengan Organisasi berbasis Industri. • Penciptaan Pengembangan Perdagangan antar Kawasan dan Perbatasan Antar Negara ("Kerjasama Selatan - Selatan"). • Memastikan <i>Supply chain</i> sebagai bagian dari pengembangan produksi di Sektor Hulu dan Hilir untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi NTT; • Pengendalian pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok.
		1.1.2	Berkurangnya kemiskinan	1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga • Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya). • Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat. • Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok disabilitas. • Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Pengalihan pekerja non upahan (pekerja keluarga) ke pekerjaan yang renumeratif. • Peningkatan pendapatan pekerja bebas pada sektor Pertanian dan non Pertanian (perkotaan). 2. Perbaiki Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan • Meningkatkan skema Perlindungan sosial yang meliputi penyediaan data, bantuan sosial maupun jaminan sosial. • Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air bersih listrik, dan akses terhadap pangan bergizi). • Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu berbasis Desa (<i>One stop Service</i>). • Memastikan tersedianya layanan dasar data kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk miskin. • Pemenuhan kebutuhan klien pada panti milik pemerintah dan bantuan untuk panti swasta. • Peningkatan Pendapatan kelompok penduduk miskin lapis bawah. 3. Pendukung • Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Des dan sumber-sumber pembiayaan lain. • Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Penyediaan skim program dan pembiayaan bagi pekerja non upahan (pekerja keluarga), pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) serta kelompok penduduk miskin lapis bawah.
		1.1.3	Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja Daerah	1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja • Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja. • Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja • Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. • Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program - program peningkatan keahlian. • Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk peningkatan keahlian, keterampilan angkatan kerja baru. 3. Perlindungan terhadap pekerja Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
1.2.	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri			
		1.2.1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi • Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak. • Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi. • Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak. • Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi. • Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala. 2. Pemantapan Sistem Pemungutan • Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompot elektronika (Traveloka, Tokopedia, DanaKini, LinkAja dll). • Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis pajak dan retribusi. 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset • Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi yang berorientasi bisnis. • Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah. • Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan potensi - potensi baru sebagai penghasilan pendapatan Sektor Non-Migas, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. • Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara komprehensif. • Pembentukan BUMD di bidang Kepariwisata.
		1.2.2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Pemantapan Infrastruktur Perdagangan • Pemerataan pembangunan infrastruktur yang bermuara pada konektivitas antar pulau di NTT untuk memastikan '<i>rantai pasok</i>' perdagangan yang berkelanjutan. • Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri dan pengembangan industri pengolahan komoditi yang bernilai tambah dalam mendukung perdagangan antar pulau di NTT. • Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital untuk UMKM. • Percepatan digitalisasi bisnis UMKM. 2. Peningkatan nilai tambah (<i>value added</i>) produk Pengembangan komoditas ekspor unggulan seperti Kopi, Kakao, Vanili, Mente, dan Garam. 3. Perbaikan sistem usaha dan investasi • Peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah/ Industri Kecil Rumah Tangga (IKM/IKRT) sebagai pendorong ekonomi produktif berbasis masyarakat. • Peningkatan jumlah sertifikasi internasional Komoditi unggulan seperti Kopi, Kakao, Mente, Rumput Laut, dan Kelor/Marungga. • Percepatan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				- Fasilitasi pemasaran dengan prinsip Perdagangan yang adil 4. Pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi) - Pembentukan dan pengembangan klaster komoditas berorientasi ekspor pada setiap sub wilayah ekonomi. - Peningkatan daya saing kelembagaan dan pelaku ekonomi pada setiap sub wilayah ekonomi. - Penguatan supply chain dan value chain komoditas berorientasi ekspor.
		1.2.3	Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	1. Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan - Sosialisasi pemanfaatan skim pembiayaan untuk rumah tangga miskin. - Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif. - Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat. - Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skim pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.
		1.2.4	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan - Intensifikasi produksi pangan utama pada skala RT. - Ekstensifikasi Pangan alternatif sebagai penyanggah pangan utama. 2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan - Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin. - Pemantapan stok pangan pada saat krisis. 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat - Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar. - Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dengan anak Baduta).



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				4. Dukungan Regulasi • Penyusunan dan penetapan regulasi (Perda) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.
1.3	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial			
		1.3.1	Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar Wilayah	1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat lapis atas dan lapis bawah • Perluasan subsidi/jaminan sosial bagi kelompok masyarakat lapis bawah/keompok rentan. • Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat lapis bawah. 2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil • Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah (kabupaten) yang fokus pada usaha produktif sektor pertanian, peternakan, perikanan/kelautan dan industri mikro (RT). • Penguatan BUMDES pada wilayah terpencil untuk memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat. 3. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru • Koordinasi dan fasilitasi kawasan pedesaan/penyangga untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru • Koordinasi pendanaan dengan Pusat untuk pengembangan pusat ekonomi baru
		1.3.2	Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan • Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. • Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. • Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. • Kesempatan berusaha yang layak. • Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan - Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukum. - Jaminan rehabilitasi akibat berbagai tindakan traumatik. - Penguatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan. 3. Pemantapan perlindungan terhadap anak - Perluasan Kota dan Desa Ramah Anak. - Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatik. - Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak.
MISI II : MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)				
2.1.	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)			
		2.1.1	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan	1. Pembangunan perwilayahan destinasi - Pengembangan 'ring of beauty' melalui pengembangan Destinasi Pariwisata baru di 22 Kabupaten/Kota dalam konsep Pariwisata Estate yang berbasis masyarakat. - Pengembangan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama Tradisional dan Alam. 2. Pembangunan daya tarik wisata - Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. - Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 3. Pembangunan infrastruktur pariwisata - Peningkatan pembangunan sarana prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata. 4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan - Mengedukasi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tentang peran dan fungsi, manfaat pariwisata guna merangsang pemanfaatan peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi. - Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. • Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. • Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. 5. Pembangunan SDM Pariwisata Peningkatan jumlah SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 6. Pengembangan Investasi pariwisata • Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen - komponen terkait lainnya. • Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai.
		2.1.2	Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	1. Penguatan value chain kepariwisataan • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu sebagai pemasok bahan baku bagi kebutuhan industri kepariwisataan. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor antara (pengolahan) untuk meningkatkan nilai tambah. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hilir untuk meningkatkan nilai transaksi dengan wisatawan. • Pengembangan jaringan bisnis untuk menyatukan pelaku ekonomi (hulu-antara-hilir) sehingga terbentuk value chain kepariwisataan yang solid dan dinamis. 2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan • Optimalisasi fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. • Pengembangan atraksi wisata interaktif untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. • Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan pada semua destinasi pariwisata. • Penerapan sistem pembayaran elektronik pada semua outlet kepariwisataan untuk mempermudah transaksi wisatawan.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
MISI III : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN				
3.1	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
		3.1.1.	Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	1. Percepatan pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara - Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternal (Pinjaman Daerah) secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. - Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara.
		3.1.2	Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan - Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternal (Pinjaman Daerah) secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pengairan. - Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan. 2. Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian - Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air. - Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras provinsi dan kabupaten. - Dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan. - Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin terselenggaranya tatakelola air yang baik.
3.2. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar				
		3.2.1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar - Pengembangan permukiman melalui Peningkatan jumlah Rumah Layak Huni. - Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan. • Pengembangan Sistem Penyediaan Perumahan dan Pemukiman yang serasi dengan Tata Ruang dan terpadu dengan Layanan Infrastruktur Dasar Pemukiman termasuk Sistem Transportasi Publik. • Penyelenggaraan sinergi Air Minum dan Sanitasi di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Masyarakat. • Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi. • Meningkatkan penyediaan dan pelayanan kualitas infrastruktur strategi. • Pengembangan Sistem Perumahan Publik di perkotaan termasuk Kawasan Industri. 2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya • Strategi di Bidang Pembiayaan dengan Optimalisasi Pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). • Optimalisasi Partisipasi Swasta dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. • Pendataan Pengembang dan Asosiasi Pengembangan Perumahan melalui Sistem Informasi Registrasi Perumahan (SIREG). • Reformasi subsidi perumahan yang efisien dan berkelanjutan melalui skema subsidi yang progresif termasuk 'passing outskema' subsidi yang tidak tepat sasaran dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang. • Pengembangan peran BUMD dalam penyediaan perumahan Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran dan investasi. • Pemanfaatan tanah milik negara untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. • Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		3.2.2.	Tersedianya Sumberdaya Kelistrikan yang Memadai dan Murah untuk Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi.	1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi • Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelistrikan berbasis EBT. • Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT pada tingkat komunitas. 2. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan • Penyediaan subsidi bagi RT untuk mengakses listrik PLN. • Pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT skala mikro untuk pemenuhan kebutuhan RT daerah terpencil.
3.3.	Menjamin terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan			
		3.3.1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan • Optimalisasi penanganan Sampah, Limbah dan Sungai melalui penyediaan tempat pembuangan sampah terpadu. • Mendorong terbentuknya tempat pembuangan sampah (TPA) di setiap Kabupaten. • Peningkatan fasilitasi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi. • Peningkatan pembangunan Instalasi Air Limbah Domestik di semua Kabupaten. • Peningkatan pengelolaan Sampah berbasis komunitas dan pengelolaan limbah berbasis komunitas. • Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembangunan infrastruktur dengan peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Penegakan Aturan dan Regulasi Lingkungan • Pelarangan buang sampah ke sungai. • Pembinaan dan evaluasi kinerja perusahaan yang berpotensi mengganggu kualitas lingkungan. • Optimalisasi sistem pendataan informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam serta lingkungan hidup yang handal.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		3.3.2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	1. Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca • Penyebarluasan gerakan hemat energi, pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah organik dan non organik. • Perluasan Ruang Terbuka Hijau. • Penanaman Pohon pada pekarangan pribadi maupun ruang publik. • Peningkatan penggunaan EBT.
		3.3.3	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki • Meningkatkan peran Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dan penguatan ruang provinsi. • Optimasi fungsi penguatan lahan dalam kawasan sentra produksi pangan guna menunjang ketahanan pangan nasional. • Optimalisasi Keterpaduan antar sektor dalam tata guna lahan pertanian yang mampu meningkatkan kerjasama pemerintah dan stakeholder dalam penataan ruang yang selaras, sinkron dan terpadu dari berbagai rencana dan program lintas sektoral dalam menunjang ketahanan pangan serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh. 2. Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan • Konsistensi kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang telah ditetapkan. • Peningkatan upaya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang sesuai fungsinya.
		3.3.4	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat • Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur. • Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. • Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan. • Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana serta Adaptasi terhadap Perubahan Iklim seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat. • Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB). • Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat. 2. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana • Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. • Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital. • Penetapan jumlah Desa Tangguh Bencana.
MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
4.1. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing				
		4.1.1.	Mewujudkan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. • Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari. • Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju Akreditasi Minimal B bagi SMA, SMK dan SLB. • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan (DAK, CSR, APBD Provinsi dan APBN). • Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah. • Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui penyediaan Modul Pembelajaran Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i SMA/SMK, Organisasi Kepemudaan, Perguruan Tinggi di wilayah NTT.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan Beasiswa. 3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship • Kerjasama pengembangan Keterampilan siswa SMK di Balai Latihan Kerja untuk menuju SDM unggul melalui Pendidikan Vokasi. • Meningkatkan Keterampilan Penduduk Usia Kerja. • Mengoptimalkan Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Sekolah Kejuruan. 4. Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru • Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah (SMA, SMK dan SLB). • Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SMK, SMA dan SLB. • Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA, SMK dan SLB.
		4.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NTT	1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan • Penyediaan Laboratorium Biomolekuler, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah. • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional). • Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan. 2. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan • Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan). • Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal Health Care 100%). • Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan melalui Fasilitasi Layanan Rujukan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sampai ke Rumah Sakit rujukan Provinsi.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Penyediaan dan distribusi tenaga medis (Dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan. • Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi. • Perbaikan sistem dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Memastikan layanan kesehatan yang komperhensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk. • Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total. 3. Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 4. Pencegahan stunting • Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahannya sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan. • Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil. • Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin. • Perbaikan perilaku hidup sehat. • Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu.
		4.1.3.	Meningkatnya kualitas Pemuda dan prestasi keolahragaan	1. Pengembangan Kepemudaan • Pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam rangka meningkatkan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah. • Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda melalui dukungan, kesempatan, pelatihan, pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa Wirausaha, Produktif, Berprestasi dan Bertanggung jawab.



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				2. Pengembangan keolahragaan - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan prestasi. - Pembinaan Cabang Olahraga Potensial, Tradisional dan Rekreasi untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah.
MISI V : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
5.1.	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik			
		5.1.1.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan - Penerapan e-government, e-planning, e-budgeting secara terpadu. - Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara terpadu. - Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja secara terpadu. - Pemantapan sistem pendataan secara terpadu untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara terpadu. - Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali. - Pemantapan pelaksanaan maintenance system secara teratur dan berkelanjutan. - Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem. - Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan. 2. Reformasi Regulasi - Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web. - Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan.



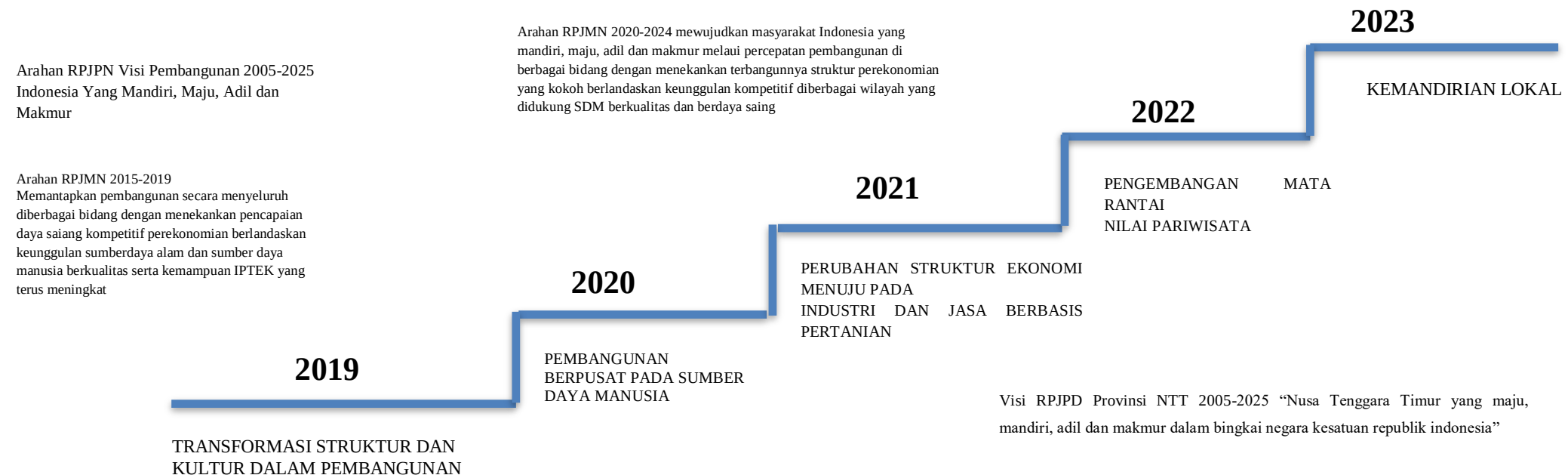
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistis dan terukur sebagai dasar penentuan pemberian tunjangan kinerja. 3. Peningkatan Kapasitas SDM • Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. • Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah. • Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas. • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme <i>assessment centre</i>, seleksi terbuka dan manajemen <i>talent pool</i>. • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Penerapan role model, agen perubahan dan budaya kerja. • Rekrutmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi. • Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta dunia usaha. • Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai. • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.



6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada gambar 6.1 dan tabel 6.2 berikut.

Gambar 6.1
Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2018 – 2023



Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN • Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar • Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat • Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya • Reformasi birokrasi sistem pemerintahan • Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik • Keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah	PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA • Pembangunan Ekonomi Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Pembangunan • Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga • Pengembangan potensi garam sebagai industri nasional • Pengembangan badan usaha daerah pada sektor-sektor potensial dalam peningkatan pendapatan daerah, pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan produk lokal	PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS PERTANIAN • Sinergitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Pemangku Kepentingan • Peningkatan perencanaan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih • Peningkatan industri pertanian, perikanan dan peternakan • Intekkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata <i>Ring of Beauty</i>	PENGEMBANGAN MATA RANTAI NILAI PARIWISATA • Kebangkitan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera • Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal • Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri • Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih	KEMANDIRIAN LOKAL • Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Ekonomi Berkelanjutan • Peningkatan kualitas hidup masyarakat • Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multisektor



6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Misi, sasaran dan program dirumuskan dengan merujuk pada penelaahan Bab II, III, IV dan V, sehingga dapat diperoleh indikator strategis program yang dapat dipedomani perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Menunjuk amanat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Karena itu, telah ditetapkan program khusus dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur, yang menjabarkan makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera, dan dikenal dengan Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program yang dilaksanakan berubah sebagaimana ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan target-target kinerja, dan data dasar. Nomenklatur Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera juga harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Namun demikian, program-program tersebut tetap dijiwai oleh semangat NTT Bangkit menuju Sejahtera. Untuk itu indikator program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya sesuai hasil evaluasi. Pemetaan Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera ke nomenklatur program sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.



Tabel 6.3
Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program NTT Sejahtera	Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)
Dinas Kesehatan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	Program NTT Sejahtera (Bangkit)	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate
	Program NTT Sejahtera	Persentase rumah tangga menurut air layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	<i>Persentase rumah tangga menurut air layak</i>
		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak		<i>Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak</i>
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Program NTT Sejahtera	Jumlah kader Champion yang terlibat dalam pemenuhan gizi balita dalam rangka pencegahan stunting	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keterlibatan Kader Champion dalam pemenuhan Gizi Balita dalam rangka pencegahan stunting



KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Program NTT Bangkit	Jumlah BumDes Aktif di Pariwisata Estate	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Bumdes Aktif di Pariwisata Estate
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	Program NTT Bangkit	Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan pariwisata estate	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA
				Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata
Dinas Perhubungan				
	Program NTT Sejahtera	Persentase trayek angkutan umum di pariwisata estate	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase trayek angkutan umum di pariwisata estate



KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Program NTT Bangkit	Persentase cakupan internet di Pariwisata estate	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan internet di Pariwisata estate
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Program NTT Bangkit	Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi
		jumlah olahraga trekreasi yang dibina untuk mendukung pariwisata estate		
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
	Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di pariwisata estate	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di pariwisata estate
Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Program NTT Bangkit	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan di pariwisata estate	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan budidaya di pariwisata estate
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan tangkap di pariwisata estate
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	



KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola
		Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan usaha di bidang pariwisata yang dikelola masyarakat
		Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilih gender	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
		Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan Gizi Buruk	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan Gizi Buruk
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di pariwisata estate	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian, Peternakan di Pariwisata Estate
		Persentase pertumbuhan produksi hortikultura di pariwisata estate		
		Persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate		
Dinas Peternakan				
	Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulanga n gizi buruk	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulanga n gizi buruk



KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral				
	Program NTT Bangkit	Persentase dukungan elektrifikasi di setiap Pariwisata Estate	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pengelolaan Potensi EBT di destinasi wisata
	Program NTT Sejahtera	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi dari non EBT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
3.06.16	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan di Pariwisata Estate	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi
	Perindustrian			
3.07.16	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata estate	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata estate



Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MISI I: MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL											
				1.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Makmur dan Sejahtera											
				1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan											
3	27			Pertanian											
3	27	02		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak:				43.566.415.276		45.396.204.718		47.302.845.316		DINAS PETERNAKAN
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0		7,0	
					- Sapi	Ekor	1.027.256	1.223.483		1.305.137		1.398.972		1.398.972	
					- Kerbau	Ekor	165.551	193.583		206.782		221.682		221.682	
					- Kuda	Ekor	114.514	129.196		135.129		141.672		141.672	
					b. Ternak Kecil	%	2,9	11		11,02		11,06		11,06	
					- Kambing	Ekor	693.577	991.505		1.083.865		1.184.829		1.184.829	
					- Domba	Ekor	68.388	83.563		89.336		95.507		95.507	
					- Babi	Ekor	2.141.246	2.899.766		3.246.707		3.650.524		3.650.524	
					c. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6		6	
					- Unggas	Ekor	17.248.318	20.318.557		21.306.593		22.584.988		22.584.988	
					Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting										DINAS PETERNAKAN
					a. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6		6	
					Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	Ekor	17.248.318	20.318.557		21.306.593		22.584.988		22.584.988	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate										DINAS PETERNAKAN
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0			
					- Sapi	Ekor	1.027.256	1.223.483		1.305.137		1.398.972		1.398.972	
					- Kerbau	Ekor	165.551	193.583		206.782		221.682		221.682	
					- Kuda	Ekor	114.514	129.196		135.129		141.672		141.672	
					b. Ternak Kecil	%	2,9	11		11,02		11,06		11,06	
					- Kambing	Ekor	693.577	991.505		1.083.865		1.184.829		1.184.829	
					- Domba	Ekor	68.388	83.563		89.336		95.507		95.507	
					- Babi	Ekor	2.141.246	2.899.766		3.246.707		3.650.524		3.650.524	
					c. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6			
					- Unggas	Ekor	17.248.318	20.318.557		21.306.593		22.584.988		22.584.988	
3	27	02		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan benih bersertifikat	%	100	100		100		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi				151.590.142.770		5.405.624.440		5.405.624.440		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	%	86,29	92,46		95,24		100,00		100,00	
					Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	%	45,80	71,15		76,09		100,00		100,00	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	%	79,69	92,47		95,24		100,00		100,00	
					Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	%	82,94	92,47		95,24		100,00		100,00	
					Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	%	95,04	92,46		95,23		100,00		100,00	
					Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	%	86	92		95		100		100	
					Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	%	0	100		100		100		100	
					Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	%	0	100		100		100		100	
					Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	%	0	100		100		100		100	
					Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	%	79	90		95		100		100	
					Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	%	77	87		93		100		100	
					Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	%	71	84		90		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	%	63	83		90		100		100	
					Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	%	68	78		87		100		100	
					Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	%	71	85		91		100		100	
					Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%	94,26	97,07		98,52		100		100	
					Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	%	89	94		97		100		100	
					Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	%	89	94		97		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	%	0	90		100		100		100	DINAS PETERNAKAN
					a. Ternak Besar	%	1,9	6,2		6,5		7,0		7,0	
					- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	%	73	87		93		100		100	
					- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	%	75	87		93		100		100	
					- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	%	81	91		95		100		100	
					b. Ternak Kecil	%	2,9	11		11,02		11,06		11,06	
					- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	%	59	84		91		100		100	
					- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	%	72	87		94		100		100	
					- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	%	59	79		89		100		100	
					c. Unggas	%	2,7	5,6		5,8		6		6	
					- Unggas (Tahun 2019= 17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	%	76	90		94		100		100	
3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	%	0	80	4.487.082.183	80	4.675.539.635	80	4.871.912.299	80	DINAS PETERNAKAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	0	15		20		25		25	DINAS PETERNAKAN
3	27	05		Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	50	70	949.894.240	75	989.789.798	75	1.031.360.970	75	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07		Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas				3.171.600.970		3.304.808.211		3.443.610.156		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	%	0	30		60		100		100	
					Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	%	0	25		50		100		100	
					Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	%	0	25		50		100		100	
					Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	%	0	33,33		66,67		100		100	
					Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	%	47,12	61,54		80,77		100		100	
3	25			Kelautan dan Perikanan											
3	25	02		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	%	40,93	72	2.326.779.322	94	2.648.457.130	100	2.913.302.843	100	DKP



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	13,80	4	52.290.163.014	6	22.997.500.000	7	29.859.875.000	23,7	DKP
					Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	%	13,80	4		6		7		23,7	
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,86	5	167.006.833.430	10	15.474.512.250	20	18.372.652.563	42,8	DKP
					Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	%	1,86	5		10		20		43	
3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	85,00	30	3.830.741.856	20	4.189.275.862	0	4.608.203.448	0	DKP
3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	5,40	9,52	932.439.644	8,70	935.000.000	8,00	1.028.500.000	38,46	DKP
3		28		Kehutanan											
3	28	05		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	8.29	9.38		10.32		11.25		11.25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.1.2 Berkurangnya Kemiskinan											
1	06			Sosial											
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	%	50	80	4.037.573.046	90	4.207.151.114	100	4.383.851.461	100	DINAS SOSIAL
1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	%	70	80	245.227.300	90	255.526.847	100	266.258.974	100	DINAS SOSIAL
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%	70	80	10.697.830.717	90	11.147.139.607	100	11.615.319.471	100	DINAS SOSIAL
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	70	80	3.277.069.490	90	3.414.706.409	100	3.558.124.078	100	DINAS SOSIAL
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	%	70	80	578.293.920	90	602.582.265	100	627.890.720	100	DINAS SOSIAL
1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	%	0	100	72.912.100	100	75.974.408	100	79.165.333	100	DINAS SOSIAL
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	04	02		Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	0	0	2.246.860.610	67	4.400.000.000	100	2.250.000.000	100	Dinas PUPR



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	%	18	45	41.201.653.312	72	42.932.122.751	100	44.735.271.907	100	Dinas PUPR
					Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	60	77	0	80		100		100	
1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	11	33	13.123.074.352	78	13.674.243.475	100	14.248.561.701	100	Dinas PUPR
2	13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat				35.571.107.570		37.065.094.088		38.621.828.040		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit)	%	52.00	76.00		88.00		100.00		100.00	
					Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif)	%	83.16	87.09		91.73		100.00		100.00	
					Adat (Target 2023= 132 Unit)	%	0.00	33.33		66.67		100.00		100.00	
					Peningkatan Cakupan Pemberdayaan										
					PKK Aktif	%	20	60		80		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes)	%	52	76		88		100		100	
				1.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja Daerah											
2	07			Tenaga Kerja											
2	07	03		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	50	70	314,738,430	80	327,957,444	90	341,731,657	90	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	51.87	50		55		60		60	
2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35	45	193,237,230	50	201,353,194	55	209,810,028	55	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentasi meningkatnya PMI prosedural	%	55	70		75		85		85	
2	07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	%	35	45	102,191,520	70	106,483,564	90	110,955,874	90	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	65	75		80		85		85	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				1.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang Mandiri												
				1.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah												
2		18			Penanaman Modal											
2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	26,67	25	439.993.770	25	458.473.508	25	477.729.396	75	DPMPTSP	
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	0	33.33	574.905.380	66.66	599.051.406	100	624.211.565	100	DPMPTSP	
2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	114	100	764.998.210	100	797.128.135	100	830.607.516	100	DPMPTSP	
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	100	329.996.860	100	343.856.728	100	358.298.711	100	DPMPTSP	
2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	100	147.999.320	100	154.215.291	100	160.692.334	100	DPMPTSP	
					Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	100	100		100		100		100	DPMPTSP	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02			Keuangan											
5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	%	100	100	779.293.480.585	100	812.023.806.770	100	846.128.806.654	100	Badan Keuda
5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	100	5.718.774.180	100	5.958.962.696	100	6.209.239.129	100	BAPENDA
					Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100	100		100		100		100	BAPENDA
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	21,32	32,26	42.168.708.180	34,04	43.939.793.924	37,56	45.785.265.268	37,56	BAPENDA
				1.2.2 Menguatnya Peranan NTT dalam Perdagangan Regional											
2	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
2	17	02		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	%	92	93	-	96		100		100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	2	3		5		7		7	
					Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	%	0,2	10		15		20		20	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	%	52	66	496,276,800	83	517,120,426	100	538,839,483	100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	47	54	965,290,990	68	1,110,084,639	100	1,443,110,030	100	
					Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	%	62	70	1,800,000,000	74	1,350,000,000	78	1,147,500,000	78	
					Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	68	76	965,290,990	82	1,110,084,639	85	1,443,110,030	85	
3	30			Perdagangan											
3	30	02		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	100	50	194.733.950	75	202.912.776	100	211.435.112	100	DISPERINDAG
3	30	03		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	%	0	25	264.406.000	50	275.511.052	25	287.082.516	100	DISPERINDAG
3	30	04		Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	10	10	1.188.398.320	10	1.238.311.049	10	1.290.320.114	10	DISPERINDAG
					a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10	10		10		10		10	
					b. Barang Penting	%	10	10		10		10		10	
3	30	05		Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	0	16,67	781.203.800	28,57	814.014.360	11,11	848.202.963	11,11	DISPERINDAG



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	06		Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	0	54,7	2.965.525.640	55,7	3.090.077.717	56,7	3.219.860.981	56,7	DISPERINDAG
					Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	0	NA		44,12		100		100	
3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	0	40	3.646.271.312	70	3.799.414.707	90	3.958.990.125	90	DISPERINDAG
					Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	0	40		70		90		90	DISPERINDAG
3	31			Perindustrian											
3	31	02		Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	1,12	1,12	10.147.333.081	2,24	10.573.521.070	3,36	11.017.608.955	3,36	DISPERINDAG
3	31	03		Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	0	50	300.940.640	70	313.580.147	90	326.750.513	90	DISPERINDAG
3	31	04		Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	%	0	10	201.995.940	11,42	210.479.769	11,85	219.319.920	11,85	DISPERINDAG



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.2.3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat											
				1.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan											
2	09			Pangan											
2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	%	2,2	2,87	3.147.148.520	2,79	3.279.328.758	2,72	3.417.060.566	2,72	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	%	9,59	10,20		9,30		8,50		8,50	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04		Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	%	0	50	124.957.710	25,07	130.205.934	0	135.674.583,04	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05		Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	%	37,21	48,84	318.999.020	74,42	332.396.979	100,00	346.357.651,95	100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				1.3 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang Berkeadilan Sosial											
				1.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan Antar Wilayah											
2	10			Pertanahan											
2	10	02		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	06		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	10		Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	339.727.055	54,55	353.995.591	81,82	368.863.406	100,00	Dinas PUPR



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2 17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	%	92	93	-	96		100		100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	2	3		5		7		7	
				Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	%	0,2	10		15		20		20	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	%	52	66	496,276,800	83	517,120,426	100	538,839,483	100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	47	54	965,290,990	68	1,110,084,639	100	1,443,110,030	100	
				Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	%	62	70	1,800,000,000	74	1,350,000,000	78	1,147,500,000	78	
				Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	68	76	965,290,990	82	1,110,084,639	85	1,443,110,030	85	
			1.3.2 Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak											
2 08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	%	8	32.0	1,769,437,330	50.7	1,843,753,698	100.0	1,921,191,353	100.0	DINAS PEMBER - DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	%	64	72		90		100		100	DINAS PEMBER - DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
2	08	03		Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	%	60	75	987,740,150	80	1,029,225,236	100	1,072,452,696	100	DINAS PEMBER - DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
					Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	%	60	75		80		100		100	
2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	%	0	25	466,040,637	50	485,614,344	75	506,010,146	100	DINAS PEMBER- DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG -AN ANAK
					Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	%	0	60		80		100		100	
					Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	%	0	25		62.5		100.0		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	10	20	180,308,680	40	187,881,645	50	195,772,674	50	DINAS PEMBER - DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG- AN ANAK
2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	%	10	32,2	802,220,880	75.6	835,914,157	100	871,022,552	100	DINAS PEMBER - DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG- AN ANAK
2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	%	0	5.6	90,311,960	55.2	94,105,062	60	98,057,475	60	DINAS PEMBER - DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG- AN ANAK
MISI II : MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)															
				2.1 Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)											
				2.1.1 Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan											
3	26			Pariwisata											
3	26	02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	112.08	32.38	10,812,254,863	42.27	20,000,000,000	56.67	9,500,000,000	56.67	DISPAREKRAF



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	-	1,50	3.100.976.940	5,00	7.289.546.133	10,00	6.248.182.400	10,00	DISPAREKRAF
					Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	-	93,75		93,75		100,00		100,00	
3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:				4.294.951.540		5.835.420.194		2.917.710.097		DISPAREKRAF
					a. Tour operator	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					b. Guide/Pemandu Wisata	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					c. Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					d. Restourant	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					e. Perhotelan	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					f. Pramuwisata	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					g. Transportasi	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					h. Informasi	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	0	29,17		79,17		100		100	DISPAREKRAF
1	01			Pendidikan											
1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	%	0	50		75		100		100 (8 Unit)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	70	77		80		90		90	Dinas PUPR
1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	54.95	100		100		100		100	Dinas PUPR
1	05			Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	%	0	33.3		66.6		100		100	BPBD



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16					Komunikasi dan Informatika										
2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	%	0	31.8		68.2		100		100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 19					Kepemudaan dan Olahraga										
2	19	03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi										DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Cabor tradisional	%	57.1	85.7		100.0		100.0		100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Cabor rekreasi	%	16.7	66.7		100.0		100.0		100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 22					Kebudayaan										
2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	5,38	21,51	7.512.671.600	0	7.828.203.807	0	8.156.988.367	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	4	6	2.556.872.500	8	2.664.261.145	10	2.776.160.113	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	4	6		8		10		10	
2	22	04		Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	%	20	36	250.000.000	38	260.500.000	40	271.441.000	40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	11,11	24	2.281.884.550	26	2.377.723.701	28	2.477.588.097	28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	25	65	1.106.504.000	80	1.152.977.168	100	1.201.402.209	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	5,38	21,51	7.512.671.600	0	7.828.203.807	0	8.156.988.367	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	28			Kehutanan											
3	28	04		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	0	50		75		100		100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 29					Energi dan Sumber Daya Mineral										
3	29	05		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	11.9/ (5,625)	8.79/(4,16)		18.88/ (8,93)		22.21/(10,5)		100/ (47,28)	Dinas ESDM
3 30					Perdagangan										
3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	0	40		70		90		90	DISPERINDAG
					2.1.2 Meningkatkan Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah										
3 26					Pariwisata										
3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	112.08	32.38	5,247,798,920	42.27	8,996,918,074	56.67	2,998,972,691	56.67	DISPAREKRAF
2 17					Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	47	54	965,290,990	68	1,110,084,639	100	1,443,110,030	100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25					Kelautan dan Perikanan										
3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	%	13.80	4		6		7		23.7	DKP
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	%	1.86	5		10		20		43	DKP
3 27					Pertanian										
3	27	02		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate										
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0			DINAS PETERNAKAN
					- Sapi	Ekor	1,027,256	1,223,483		1,305,137		1,398,972		1,398,972	DINAS PETERNAKAN
					- Kerbau	Ekor	165,551	193,583		206,782		221,682		221,682	DINAS PETERNAKAN
					- Kuda	Ekor	114,514	129,196		135,129		141,672		141,672	DINAS PETERNAKAN
					b. Ternak Kecil	%	2.9	11		11.02		11.06		11.06	DINAS PETERNAKAN
					- Kambing	Ekor	693,577	991,505		1,083,865		1,184,829		1,184,829	DINAS PETERNAKAN
					- Domba	Ekor	68,388	83,563		89,336		95,507		95,507	DINAS PETERNAKAN
					- Babi	Ekor	2,141,246	2,899,766		3,246,707		3,650,524		3,650,524	DINAS PETERNAKAN
					c. Unggas	%	2.7	5.6		5.8		6			DINAS PETERNAKAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Unggas	Ekor	17,248,318	20,318,557		21,306,593		22,584,988		22,584,988	DINAS PETERNAKAN
3	27	03		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi										
					Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%	94.26	97.07		98.52		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	%	94	97		99		100		100	
					Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi										
					Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	%	89	94		97		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	%	89	94		97		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	%	0	90		100		100		100	DINAS PETERNAKAN
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0		7,0	DINAS PETERNAKAN
					- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	%	73	87		93		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	%	75	87		93		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	%	81	91		95		100		100	DINAS PETERNAKAN
					b. Ternak Kecil	%	2.9	11		11.02		11.06		11.06	DINAS PETERNAKAN
					- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	%	59	84		91		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	%	72	87		94		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	%	59	79		89		100		100	DINAS PETERNAKAN
					c. Unggas	%	2.7	5.6		5.8		6		6	DINAS PETERNAKAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	%	76	90		94		100		100	DINAS PETERNAKAN
MISI III : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN															
				3.1 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
				3.1.1 Terwujudnya Konektivitas antar Wilayah di dalam Daerah dan Keluar Daerah											
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	%	85	100	1.218.444.330. 758	100	488.063.323.40 8	100	508.561.982.99 0,97	100	DINAS PUPR
					Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	54,95	100		100		100		100	
1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%	0	68	3.124.609.758	84	3.255.843.368	100	3.392.588.789	100	DINAS PUPR
2	15			Perhubungan											
2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	15	20	3.378.101.002	30	3.519.981.244	45	3.667.820.456	100	DINAS PERHUBUNG- AN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	25	25	22,753,552,492	30	23,709,201,697	30	24,704,988,168	30	DINAS PERHUBUNG- AN
					Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	40	50		60		75		75	
2	15	05		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	0	0	1.299.968.400	100	1.354.567.073	100	1.411.458.890	100	DINAS PERHUBUNG- AN
2	20			Statistik											
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	%	80	100	99.913.400	100	104.109.763	100	108.482.373	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	%	75	100		100		100		100	
2	21			Persandian											
2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	0	3-3,9 (Cukup)	278.662.620	4-4,9 (Baik)	290.366.450	5 (Sangat Baik)	302.561.841	5 (Sangat Baik)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3.1.2 Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung Peningkatan Produksi Pertanian											
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	%	31,39	10,56	105.361.673.330	33,10	219.573.727.220	33,10	230.552.413.581	100	DINAS PUPR
					Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	%	4,23	33,80		66,90		100,00		100	DINAS PUPR
					Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	%	70	75.02		76.74		78.46		100	
					Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	%	7,46	28,84		64,42		100		100	
					Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	%	60	70		80		85		100	
					Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	%	13,64	86.36		95.45		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 28					Kehutanan										
3	28	03		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,14	176.430.599.445	1,22	48.840.684.622	1,30	50.891.993.376	1,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	0	2,5	8.389.078.710	4,2	8.741.420.016	8,5	9.108.559.656	8,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	0	50		75		100		100	
3	28	05		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	%	29,27	31,59	1.270.478.830	32,75	1.323.838.941	33,91	1.379.440.176	33,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	8.29	9,38		10,32		11,25		11,25	
3	28	06		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	%	0	0,13	116.361.450	0,25	121.248.631	0,30	126.341.073	0,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 29					Energi Sumber Daya Mineral										
3	29	02		Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	5,26	10,53	1,508,951,200	15,79	1,572,327,150	21,05	1,638,364,891	21,05	Dinas ESDM
					Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41	%	69.49	84.75		91.53		100		100	Dinas ESDM



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)										
				3.2 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar											
				3.2.1 Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak											
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	%	73	83	6.550.676.040	85	6.825.804.434	100	7.112.488.220	100	DINAS PUPR
					Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	70	77		80		90		90	
1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%	0	32	-	64	415.275.000	100	747.495.000	100	DINAS PUPR
1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	44	66	0	72		80		80	DINAS PUPR
1	03	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	%	0	0	-	0	-	100	3.000.000.000	100	DINAS PUPR
1	03	07		Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	%	50	70	109.864.252.409	90	114.478.551.010	100	119.286.650.153	100	DINAS PUPR



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	%	0	41		70		100		100	
					Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	%	0	31,82		63,64		100		100	
1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	%	0	2	887.916.200	3	925.208.680	4	964.067.445	4	DINAS PUPR
					Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	%	0	20		60	-	80	-	100	
1	03	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%	0	0		66		100		100	DINAS PUPR
1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%	0	68	3.124.609.758	84	3.255.843.368	100	3.392.588.789	100	DINAS PUPR



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	04	02		Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	0	0	2,246,860,610	67	4,400,000,000	100	2,250,000,000	100	Dinas PUPR
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	%	18	45	41,201,653,312	72	42,932,122,751	100	44,735,271,907	100	Dinas PUPR
					Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	60	77	0	80		100		100	Dinas PUPR
1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	11	33	13,123,074,352	78	13,674,243,475	100	14,248,561,701	100	Dinas PUPR
2	11			Lingkungan Hidup											
2	11	02		Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%	4,34	56,52	997.573.600	78,26	1.039.471.691	100	1.083.129.502	100	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09		Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	0	8,33	520.088.630	16,67	541.932.352	25,00	564.693.511	25,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	0	33,33	266.267.850	41,67	277.451.100	50,00	289.104.046	50,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	11		Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	0	24	532.901.560	26	555.283.426	27	578.605.329	27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				3.2.2 Tersedianya Sumberdaya Kelistrikan yang Memadai dan Murah untuk Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi											
3	29			Energi Sumber Daya Mineral											
3	29	05		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT <i>setiap</i> tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	%/ (kW)	10.89 / (11.25)	8.04 /(8.31)	1,413,359,460	17.28/(17.85)	1,472,720,557	20.33 /(21)	1,534,574,821	100/ (103.32)	Dinas ESDM
					Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	11.9/ (5,625)	8.79/(4,16)		18.88/ (8,93)		22.21/(10,5)		100/ (47,28)	Dinas ESDM
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	%	57.22	58.42	1,179,370,240	59	1,228,903,790	59.58	1,280,517,749	59.58	Dinas ESDM
					Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	%	NA	0		33		33		100	Dinas ESDM



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan											
				3.3.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah											
2	11			Lingkungan Hidup											
2	11	03	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,01	75,13	1.972.677.610	75,42	2.055.530.070	75,66	2.141.862.333	75,66	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	05	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	%	0	10,00	7.334.457.789	27,33	7.642.505.016	51,33	7.963.490.227	51,33	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan ijin PPLH	%	59	58,26	296.249.630	79,09	308.692.114	100	321.657.183	100	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
				3.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca											
2	11			Lingkungan Hidup											
2	11	11	Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	0	24	532.901.560	26	555.283.426	27	578.605.329	27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	44	66	0	72		80		80	Dinas PUPR
3	28			Kehutanan											
3	28	03		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,14	176.430.599.44 5	1,22	48.840.684.622	1,30	50.891.993.376	1,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	0	2,5	8.389.078.710	4,2	8.741.420.016	8,5	9.108.559.656	8,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	0	50		75		100		100	
3	29			Energi Sumber Daya Mineral											
3	29	05		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	%/ (kW)	10.89 / (11.25)	8.04 /(8.31)	1,413,359,460	17.28/(17.85)	1,472,720,557	20.33 /(21)	1,534,574,821	100/ (103.32)	DINAS ESDM



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	11.9/ (5,625)	8.79/(4,16)		18.88/ (8,93)		22.21/(10,5)		100/ (47,28)	
				3.3.3 Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang											
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0	25,32	6.676.888.198	42,2	6.957.317.502	100	7.249.524.837	100	DINAS PUPR
					Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	58,3	27,27		14,3		0		0	DINAS PUPR
				3.3.4 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim											
1	05			Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	%	40	60	1.580.274.720	80	1.646.646.258	100	1.715.805.401	100	BPBD



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	20	0		80		100		100	
					Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	%	0	33,3		66,6		100		100	
					Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	%	62,5	75		87,5		100		100	
1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100	100	179.998.830	100	187.558.781	100	195.436.250	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	0	25		85		100		100	
					Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:										
					a. Kebakaran	%	0	25		85		100		100	
					b. Non Kebakaran	%	0	25		85		100		100	
1	06			Sosial											
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	%	70	80	578,293,920	90	602,582,265	100	627,890,720	100	DINAS SOSIAL



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA													
				4.1 Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing									
				4.1.1. Mewujudkan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing									
1	01			Pendidikan									
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah			1.864.382.228.124		1.942.686.281.705		2.024.279.105.537	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	74,83	100		100		100		100
				- APS SLB	%	74,65	100		100		100		100
				Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	%	0	50		75		100		100 (8 Unit)
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B			-		980.000.000		1.021.160.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	0	6%		13%		19%		19%
				2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	22,0	30,0		35,0		45,1	45,1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	9,2	14,9		19,0		25,1	25,1	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	%	100	100		100		100		100	
1	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun				-		700.590.700		850.515.500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	11,81	49,94		74,97		100		100	
					2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	11,14	49,49		74,86		100		100	
					3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	14,96	49,85		74,78		100		100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	0	33,33	748.371.000	66,67	779.802.582	100,00	812.554.290	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23			Perpustakaan											
2	23	02		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan <i>e-library</i>	%	70	100	5.139.107.352	100	5.354.949.861	100	5.579.857.755	100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA- AN
					Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	25,0	50,0		75,0		100,0		100,0	
2	23	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	%	9,1	22,7	-	45,5		100		100	
					Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	9,1	22,7		45,5		100		100	
				4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NTT											
1	02			Kesehatan											
1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					221.432.927.084		230.733.110.022		240.423.900.642		DINAS KESEHATAN
					Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100	100		100		100		100	DINAS KESEHATAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100	100		100		100		100	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	%	74,9	75,6		84,9		100,0		100,0	
					Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%	0	28,6		71,4		100		100	DINAS KESEHATAN
					Kasus Kematian Ibu	Kasus	1,81	0		0		0		0	DINAS KESEHATAN
					Kasus Kematian Bayi	Kasus	14,51	0		0		0		0	
					Kasus Kematian Balita	Kasus	1.091	0		0		0		0	
					Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	%	9,4	8,3		7,5		6		6	
					Underweight	%	19,3	16,6		15,4		14,2		14,2	
					Prevalensi Stunting	%	38	20,0		16,0		12,0		12	
					Angka Kelahiran Total (TFR)	Poin	3,4	3		2,8		2,6		2,6	
					Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	41,2	51		53		55		55	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	%	16,7	50,0		66,7		100,0			DINAS KESEHATAN
					Persentase Kasus HIV yang diobati	%	0	50		77.3		100		100	DINAS KESEHATAN
					Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	%	0	77,3		90,9		100		100	
					Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	%	22,7	50,0		77,3		100		100	
					Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	%	63.6	91		95.5		100		100	
					Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100	100		100		100		100	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
					Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	%	42,7	48		50		52		52	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
1	02	03		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	%	22,01	47,85	24.634.747.480	74,16	25.669.406.874	100,00	26.747.521.963	100	DINAS KESEHATAN



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)	%	20,75	47,17		73,58		100		100	DINAS KESEHATAN
					Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	20,00	62,00		81,00		100		100	DINAS KESEHATAN
					Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	100	100		100		100		100	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
1	02	04		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100	100,0	-	100,0	750.581.000	100	950.853.500	100	DINAS KESEHATAN
1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	%	45,5	72,7	-	86,4	435.560.000	100	275.675.000	100	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	%	9,1	45,5		72,7		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	20	95	612.372.468	97	638.092.112	100	664.891.980	100	DINAS KESEHATAN
					Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	0	60		80		100		100	
					Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	70	85		90		100		100	
					Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD)	%	0	51,3		76,9		100,0		100	DINAS KESEHATAN
				4.1.3. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan											
2	19			Kepemudaan dan Olahraga											
2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%	44,0	75,0	2.922.693.966	90,0	3.045.447.113	100	3.173.355.891	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik				45.517.121.364		47.428.840.461		49.420.851.761		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Medali (200 buah)	%	25,0	50,0		75,0		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cabor (13 cabor)	%	38,5	76,9		92,3		100		100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi										
					Cabor tradisional	%	57,1	85,7		100		100		100	
					Cabor rekreasi	%	16,7	66,7		100,0		100,0		100	
					Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	Medali /%	(Atletik 8 medali emas, 3 perunggu; Catur; 1 madali perak; Renang; 0	(Atletik 8 medali emas, 1 perak, 4 perunggu; Catur; 1 madali perak; Renang; 1 perunggu		0		(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak		(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	%	30,4	31,8	1.000.000.000	65,2	1.042.000.000	100	1.085.764.000	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
MISI V : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK															
				5.1 Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang baik											
				5.1.1 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif											
4	01			Sekretariat Daerah											
4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%	100	100	131.984.020.481	100	137.527.349.341	100	143.303.498.014	100	BIRO UMUM
				Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100	100		100			100		Biro Administrasi Pimpinan
					Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	100	100		100		100		100	
					Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	100	100		100		100		100	
4	01	02		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	72.37	84.78	4,054,946,330	92.98	4,225,254,076	100	4,402,714,747	100	BIRO ORGANISASI
4	01	03		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	100	2.126.240.072	100	2.215.542.155	100	2.308.594.926	100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	100		100		100		100	
					Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	100		100		100		100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
					Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	%	100	100		100		100		100	
4	01	04		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	%	96,15	100	5.991.729.035	100	6.243.381.654	100	6.505.603.684	100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
					Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	%	100	100		100		100		100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
4	01	05		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	100	100	3.263.323.400	100	3.400.382.983	100	3.543.199.068	100	BIRO HUKUM
					Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	%	100	100		100		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	06		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	0	33,33	1.708.587.610	66,67	1.780.348.290	100	1.855.122.918	100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
					Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	0	33,33		66,67		100		100	
					Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	%	0	40		66,67		100		100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
4	01	07		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	100	100	6.237.004.664	100	6.498.958.860	100	6.771.915.132	100	Biro PBJ
4	01	08		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	100	33,33	29.999.600	100	31.259.583	100	32.572.486	100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%	100	100	131.984.020.481	100	137.527.349.341	100	143.303.498.014	100	BIRO UMUM
4	02			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat											
4	02	02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	76,33	100	72.293.931.275	100	75.330.276.389	100	78.494.147.997	100	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01			Perencanaan											
5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	%	0	100	3.358.618.955	100	3.499.680.951	100	3.646.667.551	100	Bappelit bangda
					Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	%	0	100		100		100		100	
5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	0	100	6.996.004.470	100	7.289.836.658	100	7.596.009.797	100	Bappelit bangda
					Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	%	0	100		100		100		100	Bappelit bangda
					Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	%	0	100		100		100		100	Bappelit bangda



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02			Keuangan											
5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100	100	779.293.480.585	100	812.023.806.770	100	846.128.806.654	100	Badan Keuda
5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	100	5.718.774.180	100	5.958.962.696	100	6.209.239.129	100	BAPENDA
					Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100	100		100		100		100	
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	21,32	32,26	42.168.708.180	34,04	43.939.793.924	37,56	45.785.265.268	37,56	BAPENDA
5	03			Kepegawaian											
5	03	02		Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	30	100	9.745.785.103	100	10.155.108.077	100	10.581.622.617	100	BKD
					Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	%	50	100		100		100		100	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	04			Pendidikan dan Pelatihan											
5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	Akreditasi	Latsar "B"	Latsar "B"	47.860.312.185	Kepemimpinan "A"	49.870.445.297	B dan A	51.965.003.999	B dan A	BPSDM
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	%	100	100		100		100		100	
					Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	%	100	100		100		100		100	
					Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	%	65	75		80		85		85	BPSDM
5	05			Penelitian dan Pengembangan											
5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	%	40	62,86	3.131.717.461	82,86	3.263.249.594	100	3.400.306.077	100	Bappelit bangsa



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	%	0	93,10		96,55		100		100	Bappelit bangda
					Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	%	0	30,00		60,00		100		100	Bappelit bangda
5	06			Pengelolaan Perbatasan											
5	06	02		Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	0	33	3,985,929,080	67	4,153,338,101	100	4,327,778,302	100	BADAN PERBATASAN DAERAH
					Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	0	33		67		100		100	BADAN PERBATASAN DAERAH



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	07			Pengelolaan Penghubung											
5	07	02		Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	%	100	50	5.095.979.072	75	5.310.010.193	100	5.533.030.621	100	Badan Penghubung
					Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	%	100	100		100		100		100	
					Meningkatnya cakupan promosi daerah	%	20	100		100		100		100	Badan Penghubung
6	01			Inspektorat Daerah											
6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	33,3	100,0	13.163.105.065	100,0	13.715.955.478	100	14.292.025.608	100	INSPEKTORAT DAERAH
					OPINI BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	
6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	%	100	100	3.736.737.240	100	3.893.680.204	100	4.057.214.773	100	INSPEKTORAT DAERAH



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik											
8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	%	60.3	70.2	274,028,630	85.1	285,537,832	100	297,530,421	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	%	75.1	80.3	3,310,281,980	90.6	3,449,313,823	100	3,594,185,004	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	%	20,4	34.7	174,889,840	65.3	182,235,213	100	189,889,092	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100.0	100.0	137,208,240	100.0	142,970,986	100	148,975,767	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	%	100	100.0	544,701,300	100.0	567,578,755	100	591,417,062	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
2	16			Komunikasi dan Informatika											
2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	Skor	45 (Kurang Informatif)	80 (Menuju Informatif)	1.084.623.672	85 (Menuju Informatif)	1.130.177.866	95 (Informatif)	1.177.645.337	95 (Informatif)	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
					Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	%	0	31,8		68,2		100		100	
2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor	1,26	2,3	3.124.002.366	2,5	3.255.210.465	2,7	3.391.929.305	2,7	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA



6.4 Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran terdapat elemen- elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan elemen tersebut harus dilaksanakan dengan tepat. Elemen- elemen tersebut antara lain adalah:

a. Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah/organisasi dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai. Pada hakekatnya visi dan misi mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut;

b. Tujuan, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realistis. Ciri-ciri tujuan yang baik, antara lain memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, menggambarkan secara jelas arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis, dan mampu mengidentifikasi obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai;

c. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (*specific, measurable, achievable, relevant, timely*/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan - tujuan (*supporting the goals*);

d. Program merupakan penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD;

e. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan luaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.



6.5 Pendekatan Struktur Organisasi

Setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri. Karena itu, masing-masing daerah mempunyai prioritas yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ini, pembentukan organisasi perangkat daerah bersifat asimetris, dimana besaran urusan pemerintah dan kelembagaan berbeda. Artinya, tipe ideal perangkat daerah mengalami tuntutan normatif pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib non-pelayanan dasar, penunjang urusan dan pendukung urusan, yang kemudian dikombinasikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja dan kewenangan daerah. Untuk itu rancangan struktur organisasi yang dibentuk harus sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian target tahunan maupun 5 tahunan yang berbasis kinerja.

Dalam pembentukan perangkat daerah dan RPJMD didasarkan pada konsep organisasi sektor publik yang berbasis kinerja berjangka menengah dan penganggaran terpadu. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu, **pertama**, penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) (*Medium Term Expenditure Framework*) yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju (*Forward Estimates*); **Kedua**, Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) (*Performance Based Budgeting* dan *Value follows money*); **Ketiga**, Anggaran Terpadu (AT) (*Unified Budget*) dan efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

Dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah (KPJMD), Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan AT agar dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur PD dan struktur program (restrukturisasi PD dan Program). Restrukturisasi PD dan program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaan yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas kinerja PD, dan (ii) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), dalam mengimplementasikan pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD 2018-2023. Pertimbangan restrukturisasi organisasi untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan aturan sebagai petunjuk pelaksanaannya yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah tersebut, dilakukan berdasarkan pada asas: a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. Efisiensi; d. Efektivitas; e. Pembagian habis tugas; f. Rentang kendali; g. Tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

Bersamaan dengan itu, restrukturisasi program dan kegiatan ditujukan untuk menyusun program dan kegiatan yang dapat menjawab kebutuhan dan kepuasan. Hal ini dengan sendirinya mempermudah pemimpin daerah dalam menilai akuntabilitas kinerja PD. Namun, perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan merupakan bagian dari pencapaian tujuan perencanaan kebijakan (*policy planning*) pada tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan pada pencapaian dampak (*impact*) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas pada



tingkat pemerintah daerah dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis pemerintah daerah pada tingkat PD.

Dalam melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, ada indikator-indikator yang menjadi alasan restrukturisasi, meliputi *Downsizing* adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu; *Rightsizing* adalah pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada sesuai dengan *core business* pemerintahan. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara serius memperhatikan elemen-elemen yang terkena akibat atau dampak dari restrukturisasi itu, yaitu jumlah yang menduduki jabatan-jabatan struktural di organisasi perangkat daerah tersebut. Langkah ini ditempuh untuk mengurangi jabatan-jabatan yang dianggap tidak strategis atau kedudukannya di struktur organisasi perangkat daerah tersebut dianggap tidak efektif dan efisien yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja organisasi. Prinsip dasar dari restrukturisasi PD pada lingkup pemerintah provinsi NTT adalah, PD hadir bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan individu dan masyarakat NTT.

Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan *Logic Model Theory*. Pengembangan kerangka pikir akan menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing PD.



Gambar 6. 2
Bagan Informasi Kinerja
Organisasi

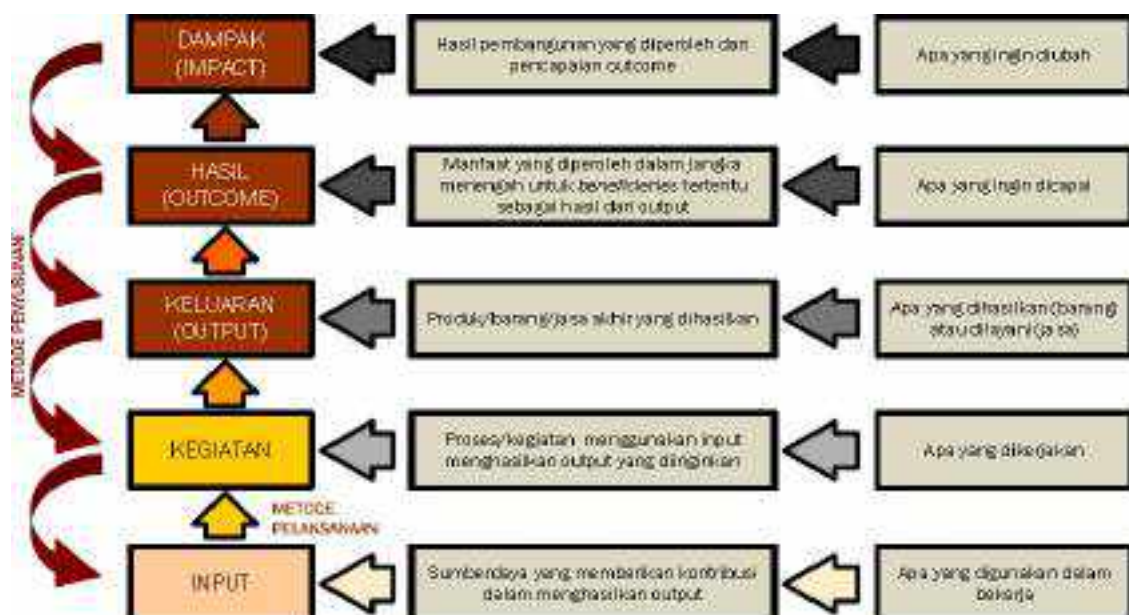
PD pada lingkup pemerintah provinsi NTT memiliki 3 (tiga) karakteristik. Karakteristik dimaksud adalah: (i) Biro (*Middle Line*); (ii) Badan (*Techno Structure*); dan (iii) Dinas (*Operation Core*).

Tiga karakteristik ini pada hakekatnya juga menunjukkan posisi PD sebagai unsur staf dan unsur lini. Unsur staf dalam menjalankan *core businessnya* tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, sebaliknya unsur lini langsung bersentuhan dengan masyarakat; Biro dan Badan adalah unsur staf, dinas adalah unsur lini. Secara struktural masing-masing organisasi tersebut terdiri dari pejabat Eselon II, III, dan IV. Sejalan dengan restrukturisasi PD, restrukturisasi program, secara umum tingkat Eselon II akan bertanggung jawab pada pelaksanaan strategi dan tingkat Eselon III akan bertanggung jawab pada pelaksanaan program, dan eselon IV bertanggung jawab pada implementasi kegiatan.

Sebagai konsekuensi dari keberadaan PD yang berorientasi pada *outcome*, maka PD menyelenggarakan seluruh program dan kegiatannya sesuai dengan prinsip *Money follows function*. Prinsip dimaksud sejatinya menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing unit dalam melayani kebutuhan warga pengguna. Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip struktur mengikuti fungsi (*structure follows function*), yaitu suatu prinsip yang melekatkan tugas dan fungsi unit kerja pada struktur organisasi yang ada. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas pokok dan fungsi PD.

6.6 Pendekatan Restrukturisasi Program

Kinerja dalam arsitektur program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian kinerja. Kerangka penyusunannya dimulai dari “apa yang ingin diubah”(impact) yang memerlukan indikator “apa yang akan dicapai” (*outcome*) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mencapai *outcome* diperlukan informasi tentang “apa yang dihasilkan”(output). Untuk menghasilkan *output* tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan” (*input*).



Gambar 6. 3
Bagan Informasi Kinerja Program



Penyusunan program adalah untuk mencapai kinerja PD sampai pada level *impact* atau *intermediate outcome*. Pencapaian *impact* itu sendiri baru dapat terwujud melalui kontribusi dari berbagai *stakeholder* dan dalam ikatan waktu 3 tahun ke atas. Untuk itu, perlu ditetapkan program prioritas yang pencapaiannya akan berkontribusi secara signifikan bagi pencapaian *impact*. Pencapaian Program prioritas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan prioritas, dengan masing-masing kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian fokus prioritas dalam RPJMD 2018-2023. Program prioritas dimaksud dapat berada dalam beberapa program yang berbeda di tingkat PD. Dengan demikian, keberadaan fokus prioritas sekaligus berperan sebagai instrumen koordinasi dan kolaborasi antara PD dan para pemangku kepentingan. Struktur manajemen kinerja daerah dalam restrukturisasi program dan kegiatan, beroperasi dengan pendekatan manajemen kinerja yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (i) Kinerja pada tingkat PD dan (ii) Kinerja pada tingkat bidang/bagian pada PD. Terkait dengan struktur informasi kinerja, tingkat kinerja yang akan disusun terdiri dari capaian pada indikator kinerja *impact*, *outcome*, *output* dan *input*. Dengan demikian akan terlihat jelas kegagalan dan keberhasilan yang dicapai serta penjelasannya.



Gambar 6.4
Bagan Struktur Program

Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Pemerintahan), memuat informasi kinerja yaitu: (i) *Immediate outcome* (sasaran pokok tahunan); (ii) *Intermediate outcome* (sasaran pokok diatas 3 tahunan); (iii) *Outcome* (kinerja program prioritas), dan (iv) *Output* (kinerja kegiatan prioritas). Misi/sasaran pokok (*impact*) merupakan kinerja dari prioritas, *outcome* fokus prioritas merupakan kinerja dari fokus prioritas dan *output* kegiatan prioritas merupakan kinerja dari kegiatan prioritas. *Outcome* fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah yang terkait

melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja prioritas daerah.

Akuntabilitas pada tingkat PD, memuat informasi kinerja yaitu: (i) *Immediate outcome* (misi/sasaran PD); (ii) *Outcome* (kinerja program); dan (iii) *Output* (kinerja kegiatan yang berkontribusi bagi pencapaian *outcome*). (iv) Proses pengelolaan *input* untuk mencapai indikator *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan. Keseluruhan informasi kinerja di atas, merupakan gambaran nyata tentang kegagalan dan keberhasilan dari masing-masing pimpinan PD dalam melaksanakan Perjanjian Kinerjanya (PK). PK adalah kontrak kinerja antara gubernur dan pimpinan PD dalam lingkup pemerintah provinsi NTT, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

6.4 Pendekatan Penyusunan Indikator Kinerja Program

Tercapainya suatu program sejatinya merupakan upaya riil membumikan visi dan misi pemerintah provinsi NTT. Dengan kata lain bila sebagian besar atau seluruh program pemerintah provinsi NTT dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka individu dan masyarakat NTT telah bangkit dan menjadi sejahtera. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan di daerah ini harus mendukung pencapaian setiap program. Untuk maksud ini, maka perlu ada petunjuk atau indikasi yang terukur, spesifik, dan realistis yang secara nyata dan logis dapat menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mengimplementasikan suatu program.

Outcome oriented government atau pemerintah yang berorientasi pada hasil adalah paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kementerian dan pemerintah daerah dalam menetapkan indikator kinerja program harus sampai pada level indikator kinerja *outcome*, baik *immediate outcome* maupun *intermediate outcome* dan atau *impact*. Indikator kinerja program *immediate outcome* bila tercapai maka PD telah berhasil meraih *output* yang berkualitas sambil berkollaborasi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, *outcome* ini akan berkontribusi pula bagi pencapaian *intermediate* dan *final outcome*.

Outcome sendiri entah pada level apa saja adalah *uncontrollable*, (tak terkendalkan) ; sangat sulit dikendalikan. Artinya, pemerintah daerah atau PD sendiri saja tidak akan dapat meraihnya bila tidak melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan indikator kinerja *output*, yang dapat dicapai oleh PD tanpa bekerja sama dengan *stakeholder*. Oleh karena itu, kolaborasi adalah kata kunci yang



harus diwujudkannyatakan oleh setiap PD dalam menetapkan indikator kinerja *outcome*, maupun pada saat implementasinya. Indikator kinerja program pemerintah provinsi NTT pada RPJMD 2018-2023, merupakan salah satu sumber utama bagi setiap PD dalam menyusun program-program dan indikator kinerjanya plus core business dari masing-masing PD. Sebab dalam konsep *logic model*, Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan penjabaran dari RPMJD dalam revisi dari kepala daerah.



BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT
Tahun 2021-2023

URAIAN		ANGGARAN INDIKATIF TAHUN		
		2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH		6.283.641.817.542	6.715.590.100.741	7.901.387.827.832
PENDAPATAN ASLI DAERAH		2.033.518.433.142	2.212.635.953.007	3.229.352.276.426
1	Pajak Daerah	1.533.311.726.456	1.375.708.488.765	1.870.374.846.155
2	Retribusi daerah	205.905.117.783	204.130.055.760	224.543.061.336
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan	94.348.316.130	162.072.349.391	259.315.759.025
4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	199.953.272.773	470.225.059.091	874.618.609.910
PENDAPATAN TRANSFER		4.182.128.447.000	4.433.599.311.586	4.601.293.618.535
	Transfer Pemerintah pusat	4.182.128.447.000	4.341.885.753.675,40	4.507.745.789.466
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		67.994.937.400	69.354.836.148	70.741.932.871
1	Hibah	67.994.937.400	69.354.836.148	70.741.932.870,96
2	Dana Darurat			
3	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU			
BELANJA DAERAH		7.476.335.787.792	6.313.395.950.992	7.499.193.678.082
1	BELANJA OPERASI	4.662.019.956.640	4.423.599.000.774	5.385.261.156.059
a.	Belanja Pegawai	1.506.964.157.609	1.566.549.856.522	1.720.171.690.553,29
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.539.560.263.063	1.513.113.741.225	1.770.343.077.233,78
c.	Belanja Bunga	39.307.557.170	39.307.557.170	39.307.557.170
d.	Belanja Subsidi	-		
e.	Belanja Hibah	1.545.265.975.472	1.274.129.756.870,35	1.823.879.408.619,64
f.	Belanja Bantuan Sosial	30.922.003.326	30.498.088.985,74	31.559.422.482
2	BELANJA MODAL	2.150.718.266.207	1.230.718.265.974	1.440.859.268.999
a.	Belanja Tanah	25.000.000.000		
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	289.307.735.826		
c.	Belanja Bangunan dan Gedung	404.065.029.715		
d.	Belanja Jalan			
e.	Belanja Irigasi dan Jaringannya	1.429.998.402.258		
f.	Belanja Aset tetap lainnya	2.347.098.408		
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.541.384.000	5.000.000.000	5.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	643.056.180.945	654.078.684.244	668.073.253.023
a.	Belanja Bagi Hasil	610.056.180.945	611.178.684.244	612.303.253.023
b.	Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000	42.900.000.000	55.770.000.000
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.192.693.970.250)	402.194.149.750	402.194.149.750
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.602.470.210.250	7.582.090.250	7.582.090.250
1	SILPA	-	-	-
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	7.582.090.250	7.582.090.250
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		409.776.240.000	409.776.240.000	409.776.240.000
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	264.776.240.000	264.776.240.000
2	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000
3	Pembentukan Dana Cadangan			
4	Pemberian Pinjaman Daerah			
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya yang sesuai PUU			
PEMBIAYAAN NETTO		1.192.693.970.250	(402.194.149.750)	(402.194.149.750)
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (SILPA)		-	-	-

Sumber: Bappelitbangda dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah, 2020, diolah



Pencapaian indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan dengan input berupa anggaran sesuai pagu indikator dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 90 Tahun 2019, highlight kegiatan prioritas yang akan tetap dilaksanakan sampai dengan Tahun 2023 adalah:

A. Terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Bergerak.
3. Fasilitasi Pelayanan Laboratorium Biomolecular, Pengobatan Herbal dan Pembangunan *Regional Maintenance Center* (RMC).
4. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Tenaga Pendidik untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB.
5. Kerjasama Pendidikan Menengah dan BLK untuk Peningkatan Keterampilan dan Sertifikasi Keahlian.
6. Pengembangan dan Pelaksanaan Modul Ajar Wawasan Kebangsaan bagi Siswa Menengah dan Perguruan Tinggi.

B. Terkait Pembangunan Sektor Produktif dan Lingkungan

1. Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).
2. Pengembangan 26 Juta Pohon Kelor.
3. Pengembangan Hortikultura.
4. Pengembangan Perikanan Budidaya Kerapu dan Kakap Putih (Mulut Seribu, Wae Kelambu, Hasan Maubesi, Hada Kewa).
5. Pembangunan Pabrik Pakan Ternak di 3 (tiga) lokasi antara lain: Daratan Timor, Daratan Sumba dan Daratan Flores.
6. Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat (Pengembangan Porang, Jahe Merah, Minyak Kayu Putih, dll).
7. Pengembangan Peternakan: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (Ayam KUB).
8. Pengembangan dan Penyertaan Modal BumDes.
9. Pengembangan UMKM dan IKRT.
10. Pengembangan Masyarakat Ekonomi (ME) NTT.
11. Mendorong Pemanfaatan EBT sebagai pengganti Energi Fosil melalui Investasi.



C. Terkait Pembangunan Pariwisata

1. Pengembangan dan Pemasaran Destinasi Wisata.
2. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM.
3. Pengembangan Kapasitas Pelaku Pariwisata.
4. Pengembangan POKDARWIS dan Sanggar-Sanggar Seni.

D. Terkait Pembangunan Infrastruktur

1. Penyelesaian Jalan Provinsi menjadi Kondisi Mantap sepanjang 2.650 Km di Tahun 2021.
2. Optimalisasi Ketersediaan Air Bersih bagi Masyarakat NTT Tahun 2022.
3. Penyediaan Listrik untuk mendukung Pembangunan dengan Rasio Elektrifikasi mencapai 100%.
4. Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang diharapkan dapat menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang dapat menjangkau semua sektor.
5. Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang bersanitasi, dan memiliki Air Bersih.

E. Terkait Pemerintahan

1. Pengembangan E-Government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .
2. Penerapan Penilaian Kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment* bagi ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas.



Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021-2023

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	XX	01		Non Urusan											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	100	1.849.747.114.251	100	1.575.603.684.445	100	2.573.424.163.776	100	39 PD
					Meningkatnya sarana dan prasarana	%	100	100		100		100		100	39 PD
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%	100	100		100		100		100	39 PD
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	01			1. Pendidikan											
1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah				1.864.382.228.124		1.942.686.281.705		2.024.279.105.537		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	74,83	100		100		100		100	
					- APS SLB	%	74,65	100		100		100		100	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	%	0	50		75		100		100 (8 Unit)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03		Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B				-		980.000.000		1.021.160.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	0	6%		13%		19%		19%	
					2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	22,0	30,0		35,0		45,1		45,1	
					3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	9,2	14,9		19,0		25,1		25,1	
					Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	%	100	100		100		100		100	
1	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun				-		700.590.700		850.515.500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	11,81	49,94		74,97		100		100	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	11,14	49,49		74,86		100		100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	14,96	49,85		74,78		100		100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	0	33,33	748.371.000	66,67	779.802.582	100,00	812.554.290	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02			2. Kesehatan											
1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					221.432.927.084		230.733.110.022		240.423.900.642,43		DINAS KESEHATAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100	100		100		100		100	DINAS KESEHATAN
					Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100	100		100		100		100	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	%	74,9	75,6		84,9		100,0		100,0	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%	0	28,6		71,4		100		100	DINAS KESEHATAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kasus Kematian Ibu	Kasus	1,81	0		0		0		0	DINAS KESEHATAN
					Kasus Kematian Bayi	Kasus	14,51	0		0		0		0	DINAS KESEHATAN
					Kasus Kematian Balita	Kasus	1.091	0		0		0		0	DINAS KESEHATAN
					Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	%	9,4	8,3		7,5		6		6	DINAS KESEHATAN
					Underweight	%	19,3	16,6		15,4		14,2		14,2	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi Stunting	%	38	20,0		16,0		12,0		12	DINAS KESEHATAN
					Angka Kelahiran Total (TFR)	Poin	3,4	3		2,8		2,6		2,6	DINAS KESEHATAN
					Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	41,2	51		53		55		55	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	%	16,7	50,0		66,7		100,0			DINAS KESEHATAN
					Persentase Kasus HIV yang diobati	%	48	52		54		56		56	DINAS KESEHATAN
					Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	%	0	50		77.3		100		100	DINAS KESEHATAN
					Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	%	22,7	50		77,3		100		100	DINAS KESEHATAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	%	63,6	91		95,5		100		100	DINAS KESEHATAN
					Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100	100		100		100		100	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
					Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	%	42,7	48		50		52		52	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
1	02	03		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	%	22,01	47,85	24.634.747.480	74,16	25.669.406.874	100,00	26.747.521.963	100	DINAS KESEHATAN
					Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)	%	20,75	47,17		73,58		100,00		100,00	DINAS KESEHATAN
					Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	20,00	62,00		81,00		100,00		100,00	DINAS KESEHATAN
					Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	100	100		100		100		100	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	04		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100	100,0	-	100,0	750.581.000	100,0	950.853.500	100,0	DINAS KESEHATAN
1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	%	45,5	72,7	-	86,4	435.560.000	100,0	275.675.000	100,0	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	%	9,1	45,5		72,7		100,0		100,0	DINAS KESEHATAN
1	03			3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	%	31,39	10,56	105.361.673.330	33,10	219.573.727.220	33,10	230.552.413.581	100	Dinas PUPR
					Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	%	4,23	33,80		66,90		100,00		100	Dinas PUPR
					Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	%	70	75.02		76.74		78.46		100	Dinas PUPR



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	%	7,46	28,84		64,42		100		100	Dinas PUPR
					Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	%	60	70		80		85		100	Dinas PUPR
					Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	%	13,64	86.36		95.45		100		100	Dinas PUPR
1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	%	73	83	6.550.676.040	85	6.825.804.434	100	7.112.488.220	100	Dinas PUPR
					Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	70	77		80		90		90	Dinas PUPR
1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%	0	32	-	64	415.275.000	100	747.495.000	100	Dinas PUPR
1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	44	66	0	72		80		80	Dinas PUPR



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	%	0	0	-	0	-	100	3.000.000.000	100	Dinas PUPR
1	03	07		Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	%	50	70	109.864.252.409	90	114.478.551.010	100	119.286.650.153	100	Dinas PUPR
					Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	%	0	41		70		100		100	Dinas PUPR
					Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	%	0	31,82		63,64		100		100	Dinas PUPR
1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	%	0	2	887.916.200	3	925.208.680	4	964.067.445	4	Dinas PUPR
					Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	%	0	20		60	-	80	-	100	Dinas PUPR



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%	0	0		66		100		100	Dinas PUPR
1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	%	85	100	1.218.444.330.758	100	488.063.323.408	100	508.561.982.990,97	100	Dinas PUPR
					Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	54,95	100		100		100		100	Dinas PUPR
1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%	0	68	3.124.609.758	84	3.255.843.368	100	3.392.588.789	100	Dinas PUPR
1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0	25,32	6.676.888.198	42,2	6.957.317.502	100	7.249.524.837	100	Dinas PUPR
					Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	58,3	27,27		14,3		0		0	Dinas PUPR



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04			4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	04	02		Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	0	0	2.246.860.610	67	4.400.000.000	100	2.250.000.000	100	Dinas PUPR
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	%	18	45	41.201.653.312	72	42.932.122.751	100	44.735.271.907	100	Dinas PUPR
					Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	60	77	0	80		100		100	Dinas PUPR
1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	11	33	13.123.074.352	78	13.674.243.475	100	14.248.561.701	100	Dinas PUPR
1	05			5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
1	05	02		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	3.302.512.660	100	3.441.218.192	100	3.585.749.356	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100	100		100		100		100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	%	40	60	1.580.274.720	80	1.646.646.258	100	1.715.805.401	100	BPBD
					Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	20	0		80		100		100	BPBD
					Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	%	0	33,3		66,6		100		100	BPBD
					Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	%	62,5	75		87,5		100		100	BPBD
1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100	100	179.998.830	100	187.558.781	100	195.436.250	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	0	25		85		100		100	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:										
					a. Kebakaran	%	0	25		85		100		100	
					b. Non Kebakaran	%	0	25		85		100		100	
1	06			6. Sosial											
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	%	50	80	4.037.573.046	90	4.207.151.114	100	4.383.851.461	100	DINAS SOSIAL
1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	%	70	80	245.227.300	90	255.526.847	100	266.258.974	100	DINAS SOSIAL
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%	70	80	10.697.830.717	90	11.147.139.607	100	11.615.319.471	100	DINAS SOSIAL
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	70	80	3.277.069.490	90	3.414.706.409	100	3.558.124.078	100	DINAS SOSIAL
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	%	70	80	578.293.920	90	602.582.265	100	627.890.720	100	DINAS SOSIAL
1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	%	0	100	72.912.100	100	75.974.408	100	79.165.333	100	DINAS SOSIAL



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2				Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2	07			1. Tenaga Kerja											
2	07	03		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	50	70	314,738,430	80	327,957,444	90	341,731,657	90	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	51.87	50		55		60		60	
2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35	45	193,237,230	50	201,353,194	55	209,810,028	55	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentasi meningkatnya PMI prosedural	%	55	70		75		85		85	
2	07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	%	35	45	102,191,520	70	106,483,564	90	110,955,874	90	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	65	75		80		85		85	
2	07	06		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	%	30	40	-	55	120,348,400	70	125,403,033	70	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08			2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2	08	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	%	8	32.0	1,769,437,330	50.7	1,843,753,698	100.0	1,921,191,353	100.0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	%	64	72		90		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03		Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	%	60	75	987,740,150	80	1,029,225,236	100	1,072,452,696	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	%	60	75		80		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	%	0	25	466,040,637	50	485,614,344	75	506,010,146	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	%	0	60		80		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	%	0	25.00		62.5		100.0		100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	10	20	180,308,680	40	187,881,645	50	195,772,674	50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	%	10	32,2	802,220,880	75.6	835,914,157	100	871,022,552	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	%	0	5.6	90,311,960	55.2	94,105,062	60	98,057,475	60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09			3. Pangan											
2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	%	2,2	2,87	3.147.148.520	2,79	3.279.328.758	2,72	3.417.060.566	2,72	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	%	9,59	10,20		9,30		8,50		8,50	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04		Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	%	0	50	124.957.710	25,07	130.205.934	0	135.674.583,04	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05		Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	%	37,21	48,84	318.999.020	74,42	332.396.979	100,00	346.357.651,95	100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10			4. Pertanian											
2	10	02		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	06		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	-	54,55	-	81,82	-	100,00	Dinas PUPR
2	10	10		Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	0	27,27	339.727.055	54,55	353.995.591	81,82	368.863.406	100,00	Dinas PUPR
2	11			5. Lingkungan Hidup											
2	11	02		Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%	4,34	56,52	997.573.600	78,26	1.039.471.691	100	1.083.129.502	100	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03		Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,01	75,13	1.972.677.610	75,42	2.055.530.070	75,66	2.141.862.333	75,66	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05		Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	%	0	10,00	7.334.457.789	27,33	7.642.505.016	51,33	7.963.490.227	51,33	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	06		Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	%	59	58,26	296.249.630	79,09	308.692.114	100	321.657.183	100	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09		Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	0	8,33	520.088.630	16,67	541.932.352	25,00	564.693.511	25,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	0	33,33	266.267.850	41,67	277.451.100	50,00	289.104.046	50,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11		Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	0	24	532.901.560	26	555.283.426	27	578.605.329	27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	12			6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	20	95	612.372.468	97	638.092.112	100	664.891.980	100	DINAS KESEHATAN
					Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	0	60		80		100		100	DINAS KESEHATAN
					Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	70	85		90		100		100	DINAS KESEHATAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD)	%	0	51,3		76,9		100,0		100	DINAS KESEHATAN
2	13			7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	13	02		Program Penataan Desa	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	%	80	90	-	100	-	100	-	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03		Program Peningkatanan Kerjasama Desa	Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)	%	31,8	31,8	-	68,2	-	100,0	-	100,0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	0	33,3	1.960.856.171	66,7	2.043.212.130	100,0	2.129.027.040	100,0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat				35.571.107.570		37.065.094.088		38.621.828.040		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit)	%	52,00	76,00		88,00		100,00		100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif)	%	83,16	87,09		91,73		100,00		100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Adat (Target 2023= 132 Unit)	%	0,00	33,33		66,67		100,00		100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Peningkatan Cakupan Pemberdayaan										
					PKK Aktif	%	20	60		80		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
					Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes)	%	52	76		88		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15			8. Perhubungan											
2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	15	20	3.378.101.002	30	3.519.981.244	45	3.667.820.456	100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	25	25	22,753,552,492	30	23,709,201,697	30	24,704,988,168	30	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	40	50		60		75		75	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	0	0	1.299.968.400	100	1.354.567.073	100	1.411.458.890	100	DINAS PERHUBUNGAN
2	16			9. Komunikasi dan Informatika											
2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	Skor	45 (Kurang Informatif)	80 (Menuju Informatif)	1.084.623.672	85 (Menuju Informatif)	1.130.177.866	95 (Informatif)	1.177.645.337	95 (Informatif)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	%	0	31,8		68,2		100		100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor	1,26	2,3	3.124.002.366	2,5	3.255.210.465	2,7	3.391.929.305	2,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17			10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
2	17	02		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	%	92	93	-	96		100		100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	2	3		5		7		7	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	%	0,2	10		15		20		20	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	%	52	66	496,276,800	83	517,120,426	100	538,839,483	100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	47	54	965,290,990	68	1,110,084,639	100	1,443,110,030	100	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	%	62	70	1,800,000,000	74	1,350,000,000	78	1,147,500,000	78	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	68	76	965,290,990	82	1,110,084,639	85	1,443,110,030	85	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18			11. Penanaman Modal											
2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	26,67	25	439.993.770	25	458.473.508	25	477.729.396	75	DPMPTSP
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	0	33.33	574.905.380	66.66	599.051.406	100	624.211.565	100	DPMPTSP
2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	114	100	764.998.210	100	797.128.135	100	830.607.516	100	DPMPTSP
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	100	329.996.860	100	343.856.728	100	358.298.711	100	DPMPTSP
2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	100	147.999.320	100	154.215.291	100	160.692.334	100	DPMPTSP
					Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	100	100		100		100		100	DPMPTSP



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19			12. Kepemudaan dan Olahraga											
2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%	44,0	75,0	2.922.693.966	90,0	3.045.447.113	100	3.173.355.891	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik				45.517.121.364		47.428.840.461		49.420.851.761		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Medali (200 buah)	%	25,0	50,0		75,0		100		100	
					Cabor (13 cabor)	%	38,5	76,9		92,3		100		100	
					Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi										
					Cabor tradisional	%	57,1	85,7		100,0		100,0			
					Cabor rekreasi	%	16,7	66,7		100,0		100,0			



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	Medali/ %	(Atletik 8 medali emas, 3 perunggu; Catur; 1 madali perak; Renang; 0	(Atletik 8 medali emas, 1 perak, 4 perunggu ; Catur; 1 madali perak; Renang; 1 perunggu		0		(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak		(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	%	30,4	31,8	1.000.000.000	65,2	1.042.000.000	100	1.085.764.000	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20			13. Statistik											
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	%	80	100	99.913.400	100	104.109.763	100	108.482.373	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	%	75	100		100		100		100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21			14. Persandian											
2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	0	3-3,9 (Cukup)	278.662.620	4-4,9 (Baik)	290.366.450	5 (Sangat Baik)	302.561.841	5 (Sangat Baik)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22			15. Kebudayaan											
2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	5,38	21,51	7.512.671.600	49.46	7.828.203.807	100	8.156.988.367	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	4	6	2.556.872.500	8	2.664.261.145	10	2.776.160.113	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	4	6		8		10		10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	04		Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	%	20	36	250.000.000	38	260.500.000	40	271.441.000	40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	11,11	24	2.281.884.550	26	2.377.723.701	28	2.477.588.097	28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	25	65	1.106.504.000	80	1.152.977.168	100	1.201.402.209	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23			16. Perpustakaan											
2	23	02		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan <i>e-library</i>	%	70	100	5.139.107.352	100	5.354.949.861	100	5.579.857.755	100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	25,0	50,0		75,0		100,0		100,0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	%	9,1	22,7	-	45,5		100		100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	9,1	22,7		45,5		100		100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	24			17. Kearsipan											
2	24	02		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	60	100,0	1.360.313.150	100,0	1.417.446.302	100,0	1.476.979.047	100,0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	60	100,0	299.999.830	100,0	312.599.823	100,0	325.729.015	100,0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3				Urusan Pemerintahan Pilihan											
3	25			1. Kelautan dan Perikanan											
3	25	02		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	%	40,93	72	2.326.779.322	94	2.648.457.130	100	2.913.302.843	100	DKP
3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	13,80	4	52.290.163.014	6	22.997.500.000	7	29.859.875.000	23,7	DKP
					Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	%	13,80	4		6		7		23,7	DKP
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,86	5	167.006.833.430	10	15.474.512.250	20	18.372.652.563	42,8	DKP
					Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	%	1,86	5		10		20		43	DKP



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	85,00	30	3.830.741.856	20	4.189.275.862	0	4.608.203.448	0	DKP
3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	5.40	9.52	932,439,644	8.70	935,000,000	8.00	1,028,500,000	38.46	DKP
3	26			2. Pariwisata											
3	26	02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	112,08	32.38	10.812.254.863	42,27	20.000.000.000	56,67	9.500.000.000	56,67	DISPAREKRAF
					Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	DISPAREKRAF
3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	112.08	32.38	5,247,798,920	42.27	8,996,918,074	56.67	2,998,972,691	56.67	DISPAREKRAF
3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	-	1,50	3.100.976.940	5,00	7.289.546.133	10,00	6.248.182.400	10,00	DISPAREKRAF



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	-	93,75		93,75		100,00		100,00	DISPAREKRAF
3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:				4.294.951.540		5.835.420.194		2.917.710.097		DISPAREKRAF
					a. Tour operator	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					b. Guide/Pemandu Wisata	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					c. Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					d. Restaurant	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					e. Perhotelan	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					f. Pramuwisata	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					g. Transportasi	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					h. Informasi	%	-	29,17		79,17		100,00		100,00	
					Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	0	29,17		79,17		100		100	DISPAREKRAF
3	27			3. Pertanian											
3	27	02		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak:				43.566.415.276		45.396.204.718		47.302.845.316		DINAS PETERNAKAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0		7,0	DINAS PETERNAKAN
					- Sapi	Ekor	1.027.256	1.223.483		1.305.137		1.398.972		1.398.972	DINAS PETERNAKAN
					- Kerbau	Ekor	165.551	193.583		206.782		221.682		221.682	DINAS PETERNAKAN
					- Kuda	Ekor	114.514	129.196		135.129		141.672		141.672	DINAS PETERNAKAN
					b. Ternak Kecil	%	2,9	11		11,02		11,06		11,06	DINAS PETERNAKAN
					- Kambing	Ekor	693.577	991.505		1.083.865		1.184.829		1.184.829	DINAS PETERNAKAN
					- Domba	Ekor	68.388	83.563		89.336		95.507		95.507	DINAS PETERNAKAN
					- Babi	Ekor	2.141.246	2.899.766		3.246.707		3.650.524		3.650.524	DINAS PETERNAKAN
					c. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6		6	DINAS PETERNAKAN
					- Unggas	Ekor	17.248.318	20.318.557		21.306.593		22.584.988		22.584.988	DINAS PETERNAKAN
					Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting										
					a. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6		6	DINAS PETERNAKAN
					Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	Ekor	17.248.318	20.318.557		21.306.593		22.584.988		22.584.988	DINAS PETERNAKAN
					Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate										DINAS PETERNAKAN
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0			
					- Sapi	Ekor	1.027.256	1.223.483		1.305.137		1.398.972		1.398.972	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Kerbau	Ekor	165.551	193.583		206.782		221.682		221.682	DINAS PETERNAKAN
					- Kuda	Ekor	114.514	129.196		135.129		141.672		141.672	
					b. Ternak Kecil	%	2,9	11		11,02		11,06		11,06	
					- Kambing	Ekor	693.577	991.505		1.083.865		1.184.829		1.184.829	
					- Domba	Ekor	68.388	83.563		89.336		95.507		95.507	
					- Babi	Ekor	2.141.246	2.899.766		3.246.707		3.650.524		3.650.524	DINAS PETERNAKAN
					c. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6			
					- Unggas	Ekor	17.248.318	20.318.557		21.306.593		22.584.988		22.584.988	
3	27	02		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan benih bersertifikat	%	100	100		100		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi				151.590.142.770		5.405.624.440		5.405.624.440		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	%	86,29	92,46		95,24		100,00		100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	%	45,80	71,15		76,09		100,00		100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	%	79,69	92,47		95,24		100,00		100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	%	82,94	92,47		95,24		100,00		100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	%	95,04	92,46		95,23		100,00		100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	%	86	92		95		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi										
					Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	%	0	100		100		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	%	0	100		100		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	%	0	100		100		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	%	79	90		95		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	%	77	87		93		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	%	71	84		90		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	%	63	83		90		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	%	68	78		87		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	%	71	85		91		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi										
					Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%	94,26	97,07		98,52		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	%	94	97		99		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	%	94	97		99		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	%	94	97		99		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	%	94	97		99		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi										
					Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	%	89	94		97		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	%	89	94		97		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	%	0	90		100		100		100	DINAS PETERNAKAN
					a. Ternak Besar	%	1.9	6,2		6,5		7,0		7,0	DINAS PETERNAKAN
					- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	%	73	87		93		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	%	75	87		93		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	%	81	91		95		100		100	DINAS PETERNAKAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					b. Ternak Kecil	%	2,9	11		11,02		11,06		11,06	DINAS PETERNAKAN
					- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	%	59	84		91		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	%	72	87		94		100		100	DINAS PETERNAKAN
					- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	%	59	79		89		100		100	DINAS PETERNAKAN
					c. Unggas	%	2.7	5,6		5,8		6		6	DINAS PETERNAKAN
					- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	%	76	90		94		100		100	DINAS PETERNAKAN
3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	%	0	80	4.487.082.183	80	4.675.539.635	80	4.871.912.299	80	DINAS PETERNAKAN
					Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	0	15		20		25		25	DINAS PETERNAKAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	05		Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	50	70	949.894.240	75	989.789.798	75	1.031.360.970	75	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07		Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas				3.171.600.970		3.304.808.211		3.443.610.156		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	%	0	30		60		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	%	0	25		50		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	%	0	25		50		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	%	0	33,33		66,67		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	%	47,12	61,54		80,77		100		100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	28			4. Kehutanan											
3	28	03		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,14	176.430.599.445	1,22	48.840.684.622	1,30	50.891.993.376	1,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	0	2,5	8.389.078.710	4,2	8.741.420.016	8,5	9.108.559.656	8,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	0	50		75		100		100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	05		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	%	29,27	31,59	1.270.478.830	32,75	1.323.838.941	33,91	1.379.440.176	33,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	8.29	9,38		10,32		11,25		11,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	06		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	%	0	0,13	116.361.450	0,25	121.248.631	0,30	126.341.073	0,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	29			5. Energi dan Sumber Daya Mineral											
3	29	02		Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	5,26	10,53	1,508,951,200	15,79	1,572,327,150	21,05	1,638,364,891	21,05	Dinas ESDM
					Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	69.49	84.75		91.53		100		100	Dinas ESDM
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	%	100	100	624,092,296	100	650,304,172	100	677,616,948	100	Dinas ESDM
3	29	05		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT <i>setiap</i> tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	%/ (kW)	10.89 / (11.25)	8.04 / (8.31)	1,413,359,460	17.28/ (17.85)	1,472,720,557	20.33 / (21)	1,534,574,821	100/ (103.32)	Dinas ESDM
					Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	11.9/ (5,625)	8.79/ (4,16)		18.88/ (8,93)		22.21/ (10,5)		100/ (47,28)	Dinas ESDM



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	%	57.22	58.42	1,179,370,240	59	1,228,903,790	59.58	1,280,517,749	59.58	Dinas ESDM
					Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	%	NA	0		33		33		100	Dinas ESDM
3	30			6. Perdagangan											
3	30	02		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	100	50	194.733.950	75	202.912.776	100	211.435.112	100	DISPERINDAG
3	30	03		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	%	0	25	264.406.000	50	275.511.052	25	287.082.516	100	DISPERINDAG
3	30	04		Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	10	10	1.188.398.320	10	1.238.311.049	10	1.290.320.114	10	DISPERINDAG
					a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10	10		10		10		10	DISPERINDAG
					b. Barang Penting	%	10	10		10		10		10	DISPERINDAG
3	30	05		Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	0	16,67	781.203.800	28,57	814.014.360	11,11	848.202.963	11,11	DISPERINDAG



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	06		Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	0	54,7	2.965.525.640	55,7	3.090.077.717	56,7	3.219.860.981	56,7	DISPERINDAG
					Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023= 34 PelakuUsaha)	%	0	NA		44,12		100		100	DISPERINDAG
3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	0	40	3.646.271.312	70	3.799.414.707	90	3.958.990.125	90	DISPERINDAG
					Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	0	40		70		90		90	DISPERINDAG
3	31			7. Perindustrian											
3	31	02		Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	1,12	1,12	10.147.333.081	2,24	10.573.521.070	3,36	11.017.608.955	3,36	DISPERINDAG
3	31	03		Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	0	50	300.940.640	70	313.580.147	90	326.750.513	90	DISPERINDAG
3	31	04		Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	%	0	10	201.995.940	11,42	210.479.769	11,85	219.319.920	11,85	DISPERINDAG



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	32			8. Transmigrasi											
3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	65	75	57,287,710	85	59,693,794	100	62,200,933	100	Dinas Koperasi, Nakertrans
3	32	03		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	65	75	266,986,350	85	278,199,777	100	289,884,167	100	Dinas Koperasi, Nakertrans
3	32	04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%	65	75	175,724,928	85	183,105,375	100	190,795,801	100	Dinas Koperasi, Nakertrans
4				Pendukung Urusan Pemerintahan											
4	01			1. Sekretariat Daerah											
4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%	100	100	131.984.020.481	100	137.527.349.341	100	143.303.498.014	100	BIRO UMUM
				Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100	100		100		100		100	Biro Administrasi Pimpinan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	100	100		100		100		100	Biro Administrasi Pimpinan
					Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	100	100		100		100		100	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	02		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	72.37	84.78	4,054,946,330	92.98	4,225,254,076	100	4,402,714,747	100	BIRO ORGANISASI
4	01	03		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	100	2.126.240.072	100	2.215.542.155	100	2.308.594.926	100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
					Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	100		100		100		100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
					Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	100		100		100		100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
					Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	%	100	100		100		100		100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	04		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	%	96,15	100	5.991.729.035	100	6.243.381.654	100	6.505.603.684	100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
					Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	%	100	100		100		100		100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
4	01	05		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	100	100	3.263.323.400	100	3.400.382.983	100	3.543.199.068	100	BIRO HUKUM
					Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	%	100	100		100		100		100	BIRO HUKUM
4	01	06		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	0	33,33	1.708.587.610	66,67	1.780.348.290	100	1.855.122.918	100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
					Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	0	33,33		66,67		100		100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	%	0	40		66,67		100		100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
4	01	07		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	100	100	6.237.004.664	100	6.498.958.860	100	6.771.915.132	100	BIRO PBJ
4	01	08		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	100	33,33	29.999.600	100	31.259.583	100	32.572.486	100	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
4	02			2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat											
4	02	02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	76,33	100	72.293.931.275	100	75.330.276.389	100	78.494.147.997	100	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
5				Penunjang Urusan Pemerintahan											
5	01			1. Perencanaan											
5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPDP Provinsi	%	0	100	3.358.618.955	100	3.499.680.951	100	3.646.667.551	100	Bappelitbangda



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	%	0	100		100		100		100	Bappelitbangda
5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	0	100	6.996.004.470	100	7.289.836.658	100	7.596.009.797	100	Bappelitbangda
					Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	%	0	100		100		100		100	Bappelitbangda
					Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup	%	0	100		100		100		100	Bappelitbangda



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan										
5	02			2. Keuangan											
5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100	100	779.293.480.585	100	812.023.806.770	100	846.128.806.654	100	BADAN KEUDA
5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	100	5.718.774.180	100	5.958.962.696	100	6.209.239.129	100	BAPENDA
					Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100	100		100		100		100	BAPENDA
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	21,32	32,26	42.168.708.180	34,04	43.939.793.924	37,56	45.785.265.268	37,56	BAPENDA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03			3. Kepegawaian											
5	03	02		Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	30	100	9.745.785.103	100	10.155.108.077	100	10.581.622.617	100	BKD
					Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	%	50	100		100		100		100	BKD
5	04			4. Pendidikan dan Pelatihan											
5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	Akredita si	Latsar "B"	Latsar "B"	47.860.312.185	Kepemim pinan "A"	49.870.445.297	B dan A	51.965.003.999	B dan A	BPSDM
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	%	100	100		100		100		100	BPSDM
					Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	%	100	100		100		100		100	BPSDM



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	%	65	75		80		85		85	BPSDM
5	05			5. Penelitian dan Pengembangan											
5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbang dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	%	40	62,86	3.131.717.461	82,86	3.263.249.594	100	3.400.306.077	100	Bappelitbangda
					Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	%	0	93,10		96,55		100		100	Bappelitbangda
					Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan	%	0	30,00		60,00		100		100	Bappelitbangda



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)										
5	06			6. Pengelolaan Perbatasan											
5	06	02		Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	0	33	3,985,929,080	67	4,153,338,101	100	4,327,778,302	100	BADAN PERBATASAN DAERAH
					Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	0	33		67		100		100	BADAN PERBATASAN DAERAH
5	07			7. Pengelolaan Penghubung											
5	07	02		Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	%	100	50	5.095.979.072	75	5.310.010.193	100	5.533.030.621	100	BADAN PENGHUBUNG
					Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	%	100	100		100		100		100	BADAN PENGHUBUNG



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Meningkatnya cakupan promosi daerah	%	20	100		100		100		100	BADAN PENGHUBUNG
6				Pengawasan Urusan Pemerintahan											
6	01			1. Inspektorat Daerah											
6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	33.3	100.0	13,163,105,065	100.0	13,715,955,478	100	14,292,025,608	100	INSPEKTORAT DAERAH
					OPINI BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	%	100	100	3,736,737,240	100	3,893,680,204	100	4,057,214,773	100	INSPEKTORAT DAERAH
8				Pemerintahan Umum											
8	01			1. Kesatuan Bangsa dan Politik											
8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	%	60.3	70.2	274,028,630	85.1	285,537,832	100	297,530,421	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	%	75.1	80.3	3,310,281,980	90.6	3,449,313,823	100	3,594,185,004	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	%	20,4	34.7	174,889,840	65.3	182,235,213	100	189,889,092	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100.0	100.0	137,208,240	100.0	142,970,986	100	148,975,767	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	%	100	100.0	544,701,300	100.0	567,578,755	100	591,417,062	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
TOTAL NON URUSAN									1,849,747,114,251		1,575,603,684,445		2,573,424,163,776		
TOTAL URUSAN									5,626,588,673,541		4,737,792,266,547		4,925,769,514,306		
TOTAL NON URUSAN DAN URUSAN									7,476,335,787,792		6,313,395,950,992		7,499,193,678,082		



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Provinsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan.
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan.



4. Terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.1.dan 8.2.

8.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135



INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik					
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83



8.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	- Pertumbuhan PDRB	%	5,20	5,87	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
	- Inflasi	%	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
	- PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
	- Indeks Gini	Poin	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	1,12	1,05	0,98	0,85	0,85
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	4,13	4,02	3,91	3,40	3,40
	- Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,23	65.54 – 67,00	67.35 – 69,00	70 - 71	70 - 71
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
	- Angka Melek Huruf	%	95,76	96,56	98,47	100	100
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
	- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	66,85	68,1	68,8	69	69
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,50	69,58	69,67	69,76	69,76



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	24,36	22,69	21,02	21,02
	- Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	65	67	69	71	71
	- Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
	- Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,20	2,23	2,32	2,45	2,45
	- Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,08	12,12	12,18	12,23	12,23
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Pendidikan Menengah						
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
	- Angka Melek Huruf	%	95,76	96,56	98,47	100	100
2	Urusan Kesehatan						
	- Kasus Kematian Ibu	Kasus	118	0	0	0	0
	- Kasus Kematian Bayi	Kasus	913	0	0	0	0
	- Kasus Kematian Balita	Kasus	1.050	0	0	0	0
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	85	90	100	100	100
	- Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	70	77	80	90	90



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
	- Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	73	83	85	100	100
	- Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	60	77	80	100	100
	- Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	41,7	72,73	85,70	100	100
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	- Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	- Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
	- Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100	100	100	100	100
6	Urusan Sosial						
	- Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%	70	80	90	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
7	Urusan Tenaga Kerja						
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	24,36	22,69	21,02	21,02
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	- Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	10,16	30	30	30	30
	- Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	60	75	80	100	100
	- Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	60	75	80	100	100
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	10	32,2	52,2	72,2	72,2
9	Urusan Pangan						
	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	65	67	69	71	71
10	Urusan Pertanian						
	- Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%					
11	Urusan Lingkungan Hidup						
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,5	67	69	75	75
12	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	- Posyandu Aktif	Unit	5.532	5.792	6.002	6.302	6.652
	- BUMDes Aktif	Unit	302	960	1.140	1.320	1.500
	- Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah	Desa/Kel	4,40	10,52	16,64	22,75	22,75
14	Urusan Perhubungan						
	- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	3,90	9,08	45,60	74,81	74,81
	- Dweling Time Pelabuhan	Hari	5	4	4	3	3
15	Urusan Komunikasi dan Informatika						
	- Skor PeGi Pemeringkatan E-government	Skor	42,23	80 (Menuju Informatif)	85 (Menuju Informatif)	95 (Informatif)	95 (Informatif)
	- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	42,23	80	85	95	95
	- Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Poin	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
16	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
	- Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk	Poin	0,7	1	1,1	1,2	1,3
17	Urusan Penanaman Modal						
	- Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	4,9	5,7	5,9	6,2	6,2



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
	Jumlah medali yang diperoleh dalam - Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	4	9	12	17	17
	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	40	60	70	80	80
19	Urusan Statistik						
	- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
20	Urusan Kebudayaan						
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	11,11	25,9	48,1	100	100,0
21	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan						
	- Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun	%	25,0	50,0	75,0	100,0	100,0
	- Pengelolaan Arsip secara Baku	%	60	100	100	100	100
	Layanan Urusan Pilihan						
22	Urusan Pertanian						
	- Nilai Tukar Petani	Poin	101,31	102	102,4	103	103
23	Urusan Pariwisata						
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.057.384	1.165.378	1.378.453	1.634.144	1.634.144



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
	- Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,71	4	4	4	4
24	Urusan Kehutanan						
	- Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,14	1,22	1,30	1,30
25	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
	- Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85	85
26	Urusan Kelautan dan Perikanan						
	- Nilai Tukar Nelayan	Poin	105	106	106,3	106,8	106,8
27	Urusan Perindustrian dan Perdagangan						
	- Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	55,83	61,29	62,23	63,10	63,10
28	Urusan Transmigrasi						
	- Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	0	70	80	90	100
	Penunjang Urusan						
29	Urusan Perencanaan Pembangunan						
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
	- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	
30	Urusan Keuangan						
	Persentase Penyampaian dan Penetapan - Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100	100	100	100	100
31	Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan						
	- Persentase Keterisian SKP Online	%	50	100	100	100	100
32	Urusan Penelitian dan Pengembangan						
	- Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	0	11.721	12.786	13.852	13.852
	- Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	0	3,391	3,700	4,008	4,008
33	Urusan Pengawasan						
	- Opini Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat						
	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	76,33	100	100	100	100
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Nilai Tukar Petani	Poin	101,31	102	102,4	103	103
2.	Rasio Ketergantungan	%	64,10	63,50	62,79	62,08	61,36
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	55,83	61,29	62,23	63,10	63,10



BAB IX

PENUTUP

Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyesuaian dengan RPJMN 2020 – 2024 dan berbagai kebijakan pusat maupun tertib administrasi, serta akibat penyesuaian Perangkat Daerah dan penyesuaian dengan keadaan Pandemic Covid 19.

Dokumen Perubahan RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah (*top – down*) dan bawah-atas (*bottom – up*).

Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 2021 -2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan sebagai dokumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 3 (tahun) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.



3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan Kota, dunia usaha serta masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
5. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
6. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode Perubahan RPJMD Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD, yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, dan lain- lain.

9.3 PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan program/kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi, namun Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam kemampuan penganggaran seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta (*public-private partnership*) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat



menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nusa Tenggara Timur harus mempertimbangkan kondisi bauran geografi-biologi-ekonomi-politik-sosial- budaya (geobioekopolsosbud) sebagai daerah kepulauan dan daerah perbatasan dengan memanfaatkan semua mitra potensi untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
6. Indikator-indikator kinerja utama pembangunan 2018-2023 merupakan sebuah rancangan masa depan Nusa Tenggara Timur yang harus dicapai bersama dan sebagai tantangan besar bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan masyarakat yang bermartabat.
7. Kunci pembangunan terletak pada inovasi yang berbasis pada iptek dengan langkah-langkah terobosan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan mengutamakan nilai-nilai moralitas, hukum, partisipasi, efektivitas, efisiensi, adil (inklusif), transparan, dan akuntabel.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT



